



Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

NASKAH
**INVENTARISASI
PEMUDA WIRAUSAHA**
PROVINSI JAWA TENGAH
2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan wirausaha muda, khususnya melakukan intervensi terhadap salah satu Domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah dalam aspek Lapangan dan Kesempatan Kerja.

Wirausaha muda memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, strategi pengembangan wirausaha muda membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dokumen ini tidak hanya mengidentifikasi profil wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga menyajikan analisis permasalahan yang dihadapi, seperti akses permodalan, pendampingan pemasaran, serta kendala perizinan dan pendataan. Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya strategi komprehensif yang mencakup pengembangan keterampilan bisnis dasar, literasi digital, dan adaptasi terhadap tren pasar. Penguatan ekosistem wirausaha, seperti akses ke mentor, pelatihan kewirausahaan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, juga menjadi fokus utama dalam upaya pemberdayaan wirausaha muda.

Hasil inventarisasi tahun 2024 menunjukkan distribusi yang beragam di antara kategori wirausaha, dengan 52,88% calon wirausaha, 42,83% wirausaha pemula, dan 4,28% wirausaha mapan. Data ini menjadi landasan penting dalam

merancang program pengembangan, termasuk program inkubasi bisnis, insentif pajak, serta kemudahan akses pembiayaan dan perizinan yang relevan. Selain itu, kami berharap bahwa dokumen ini menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bentuk dokumen kajian untuk mendukung target dan sasaran Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah yang akan datang dimana pengembangan wirausaha menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam aspek pemberdayaan pemuda, peningkatan ekonomi kreatif, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari segi data, analisis, maupun masukan strategis. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang beririsan langsung dengan bidang wirausaha khususnya dalam mendorong kemajuan dan keberlanjutan wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan wirausaha muda dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, November 2024

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah



AGUNG HARIYADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197012021990031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB - 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN.....	3
1.2.1 Maksud.....	3
1.2.2 Tujuan.....	3
1.2.3 Sasaran	3
1.3 RUANG LINGKUP	4
1.4 DASAR HUKUM.....	4
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN.....	5
BAB - 2 KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK.....	7
2.1 KAJIAN TEORI.....	7
2.1.1 Teori Kebijakan dan Pelayanan Publik.....	7
2.1.1.1 Konsep <i>E-Government</i>	17
2.1.2 Wirausaha (Teori dan Perkembangan di Indonesia).....	25
2.1.3 Wirausaha dan Perkembangan Ekonomi Nasional.....	36
2.1.4 Wirausaha Pemuda.....	43
2.1.5 Kebijakan dan Program Wirausaha Pemuda di Daerah.....	49
2.1.6 Strategi Pengembangan Wirausaha dan Wirausaha Pemuda	55
2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	60
2.2.1 Aspek Geografi dan Demografi Provinsi Jawa Tengah.....	60

2.2.2	Kondisi Perekonomian, Sosial, dan Budaya Provinsi Jawa Tengah	68
2.2.3	Infrastruktur dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah	73
2.2.4	Potensi Pariwisata dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	75
2.2.5	Kondisi Pemuda di Provinsi Jawa Tengah	77
BAB - 3	METODOLOGI.....	86
3.1	METODOLOGI.....	86
3.2	JENIS DAN SUMBER DATA.....	87
3.3	SKEMA RANCANGAN KAJIAN.....	88
BAB - 4	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	90
4.1	ANALISIS REGULASI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA PROVINSI JAWA TENGAH.....	90
4.2	ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF WIRAUSAHA MUDA DI SELURUH WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.....	98
4.2.1	Berdasarkan Fase Wirausaha.....	99
4.2.2	Berdasarkan Tematik.....	114
4.3	ANALISIS WIRAUSAHA MUDA BERDASARKAN FASE PER KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.....	135
4.3.1	Kabupaten Banjarnegara	136
4.3.2	Kabupaten Banyumas	137
4.3.3	Kabupaten Batang.....	138
4.3.4	Kabupaten Blora	139
4.3.5	Kabupaten Boyolali.....	140
4.3.6	Kabupaten Brebes	141
4.3.7	Kabupaten Cilacap	143
4.3.8	Kabupaten Demak.....	144
4.3.9	Kabupaten Grobogan	145
4.3.10	Kabupaten Jepara.....	146
4.3.11	Kabupaten Karanganyar.....	147
4.3.12	Kabupaten Kebumen.....	148
4.3.13	Kabupaten Kendal	149

4.3.14	Kabupaten Klaten	150
4.3.15	Kabupaten Kudus	152
4.3.16	Kabupaten Magelang.....	153
4.3.17	Kabupaten Pati	154
4.3.18	Kabupaten Pekalongan	155
4.3.19	Kabupaten Pemalang.....	156
4.3.20	Kabupaten Purbalingga.....	157
4.3.21	Kabupaten Purworejo	158
4.3.22	Kabupaten Rembang	160
4.3.23	Kabupaten Semarang.....	161
4.3.24	Kabupaten Sragen.....	162
4.3.25	Kabupaten Sukoharjo.....	163
4.3.26	Kabupaten Tegal.....	164
4.3.27	Kabupaten Temanggung.....	165
4.3.28	Kabupaten Wonogiri	166
4.3.29	Kabupaten Wonosobo.....	168
4.3.30	Kota Magelang	168
4.3.31	Kota Pekalongan.....	169
4.3.32	Kota Salatiga	170
4.3.33	Kota Semarang	171
4.3.34	Kota Surakarta	172
4.3.35	Kota Tegal	173
4.4	ANALISIS WIRUSAHA TEMATIK BERDASARKAN TEMATIK PER KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.....	174
4.4.1	Kabupaten Banjarnegara	175
4.4.2	Kabupaten Banyumas	176
4.4.3	Kabupaten Batang.....	177
4.4.4	Kabupaten Blora	178
4.4.5	Kabupaten Boyolali.....	179

4.4.6	Kabupaten Brebes	181
4.4.7	Kabupaten Cilacap	182
4.4.8	Kabupaten Demak.....	183
4.4.9	Kabupaten Grobogan	184
4.4.10	Kabupaten Jepara.....	185
4.4.11	Kabupaten Karanganyar.....	186
4.4.12	Kabupaten Kebumen.....	187
4.4.13	Kabupaten Kendal	189
4.4.14	Kabupaten Klaten	190
4.4.15	Kabupaten Kudus	191
4.4.16	Kabupaten Magelang.....	192
4.4.17	Kabupaten Pati	194
4.4.18	Kabupaten Pekalongan	195
4.4.19	Kabupaten Pemasang	196
4.4.20	Kabupaten Purbalingga.....	197
4.4.21	Kabupaten Purworejo	198
4.4.22	Kabupaten Rembang	200
4.4.23	Kabupaten Semarang.....	201
4.4.24	Kabupaten Sragen.....	202
4.4.25	Kabupaten Sukoharjo.....	203
4.4.26	Kabupaten Tegal.....	204
4.4.27	Kabupaten Temanggung.....	205
4.4.28	Kabupaten Wonogiri	206
4.4.29	Kabupaten Wonosobo.....	207
4.4.30	Kota Magelang	208
4.4.31	Kota Pekalongan.....	209
4.4.32	Kota Salatiga	210
4.4.33	Kota Semarang	211
4.4.34	Kota Surakarta	212

4.4.35	Kota Tegal	213
4.5	STRATEGI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA MUDA PROVINSI JAWA TENGAH.....	215
BAB - 5	PENUTUP	238
5.1	KESIMPULAN	238
5.2	REKOMENDASI	239
DAFTAR PUSTAKA.....		241

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi Pengembangan Wirausaha Pemuda di Provinsi Jawa Tengah	59
Tabel 2.2 Luas Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah	62
Tabel 2.3 Penduduk di Provinsi Jawa Tengah.....	66
Tabel 2.4 Tabel Jumlah Wisatawan 2021-2023 di Jawa Tengah	77
Tabel 2.5 Jumlah Pemuda Provinsi Jawa Tengah	78
Tabel 2.6 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2022	80
Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Tipe Daerah, 2020-2022.....	82
Tabel 2.8 Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2022	82
Tabel 4.1 Regulasi yang Berkaitan dengan Kewirausahaan Pemuda.....	91
Tabel 4.2 Fase Wirausaha Kab. Banjarnegara	136
Tabel 4.3 Fase Wirausaha Kab. Banyumas	137
Tabel 4.4 Fase Wirausaha Kab. Batang.....	138
Tabel 4.5 Fase Wirausaha Kab. Blora	139
Tabel 4.6 Fase Wirausaha Kab. Boyolali.....	140
Tabel 4.7 Fase Wirausaha Kab. Brebes	142
Tabel 4.8 Fase Wirausaha Kab. Cilacap	143
Tabel 4.9 Fase Wirausaha Kab. Demak.....	144
Tabel 4.10 Fase Wirausaha Kab. Grobogan.....	145
Tabel 4.11 Fase Wirausaha Kab. Jepara	146
Tabel 4.12 Fase Wirausaha Kab. Karanganyar	147

Tabel 4.13 Fase Wirausaha Kab. Kebumen	148
Tabel 4.14 Fase Wirausaha Kab. Kendal	150
Tabel 4.15 Fase Wirausaha Kab. Klaten.....	151
Tabel 4.16 Fase Wirausaha Kab. Kudus.....	152
Tabel 4.17 Fase Wirausaha Kab. Magelang	153
Tabel 4.18 Fase Wirausaha Kab. Pati.....	154
Tabel 4.19 Fase Wirausaha Kab. Pekalongan.....	155
Tabel 4.20 Fase Wirausaha Kab. Pemalang	156
Tabel 4.21 Fase Wirausaha Kab. Purbalingga	157
Tabel 4.22 Fase Wirausaha Kab. Purworejo.....	159
Tabel 4.23 Fase Wirausaha Kab. Rembang.....	160
Tabel 4.24 Fase Wirausaha Kab. Semarang.....	161
Tabel 4.25 Fase Wirausaha Kab. Sragen	162
Tabel 4.26 Fase Wirausaha Kab. Sukoharjo.....	163
Tabel 4.27 Fase Wirausaha Kab. Tegal	164
Tabel 4.28 Fase Wirausaha Kab. Temanggung	166
Tabel 4.29 Fase Wirausaha Kab. Wonogiri.....	167
Tabel 4.30 Fase Wirausaha Kab. Wonogiri.....	168
Tabel 4.31 Fase Wirausaha Kota Magelang	168
Tabel 4.32 Fase Wirausaha Kota Pekalongan	169
Tabel 4.33 Fase Wirausaha Kota Salatiga.....	170
Tabel 4.34 Fase Wirausaha Kota Semarang	171
Tabel 4.35 Fase Wirausaha Kota Surakarta.....	173
Tabel 4.36 Fase Wirausaha Kota Tegal.....	174
Tabel 4.37 Wirausaha Tematik Kabupaten Banjarnegara.....	175
Tabel 4.38 Wirausaha Tematik Kabupaten Banyumas.....	176
Tabel 4.39 Wirausaha Tematik Kabupaten Batang	177
Tabel 4.40 Wirausaha Tematik Kabupaten Blora.....	178
Tabel 4.41 Wirausaha Tematik Kabupaten Boyolali	180

Tabel 4.42 Wirausaha Tematik Kabupaten Brebes	181
Tabel 4.43 Wirausaha Tematik Kabupaten Cilacap.....	182
Tabel 4.44 Wirausaha Tematik Kabupaten Demak.....	183
Tabel 4.45 Wirausaha Tematik Kabupaten Grobogan.....	184
Tabel 4.46 Wirausaha Tematik Kabupaten Jepara	186
Tabel 4.47 Wirausaha Tematik Kabupaten Karanganyar	187
Tabel 4.48 Wirausaha Tematik Kabupaten Kebumen	188
Tabel 4.49 Wirausaha Tematik Kabupaten Kendal	189
Tabel 4.50 Wirausaha Tematik Kabupaten Klaten	190
Tabel 4.51 Wirausaha Tematik Kabupaten Kudus.....	191
Tabel 4.52 Wirausaha Tematik Kabupaten Magelang	192
Tabel 4.53 Wirausaha Tematik Kabupaten Pati.....	194
Tabel 4.54 Wirausaha Tematik Kabupaten Pekalongan.....	195
Tabel 4.55 Wirausaha Tematik Kabupaten Pemalang	196
Tabel 4.56 Wirausaha Tematik Kabupaten Purbalingga	197
Tabel 4.57 Wirausaha Tematik Kabupaten Purworejo.....	199
Tabel 4.58 Wirausaha Tematik Kabupaten Rembang.....	200
Tabel 4.59 Wirausaha Tematik Kabupaten Semarang.....	201
Tabel 4.60 Wirausaha Tematik Kabupaten Sragen	202
Tabel 4.61 Wirausaha Tematik Kabupaten Sukoharjo	203
Tabel 4.62 Wirausaha Tematik Kabupaten Tegal	204
Tabel 4.63 Wirausaha Tematik Kabupaten Temanggung	205
Tabel 4.64 Wirausaha Tematik Kabupaten Wonogiri	206
Tabel 4.65 Wirausaha Tematik Kota Magelang	208
Tabel 4.66 Wirausaha Tematik Kota Pekalongan	209
Tabel 4.67 Wirausaha Tematik Kota Salatiga.....	210
Tabel 4.68 Wirausaha Tematik Kota Semarang	211
Tabel 4.69 Wirausaha Tematik Kota Surakarta.....	212
Tabel 4.70 Wirausaha Tematik Kota Tegal.....	213

Tabel 4.71 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah.....	216
Tabel 4.72 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara.....	218
Tabel 4.73 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas	219
Tabel 4.74 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Batang	219
Tabel 4.75 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Blora	220
Tabel 4.76 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Boyolali	220
Tabel 4.77 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Brebes	221
Tabel 4.78 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Cilacap	221
Tabel 4.79 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Demak	222
Tabel 4.80 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Grobogan	222
Tabel 4.81 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Jepara	223
Tabel 4.82 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Karanganyar.....	223
Tabel 4.83 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Kebumen	224
Tabel 4.84 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Kendal	224
Tabel 4.85 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten	225

Tabel 4.86 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Kudus	226
Tabel 4.87 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Magelang	226
Tabel 4.88 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Pati..	227
Tabel 4.89 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Pekalongan.....	227
Tabel 4.90 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang	228
Tabel 4.91 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Purworejo	228
Tabel 4.92 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Rembang	229
Tabel 4.93 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Purbalingga.....	229
Tabel 4.94 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Semarang	230
Tabel 4.95 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Sragen	230
Tabel 4.96 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Sukoharjo	231
Tabel 4.97 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Tegal	231
Tabel 4.98 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung	232
Tabel 4.99 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Wonogiri	232
Tabel 4.100 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Wonosobo.....	233

Tabel 4.101 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Magelang.....	233
Tabel 4.102 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Pekalongan.....	234
Tabel 4.103 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Salatiga	234
Tabel 4.104 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Semarang.....	235
Tabel 4.105 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta.....	236
Tabel 4.106 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Tegal	236

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	61
Gambar 2.2 Persentase Luas Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	63
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional	69
Gambar 2.4 Presentase Pemuda Jawa Tengah.....	81
Gambar 3.1 Skema Rancangan Naskah Akademik Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah	89
Gambar 4.1 Usia Responden Calon Wirausaha Provinsi Jawa Tengah.....	100
Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan Calon Wirausaha Provinsi Jawa Tengah.....	100
Gambar 4.3 Jenis Usaha Calon Wirausaha Provinsi Jawa Tengah.....	101
Gambar 4.4 Usia Responden Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah	102
Gambar 4.5 Tingkat Pendidikan Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah	103
Gambar 4.6 Jenis Usaha Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah	103
Gambar 4.7 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah.....	104
Gambar 4.8 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah	105
Gambar 4.9 Omset per Tahun Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah.....	105
Gambar 4.10 Jumlah Karyawan Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah.....	106
Gambar 4.11 Sumber Modal Usaha Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah .	107
Gambar 4.12 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah	107
Gambar 4.13 Usia Responden Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah.....	108
Gambar 4.14 Tingkat Pendidikan Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah.....	109
Gambar 4.15 Jenis Usaha Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah.....	110
Gambar 4.16 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah.....	110

Gambar 4.17 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah...	111
Gambar 4.18 Omset per Tahun Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah	112
Gambar 4.19 Jumlah Karyawan Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah	112
Gambar 4.20 Sumber Modal Usaha Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah..	113
Gambar 4.21 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah	113
Gambar 4.22 Usia Responden Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah	115
Gambar 4.23 Tingkat Pendidikan Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah	115
Gambar 4.24 Jenis Usaha Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah	116
Gambar 4.25 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah	117
Gambar 4.26 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah	117
Gambar 4.27 Omset per Tahun Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	118
Gambar 4.28 Jumlah Karyawan Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	119
Gambar 4.29 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah	119
Gambar 4.30 Usia Responden Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah	120
Gambar 4.31 Tingkat Pendidikan Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah.	121
Gambar 4.32 Jenis Usaha Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah	121
Gambar 4.33 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah.	122
Gambar 4.34 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah	123
Gambar 4.35 Omset per Tahun Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah	123
Gambar 4.36 Jumlah Karyawan Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah.....	124
Gambar 4.37 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah	125
Gambar 4.38 Usia Responden Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah....	125
Gambar 4.39 Tingkat Pendidikan Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah	126
Gambar 4.40 Jenis Usaha Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah	127

Gambar 4.41 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah	127
Gambar 4.42 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah	128
Gambar 4.43 Omset per Tahun Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah .	128
Gambar 4.44 Jumlah Karyawan Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah .	129
Gambar 4.45 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah	129
Gambar 4.46 Usia Responden Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah	130
Gambar 4.47 Tingkat Pendidikan Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah	131
Gambar 4.48 Jenis Usaha Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah	131
Gambar 4.49 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah	132
Gambar 4.50 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah	133
Gambar 4.51 Omset Per Tahun Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah	133
Gambar 4.52 Jumlah Karyawan Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah	134
Gambar 4.53 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah .	135
Gambar 4.54 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Banjarnegara	136
Gambar 4.55 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Banyumas	138
Gambar 4.56 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Batang	139
Gambar 4.57 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Blora	140
Gambar 4.58 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Boyolali	141
Gambar 4.59 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Brebes	142
Gambar 4.60 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Cilacap	143
Gambar 4.61 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Demak	145
Gambar 4.62 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Grobogan	146
Gambar 4.63 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Jepara	147
Gambar 4.64 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Karanganyar	148
Gambar 4.65 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Kebumen	149
Gambar 4.66 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Kendal	150

Gambar 4.67 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Klaten	151
Gambar 4.68 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Kudus	152
Gambar 4.69 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Magelang.....	154
Gambar 4.70 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Pati	155
Gambar 4.71 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Pekalongan	156
Gambar 4.72 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Pemalang	157
Gambar 4.73 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Purbalingga.....	158
Gambar 4.74 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Purworejo	159
Gambar 4.75 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Rembang.....	160
Gambar 4.76 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Semarang.....	162
Gambar 4.77 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Sragen.....	163
Gambar 4.78 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Sukoharjo.....	164
Gambar 4.79 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Tegal	165
Gambar 4.80 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Temanggung	166
Gambar 4.81 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Wonogiri	167
Gambar 4.82 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Magelang	169
Gambar 4.83 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Pekalongan.....	170
Gambar 4.84 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Salatiga	171
Gambar 4.85 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Semarang	172
Gambar 4.86 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Surakarta	173
Gambar 4.87 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Tegal	174
Gambar 4.88 Jenis Tematik Teknologi Kabupaten Banjarnegara	176
Gambar 4.89 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Banyumas	177
Gambar 4.90 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Batang.....	178
Gambar 4.91 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Blora	179
Gambar 4.92 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Boyolali.....	180
Gambar 4.93 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Brebes	182
Gambar 4.94 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Cilacap	183
Gambar 4.95 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Demak.....	184

Gambar 4.96 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Grobogan	185
Gambar 4.97 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Jepara.....	186
Gambar 4.98 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Karanganyar.....	187
Gambar 4.99 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Kebumen	188
Gambar 4.100 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Kendal.....	190
Gambar 4.101 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Klaten.....	191
Gambar 4.102 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Kudus.....	192
Gambar 4.103 Jenis Usaha Wirausaha Tematik KabupatenMagelang	193
Gambar 4.104 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Pati.....	195
Gambar 4.105 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Pekalongan	196
Gambar 4.106 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Pemalang.....	197
Gambar 4.107 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Purbalingga	198
Gambar 4.108 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Purworejo	199
Gambar 4.109 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Rembang	200
Gambar 4.110 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Semarang	202
Gambar 4.111 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Sragen	203
Gambar 4.112 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Sukoharjo	204
Gambar 4.113 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Tegal	205
Gambar 4.114 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Temanggung.....	206
Gambar 4.115 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Wonogiri.....	207
Gambar 4.116 Jenis Usaha Tematik Kota Magelang.....	208
Gambar 4.117 Jenis Usaha Tematik Kota Pekalongan	210
Gambar 4.118 Jenis Usaha Tematik Kota Salatiga	211
Gambar 4.119 Jenis Usaha Tematik Kota Semarang.....	212
Gambar 4.120 Jenis Usaha Tematik Kota Surakarta.....	213
Gambar 4.121 Jenis Usaha Tematik Kota Tegal	214

BAB - 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Wirausaha muda merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian modern, terutama di negara berkembang. Mereka dikenal karena inovasi dan dinamisme yang mereka bawa ke dalam dunia bisnis. Analisis mengenai wirausaha muda melibatkan pemahaman tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang mereka hadapi. Faktor-faktor seperti akses ke modal, tingkat pendidikan, dukungan pemerintah, dan jaringan bisnis sangat berpengaruh. Selain itu, karakteristik pribadi seperti kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko juga memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan wirausaha muda.

Menyusun strategi bagi wirausaha muda memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Strategi ini harus mencakup pengembangan keterampilan bisnis dasar, pemahaman pasar, dan manajemen keuangan. Pendidikan kewirausahaan yang komprehensif perlu disediakan, baik melalui institusi formal maupun pelatihan informal. Selain itu, penting untuk membangun ekosistem yang mendukung, termasuk akses ke mentor, komunitas bisnis, dan platform jaringan. Strategi juga harus mempertimbangkan penggunaan teknologi digital untuk memperluas pasar dan efisiensi operasional. Dengan strategi yang tepat, wirausaha muda dapat lebih siap menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang pasar.

Berdasarkan analisis dan strategi yang telah disusun, penyusunan rekomendasi bertujuan untuk memberikan panduan praktis yang dapat

diimplementasikan oleh wirausaha muda. Rekomendasi ini dapat mencakup pengembangan program inkubasi bisnis yang menyediakan bimbingan intensif, akses ke pembiayaan awal, dan dukungan infrastruktur. Selain itu, kebijakan pemerintah yang proaktif, seperti insentif pajak untuk startup dan kemudahan perizinan, sangat diperlukan. Wirausaha muda juga disarankan untuk aktif membangun jaringan dengan sesama pengusaha dan mencari peluang kolaborasi. Peningkatan literasi digital dan kemampuan adaptasi terhadap tren pasar juga menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Inventarisasi wirausaha muda yang telah dilakukan terhadap data wirausaha muda di lingkup daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, menunjukkan bahwa hasil inventarisasi responden wirausaha muda yang ada di Provinsi Jawa Tengah didapatkan bahwa jumlah calon wirausaha adalah sebesar 52,88%, wirausaha pemula adalah 42,83%, dan wirausaha mapan sebesar 4,28%. Berdasarkan responden yang diterima dengan tema sosial sebanyak 2,10%, teknologi sebesar 91,08%, perempuan sebanyak 45,10%, dan wirausaha muda desa sebesar 11,54%. Berdasarkan analisis mengenai permasalahan yang dihadapi wirausaha muda, maka didapatkan 3 (tiga) permasalahan utama wirausaha muda, yaitu akses permodalan, pendampingan dan pendampingan mengenai cara pemasaran, dan sulitnya perizinan dan pendataan.

Oleh karena itu, dalam menindaklanjuti upaya untuk dapat menangani permasalahan wirausaha muda tersebut maka disusunlah Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah. Pentingnya menyusun Naskah pemuda wirausaha sebagai sebuah Policy Paper bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif dan sebagai landasan dalam memetakan permasalahan, potensi dan isu strategis kewirausahaan Provinsi Jawa Tengah serta mengukur dampak dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan. Dengan inventarisasi data wirausaha yang akurat dan terkini maka kita dapat mengevaluasi keberhasilan program-

program yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan dengan menganalisis secara mendalam permasalahan yang ada, melakukan penyusunan strategi program/kebijakan, dan menentukan rekomendasi terkait isu/permasalahan mengenai wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan pekerjaan ini adalah tersusunnya Dokumen Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah dengan terstruktur dan tersistematis.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah melakukan analisis terkait permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha muda, melakukan penyusunan strategi bagi wirausaha muda, dan merumuskan penyusunan rekomendasi peningkatan kompetensi bagi wirausaha muda di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dalam kegiatan penyusunan Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk memperoleh gambaran Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah dengan analisis komprehensif sesuai metodologi, antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi instrument Regulasi berkaitan dengan kewirausahaan pemuda.
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif wirausaha muda berdasarkan tematik, yaitu wirausaha sosial, wirausaha teknologi, wirausaha perempuan, dan wirausaha desa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Analisis kualitatif dan kuantitatif wirausaha muda berdasarkan fase wirausaha, yaitu calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan di setiap kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Analisis kondisi wirausaha muda di seluruh kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Menyusun strategi dan rekomendasi terhadap wirausaha muda yang akan dikembangkan (staging, task, and milestone) dan tertuang dalam **Policy Paper: Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah**.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dan substansi dari pekerjaan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyusun strategi dan rekomendasi yang implementatif untuk peningkatan kompetensi dan skala usaha bagi wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah ini adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 0945 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan yang berkaitan dengan judul kajian, dasar hukum, dan sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi dalam penelitian ini.

BAB 2 : KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK

Pada bab ini menjelaskan mengenai Konsep dan teori, serta gambaran umum daerah dan objek penelitian yang dikaji dan sekaligus menjadi salah satu dasar dan sumber rujukan (referensi) penyusunan kajian.

BAB 3 : METODOLOGI

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, pendekatan terkait kajian atau pelaksanaan pekerjaan. Kemudian jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB 4 : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian dari hasil-hasil yang telah didapatkan dalam penelitian. Uraian yang akan dipaparkan oleh peneliti yaitu mengenai data yang telah dikumpulkan beserta dengan analisis dan pembahasannya.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti kepada pihak terkait sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dibahas. Mengenai saran yang diberikan oleh peneliti tujuan adalah untuk menjadi sumbangan pemikiran terkait permasalahan yang diteliti.

BAB - 2

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Teori Kebijakan dan Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Teori kebijakan publik adalah kajian yang membahas proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik sering dipandang sebagai respons pemerintah terhadap masalah atau kebutuhan publik yang mendesak, di mana teori ini mencakup berbagai pendekatan seperti rasionalisme, incrementalism, dan teori sistem. Rasionalisme

menganggap bahwa kebijakan yang baik dihasilkan melalui analisis rasional yang sistematis, sedangkan incrementalism menekankan bahwa kebijakan sering berkembang secara bertahap melalui langkah-langkah kecil daripada melalui perubahan besar. Dalam konteks teori sistem, kebijakan dipandang sebagai bagian dari interaksi berbagai aktor dan faktor dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi (Osborne, 2020).

Pelayanan publik, sebagai implementasi dari kebijakan publik, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan. Teori pelayanan publik berfokus pada bagaimana pemerintah menyediakan layanan yang efisien, transparan, dan adil untuk masyarakat. Pelayanan publik seharusnya bersifat lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelanggan, berlawanan dengan model birokrasi tradisional yang cenderung lamban dan kaku (Virtanen & Jalonen, 2024). Dalam konteks ini, New Public Management (NPM) muncul sebagai pendekatan baru yang menekankan pentingnya efisiensi manajemen sektor publik dengan mengadopsi praktik-praktik sektor swasta seperti manajemen berbasis hasil, desentralisasi, dan orientasi pasar.

Lebih jauh lagi, kebijakan publik juga terkait dengan keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat sipil, dan sektor swasta. Teori jaringan kebijakan (policy network) menggambarkan bagaimana proses kebijakan dihasilkan melalui kolaborasi dan negosiasi di antara berbagai kelompok kepentingan, baik itu pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun aktor bisnis (Wang et al., 2020). Di era demokrasi modern, partisipasi publik dalam proses kebijakan menjadi sangat penting, sehingga teori kebijakan berupaya memahami bagaimana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan hasil pelayanan publik. Keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sejauh

mana pemerintah mampu melibatkan berbagai aktor dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan tersebut.

Akhirnya, evaluasi kebijakan dan pelayanan publik menjadi komponen penting dalam teori kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah kebijakan dan layanan publik telah mencapai tujuan yang diinginkan serta apakah pelaksanaannya sudah efektif. Dalam evaluasi ini, indikator seperti output, outcome, dan impact menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu, evaluasi kebijakan juga menjadi dasar dalam melakukan reformasi kebijakan, sehingga pemerintah dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan memastikan keberlanjutan program-program publik di masa depan (Osborne et al., 2013). Proses ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kebijakan publik sebagai arah tindakan dirinci menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Tuntutan-tuntutan Kebijakan (*Policy Demands*). Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.
2. Keputusan-keputusan kebijakan (*Policy Decisions*). Keputusan kebijakan didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau

pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*Policy Statements*). Pernyataan-pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
4. Hasil-hasil kebijakan (*Policy Outputs*). Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada "manifestasi nyata" dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
5. Dampak-dampak kebijakan (*Policy Outcomes*). Dampak-dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan

kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/KEP/M. PAN/ 7/ 2003 antara lain adalah:

1. **Kesederhanaan.** Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. **Kejelasan.** Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. **Kepastian waktu.** Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. **Akurasi.** Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. **Keamanan.** Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. **Tanggung jawab.** Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. **Kelengkapan sarana dan prasarana.** Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. **Kemudahan akses.** Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. **Kedisiplinan.** kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. **Kenyamanan.** Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum (Jones, 2021).

Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, sebagai konsumen mereka (Shiyovych, 2023). Salah satu yang dianggap sebagai biang keladinya adalah bentuk orang birokrasi, sehingga birokrasi “Merupakan tipe dari orang yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.”

Konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi birokrasi mempunyai keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena mempunyai pembagian kerja dan struktur jabatan yang jelas sehingga komponen birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur dalam mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami

penyimpangan dalam mencapai tujuan orang. Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan bersifat resmi dan berjenjang berdasarkan struktur orang yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku pada orang tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan (Osborne, 2010). Untuk menciptakan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas, maka Menteri Pendayagunaan Negara menerbitkan keputusan No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 mengenai pola penyelenggaraan pelayanan publik, yang antara lain:

1. Fungsional. Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Terpusat. Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
3. Terpadu
 - a. Terpadu Satu Atap. Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di satu atapkan.
 - b. Terpadu Satu pintu. Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

- c. Gugus Tugas. Petugas pelayanan secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni yang terdiri dari 12 asas:

1. Asas kepentingan umum
2. Asas kepastian hukum
3. Asas kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Asas keprofesionalan
6. Asas partisipasif
7. Asas persamaan perlakuan/tindak diskriminatif
8. Asas keterbukaan
9. Asas akuntabilitas
10. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
11. Asas ketepatan waktu
12. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 25 tahun 2009. Adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian

5. Biaya/ tarif
6. Produk pelayanan
7. Sarana, prasarana atau fasilitas
8. Kompetensi pelaksanaan
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana

Pelayan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan terdapat faktor penting, dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang baik. H.A.S Moenir (2002:88) berpendapat ada enam faktor pendukung pelayanan, antara lain:

1. **Faktor kesadaran.** Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa.
2. **Faktor aturan.** Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung ataupun tidak langsung akan sangat berpengaruh.

3. **Faktor organisasi.** Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja.
4. **Faktor pendapatan.** Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
5. **Faktor kemampuan.** Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.
6. **Faktor sarana pelayanan.** Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

Dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten
4. Menyediakan sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Teori kebijakan dan pelayanan publik sangat penting dalam memahami kompleksitas administrasi publik. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan dan

penyediaan pelayanan, menyoroti peran stakeholder, institusi, dan masyarakat. Teori ini juga memberikan informasi bagi pengambil keputusan kebijakan, memastikan bahwa keputusan kebijakan didasarkan pada bukti dan efektif dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat.

2.1.1. Konsep *E-Government*

E-Government, atau dalam Bahasa Indonesia disebut juga Pemerintahan Elektronik, merujuk pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kegiatan organisasi sektor publik. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan pemerintah, pertukaran informasi, dan transaksi komunikasi. Tujuan utama *E-Government* adalah untuk menyediakan akses yang mudah bagi warga negara, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap informasi dan layanan pemerintah melalui berbagai saluran elektronik, seperti internet, perangkat seluler, dan platform digital lainnya (Malodia et al., 2021).

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Yildiz, 2007). Atau E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis (Vrabie, 2023).

Fitur Utama *E-Government* yaitu:

1. Penggunaan TIK untuk menyediakan layanan dan informasi pemerintah kepada warga negara dan bisnis.
2. Pembuatan portal dan platform *online* untuk mengakses layanan dan informasi pemerintah.
3. Penggunaan tanda tangan digital dan bentuk *otentikasi* elektronik lainnya untuk mengamankan transaksi *online*.
4. Penerapan sistem pembayaran elektronik untuk layanan dan biaya pemerintah.
5. Penggunaan analitik data dan alat digital lainnya untuk meningkatkan pengambilan keputusan pemerintah dan pengembangan kebijakan.

Jenis-jenis E-Government.

1. *Government-to-Citizen* (G2C): Menyediakan layanan dan informasi pemerintah langsung kepada warga negara melalui saluran elektronik. Contoh: Pengurusan KTP online, pembayaran pajak online. Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.
2. *Government-to-Business* (G2B): Menyediakan layanan dan informasi pemerintah kepada bisnis melalui saluran elektronik. Contoh: Perizinan usaha online, pengadaan barang/jasa secara elektronik. Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah

untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem *e-procurement*. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

3. *Government-to-Government* (G2G): Pertukaran informasi dan layanan antar instansi pemerintah melalui saluran elektronik. Contoh: Sistem informasi data kependudukan, sistem pengelolaan keuangan daerah. Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh : Konsultasi secara online, *blogging* untuk kalangan *legislative*, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.
4. *Government-to-Employee* (G2E): Menyediakan layanan dan informasi pemerintah kepada pegawai pemerintah melalui saluran elektronik. Contoh: Sistem absensi online, sistem penggajian elektronik.

Electronic Government atau e- government atau e-govt merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat - "The employment of the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to the citizens". Penerapan e-government (atau dalam bahasa Indonesia disebut pemerintahan elektronik) yang kemudian dikenal dengan sebutan digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government terbukti mempermudah terjadinya interaksi

timbang balik secara digital tentunya antara pemerintah dengan masyarakat (Grigalashvili, 2022).

Singkatnya, e-govt memberikan peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pihak swasta melalui peningkatan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun manfaat lain apabila e-govt dikelola dengan baik, akan mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog, berpartisipasi, dan termotivasi sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Karakter masyarakat yang sebelumnya bersikap pasif hanya sebagai penerima informasi (Lavitskaya, 2021), mampu berubah menjadi pihak yang aktif dalam memberi sekaligus menerima informasi (Lavitskaya, 2021).

Terjadinya model penyampaian informasi dua arah yang semakin mudah tidak hanya antara pemerintah dan masyarakat (*Government-to-Citizen/G2C*); tapi juga antara pemerintah dan pihak swasta (*Government-to-Business/G2B*) atau pemerintah dan pemerintah (*Government-to-Government/G2G*). Hal ini merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi, yang tentunya akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. Tentunya manfaat yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Adapun tujuan dari dibangunnya *E-Government* itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Secara umum, penerapan e-Government di berbagai negara yang dikaji mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses

interaksi masyarakat; Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi public; Meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat; Mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan (Yildiz, 2007).

Beberapa manfaat dari *E-Government*, diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah.
2. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.
3. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh.
4. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
5. Adanya *E-Government* diharapkan pelaksanaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
6. Membuat mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas dan memperbaiki tanggapan/ tanggung jawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya.
7. Selanjutnya akan memberikan *value*, seperti : penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan pelayanan, memungkinkan semua warga negara memperoleh informasi dan

pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrasi sistem pemerintahan dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat.

8. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat , memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan , mereduksi biaya transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.
9. Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya akses informasi, pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah dapat berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif serta memungkinkan meningkatkan pendapatan dari pajak.

Tahapan perkembangan implementasi E-Government di Indonesia dibagi menjadi empat:

1. *Web Presence*, yaitu memunculkan *website* daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam *website* pemerintah.
2. *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas *download* dan komunikasi *E-mail* dalam *website* pemerintah.
3. *Transaction*, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. *Transformation*, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Tahap Inisiatif *E-Government Washtenaw County Washtenaw County* membagi berbagai inisiatif e-Government yang ada menjadi tiga tahapan

besar, yaitu: *e-Information*, *e-Commerce* dan *e-Democracy*. Tiga jenis klasifikasi inisiatif ini merupakan tiga fase besar pengembangan *e-Government*.

1. ***e-Information***. Konsep *e-Information* terkait dengan obyektif bagaimana agar seluruh stakeholder pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dapat di satu sisi menyediakan dan di sisi lain mengakses informasi secara cepat dan tepat melalui berbagai kanal akses. Kanal akses tersebut dapat merupakan saluran komunikasi tradisional seperti kantor-kantor, telepon, fax, dan lain sebagainya maupun melalui media teknologi informasi seperti internet, call center, web-TV, PDA (Personal Digital Assistant), dan lain-lain. Program pembangunan aplikasi *e-government* dalam tahapan ini biasanya dimulai dengan membangun website yang berisi informasi mengenai berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang seyogyanya merupakan tugas pemerintah untuk menyediakannya. Dengan adanya *website* ini diharapkan masyarakat dapat secara mandiri mencari data dan informasi yang dibutuhkannya, sekaligus memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif antara mereka dengan pihak pemerintah yang membangun *website* tersebut. Pada aplikasi yang lebih kompleks, biasanya *website* tersebut telah menjadi sebuah portal pengetahuan (*knowledge portal*) yang di dalamnya tidak sekedar berisi data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, namun lebih jauh lagi berisi berbagai pengetahuan penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
2. ***e-Commerce***. Pada tahap *e-Commerce*, konsep pelayanan yang ada tidak hanya berhenti pada pertukaran informasi antara

masyarakat dan pemerintahnya, tetapi lebih jauh sudah melibatkan sejumlah proses transaksi pertukaran barang dan/atau jasa. Masyarakat yang selama ini perlu mendatangi kantor-kantor pemerintahan secara fisik untuk berbagai proses perijinan dan berbagai pembayaran, seperti membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Penyetoran Pajak Bumi Bangunan, dan lain-lain saat ini tidak perlu berpergian lagi karena semua hal tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan media internet.

3. ***e-Democracy***. Pada tahap *e-Democracy*, terjadi suatu lingkungan yang kondusif bagi pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan konstituennya untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkooperasi melalui sejumlah proses interaksi melalui media internet. Dalam kaitan ini, masyarakat dapat menyampaikan penilaian dan pandangannya terhadap kinerja pemerintah dan menyampaikan pendapatnya secara bebas kepada para wakil rakyat secara online dengan menggunakan fasilitas semacam *e-mail*, *mailing list*, *discussion/forum*, *chatting*, dan *polling*. Arah perkembangan akhirnya adalah bagaimana membangun sistem pemilihan umum yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya komunikasi politik yang intensif dan terbuka ini, maka diharapkan akan dapat membantu mempromosikan proses demokrasi di negara yang bersangkutan. Ketiga fase ini perlu dijalankan prosesnya satu per satu secara sekuensial karena memang satu fase merupakan landasan bagi pengembangan fase berikutnya. Fase terberat tentu saja adalah fase ketiga, di mana dibutuhkan tidak hanya infrastruktur teknologi informasi yang kuat, tetapi juga dibutuhkan perubahan kultur yang besar di masyarakat.

2.1.2 Wirausaha (Teori dan Perkembangan di Indonesia)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti, wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat (Farida et al., 2022). Namun teori mengenai kewirausahaan sendiri banyak berkembang, dan memiliki arti masing-masing menurut para ahli.

Kata "entrepreneur" (entrepreneurship diterjemahkan menjadi kewirausahaan dalam tulisan ini, sedangkan entrepreneur diterjemahkan menjadi wirausahawan) berasal dari kata bahasa Perancis "entreprendre" yang berarti "melakukan" atau "melaksanakan". Wirausahawan adalah seseorang yang mengorganisasikan, mengelola, dan menanggung risiko sebuah usaha. Perkembangan kegiatan kewirausahaan selama ini menyebabkan definisi tersebut perlu diperluas. Sekarang ini wirausahawan juga sering kali mencakup penemu dan pengembang usaha yang mampu mengenali dan memanfaatkan peluang, mengubah peluang menjadi sesuatu yang layak dilaksanakan maupun dipasarkan (Manullang & Simarmata, 2023). Wirausahawan juga mampu memberikan nilai tambah melalui waktu, melalui usaha yang dikeluarkan, melalui uang atau modal untuk memulai usaha, memanfaatkan keterampilan, bersedia menanggung risiko jika pasar ternyata penuh dengan persaingan, dan menyadari imbalan yang akan diperoleh dari usaha yang dilakukan (Amalia & von Korfflesch, 2021).

Wirausaha, atau entrepreneurship, merupakan konsep yang melibatkan kemampuan individu dalam mengidentifikasi peluang bisnis, mengambil risiko, dan mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai ekonomi. Teori klasik wirausaha pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter, yang mengaitkan wirausaha dengan inovasi. Menurut Schumpeter, wirausaha berperan sebagai agen perubahan yang mendisrupsi status quo dengan menciptakan produk, metode produksi, atau pasar baru, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, teori risiko yang dikemukakan oleh Richard Cantillon menekankan bahwa wirausaha adalah individu yang berani mengambil risiko dalam kondisi ketidakpastian pasar. Perspektif modern mengenai wirausaha menggabungkan elemen inovasi, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Di Indonesia, perkembangan wirausaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, regulasi, dan budaya. Wirausaha mulai menjadi perhatian utama pemerintah sejak era reformasi ekonomi pada akhir 1990-an, di mana terjadi pergeseran dari ekonomi terpusat ke arah liberalisasi dan privatisasi. Pemerintah Indonesia kemudian mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan sektor wirausaha melalui berbagai kebijakan seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan akses pasar. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan peran penting wirausaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Nurmalia et al., 2020).

Perkembangan teknologi digital di Indonesia juga telah mendorong munculnya generasi baru wirausaha yang bergerak di sektor startup. Digitalisasi ekonomi memfasilitasi kemudahan dalam memulai bisnis dengan biaya lebih rendah, akses pasar yang lebih luas, dan proses

operasional yang lebih efisien. Fenomena e-commerce, fintech, dan ride-hailing yang berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi mendorong pertumbuhan wirausaha di Indonesia. Banyak dari startup ini yang berhasil meraih status "unicorn," yakni perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS, seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak, yang menjadi ikon sukses dalam ekosistem wirausaha digital Indonesia.

Namun, meskipun sektor wirausaha di Indonesia menunjukkan potensi besar, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pendidikan kewirausahaan di masyarakat, yang berdampak pada kurangnya literasi bisnis dan manajemen, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Akses terhadap modal juga masih menjadi masalah bagi sebagian besar wirausaha, terutama di sektor mikro dan kecil. Meski pemerintah telah menyediakan berbagai program pembiayaan, banyak wirausaha yang belum mampu memanfaatkan fasilitas ini secara optimal karena keterbatasan informasi atau persyaratan yang ketat. Selain itu, birokrasi yang masih rumit dan regulasi yang sering berubah juga menjadi hambatan dalam pengembangan wirausaha (Idris & Hijrah Hati, 2013).

Ke depan, untuk meningkatkan ekosistem wirausaha di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Peningkatan pendidikan kewirausahaan di berbagai jenjang sekolah dan perguruan tinggi sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda menjadi wirausaha yang inovatif dan adaptif. Selain itu, pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif dan memberdayakan UMKM melalui transformasi digital, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif melalui reformasi regulasi (Kadarusman, 2020). Dengan dukungan yang tepat, wirausaha dapat menjadi pilar utama dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Era revolusi industri 4.0 semakin menjadikan pengembangan kewirausahaan UMKM sebagai salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, utamanya dalam memastikan pengembangan kebijakan yang kondusif dalam mendukung Indonesia Maju (Du & O'Connor, 2018). Kewirausahaan UMKM dilakukan dengan membangun sinergitas dalam pemetaan potensi kewirausahaan, menciptakan iklim kewirausahaan, menumbuhkembangkan kewirausahaan dan inkubasi kewirausahaan serta dukungan pembiayaannya.

Dalam teori kewirausahaan destruksi kreatif (the creative destruction theory of entrepreneurship) yang digagas oleh Joseph A. Schumpeter, wirausahawan dipandang sebagai inovator utama dan kewirausahaan adalah pendorong utama ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui badai penghancuran kreatif (Schumpeter, 1947). Representasi modern yang hebat dari teori Schumpeter tentang penghancuran kreatif dalam kewirausahaan adalah perusahaan rintisan (start-up) yang inovatif. Start-up bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada yang dialami oleh pasar dan penawaran incumbent saat ini (Martínez-Fierro et al., 2016). Start-up juga bertujuan untuk menciptakan solusi baru yang pada akhirnya akan mengambil alih produk atau layanan yang ada di pasar dengan menghancurkannya. Bagi Indonesia pengembangan kewirausahaan menjadi suatu keniscayaan mengingat saat ini tingkat kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47%, lebih rendah dari negara negara tetangga, seperti Singapura dengan tingkat kewirausahaan 8,5%, Thailand dan Malaysia 4,5%. Padahal untuk menjadi

negara maju setidaknya dibutuhkan minimal 4% dari proporsi jumlah penduduk.

Wirausahawan boleh dianggap sebagai katalisator yang secara agresif berusaha mengubah dunia usaha. Wirausahawan juga merupakan orang-orang dengan pemikiran bebas (independen) yang berani memunculkan gagasan yang berbeda dari pemikiran masyarakat umum. Berbagai tulisan mengenai kewirausahaan pada umumnya menunjukkan kesamaan karakteristik dari para wirausahawan (Martínez-Fierro et al., 2016). Para wirausahawan biasanya dikaitkan dengan beberapa karakteristik utama yang melekat padanya, antara lain sebagai berikut:

1. memiliki sifat inisiatif;
2. mempunyai kemampuan mengonsolidasikan berbagai sumber;
3. memiliki keterampilan manajemen;
4. menginginkan kebebasan mengatur diri sendiri;
5. mempunyai keberanian menanggung risiko dalam menjalankan usahanya.

Kewirausahaan diperkenalkan oleh para ahli ekonomi sebagai topik bahasan dalam diskusi dan analisis sejak abad ke-18 maupun abad ke-19. Sekarang ini istilah kewirausahaan sering dianggap sama ataupun dianggap berkaitan erat dengan kebebasan berusaha ataupun kapitalisme. Wirausaha juga pada umumnya dianggap sebagai agen perubahan yang memunculkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha, ataupun untuk membantu perkembangan perusahaan sehingga menjadi menguntungkan.

Wirausaha tidak hanya berkaitan dengan usaha yang menawarkan produk berupa barang jadi seperti industri, perdagangan, persewaan, makanan, tapi juga sektor jasa. Wirausaha lebih menekankan pada jiwa, semangat, kemudian diaplikasikan dalam segala aspek

kehidupan. Apapun profesi seseorang, jika ia memiliki jiwa kewirausahaan maka jiwa dan semangatnya berbeda. Mereka akan menjadi lebih kreatif, efisien, inovatif, berpandangan terbuka (open mind) (Vasiuta et al., 2022).

Karakteristik wirausaha memiliki peran penting dalam membentuk sikap mental seseorang, daya inovasi, kreatifitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja keras, daya juang yang bersinergi dengan pengetahuan keterampilan dan kewaspadaan menentukan keberhasilan usaha. Pengusaha yang memiliki karakteristik wirausaha dapat menghadapi permasalahan dan hambatan yang dihadapinya. Wijayanto (2013) mengungkapkan bahwa karakteristik wirausaha memiliki motif berprestasi. Seorang wirausaha adalah seseorang yang kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko melalui pemanfaatan kesempatan usaha yang potensial dan mensinergikan aset-aset dan kapabilitas sehingga aset dan kapabilitas tersebut dapat dikapitalisasikan (Alma, 2005).

Menurut Abdullah dan Mansor (2018), karakteristik wirausaha memainkan peranan penting dalam menjamin kesuksesan usaha UMKM. Karakteristik wirausaha menunjuk pada karakteristik demografi, karakteristik individu, sifat pribadi, orientasi berwirausaha dan kesiapan berwirausaha. Secara detail karakter wirausaha menunjuk pada karakter yang fokus dalam jangka panjang, memiliki banyak ide, percaya diri, tidak mudah menyerah, mandiri, berani mengambil risiko, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan.

Seorang wirausahawan haruslah memiliki watak yang mampu melihat ke depan, yaitu melihat, berpikir, dengan penuh perhitungan, mencari alternatif masalah dan pemecahannya. Secara umum dapat digambarkan kepribadian yang perlu dimiliki wirausahawan, sebagai berikut:

1. Percaya diri. Percaya diri adalah keyakinan yang tumbuh dalam diri seseorang setelah melakukan penilaian terhadap kemampuan

yang dimiliki. Orang yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang jiwanya sudah matang. Kematangan seseorang ditunjukkan dari sikap tidak tergantung pada orang lain, bertanggungjawab, obyektif, kritis, emosional stabil dan berjiwa sosial. Percaya diri sangat dibutuhkan oleh seorang wirausahawan. Saat seseorang menawarkan produknya, dibutuhkan kepercayaan diri untuk bisa berinteraksi dengan baik dan meyakinkan. Saat seseorang akan memulai untuk berwirausaha, jika ia percaya diri maka ia akan berusaha agar usahanya bisa dibuka dan berjalan. Sebaliknya, orang yang tidak percaya diri akan kerap patah sebelum melangkah.

2. Pantang Menyerah. Seorang wirausahawan memiliki karakteristik pantang menyerah. Seorang wirausahawan membutuhkan semangat pantang menyerah saat berusaha mewujudkan inovasi maupun ide barunya. Tingkat kegigihan seseorang bisa dilihat dari kemampuannya untuk bertahan dalam situasi sulit. Kemampuan ini dikenal dengan adversity intelligence dan tingkat penguasaannya dikenal dengan adversity quotient. Adversity Quotient memiliki empat dimensi yaitu:
 - a. *Control* yaitu berkaitan dengan seberapa besar individu mampu memberi pengaruh secara positif terhadap situasi
 - b. *Ownership* berkaitan dengan sejauh mana individu mengendalikan diri sendiri untuk memperbaiki situasi yang dihadapi tanpa mempedulikan penyebabnya
 - c. *Reach* berkaitan dengan penilaian seseorang mengenai seberapa jauh kesulitan akan menjangkau atau menyebar ke bagian-bagian lain dari kehidupannya
 - d. *Endurance* berkaitan dengan seberapa lama individu menganggap kesulitan akan berlangsung atau bertahan

3. Berani Mengambil Risiko. Wirausaha tidak lepas dengan adanya tantangan, dan terkadang spekulatif. Keberanian seseorang dalam mengambil resiko memiliki arti penting dalam hal ini. Persaingan, perubahan selera maupun kebutuhan pasar, harga bahan baku yang turun naik, kerugian mesti dihadapi jika memang berniat memasuki dunia wirausaha. Seseorang yang tidak memiliki keberanian mengambil resiko akan cenderung selalu memilih untuk berada di zona aman. Zona aman adalah wilayah dimana seseorang merasa nyaman, aman, terhindar dari resiko konflik atau situasi yang tidak menyenangkan. Seorang wirausahawan akan memilih untuk keluar dari zona aman, melakukan hal yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, menelurkan ide-ide baru dan melaksanakannya, serta berani menghadapi resiko. Manajemen resiko menjadi faktor penting yang mendukung keberanian pengambilan resiko ini. Keberanian mengambil resiko juga perlu didukung oleh perhitungan yang matang. Semakin baik seseorang membuat pertimbangan, maka resiko akan semakin bisa terantisipasi.
4. Kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership dapat dilihat dari bagaimana seseorang mampu mempengaruhi, mengkoordinir, memimpin dan mengambil keputusan dalam sebuah tim. Gaya kepemimpinan bagi seorang wirausaha adalah pemimpin yang memiliki kemampuan mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan tulus, dilakukan dengan kesadaran, tidak dipaksa atau memaksa. Karakteristik kepemimpinan wirausaha adalah jujur, berpedoman pada nurani dalam berpikir, bersikap dan bertindak, amanah, bertanggungjawab, berkomitmen tinggi dan dapat dipercaya

5. Keorisinilan. Orisinil dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru atau belum ada sesuatu yang sama sebelumnya. Baru disini disini tidak selalu berarti belum pernah ada sama sekali, tapi bisa juga merupakan modifikasi, kombinasi atau reintegrasi dari komponen yang sudah ada, sehingga memunculkan fungsi, cita rasa maupun variasi baru. Bobot orisinalitas suatu ide maupun produk akan tampak dari sejauh manakah ia berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya.
6. Kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya (Alma, 2005). Seorang wirausaha kreatif memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan produk yang unik dan berbeda, serta dapat merespon kesempatan dengan lebih baik. Kemampuan berpikir kreatif menuntut beberapa hal, antara lain sikap terbuka, keberanian untuk berbeda dengan biasanya, menguasai satu bidang dengan sangat baik, buying low, selling high: melihat sesuatu dari yang tidak disukai banyak orang, kemudian mengolahnya dan memunculkan kembali menjadi sesuatu yang berbeda di saat yang tepat sehingga bernilai tinggi.
7. Inisiatif. Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai sesuatu. Untuk memulai diperlukan adanya niat dan tekad yang kuat serta karsa yang besar. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif ini biasanya diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah dan semangat.
8. Motivasi Berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan dorongan untuk selalu berprestasi tinggi harus ada dalam diri seorang

wirausaha, karena dapat membentuk mental pada diri mereka untuk selalu lebih unggul dan mengerjakan segala sesuatu melebihi standar yang ada. Motivasi berprestasi, pertama diartikan sebagai perilaku yang timbul karena melihat standar keunggulan dan dengan demikian dapat dinilai dari segi keberhasilan dan kegagalan. Kondisi kedua adalah individu sedikit banyak harus bertanggung jawab atas hasilnya. Ketiga, terdapat suatu tingkat tantangan dan timbul perasaan tidak pasti. Konsep motivasi berprestasi juga sangat menitik beratkan pada kerja dinamika batiniah. Seseorang yang memiliki motivasi prestasi maka dalam menjalankan usahanya ia akan berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan.

Wirausaha di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak beberapa dekade terakhir, terutama dengan perubahan ekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Secara historis, wirausaha di Indonesia telah lama dipraktikkan melalui sektor informal, seperti pasar tradisional dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Namun, baru setelah era reformasi ekonomi pada 1998, perhatian lebih besar diberikan kepada sektor wirausaha sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah mulai menyadari pentingnya peran wirausaha dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan wirausaha di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja nasional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung pertumbuhan wirausaha, seperti kredit usaha rakyat

(KUR), pelatihan kewirausahaan, dan penyederhanaan prosedur perizinan melalui platform digital seperti OSS (Online Single Submission). Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjadi dasar hukum penting yang memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Perkembangan teknologi digital juga telah memainkan peran besar dalam transformasi sektor wirausaha di Indonesia. Kemunculan startup digital, terutama di bidang e-commerce, fintech, dan ride-hailing, telah mengubah lanskap bisnis di Indonesia. Dengan adopsi teknologi yang semakin meningkat, banyak wirausaha memanfaatkan platform digital untuk memperluas akses pasar, memperbaiki efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing. Startup Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak menjadi contoh sukses wirausaha digital yang kini berstatus unicorn, yang tidak hanya berhasil di pasar domestik tetapi juga menarik perhatian investor internasional. Pertumbuhan ini didukung oleh penetrasi internet yang semakin luas serta meningkatnya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat.

Meskipun demikian, perkembangan wirausaha di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah akses terhadap pembiayaan. Meskipun program seperti KUR telah membantu banyak wirausaha, sebagian besar pelaku usaha kecil masih kesulitan mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan formal. Selain itu, rendahnya tingkat literasi finansial dan manajemen bisnis juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Di sisi lain, kompleksitas regulasi dan birokrasi di tingkat daerah sering kali menyulitkan wirausaha, terutama yang berada di wilayah terpencil, untuk memperoleh izin usaha dan akses terhadap dukungan pemerintah (Gunawan & Fraser, 2016).

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong perkembangan wirausaha di Indonesia. Program-program yang mendukung literasi digital dan kewirausahaan perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Pengembangan infrastruktur digital juga harus diprioritaskan untuk mendukung wirausaha di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, reformasi regulasi yang mempermudah akses pembiayaan dan penyederhanaan birokrasi akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang lebih kondusif. Dengan demikian, wirausaha dapat terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Wirausaha dan Perkembangan Ekonomi Nasional

Wirausaha merupakan salah satu penggerak utama dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam teori ekonomi, wirausaha sering dianggap sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Joseph Schumpeter, seorang ekonom ternama, berpendapat bahwa wirausaha adalah aktor kunci dalam "proses penghancuran kreatif" (creative destruction), di mana inovasi yang diciptakan oleh para wirausaha mendisrupsi struktur ekonomi lama dan menciptakan tatanan ekonomi baru yang lebih produktif. Dalam konteks ekonomi nasional, wirausaha memegang peran penting sebagai penyedia produk dan jasa baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong daya saing pasar, sehingga mempercepat laju perkembangan ekonomi (Vasiuta et al., 2022).

Di Indonesia, wirausaha memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM), sebagai salah satu bentuk wirausaha yang paling umum, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan sekitar 97% lapangan kerja di Indonesia. UMKM berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, terutama di tengah situasi krisis, karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk bertahan dalam kondisi yang sulit. Pemerintah Indonesia telah lama memberikan perhatian terhadap pengembangan wirausaha melalui berbagai kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kewirausahaan pemuda, dan penyederhanaan prosedur perizinan usaha melalui sistem digital, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha di tanah air.

Peran wirausaha dalam perekonomian nasional juga semakin diperkuat dengan berkembangnya ekonomi digital. Di era revolusi industri 4.0, teknologi digital memberikan peluang baru bagi para wirausaha untuk menciptakan model bisnis yang lebih efisien, inovatif, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Startup teknologi yang berkembang di Indonesia, seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak, telah menunjukkan bagaimana wirausaha dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga menggerakkan ekonomi di berbagai sektor, termasuk transportasi, logistik, dan keuangan. Digitalisasi juga telah memungkinkan wirausaha di berbagai daerah untuk mengakses pasar global, yang secara signifikan meningkatkan potensi ekspor dan kontribusi ekonomi mereka (Ridha et al., 2017).

Namun, meskipun wirausaha di Indonesia terus berkembang, masih ada tantangan yang perlu diatasi agar dampaknya terhadap perekonomian nasional bisa lebih optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kewirausahaan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju (Lediana et al., 2023). Berdasarkan data Global Entrepreneurship

Monitor (GEM), tingkat aktivitas kewirausahaan di Indonesia masih relatif rendah, yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari populasi yang terlibat dalam aktivitas wirausaha. Selain itu, wirausaha di Indonesia juga masih dihadapkan pada kendala akses pembiayaan, infrastruktur yang belum merata, serta regulasi yang terkadang memberatkan. Hal ini dapat membatasi kemampuan wirausaha untuk berkembang lebih jauh dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap ekonomi nasional (Gunawan & Fraser, 2016).

Ke depan, untuk memastikan bahwa wirausaha dapat terus menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan sektor swasta. Pengembangan ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan perlu difasilitasi melalui program pendidikan kewirausahaan, perluasan akses terhadap pembiayaan, serta penguatan infrastruktur digital. Selain itu, penting untuk mendorong budaya inovasi dan kreativitas di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, agar semakin banyak wirausaha yang muncul dan mampu bersaing di pasar global. Dengan pendekatan yang tepat, wirausaha di Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Sumberdaya yang dapat dikelola (invisible resources)
2. Sumberdaya manusia (human resources)
3. Wirausaha (entrepreneurship)
4. Teknologi (technology).

Wirausaha menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi islam dan merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi islam, hal tersebut disebabkan karena, Wirausaha

dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw, dalam beberapa hadis menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadis riwayat Ahmad beliau bersabda, "Hendaklah kamu berdagang (berbisnis), karena di dalamnya teedapat 90 % pintu rezeki". Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan (bisnis)". Wirausaha (entrepreneur) diartikan sebagai seorang inovator dan penggerak pembangunan. Bahkan, seorang wirausaha merupakan katalis yang agresif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Harian Kompas edisi Sabtu, 19 April 2009, menurunkan laporan hasil survey terhadap 316 pengusaha dengan judul "Saatnya Dipimpin Oleh Pengusaha". Menurut laporan tersebut, para pengusaha yang disurvei memandang bahwa terkait dengan persoalan ekonomi, sesungguhnya negeri kita sedang mengalami masalah kepemimpinan. Dengan kata lain, bersangkut-paut dengan upaya keluar dari berbagai persoalan ekonomi, maka sudah seharusnya negeri ini dipimpin oleh seorang presiden yang berasal dari kalangan pengusaha.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan adalah dengan membuat masyarakat dan individu untuk mampu semaksimal mungkin menggunakan daya kreasi dan artistiknya secara profesional, produktif dan efisien. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a. disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang tidak menjadi milik seseorang, maka ia lebih berhak (atas tanah itu). "Urwah mengatakan: Umar telah membuat putusan sesuai dengan Hadis ini pada kepemimpinannya.

Dengan demikian, semangat entrepreneurship (kewirausahaan) dan kewiraswastaan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat, pentingnya pembangunan jiwa wirausaha dalam

pembangunan ekonomi di negara-negara muslim yang tergolong miskin. Dalam hal ini ia dikatakan,; Upah buruh bukanlah satu jalan mulus bagi pengurangan kemiskinan, justru wirausahalah yang mempunyai potensi lebih besar dalam meningkatkan basis-basis asset individual daripada yang dimiliki oleh upah kerja.

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan akan mendorong pengembangan usaha kecil secara signifikan. Usaha kecil, khususnya di sektor produksi akan menyerap tenaga kerja yang luas dan jauh lebih besar. industri kecil dan usaha mikro UKM memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan, mereka mampu menciptakan lapangan kerja bahkan secara tidak langsung mereka berarti mengembangkan pendapatan dan permintaan akan barang dan jasa, peralatan, bahan baku dan ekspor. Mereka adalah industri padat karya yang kurang memerlukan bantuan dana luar (asing), bahkan kadang tidak begitu tergantung kepada kredit pemerintah dibanding industri berskala besar.

Saat ini telah muncul kesadaran yang meluas bahwa strategi industrialisasi modern yang berskala besar pada dekade terdahulu secara umum telah gagal memecahkan masalah-masalah keterbelakangan global dan kemiskinan. Industri-industri modern yang berskala besar biasanya kurang dapat menghasilkan keuntungan daripada industri-industri kecil, di samping itu industri besar lebih mahal dalam hal modal dan lebih sedikit menciptakan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu Usaha Mikro (Industri kecil) secara luas dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta, baik untuk tujuan-tujuan pertumbuhan maupun pemerataan bagi negara-negara berkembang. Peningkatan jumlah wirausaha menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada lima alasan yang melatarbelakangi gagasan Schumpeter bahwa

wirausaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yakni:

1. Wirausaha yang mengenalkan produk baru dan kualitas baru dari suatu produk,
2. Wirausaha yang mengenalkan metode baru berproduksi yang lebih komersial, baik berdasarkan pengalaman maupun hasil kajian ilmiah dari suatu penelitian,
3. Wirausaha yang membuka pasar baru, baik dalam negeri ataupun di negara yang sebelumnya belum ada pasar,
4. Wirausaha yang menggali sumber pasokan bahan baku baru bagi industri setengah jadi atau industri akhir, dan
5. Wirausaha yang menjalankan organisasi baru dari industri apapun.

Kelima hal inilah mengapa wirausaha dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu karena adanya suatu peningkatan produktivitas. Karena itulah dengan mengembangkan industri rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat miskin, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha dapat bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Dampak pertumbuhan wirausaha terhadap perekonomian sangat besar, baik ekonomi syariah maupun ekonomi pada umumnya. Perbankan syariah akan menjadi semakin ideal dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Penyaluran kredit Peran Kewirausahaan Dalam

Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia akan berjalan maksimal. Wirausaha juga akan membantu menggerakkan roda perekonomian lewat pembukaan lapangan kerja. Wirausaha juga terkait dengan penyelenggaraan ibadah lainnya yaitu jika wirausaha dilakukan pada sektor-sektor yang syar'i.

Misalnya, usaha biro perjalanan haji dan umroh, akan membantu masyarakat untuk menjalankan ibadah haji atau umroh. Begitu juga pembangunan masjid, sangat membutuhkan keberadaan wirausaha seperti untuk pengadaan bahan-bahan bangunan. Berwirausaha sesuai dengan ekonomi Islam/syariah. Ekonomi Islam bukan hanya perbankan, asuransi dan pasar modal. Ekonomi Islam juga mencakup persoalan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan untuk itu dibutuhkan wirausaha.

Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, wirausaha mempengaruhi seluruh perekonomian, khususnya pengaruhnya pada pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sangat mungkin akan meningkatkan peluang kesempatan berusaha, namun disisi lain akan mengarah pada tekanan inflasi yang berpengaruh langsung pada upah tenaga kerja. Padahal kenaikan upah tenaga kerja tidak bisa selalu diturunkan dari ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja pasar. Menteri Koperasi dan UKM (2009-2014), Syarifuddin Hasan, pernah menyatakan harapannya agar para calon wirausaha dan semua wirausaha yang telah tumbuh dan berkembang saat ini bisa memanfaatkan proyek pembangunan pemerintah dalam mengembangkan usahanya. Keberadaan program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), misalnya, menjadi peluang nyata yang bisa dimanfaatkan oleh semua calon wirausaha. Jika MP3EI dijadikan peluang usaha yang baik oleh para wirausaha, pada tahun 2025, Indonesia bisa

masuk 12 negara ekonomi besar dunia dan menjadi delapan negara ekonomi terbesar dunia pada 2045.

2.1.4 Wirausaha Pemuda

Wirausaha pemuda merupakan konsep yang merujuk pada partisipasi generasi muda dalam dunia bisnis dan penciptaan usaha mandiri. Pemuda, yang dikenal dengan kreativitas, semangat, dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat, memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui wirausaha. Teori wirausaha pemuda menekankan peran penting pemuda dalam menciptakan inovasi baru dan mengubah pola pikir tradisional dalam bisnis (Rahmatiah et al., 2017). Dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses informasi, pemuda memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memulai bisnis yang inovatif, terutama dalam sektor digital dan ekonomi kreatif. Studi-studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kewirausahaan pemuda yang tinggi sering kali mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena pemuda dianggap sebagai agen perubahan yang dinamis.

Wirausaha pemuda adalah aspek yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Untuk mengikuti program Wirausaha Muda Pemula, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk berusia antara 16 dan 30 tahun, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang sah, memiliki rekening bank aktif, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, peserta juga harus menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Di Indonesia, wirausaha pemuda mendapat perhatian yang signifikan, mengingat negara ini memiliki bonus demografi dengan mayoritas penduduknya berusia muda. Pemerintah Indonesia, melalui

berbagai program dan kebijakan, berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kewirausahaan. Salah satunya adalah program "Wirausaha Muda Mandiri" yang bertujuan mendorong pemuda untuk memulai usaha sejak dini dengan memberikan akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan. Kewirausahaan pemuda juga didukung oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menegaskan peran penting pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui inovasi dan kewirausahaan. Selain itu, berbagai kompetisi bisnis untuk pemuda, seperti "Youth Entrepreneurship Summit," turut berperan dalam menginspirasi generasi muda untuk terjun ke dunia usaha.

Perkembangan teknologi digital telah memfasilitasi wirausaha pemuda, khususnya di sektor startup dan bisnis berbasis internet. Pemuda yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi menjadi pemain kunci dalam sektor ini, yang dapat dilihat dari menjamurnya bisnis digital yang dipelopori oleh anak-anak muda. Contoh nyata adalah kemunculan berbagai platform digital di Indonesia yang didirikan oleh wirausahawan muda, seperti Gojek oleh Nadiem Makarim dan Tokopedia oleh William Tanuwijaya. Kesuksesan mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat menciptakan bisnis yang inovatif, disruptif, dan memiliki jangkauan pasar yang luas (Gunawan & Fraser, 2016). Selain itu, media sosial juga menjadi platform penting bagi wirausaha muda untuk memasarkan produk dan jasa mereka secara lebih efektif dengan biaya yang relatif rendah.

Meskipun memiliki potensi yang besar, wirausaha pemuda di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap pembiayaan dan modal usaha. Banyak pemuda yang memiliki ide bisnis kreatif namun terkendala dalam memperoleh modal untuk memulai usahanya. Selain itu, tingkat literasi keuangan dan manajemen yang rendah di kalangan pemuda juga menjadi

penghalang dalam pengelolaan bisnis mereka secara profesional. Birokrasi yang rumit dan regulasi yang tidak ramah bagi startup kecil juga sering kali menjadi kendala bagi pemuda yang ingin memulai bisnis. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk menyediakan ekosistem yang lebih mendukung bagi kewirausahaan pemuda, terutama dalam hal akses pembiayaan dan penyederhanaan regulasi (Yulianto, 2020).

Untuk mendorong perkembangan wirausaha pemuda yang lebih signifikan di masa depan, penting untuk meningkatkan program pendidikan kewirausahaan di berbagai jenjang pendidikan. Pelatihan keterampilan kewirausahaan dan literasi digital perlu ditanamkan sejak dini agar pemuda lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia usaha. Selain itu, dukungan terhadap kewirausahaan sosial juga perlu diperkuat, karena banyak pemuda yang tertarik pada bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta akses yang lebih luas terhadap sumber daya, wirausaha pemuda di Indonesia berpotensi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemuda mendominasi penduduk yang menganggur di Indonesia. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 mencatat bahwa sekitar 3/4 penduduk yang menganggur adalah pemuda. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) memperbesar tantangan pemuda untuk mendapatkan pekerjaan. Angka pengangguran pemuda diduga akan meningkat dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan angka pengangguran generasi dewasa. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada April– Mei 2020 menunjukkan bahwa tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kelompok usia muda lebih tinggi daripada tingkat PHK pada angkatan kerja kelompok usia yang lebih

tua (Gambar 1). Lebih tingginya angka PHK pemuda terjadi terutama karena pengalaman kerja mereka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang lebih dewasa. Oleh karena itu penyelesaian persoalan pengangguran pemuda memiliki peranan strategis dalam penanggulangan pengangguran nasional.

Salah satu peluang yang dimiliki Indonesia untuk mengatasi persoalan pengangguran pemuda saat ini adalah tingginya minat pemuda untuk menjadi pengusaha (U-Report Indonesia, 2019). Indonesia memiliki potensi penumbuhan kewirausahaan yang besar karena besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2019 terbesar di Asia Tenggara. Disamping itu, terdapat pula potensi penumbuhan industri halal. Banyak literatur mengungkapkan bahwa jika dibandingkan dengan penduduk berusia lebih tua, pemuda memiliki keinginan belajar, inovasi, mobilitas, dan keterbukaan terhadap teknologi yang lebih tinggi.

Dengan adanya potensi ini, kreativitas dan inovasi pemuda perlu terus dirangsang dan dikembangkan agar mereka menjadi individu yang dapat menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Pengembangan kewirausahaan⁵ pemuda menuju wirausaha kerah putih harus terus didorong agar menghasilkan pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Akan tetapi, untuk menjadi pengusaha yang mampu mengembangkan usahanya, pemuda menghadapi tantangan dari sisi kompetensi, pengalaman, sumber daya, jejaring, dan dukungan keluarga untuk memulai dan menjalankan usahanya. Karakteristik tantangan yang dihadapi anak muda ini berbeda dengan karakteristik tantangan yang dihadapi pengusaha dari kelompok usia dewasa. Perbedaan tersebut berkaitan dengan berbagai hal, seperti kepemilikan sumber daya yang

lebih rendah, kurangnya pengalaman, dan terbatasnya jejaring di kalangan anak muda (Chigunta, 2002).

Ketika tantangan ini tidak ditangani secara optimal, kemungkinan yang akan terjadi adalah ketidakselarasan /mismatch antara potensi kewirausahaan pemuda dan realisasi pemuda yang berhasil menjadi wirausaha. Untuk kasus pemuda Indonesia, terjadinya mismatch ini tergambar dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Youth Co:Lab UNDP6 Indonesia (U-Report Indonesia, 2019). Jajak pendapat ini menemukan bahwa 81% pemuda berminat menjadi wirausaha tetapi hanya 8% yang sudah memiliki usaha atau bisnis.

Ekosistem kewirausahaan pemuda terdiri dari berbagai faktor kelembagaan dan struktural, kebijakan dan program, serta pemangku kepentingan yang memengaruhi dan berkontribusi pada lingkungan operasional wirausahawan muda dan calon wirausahawan muda. Pemangku kepentingan ekosistem dan pembangun ekosistem meliputi, tetapi tidak terbatas pada, berbagai jenis perusahaan, pemerintah nasional dan daerah, akademisi, lembaga dan organisasi pendidikan dan keuangan, layanan pendukung bisnis, investor, organisasi nonpemerintah, dan mitra pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan kemandirian usaha pemuda. Namun, perlu dicatat bahwa di Indonesia belum ada definisi yang dipahami secara umum tentang kewirausahaan pemuda. Ketiadaan definisi ini menjadi poin penting bagi BAPPENAS dalam Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda yang menyatakan bahwa ketidakpahaman tersebut dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dalam pengembangan pemuda.

Strategi nasional kewirausahaan pemuda yang disusun pada tahun 2020 memetakan komponen utama ekosistem kewirausahaan pemuda di Indonesia. Komponen tersebut meliputi:

1. lingkungan pendukung kewirausahaan langsung (yaitu keluarga dan masyarakat) dan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi kewirausahaan;
2. situasi ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi prospek usaha dan pemasaran produk usaha pemuda; (iii) dukungan kebijakan dan kelembagaan; dan
3. Faktor kerentanan, misalnya bencana alam dan pandemi COVID-19.

Hal tersebut memberikan gambaran umum tentang profil pemuda dan wirausahawan muda Indonesia. Sekitar dua puluh persen pemuda yang bekerja adalah wirausahawan di Indonesia pada tahun 2020. Sekitar enam puluh persen wirausahawan muda adalah laki-laki dan 65,3 persen di antaranya berusia antara 25-30 tahun. Hampir seperempat pemuda yang bekerja di daerah pedesaan adalah wirausahawan, sekitar 22 persen, sedangkan angkanya 17 persen di daerah perkotaan.

Lebih dari 50 persen wirausahawan muda beroperasi di sektor perdagangan eceran dan reparasi mobil atau pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2020. Dalam hal skala bisnis mereka, sebagian besar wirausahawan muda beroperasi sendiri. Hanya di sektor jasa perusahaan, jasa keuangan, dan konstruksi kurang dari 80 persen usaha yang dikelola oleh pemuda beroperasi sendiri pada tahun 2020. Berdasarkan Sakernas tahun 2020, usaha yang dikelola oleh pemuda dengan karyawan lebih banyak berada di wilayah perkotaan dibandingkan di wilayah pedesaan pada tahun 2020.

2.1.5 Kebijakan dan Program Wirausaha Pemuda di Daerah

Wirausaha pemuda telah menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan dan program yang mendukung wirausaha pemuda di daerah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing lokal, serta mengurangi ketergantungan pada sektor formal yang cenderung terbatas. Pemerintah pusat maupun daerah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong pemuda menjadi penggerak ekonomi melalui kewirausahaan, terutama dengan memberikan pelatihan, akses modal, dan dukungan teknis. Pemuda, dengan potensi kreativitas dan inovasinya, diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan bisnis yang berkontribusi pada kesejahteraan daerah (Ranjan, 2019).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, dan pemerintah wajib memberikan fasilitas bagi mereka untuk mengembangkan potensi wirausaha. Implementasi dari undang-undang ini tercermin dalam berbagai program wirausaha pemuda yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga, mengoordinasikan pelaksanaan program yang membantu pemuda memulai dan mengembangkan usaha, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal.

Program-program kewirausahaan pemuda di daerah sering kali dikaitkan dengan sektor-sektor unggulan daerah. Misalnya, di daerah agraris, banyak program yang berfokus pada pengembangan usaha agribisnis, pertanian modern, atau pengolahan hasil pertanian. Di daerah pesisir, program kewirausahaan pemuda cenderung mengarah pada

sektor perikanan dan pariwisata. Dengan mendorong pemuda untuk mengelola potensi ekonomi daerah mereka, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan agar pemuda bisa menjadi inovator dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Salah satu contoh program yang populer adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), yang bertujuan meningkatkan kesadaran wirausaha di kalangan pemuda, termasuk di tingkat daerah. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausahawan muda. Melalui pelatihan yang intensif, pemuda dibekali dengan keterampilan teknis dan manajerial untuk memulai bisnis serta diberikan akses ke pembiayaan mikro. GKN juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif.

Selain itu, banyak pemerintah daerah yang meluncurkan program lokal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Contohnya, di Jawa Tengah, program Jateng Gayeng menekankan pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, dengan fokus pada pemuda. Pemerintah daerah memberikan hibah modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada pemuda untuk menjalankan usaha berbasis kearifan lokal, seperti kerajinan, produk makanan khas daerah, dan industri kreatif. Pendekatan ini bertujuan mendorong pemuda untuk melestarikan budaya lokal sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari potensi tersebut.

Kebijakan kewirausahaan pemuda di daerah juga sering kali difokuskan pada pengembangan wirausaha berbasis digital. Di tengah berkembangnya teknologi informasi, pemerintah daerah mulai melihat

potensi besar dari bisnis digital yang digerakkan oleh pemuda. Program "1000 Startup Digital" yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan pemerintah daerah merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ekosistem startup di daerah. Program ini memberikan pelatihan, inkubasi, dan pendanaan bagi pemuda yang tertarik memulai usaha berbasis teknologi, seperti e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya, yang berkontribusi pada akselerasi digitalisasi di daerah-daerah.

Dalam aspek pembiayaan, beberapa pemerintah daerah juga telah memperkenalkan Skema Kredit Usaha Pemuda (KUP) untuk memberikan akses modal yang lebih mudah bagi wirausahawan muda. KUP sering kali bekerja sama dengan bank daerah atau lembaga keuangan mikro setempat, dengan menawarkan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel bagi pemuda yang baru memulai usaha. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi hambatan utama yang sering dihadapi pemuda dalam memulai bisnis, yaitu keterbatasan modal. Selain itu, ada pula inisiatif dari lembaga non-pemerintah dan BUMN yang terlibat dalam pembiayaan usaha pemuda melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada kewirausahaan.

Namun, meskipun ada banyak kebijakan dan program yang dijalankan, keberhasilan wirausaha pemuda di daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan utama adalah akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Banyak pemuda yang masih kurang memahami tentang prosedur bisnis, regulasi, serta peluang pasar yang ada di sekitar mereka. Kurangnya informasi dan pengetahuan ini dapat menghambat inisiatif mereka untuk terjun ke dunia kewirausahaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif yang mencakup aspek pemasaran,

manajemen keuangan, dan pemahaman tentang aspek hukum yang terkait dengan usaha.

Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan sosial juga menjadi kendala yang signifikan bagi wirausaha pemuda. Di beberapa daerah, ada stigma negatif terhadap kewirausahaan, di mana masyarakat lebih menghargai pekerjaan formal dibandingkan dengan usaha mandiri. Hal ini dapat membuat pemuda merasa ragu untuk memulai bisnis, apalagi jika mereka tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau komunitas mereka. Oleh karena itu, menciptakan budaya kewirausahaan yang positif dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan potensi dari wirausaha sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kewirausahaan.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, infrastruktur seperti jalan, listrik, dan internet yang tidak memadai dapat menghambat perkembangan usaha. Wirausaha pemuda yang ingin mengakses pasar yang lebih luas atau memanfaatkan teknologi digital akan kesulitan jika infrastruktur dasar tidak mendukung. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan dan program kewirausahaan pemuda di daerah.

Selain itu, kualitas pelatihan dan pendampingan yang diberikan dalam program-program kewirausahaan juga sering kali bervariasi. Beberapa program mungkin tidak menyediakan informasi yang cukup praktis atau kurang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melibatkan praktisi bisnis yang berpengalaman dalam proses pelatihan dan pendampingan, agar pemuda mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif. Keterlibatan dunia usaha dalam program kewirausahaan akan memberikan pemuda

akses langsung ke pengalaman nyata serta jaringan yang bisa membantu mereka dalam menjalankan usaha.

Akhirnya, untuk memastikan keberhasilan wirausaha pemuda di daerah, perlu ada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mendukung. Misalnya, perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberikan pelatihan, pendanaan, dan peluang kerja bagi wirausaha muda. Dengan sinergi yang baik, pemuda tidak hanya akan mendapatkan akses ke sumber daya yang mereka butuhkan, tetapi juga menciptakan jaringan kolaborasi yang kuat yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan usaha mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan dan program kewirausahaan pemuda di daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. Dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang ada, pemuda dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka dan masyarakat. Kebijakan yang responsif dan program yang efektif adalah kunci untuk mendorong partisipasi pemuda dalam wirausaha, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan dan program wirausaha pemuda di daerah adalah upaya untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda di Indonesia. Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda telah disusun untuk mengisi celah kebijakan yang selama ini belum terintegrasi dengan baik.

Program wirausaha pemuda di Indonesia telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha pemuda dan meningkatkan kesadaran pemuda akan

pentingnya kewirausahaan dalam pengembangan ekonomi daerah. Contoh program wirausaha pemuda adalah Program Wirausaha Muda Berprestasi (WMP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Implementasi program wirausaha pemuda di daerah telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Tegal. Implementasi program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha pemuda dan meningkatkan kesadaran pemuda akan pentingnya kewirausahaan dalam pengembangan ekonomi daerah.

Kebijakan dan program wirausaha pemuda di daerah adalah upaya untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda di Indonesia. Kebijakan kewirausahaan pemuda telah diatur dalam beberapa peraturan, dan program wirausaha pemuda telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan lembaga. Implementasi program wirausaha pemuda di daerah telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan kewirausahaan pemuda dapat berkembang dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah.

Isu Kewirausahaan merupakan salah satu prioritas Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Kewirausahaan Nasional juga pada Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Layanan Kepemudaan. Kemenpora merinci lebih khusus pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah. Hal ini ditindaklanjuti Kemenpora dengan inisiasi koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk sama-sama mengawal pengembangan ekosistem kewirausahaan.

Saat ini Kemenpora sudah berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Bappenas, KemenkopUKM, Kemendagri, Kemenparekraft dan beberapa

Kementerian/Lembaga lainnya sudah dilakukan dan sudah ada beberapa K/L yang siap bersinergi untuk sama-sama memperbaiki ekosistem kewirausahaan pemuda di beberapa daerah yaitu Banjarmasin, Nganjuk, Jayapura dan Labuan Bajo. Kedepannya akan ada beberapa Kota/ Kabupaten yang juga siap untuk meningkatkan kewirausahaan pemuda di daerahnya dan bersinergi dengan Kementerian/ Lembaga untuk turut memperbaiki ekosistem tersebut.

2.1.6 Strategi Pengembangan Wirausaha dan Wirausaha Pemuda

Strategi pengembangan wirausaha, terutama di kalangan pemuda, memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Dalam kajian teoretis, pengembangan wirausaha mencakup berbagai faktor, termasuk peningkatan kapasitas, akses terhadap modal, pelatihan, dan pendampingan bisnis. Salah satu strategi utama yang banyak digunakan adalah penyediaan pendidikan kewirausahaan sejak dini, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Pendidikan kewirausahaan yang terintegrasi dengan kurikulum formal dapat memupuk semangat kewirausahaan sejak usia muda. Melalui pendekatan ini, pemuda diajarkan untuk memiliki pola pikir inovatif, kemampuan manajerial, dan pemahaman dasar tentang bagaimana memulai dan menjalankan usaha.

Selanjutnya, strategi penyediaan akses terhadap modal dan pembiayaan juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan wirausaha pemuda. Penelitian oleh Berger & Udell (2006) menyoroti bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemuda dalam memulai usaha adalah keterbatasan modal. Beberapa strategi untuk mengatasi masalah ini meliputi pengenalan skema pembiayaan mikro yang ditargetkan khusus bagi pemuda wirausaha. Skema ini sering kali diberikan melalui lembaga keuangan mikro atau program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel, bunga rendah, dan periode pengembalian yang panjang. Dengan adanya akses yang lebih mudah

terhadap modal, pemuda dapat lebih cepat mewujudkan ide-ide bisnis mereka.

Dalam konteks pengembangan wirausaha pemuda, pelatihan kewirausahaan yang berbasis praktik juga menjadi elemen yang penting. Program pelatihan yang komprehensif biasanya mencakup berbagai keterampilan, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, inovasi produk, dan manajemen operasional. Penelitian oleh Valerio, Parton, & Robb (2014) menunjukkan bahwa pelatihan yang menekankan pada pembelajaran langsung melalui magang atau mentor wirausaha berhasil memberikan pemuda wawasan nyata tentang tantangan bisnis di lapangan. Pelatihan seperti ini juga memberikan kesempatan bagi pemuda untuk membangun jaringan bisnis, yang pada akhirnya dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha di masa depan.

Selain itu, salah satu strategi yang sedang berkembang adalah pengembangan inkubator bisnis dan akselerator yang ditujukan khusus untuk wirausaha pemuda. Inkubator dan akselerator ini memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan ide-ide bisnis mereka dalam lingkungan yang suportif dan terkendali. Menurut penelitian oleh Amezcua et al. (2013), inkubator bisnis yang menyediakan bimbingan intensif dan akses ke jaringan investor dapat meningkatkan peluang keberhasilan wirausaha pemula. Program akselerator bisnis, yang biasanya berdurasi singkat dan intensif, berfokus pada percepatan pertumbuhan bisnis pemula melalui pelatihan, pendampingan, dan akses ke modal ventura.

Dukungan kebijakan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam pengembangan wirausaha pemuda. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wirausaha. Studi oleh Asadullah & Ullah (2017) menyebutkan bahwa kebijakan yang proaktif, seperti pemberian insentif pajak, pengurangan regulasi usaha kecil, serta dukungan teknis,

dapat memotivasi pemuda untuk memulai bisnis. Selain itu, pemerintah dapat menginisiasi program-program yang dirancang khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh wirausaha pemuda, seperti akses ke pasar, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Strategi pengembangan wirausaha pemuda juga tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital. Di era digital ini, teknologi memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Penelitian oleh Chatterjee & Kar (2020) menunjukkan bahwa pemuda yang mengadopsi teknologi digital, seperti platform e-commerce dan media sosial, lebih mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar mereka. Teknologi memungkinkan wirausaha pemuda untuk beroperasi dengan biaya lebih rendah dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan pelatihan digital dan menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan wirausaha pemuda.

Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah juga memainkan peran penting dalam pengembangan wirausaha pemuda. Banyak perusahaan swasta yang kini terlibat dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk mendukung wirausaha pemuda. Studi oleh Porter & Kramer (2011) menekankan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mendukung. Perusahaan swasta dapat menyediakan modal, pelatihan, dan akses pasar bagi wirausaha pemuda, sementara pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha di berbagai sektor.

Strategi pengembangan wirausaha pemuda juga harus mempertimbangkan pendekatan berbasis komunitas. Menurut penelitian

oleh Aldrich & Zimmer (1986), dukungan komunitas sangat penting dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kuat. Dalam konteks daerah, komunitas bisnis lokal dapat memberikan dukungan moral, pengetahuan, dan peluang kerjasama bagi wirausaha pemuda. Pengembangan jaringan komunitas bisnis yang solid dapat meningkatkan kepercayaan diri pemuda dalam menghadapi tantangan bisnis serta memberikan mereka peluang untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

Secara keseluruhan, pengembangan wirausaha pemuda membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup pendidikan, pembiayaan, pelatihan, dukungan kebijakan, teknologi, kolaborasi, dan keterlibatan komunitas. Strategi-strategi ini saling melengkapi dan berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan wirausaha pemuda di Indonesia.

Pengembangan wirausaha dan wirausaha pemuda di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian bangsa. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan wirausaha dan wirausaha pemuda di Indonesia:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Kemampuan Wirausaha.
2. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung
3. Meningkatkan Aksesibilitas Sumber Daya
4. Meningkatkan Kemampuan Teknologi
5. Meningkatkan Jaringan dan Kolaborasi
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
7. Meningkatkan Kemampuan Inovasi
8. Meningkatkan Kemampuan Adaptasi
9. Meningkatkan Kemampuan Berkelanjutan
10. Meningkatkan Kemampuan Pemasaran

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan wirausaha dan wirausaha pemuda di Indonesia, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian bangsa. Berikut beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong pengembangan wirausaha pemuda di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2.1 Strategi Pengembangan Wirausaha Pemuda di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Strategi yang dilaksanakan	Sumber
1	Kabupaten Kudus	Pelatihan Ketrampilan: Beri Bekal Pemuda Wirausaha Mandiri & Ciptakan Lapangan Kerja	(Sofiyanto, 2017)
2	Kabupaten Tegal	Akselerasi pertumbuhan pengusaha pemula, dengan menciptakan wirausahawan muda	(Yandip, 2021)
3	Kabupaten Brebes	Merangkul para pelajar untuk menjadi entrepreneur alias pebisnis muda, melalui komunitas Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus) Jawa Tengah.	(Yandip, 2023)
4	Kabupaten Tegal	Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda	(Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, 2024)
5	Kota Magelang	Pelatihan Wirausaha Pemula Melalui Program Kemitraan	(Bank Jateng, 2024)
6	Kota Semarang	Kewirausahaan Pemuda (Wira Muda)	(Kemenpora, 2023)
7	Kota Semarang	Pelatihan kewirausahaan bagi kaum milenial atau generasi muda. Pelatihan bertajuk "Youtuber Bagi Generasi Muda"	(Semarangkota, 2022)
8	Kabupaten Blora	Pelatihan Digital Marketing	(Blorakab, 2021)
9	Kabupaten Banyumas	Pelatihan Usaha Kreatif	(Dinas Tenaga Kerja, 2021)
10	Kabupaten Wonosobo	Pelatihan Dasar-Dasar Kewirausahaan Digital	(Kemkominfo, 2022)

Tabel di atas memuat berbagai strategi pengembangan wirausaha pemuda di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan potensi kewirausahaan di

kalangan generasi muda. Di Kabupaten Kudus, misalnya, diadakan pelatihan keterampilan guna membekali pemuda menjadi wirausaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Kabupaten Tegal mempercepat pertumbuhan pengusaha pemula melalui program akselerasi dan penumbuhan wirausahawan muda. Di Brebes, pelajar dilibatkan dalam komunitas Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus) untuk membangun jiwa kewirausahaan. Sementara di Kota Semarang, ada pelatihan kewirausahaan bagi generasi milenial, termasuk pelatihan menjadi Youtuber. Kota Magelang fokus pada pelatihan wirausaha pemula melalui kemitraan, dan Kabupaten Blora menekankan pelatihan digital marketing. Kabupaten Banyumas dan Wonosobo memberikan pelatihan usaha kreatif serta dasar-dasar kewirausahaan digital. Semua strategi ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda dan menciptakan lapangan kerja baru.

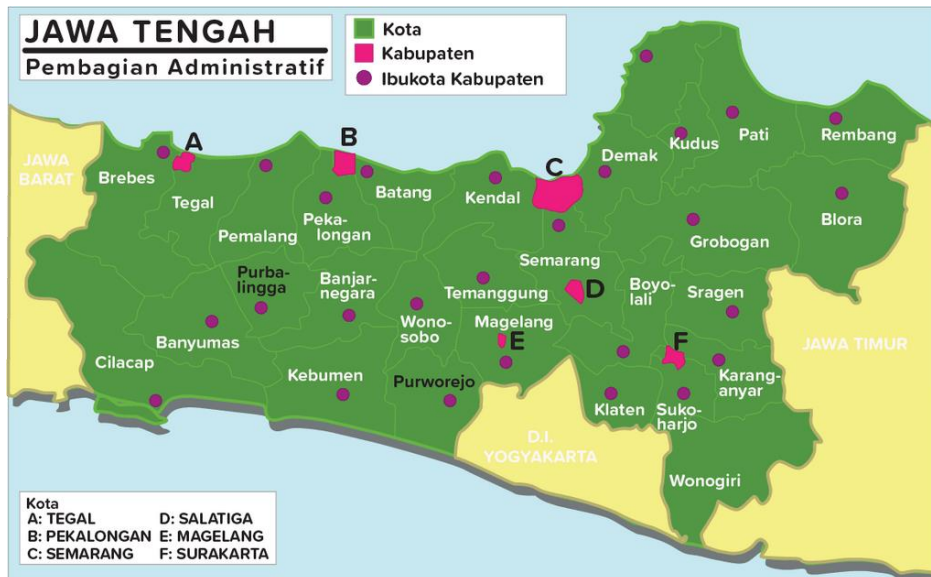
2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.2.1 Aspek Geografi dan Demografi Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah atau sering dikenal Jateng adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia beserta Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara.

Pengertian Jawa Tengah secara geografis maupun budaya juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih satu teritorial dengan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah bagian tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat, sebagian kecil

masyarakat Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Selain itu ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia sebagai pendatang yang tersebar di seluruh provinsi ini. Sejak tahun 2008, provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan kembar dengan provinsi Fujian di Tiongkok.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: (BPS Jawa Tengah, 2024)

Secara geografis letak wilayah provinsi Jawa Tengah berada pada $5^{\circ} 40' - 8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 30' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur. Iklim Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis. Pada Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah dataran tinggi dan juga pegunungan yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan juga pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringannya 0-2% sebesar 38% lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31% lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

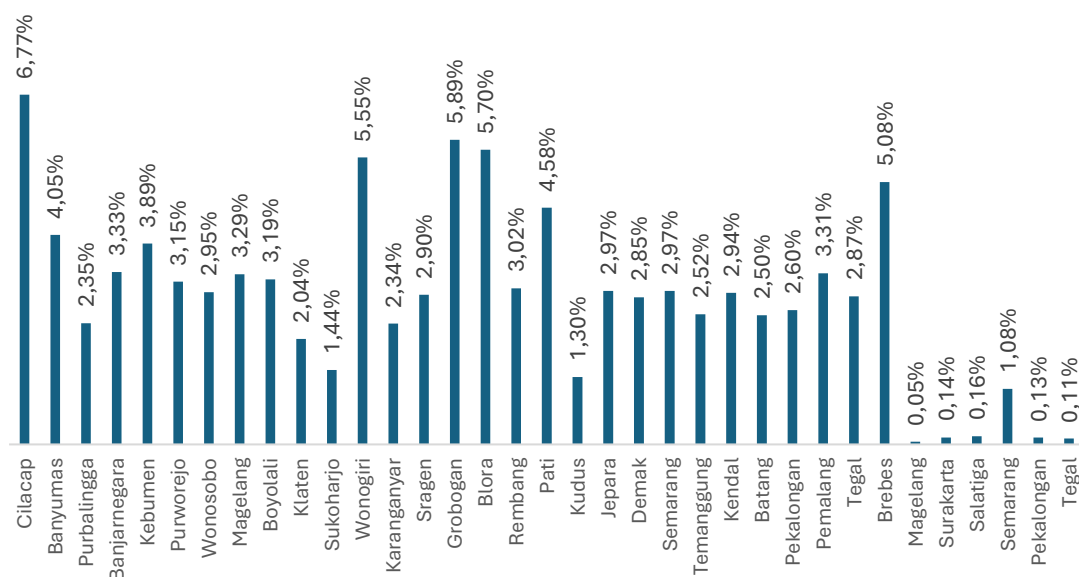
Secara administratif, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas pulau Jawa. Secara administratif letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta sementara di sebelah selatannya; Provinsi Jawa Barat disebelah Barat; Provinsi Jawa Timur disebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang mana meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Berikut luas masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2.2 Luas Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Presentase Luas	Luas Wilayah (km2)
Kabupaten:				
1	Cilacap	Cilacap	6,77%	2.323,93
2	Banyumas	Purwokerto	4,05%	1.391,15
3	Purbalingga	Purbalingga	2,35%	805,76
4	Banjarnegara	Banjarnegara	3,33%	1.144,90
5	Kebumen	Kebumen	3,89%	1.334,10
6	Purworejo	Purworejo	3,15%	1.081,96
7	Wonosobo	Wonosobo	2,95%	1.011,62
8	Magelang	Mungkid	3,29%	1.129,98
9	Boyolali	Boyolali	3,19%	1.096,59
10	Klaten	Klaten	2,04%	701,50
11	Sukoharjo	Sukoharjo	1,44%	493,53
12	Wonogiri	Wonogiri	5,55%	1.905,74
13	Karanganyar	Karangayar	2,34%	803,05
14	Sragen	Sragen	2,90%	994,57
15	Grobogan	Purwodadi	5,89%	2.023,85
16	Blora	Blora	5,70%	1.957,29
17	Rembang	Rembang	3,02%	1.037,54
18	Pati	Pati	4,58%	1.572,90
19	Kudus	Kudus	1,30%	447,55
20	Jepara	Jepara	2,97%	1.020,25
21	Demak	Demak	2,85%	977,77
22	Semarang	Ungaran	2,97%	1.019,27
23	Temanggung	Temanggung	2,52%	864,83
24	Kendal	Kendal	2,94%	1.008,12
25	Batang	Batang	2,50%	857,27
26	Pekalongan	Kajen	2,60%	892,91
27	Pemalang	Pemalang	3,31%	1.137,41

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Presentase Luas	Luas Wilayah (km2)
28	Tegal	Slawi	2,87%	983,90
29	Brebes	Brebes	5,08%	1.742,81
Kota:				
30	Magelang	Magelang	0,05%	18,56
31	Surakarta	Surakarta	0,14%	46,72
32	Salatiga	Salatiga	0,16%	54,98
33	Semarang	Semarang	1,08%	370,00
34	Pekalongan	Pekalongan	0,13%	46,20
35	Tegal	Tegal	0,11%	39,08
Total			100,00%	34.337,59

Sumber: (BPS Jawa Tengah, 2024)



Gambar 2.2 Persentase Luas Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah

Sumber: (BPS Jawa Tengah, 2024)

Tabel di atas menunjukkan luas wilayah setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah beserta persentase luasnya terhadap total luas wilayah provinsi. Provinsi Jawa Tengah memiliki total luas wilayah sebesar 34.337,59 km². Kabupaten Cilacap merupakan wilayah terluas di provinsi ini, mencakup 6,77% dari total wilayah dengan luas 2.323,93 km², sedangkan Kabupaten Grobogan dan Blora masing-masing menyumbang 5,89% dan 5,70% dengan luas 2.023,85 km² dan 1.957,29 km². Sebaliknya, wilayah dengan luas terkecil adalah Kota Magelang, yang hanya mencakup 0,05% dari total wilayah, atau sekitar 18,56 km².

Dari segi persentase, sebagian besar kabupaten memiliki luas yang bervariasi antara 2% hingga 5%, sementara wilayah kota seperti Surakarta, Pekalongan, dan Tegal memiliki luas yang relatif kecil, masing-masing kurang dari 0,2% dari total luas provinsi. Kabupaten Wonogiri memiliki wilayah yang signifikan dengan luas 1.905,74 km² (5,55%), menjadikannya salah satu kabupaten terluas setelah Cilacap. Data ini memberikan gambaran penting mengenai distribusi geografis setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berperan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur.

Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan 1.113,00 jiwa/km². Tiga kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (1.978.759 jiwa), Kabupaten Cilacap (1.944.857 jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1.776.918 jiwa).

Sementara tiga kota dengan jumlah penduduk paling banyak ialah Kota Semarang (1.653.524 jiwa), Kota Surakarta (522.364 jiwa) dan Kota Pekalongan (307.150 jiwa). Jumlah tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai Provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Biasanya penduduk terkonsentrasi hanya di perkotaan dengan adanya dukungan dari aspek kegiatan ekonomi yang disertai oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kawasan pemukiman yang sangat padat terletak di daerah Semarang Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan juga Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,45% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%). Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini.

Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya, mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya. Pengaruh kental bisa kita rasakan saat berada di kota Semarang serta kota Lasem yang berada di ujung timur laut Jawa Tengah, bahkan Lasem dijuluki Le Petit Chinois atau Kota Tiongkok Kecil.

Di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat juga terdapat banyak orang beretnis Sunda. Mereka mendiami wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, Kabupaten Cilacap bagian barat dan utara serta sebagian kecil wilayah Kabupaten Banyumas tepatnya di Dusun Cijurig, Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir. Jawa Tengah bagian barat seperti Cilacap, Brebes bagian barat dan sebagian Banyumas dahulu dalam sejarahnya termasuk kedalam wilayah Kerajaan Sunda Galuh menyebabkan banyak unsur budaya Sunda yang tersisa didalamnya, termasuk dalam penamaan daerah, bahasa, dan adat istiadat lainnya.

Di pedalaman Blora (perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin yang terisolasi, masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di

mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Selain itu, di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2023 sebanyak 37 540 962 jiwa yang terdiri atas 18.866.423 jiwa penduduk laki-laki dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,00 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,0. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 200 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.258 jiwa/ km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 490 jiwa/Km². Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 21,07 juta. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 71,72 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 5,13 persen.

Tabel 2.3 Penduduk di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten dan Kota	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
		2024	2024	2024	2024	2024
1	Kabupaten Cilacap	2027,38	1,03	5,35	872	101,4
2	Kabupaten Banyumas	1847,1	1,06	4,87	1328	101,2
3	Kabupaten Purbalingga	1037,64	1,05	2,74	1288	102,4
4	Kabupaten Banjarnegara	1057,56	1,04	2,79	924	102,9
5	Kabupaten Kebumen	1414,75	1,27	3,73	1060	102,8
6	Kabupaten Purworejo	795,03	0,89	2,1	735	100,3
7	Kabupaten Wonosobo	920,51	1,25	2,43	910	103,7

No	Kabupaten dan Kota	Penduduk	Laju	Persentase	Kepadatan	Rasio Jenis
		(ribu)	Pertumbuhan	Penduduk	Penduduk	Kelamin
		2024	2024	2024	2024	2024
8	Kabupaten Magelang	1341,45	0,85	3,54	1187	101,1
9	Kabupaten Boyolali	1099,85	0,94	2,9	1003	100,9
10	Kabupaten Klaten	1292,8	0,7	3,41	1851	99
11	Kabupaten Sukoharjo	941,65	1,01	2,49	1908	99,9
12	Kabupaten Wonogiri	1054,15	0,31	2,78	553	99,5
13	Kabupaten Karanganyar	961,91	0,75	2,54	1198	99,4
14	Kabupaten Sragen	1004,76	0,77	2,65	1010	99,2
15	Kabupaten Grobogan	1506,37	0,96	3,98	744	100,6
16	Kabupaten Blora	907,99	0,75	2,4	464	100
17	Kabupaten Rembang	665,24	0,83	1,76	641	101
18	Kabupaten Pati	1370,82	0,89	3,62	872	99,7
19	Kabupaten Kudus	883,32	1,06	2,33	1974	99,5
20	Kabupaten Jepara	1232,88	1,02	3,25	1208	101,2
21	Kabupaten Demak	1252,97	1,07	3,31	1281	101,8
22	Kabupaten Semarang	1089,77	0,9	2,88	1069	99,1
23	Kabupaten Temanggung	814,88	0,84	2,15	942	100,8
24	Kabupaten Kendal	1064,81	1,2	2,81	1056	101,6
25	Kabupaten Batang	838,19	1,2	2,21	978	101,5
26	Kabupaten Pekalongan	1019,01	1,21	2,69	1141	103,3
27	Kabupaten Pemalang	1541,69	1,25	4,07	1355	102,6
28	Kabupaten Tegal	1674,8	1,28	4,42	1702	102,7
29	Kabupaten Brebes	2065,5	1,16	5,45	1185	102,8
30	Kota Magelang	122,43	0,24	0,32	6596	98,5
31	Kota Surakarta	528,04	0,26	1,39	11302	96,9
32	Kota Salatiga	201,27	1,24	0,53	3661	97,5
33	Kota Semarang	1708,83	0,89	4,51	4618	97,9
34	Kota Pekalongan	321,1	1,19	0,85	6950	102
35	Kota Tegal	285,84	1,15	0,75	7316	101,6
Provinsi Jawa Tengah		37892,28	0,99	100	1104	101

Sumber: (BPS Jawa Tengah, 2024)

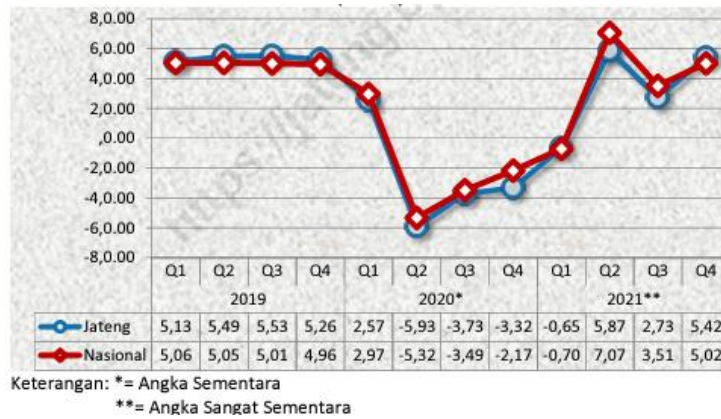
Tabel di atas menggambarkan kondisi demografi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin di setiap kabupaten dan kota. Provinsi Jawa Tengah memiliki total penduduk sebanyak 37,89 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk

0,99% dan kepadatan rata-rata 1.104 jiwa per km². Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes, yang memiliki 2,07 juta penduduk dan laju pertumbuhan 1,16%, sementara Kota Surakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 11.302 jiwa per km².

Di sisi lain, rasio jenis kelamin di seluruh provinsi berada pada angka 101, menunjukkan bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat 101 laki-laki. Kabupaten Tegal memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu 1,28%, sementara Kota Magelang memiliki laju pertumbuhan terendah dengan 0,24%. Data ini mencerminkan variasi dalam distribusi populasi, kepadatan, dan rasio jenis kelamin di berbagai wilayah di Jawa Tengah, memberikan gambaran penting bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan di provinsi tersebut.

2.2.2 Kondisi Perekonomian, Sosial, dan Budaya Provinsi Jawa Tengah

Gambaran Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), total Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan di Jawa Tengah pada triwulan IV-2021 mencapai Rp. 364,35 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 tercatat sebesar Rp. 253,27 triliun. Capaian PDB nasional ADHB pada triwulan ini tercatat sebesar Rp. 4.498,04 triliun, sedangkan menurut ADHK tercatat mencapai Rp. 2.845,9 triliun. Ekonomi Indonesia secara kumulatif tahun 2021 tumbuh 3,69 persen melampaui perekonomian Jawa Tengah yang tumbuh 3,32 persen. Sedangkan secara tahunan pada triwulan ini meningkat menjadi sebesar 5,02 persen, di bawah perekonomian Jawa Tengah yang tumbuh 5,42 persen.



Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: (BPS Jawa Tengah, 2024)

Berdasarkan Gambar 2.2, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selalu melampaui nasional secara yoy. Namun ketika memasuki tahun 2020, terjadi kondisi yang berbeda. Laju pertumbuhan nasional setiap triwulannya melampaui Jawa Tengah secara yoy. Seperti telah diketahui, tahun 2020 adalah tahun dimana Covid-19 mulai merebak dan memengaruhi kondisi perekonomian dan sosial dunia. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dengan tahun sebelumnya, pandemi Covid-19 memberi dampak lebih besar terhadap ekonomi Jawa Tengah daripada nasional. Perlahan namun pasti, ekonomi Jawa Tengah mulai berbenah dan pada triwulan IV-2021 ekonomi Jawa Tengah tumbuh melampaui nasional secara yoy.

Beberapa indikator dan fenomena yang sejalan dengan peningkatan roda perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV-2021 antara lain bahwa berdasarkan data Samsat Jawa Tengah, jumlah kendaraan baru triwulan IV-2021 meningkat 50,35 persen dibanding triwulan IV-2020. Di sisi lain Berita Resmi Statistik terkait perkembangan ekspor impor Jawa Tengah mencatat bahwa nilai Ekspor dan impor luar negeri pada triwulan IV-2021 (dalam juta US \$) tercatat tumbuh masing-masing sebesar 40,35 dan 58,64 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

Peningkatan jumlah penumpang angkutan udara maupun angkutan laut yang berangkat dari maupun yang datang ke Jawa Tengah juga menjadi indikator lain terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Berita Resmi Statistik terkait perkembangan statistik transportasi Jawa Tengah mencatat bahwa jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dari Jawa Tengah mencapai 213.699 orang pada periode Oktober-Desember 2021, meningkat 10,69 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang memberangkatkan 193.059 penumpang domestik (nihil penumpang internasional).

Pada periode waktu yang sama, jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke Jawa Tengah mencapai 217.543 orang, meningkat 4,39 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, sebanyak 208.398 penumpang domestik dan 50 penumpang internasional. Sejalan dengan fenomena peningkatan jumlah penumpang angkutan udara, jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat dari Jawa Tengah hanya tumbuh 19,86 persen dari 44.688 orang selama periode Oktober-Desember 2020 menjadi 5.561 orang selama Oktober-Desember 2021. Pada periode waktu yang sama, jumlah penumpang angkutan laut yang datang ke Jawa Tengah mencapai 52.773 orang, meningkat 23,38 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, sebanyak 42.772 orang.

Berdasarkan keterbandingan antar triwulan (q to q), ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 tumbuh positif sebesar 1,06 persen, melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,55 persen. Ekonomi Jawa Tengah secara triwulanan tumbuh lebih rendah dari nasional dengan laju pertumbuhan sebesar 0,67 persen. Jika melihat keterbandingan antar triwulan, kondisi perekonomian nasional yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2021 lebih baik daripada Jawa Tengah. Kontributor terbesar dalam perlambatan ekonomi

Jawa Tengah pada triwulan IV-2021 secara triwulanan adalah kontraksi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -14,45 persen, dengan sumbangan sebesar -1,94 persen. Kategori pertanian merupakan salah satu kontributor utama dalam menopang ekonomi Jawa Tengah, sehingga kontraksi yang sedemikian dalam pada kategori tersebut berdampak melemahkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV-2021.

Jawa Tengah dihuni oleh berbagai kelompok etnis, meskipun mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Selain itu, terdapat juga masyarakat dari suku-suku lainnya seperti Sunda, Batak, dan Tionghoa. Mayoritas penduduk Jawa Tengah menganut agama Islam, namun terdapat pula komunitas Hindu, Budha, dan Kristen. Ada pula harmoni antaragama yang dapat dilihat dalam praktik keagamaan dan festival bersama. Jawa Tengah memiliki pola pemukiman yang mencakup desa-desa tradisional dan perkotaan yang berkembang pesat. Meskipun modernisasi telah mempengaruhi kehidupan perkotaan, nilai-nilai tradisional masih sangat dihargai di masyarakat pedesaan.

Seni wayang kulit Jawa Tengah, seperti wayang kulit Purwa, merupakan warisan budaya yang sangat penting. Pertunjukan wayang kulit seringkali disertai dengan cerita-cerita epik yang berasal dari mitologi Hindu. Batik merupakan seni tradisional yang sangat dihargai di Jawa Tengah. Motif batik khas daerah ini sering mencerminkan filosofi dan nilai-nilai budaya Jawa. Tarian tradisional Jawa Tengah, seperti tari gambyong, tari bedhaya, dan tari dolalak, merupakan bentuk seni yang turun-temurun diwarisi dari generasi ke generasi. Upacara keagamaan seperti Grebeg Maulud, Grebeg Syawal, dan Nyadran sering diadakan di berbagai tempat di Jawa Tengah, memperlihatkan keberagaman ritual keagamaan. Jawa Tengah memiliki beragam kuliner tradisional yang khas, seperti soto, gudeg, nasi liwet, dan makanan khas lainnya.

Lingkungan sosial dan budaya di Jawa Tengah juga tercermin dalam berbagai tradisi keagamaan dan perayaan lokal. Upacara adat, seperti slametan dan kenduri, sering diadakan untuk merayakan berbagai momen penting dalam kehidupan masyarakat, seperti kelahiran, pernikahan, atau kematian. Selain itu, nilai gotong royong dan kebersamaan sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Seni ukir dan seni pahat Jawa Tengah juga mencerminkan keahlian dan keindahan lokal.

Banyak rumah tradisional dan bangunan bersejarah di daerah ini dihiasi dengan ukiran yang rumit dan pahatan yang memperlihatkan kekayaan seni rupa tradisional. Dalam konteks pendidikan, Jawa Tengah memiliki universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual masyarakat. Pendidikan formal diimbangi dengan sistem pendidikan informal, di mana kearifan lokal dan tradisi turun-temurun diajarkan dari generasi ke generasi.

Adat istiadat dan norma-norma sosial juga memberikan fondasi untuk kehidupan sehari-hari di Jawa Tengah. Pemberian gelar kehormatan dan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang dihormati adalah contoh nyata dari pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam memelihara dan melestarikan budaya setempat. Perkembangan ekonomi dan industri juga turut memengaruhi pola hidup masyarakat. Sebagian besar wilayah di Jawa Tengah telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan sektor pertanian, industri, dan pariwisata memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian, tetap terlihat usaha untuk melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi.

Dalam sektor pariwisata, Jawa Tengah menawarkan berbagai destinasi menarik. Candi Borobudur, sebuah situs warisan dunia UNESCO, adalah salah satu daya tarik utama. Selain itu, Candi Prambanan yang

megah dan kawasan Dieng dengan suasana pegunungan yang sejuk juga menjadi destinasi populer. Keberagaman budaya dan keindahan alam di Jawa Tengah tercermin dalam berbagai festival dan acara tahunan. Festival Kebudayaan Solo, Festival Batik Pekalongan, dan Festival Dieng Culture Festival adalah beberapa contoh kegiatan yang menampilkan kekayaan seni dan budaya setempat.

Penting untuk diingat bahwa transformasi sosial dan budaya terus berlangsung di Jawa Tengah. Globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial ekonomi dapat mempengaruhi cara hidup masyarakat. Namun, kebanggaan terhadap warisan budaya dan upaya untuk mempertahankannya masih menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Jawa Tengah. Masyarakatnya terus beradaptasi dengan perubahan sambil memelihara akar budayanya, menciptakan kesinambungan yang harmonis antara masa lalu dan masa kini.

2.2.3 Infrastruktur dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Pemerintah provinsi terus berupaya memperbaiki akses transportasi, baik jalan raya, jembatan, pelabuhan, maupun bandara, guna memperlancar mobilitas barang dan manusia. Beberapa proyek besar yang sudah berjalan di antaranya pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintasi kota-kota besar seperti Semarang, Solo, Pekalongan, Tegal, dan Brebes serta perluasan Bandara Ahmad Yani di Semarang. Infrastruktur ini mendorong percepatan ekonomi lokal dan memudahkan konektivitas antarwilayah.

Di sektor transportasi publik, Jawa Tengah juga memperlihatkan kemajuan yang pesat. Salah satu proyek penting adalah revitalisasi jalur kereta api dan pembangunan LRT (Light Rail Transit) di kawasan perkotaan. Ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar seperti

Semarang dan Solo, serta meningkatkan efisiensi transportasi. Selain itu, pembangunan terminal bus modern dan pengembangan pelabuhan juga diupayakan untuk mendukung distribusi logistik dan pariwisata di daerah-daerah strategis.

Pengembangan infrastruktur juga mencakup sektor energi dan telekomunikasi. Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu provinsi yang aktif dalam proyek pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT), seperti PLTU Batang yang berfokus pada pemanfaatan energi ramah lingkungan. Selain itu, upaya memperluas jaringan internet di daerah pedesaan telah dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital dan mendukung program "smart village" yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan infrastruktur ini juga berdampak positif pada sektor pariwisata dan investasi di Jawa Tengah. Daerah seperti Karimunjawa, Borobudur, dan Dieng Plateau menjadi lebih mudah diakses sehingga menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, peningkatan infrastruktur memicu ketertarikan investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, properti, dan pariwisata.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemerataan pembangunan. Beberapa daerah terpencil di Jawa Tengah masih menghadapi kendala akses infrastruktur, seperti kondisi jalan yang kurang memadai dan keterbatasan akses ke air bersih serta listrik. Pemerintah provinsi terus berusaha melakukan pembangunan yang lebih inklusif, salah satunya melalui program pembangunan desa yang bertujuan memperbaiki infrastruktur dasar di daerah-daerah tertinggal.

Ke depan, Jawa Tengah berpotensi menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, didukung oleh pengembangan infrastruktur yang strategis. Dengan rencana pembangunan jangka panjang yang terintegrasi, provinsi ini diharapkan

mampu mencapai visi sebagai pusat ekonomi yang berkelanjutan, dengan infrastruktur modern yang menunjang berbagai sektor penting seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi.

2.2.4 Potensi Pariwisata dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam. Keindahan alam dan kekayaan budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Mulai dari pegunungan, pantai, hingga candi-candi peninggalan sejarah, Jawa Tengah menawarkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Kota-kota seperti Semarang, Surakarta (Solo), dan Magelang, menjadi pusat-pusat wisata yang banyak dikunjungi karena berbagai daya tarik yang dimiliki.

Salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah adalah Candi Borobudur, sebuah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang. Candi ini merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO dan menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah dan kebudayaan Jawa kuno. Selain itu, Candi Prambanan yang berada di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah juga menjadi tujuan favorit, terutama bagi mereka yang tertarik dengan sejarah Hindu di Indonesia.

Selain candi-candi, Jawa Tengah juga memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Gunung Merbabu dan Gunung Merapi menjadi tujuan pendakian yang populer bagi para pencinta alam. Gunung-gunung ini menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan jalur pendakian yang menantang. Selain itu, Dataran Tinggi Dieng di Wonosobo juga menawarkan keindahan alam berupa kawah, telaga, dan pemandangan pegunungan yang sering diselimuti kabut, memberikan suasana magis yang menarik bagi wisatawan.

Pantai-pantai di pesisir utara dan selatan Jawa Tengah juga menyimpan potensi besar dalam pariwisata. Di sebelah utara, terdapat Pantai Kartini dan Pantai Bandengan di Jepara yang terkenal dengan keindahan sunset dan pasir putihnya. Di pesisir selatan, Pantai Menganti di Kebumen menawarkan pemandangan laut biru dengan tebing-tebing tinggi yang dramatis, sering kali disandingkan dengan keindahan pantai-pantai di Bali.

Selain potensi pariwisata, sumber daya alam Jawa Tengah juga sangat melimpah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil produk-produk pertanian seperti padi, jagung, dan tebu yang menjadi komoditas utama masyarakat setempat. Selain itu, sektor perkebunan seperti kopi, teh, dan tembakau juga berperan penting dalam perekonomian daerah, dengan daerah-daerah seperti Temanggung, Wonosobo, dan Karanganyar yang menjadi sentra produksi perkebunan tersebut.

Tidak hanya pertanian, sumber daya mineral juga menjadi salah satu potensi yang dimiliki Jawa Tengah. Kabupaten Blora dan Grobogan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi dan gas alam. Potensi ini memberikan kontribusi besar dalam perekonomian daerah, meskipun pengelolaan sumber daya alam ini perlu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan.

Kekayaan budaya dan tradisi lokal juga menjadi bagian dari potensi pariwisata di Jawa Tengah. Seni dan budaya seperti batik Solo, kerajinan kayu Jepara, hingga seni tari dan gamelan tradisional Jawa merupakan bagian penting dari identitas provinsi ini. Event-event budaya seperti Sekaten dan Grebeg di Surakarta menjadi daya tarik tersendiri yang mengundang wisatawan untuk menikmati kearifan lokal.

Dengan segala potensi yang dimilikinya, Jawa Tengah memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan sektor pariwisata dan sumber daya alamnya. Namun, upaya pengembangan ini harus diiringi dengan

perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan budaya, agar keindahan alam dan kearifan lokal yang ada tetap terjaga untuk dinikmati oleh generasi mendatang.

Tabel 2.4 Tabel Jumlah Wisatawan 2021-2023 di Jawa Tengah

Keterangan	Jumlah		
	2021	2022	2023
Wisatawan Domestik	56.485.087	46.465.437	21.332.409
Wisatawan Mancanegara	464.719	144.691	1.793
Total	56.949.806	46.610.128	21.334.202

Sumber: (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2023)

Tabel di atas menunjukkan tren jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan domestik mencapai 56,49 juta orang, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 46,47 juta orang pada 2022, dan semakin menurun drastis hingga hanya 21,33 juta orang pada 2023. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara di Jawa Tengah juga mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2021, tercatat 464.719 wisatawan asing, yang kemudian berkurang menjadi 144.691 pada 2022, dan hanya 1.793 wisatawan pada 2023. Total kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mengikuti tren penurunan dari 56,95 juta pada 2021 menjadi 46,61 juta pada 2022, dan akhirnya hanya 21,33 juta pada 2023. Penurunan tajam ini menunjukkan dampak signifikan yang mungkin dipicu oleh pembatasan akibat pandemi COVID-19, perubahan kebijakan perjalanan, atau tantangan ekonomi yang memengaruhi sektor pariwisata di Jawa Tengah.

2.2.5 Kondisi Pemuda di Provinsi Jawa Tengah

Pemuda merupakan bagian dari penduduk umur produktif. Selain itu, pemuda menjadi salah satu sumber potensial dalam proses pembangunan bangsa yang memegang peranan penting sebagai sumber kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Sejarah membuktikan bahwa

pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Pada generasi sekarang, pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional. Hal tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikutnya diketahui jumlah pemuda di wilayah Provinsi Jawa Tengah bersumber pada data BPS Pemuda Tahun 2022 publish 23 November 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Jumlah Pemuda Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Cilacap	238,355	221,086	459,441
Banyumas	210,896	198,568	409,464
Purbalingga	122,615	114,989	237,604
Banjarnegara	121,452	113,954	235,406
Kebumen	171,896	158,089	329,985
Purworejo	91,858	84,406	176,264
Wonosobo	107,155	101,865	209,020
Magelang	154,005	146,012	300,017
Boyolali	125,618	118,705	244,323
Klaten	142,417	134,136	276,553
Sukoharjo	106,818	101,790	208,608
Wonogiri	117,181	108,433	225,614
Karanganyar	105,513	101,014	206,527
Sragen	112,103	105,908	218,011
Grobogan	177,776	168,176	345,952
Blora	102,851	96,678	199,529
Rembang	74,918	70,398	145,316
Pati	103,802	135,026	238,828
Kudus	101,616	97,199	198,815
Jepara	143,520	140,044	283,564
Demak	151,292	141,927	293,219
Semarang	123,041	121,566	244,607
Temanggung	90,337	85,945	176,282

Kabupaten / Kota	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Kendal	120,488	114,384	234,872
Batang	96,257	92,116	188,373
Pekalongan	124,762	117,339	242,101
Pemalang	197,891	183,778	381,669
Tegal	200,571	188,906	389,477
Brebes	250,105	234,231	484,336
Kota Magelang	15,313	13,909	29,222
Kota Surakarta	61,504	59,635	121,139
Kota Salatiga	22,839	22,046	44,885
Kota Semarang	196,975	189,063	386,038
Kota Pekalongan	38,969	36,254	75,223
Kota Tegal	35,517	33,785	69,302
Total	4,358,226	4,151,360	8,509,586

Sumber: (BPS Jawa Tengah, 2024)

Tabel di atas menunjukkan jumlah pemuda di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, dibedakan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) di setiap kabupaten dan kota. Total jumlah pemuda di provinsi ini mencapai 8.509.586 orang, yang terdiri dari 4.358.226 laki-laki dan 4.151.360 perempuan. Kabupaten Brebes memiliki jumlah pemuda terbesar, yaitu 484.336 orang, diikuti oleh Kabupaten Cilacap dengan 459.441 pemuda. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah pemuda terkecil adalah Kota Magelang, dengan total 29.222 orang.

Beberapa kabupaten/kota dengan populasi pemuda yang besar antara lain Tegal (389.477), Kota Semarang (386.038), dan Pemalang (381.669). Sebagian besar kabupaten/kota memiliki jumlah pemuda yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun ada sedikit variasi. Secara keseluruhan, data ini penting untuk memahami potensi demografis pemuda di berbagai wilayah Jawa Tengah, yang dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan terkait pendidikan, lapangan kerja, dan pembangunan sosial di provinsi tersebut.

Bab ini juga memberikan gambaran beberapa aspek penting demografis pemuda di Jawa Tengah, yaitu: jumlah, distribusi, dan struktur/komposisi pemuda yang disajikan menurut wilayah perkotaan

dan perdesaan. Pembahasan profil pemuda diuraikan lebih rinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, status perkawinan, dan hubungan dengan kepala rumah tangga.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2022

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
<16	4.344	23,70%	3940	23,57%	8.284	23,64%
16-30	4.196	22,89%	3776	22,59%	7.972	22,75%
>30	9.788	53,40%	9002	53,85%	18.790	53,62%
Total	18.328	100,00%	16718	100,00%	35.046	100,00%

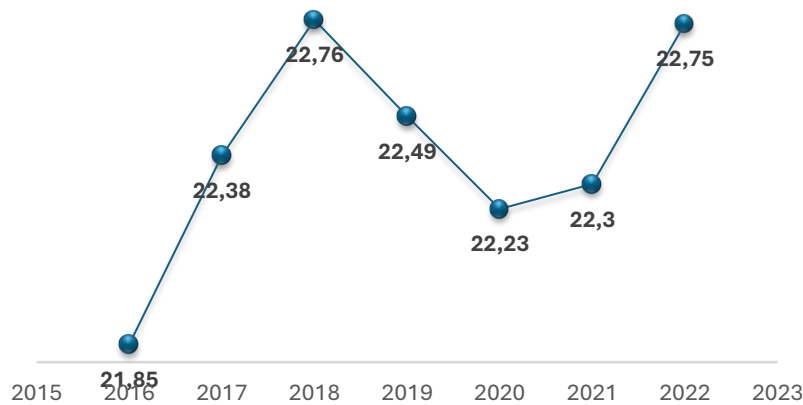
Sumber: (BPS Pemuda Jawa Tengah, 2023)

Tabel di atas menggambarkan distribusi penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 berdasarkan kelompok umur dan tipe daerah (perkotaan dan perdesaan). Jumlah pemuda di Jawa Tengah tahun 2022 sebanyak 7,97 juta jiwa atau 22,75 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah. Persentase pemuda di perkotaan lebih tinggi dibanding persentase pemuda di perdesaan, yaitu 22,89 persen berbanding 22,59 persen. Lebih tingginya persentase pemuda di perkotaan dimungkinkan karena adanya kecenderungan migrasi penduduk usia produktif ke perkotaan. Total penduduk dibagi menjadi tiga kelompok umur: di bawah 16 tahun, 16-30 tahun, dan di atas 30 tahun.

1. Kelompok usia di bawah 16 tahun mencakup 23,64% dari total populasi, dengan 4,344 juta tinggal di perkotaan dan 3,94 juta di perdesaan.
2. Kelompok usia 16-30 tahun menyumbang 22,75% dari total penduduk, dengan 4,196 juta di perkotaan dan 3,776 juta di perdesaan.
3. Kelompok usia di atas 30 tahun adalah yang terbesar, mencakup 53,62% dari total penduduk, dengan 9,788 juta di perkotaan dan 9,002 juta di perdesaan.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk di daerah perkotaan mencapai 18,328 juta (52,3% dari total), sementara di perdesaan mencapai 16,718 juta (47,7% dari total). Data ini menunjukkan distribusi yang seimbang antara perkotaan dan perdesaan, dengan penduduk usia di atas 30 tahun mendominasi di kedua wilayah.

Berikutnya adalah grafik presentase pemuda di Provinsi Jawa Tengah. Grafik tersebut akan memberikan Gambaran bagaimana pertumbuhan pemuda di Provinsi Jawa Tengah. Secara detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4 Presentase Pemuda Jawa Tengah

Sumber: (BPS Pemuda Jawa Tengah, 2023)

Persentase pemuda Jawa Tengah tahun 2016-2022 berkisar antara 21 sampai dengan 22 persen. Tren persentase pemuda Jawa Tengah mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir, yaitu dari 22,23 persen pada tahun 2020 menjadi 22,75 persen pada tahun 2022. Penurunan persentase pemuda terjadi di tahun 2019 dan 2020. Perubahan persentase pemuda di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu migrasi atau pola mobilitas yang dilakukan oleh pemuda serta pengaruh tingkat kelahiran pada suatu wilayah.

Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Tipe Daerah, 2020-2022

Tipe Daerah	Tahun		
	2020	2021	2022
Perkotaan	108,46	107	104,28
Perdesaan	99,97	98,08	105,41
Perkotaan + Perdesaan	104,33	102,77	104,82

Sumber: (BPS Pemuda Jawa Tengah, 2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rasio jenis kelamin pemuda menurut tipe daerah tahun 2020-2022. Rasio jenis kelamin pemuda tahun 2022 adalah 104,82 yang berarti bahwa di antara 100 pemuda perempuan terdapat 104 pemuda laki-laki. Rasio jenis kelamin pemuda di perdesaan sedikit lebih besar dibanding perkotaan, yaitu 105,41 persen berbanding 104,28 persen. Artinya di perkotaan maupun perdesaan pemuda laki-laki lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan. Sepanjang tahun 2020-2021, rasio jenis kelamin pemuda di perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Sementara itu, pada tahun 2022 rasio jenis kelamin di perkotaan sedikit lebih rendah dibanding rasio jenis kelamin di perdesaan. Pada kelompok umur pemuda, perbedaan rasio jenis kelamin antar wilayah dipengaruhi oleh kecenderungan migrasi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dimungkinkan pada tahun 2022 pemuda perempuan di perdesaan yang melakukan migrasi ke wilayah perkotaan cenderung lebih banyak.

Tabel 2.8 Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2022

Kelompok Umur	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
16-18	20,72%	20,33%	20,53%
19-24	38,87%	39,22%	39,04%
25-30	40,41%	40,45%	40,43%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: (BPS Pemuda Jawa Tengah, 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan persentase pemuda terbesar dilihat dari kelompok umur adalah pada kelompok umur 25-30 tahun, yaitu 40,43 persen. Sementara persentase pemuda yang masih pada

usia sekolah menengah yaitu umur 16-18 tahun sebesar 20,53 persen. Pola distribusi pemuda menurut kelompok umur hampir sama antara perkotaan dan perdesaan.

Kondisi pemuda di Provinsi Jawa Tengah saat ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, dengan berbagai tantangan serta peluang yang harus dihadapi. Pemuda sebagai tulang punggung masa depan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi perkembangan global dan kemajuan teknologi. Di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada berbagai isu, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga keterlibatan dalam aktivitas sosial dan politik.

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kondisi pemuda di Jawa Tengah adalah akses terhadap pendidikan. Sebagian besar pemuda di provinsi ini memiliki akses yang cukup baik terhadap pendidikan dasar hingga menengah, dengan banyaknya sekolah-sekolah negeri dan swasta yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, tantangan muncul pada tingkat pendidikan tinggi, terutama bagi pemuda di daerah pedesaan atau terpencil yang terkadang kesulitan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena faktor ekonomi atau akses yang terbatas.

Di sisi lain, tingginya angka pengangguran pemuda menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Jawa Tengah. Meskipun provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor industri dan pertanian, banyak pemuda yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pemuda dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Selain itu, perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar bagi kehidupan pemuda di Jawa Tengah. Banyak dari mereka yang

sudah sangat familiar dengan teknologi informasi dan media sosial, yang membuka peluang bagi mereka untuk berkembang di dunia kreatif, bisnis daring, dan startup digital. Generasi muda di daerah ini mulai banyak yang berinovasi dalam menciptakan usaha-usaha berbasis teknologi, memanfaatkan potensi pasar lokal maupun global. Namun, belum semua pemuda bisa memanfaatkan peluang ini, terutama mereka yang berada di daerah terpencil yang minim akses internet.

Kondisi sosial pemuda di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh budaya lokal yang kuat, di mana tradisi dan nilai-nilai Jawa masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal ini bisa menjadi modal bagi pemuda untuk mempertahankan identitas budaya dalam era globalisasi. Namun, di sisi lain, tantangan modernitas dan pengaruh budaya luar terkadang membuat mereka berada di persimpangan antara menjaga tradisi dan mengikuti tren global. Pemuda di Jawa Tengah harus beradaptasi dengan baik agar mampu menghadapi tantangan ini tanpa kehilangan jati diri.

BAB - 3

METODOLOGI

3.1 METODOLOGI

Metodologi penyusunan Dokumen Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menggunakan dasar yang dapat diterima oleh regulasi yang berlaku dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Metodologi yang digunakan pada Pekerjaan Dokumen Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 didasarkan pada permasalahan, tujuan, dan hasil regulasi yang harus implementatif kepada pihak- pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas maka metode penelitian yang akan diterapkan dalam kajian ini didesain untuk menjawab pertanyaan dalam tujuan penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan perpaduan metode penelitian literatur *review* dan *eksploratory research*. Metode literatur *review* adalah proses yang melibatkan penelaahan, pengumpulan, dan sintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik tertentu. Secara definisi Pengertian literatur *review* adalah proses penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Tujuan utama dari literatur *review* adalah untuk memahami dan menggambarkan keadaan penelitian terkini di bidang yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Berikutnya adalah *eksploratory research* yaitu sebuah metode yang dikembangkan untuk menyelidiki suatu fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya atau belum dijelaskan dengan baik sebelumnya dengan cara yang

tepat. Tujuan utamanya adalah untuk memberi kita perincian tentang di mana sejumlah kecil informasi dapat ditemukan. Dengan metode ini, sebuah penelitian akan mendapatkan gambaran dan dapat digunakan sebagai alat untuk membimbing peneliti lebih cepat kepada masalah yang mungkin akan dibahas dan terjadi di masa depan. Tujuannya adalah untuk menemukan mengapa dan untuk apa suatu objek studi. Penelitian *eksplanatory* bertanggung jawab untuk menemukan mengapa suatu peristiwa melalui pembentukan hubungan sebab-akibat. Pekerjaan Dokumen Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah juga dipadukan dengan teori agar secara akademis produk kajian yang dihasilkan tidak keluar dari ketentuan dan teori yang sudah ada sebelumnya.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Pekerjaan Dokumen Naskah Inventarisasi Pemuda Wirausaha Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menggunakan data sekunder dan data primer untuk dijadikan referensi agar kedalaman materi dapat tersaji dengan lebih baik. Data sekunder yang dimaksud adalah melalui dokumen - dokumen yang berhubungan dengan aktivitas wirausaha pemuda yang ada pada lingkup Provinsi Jawa Tengah. Dokumen sekunder yang dimaksud secara definisi adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau dokumen. Dokumen sekunder utama yang dimaksud dapat dilihat sebagai berikut ini:

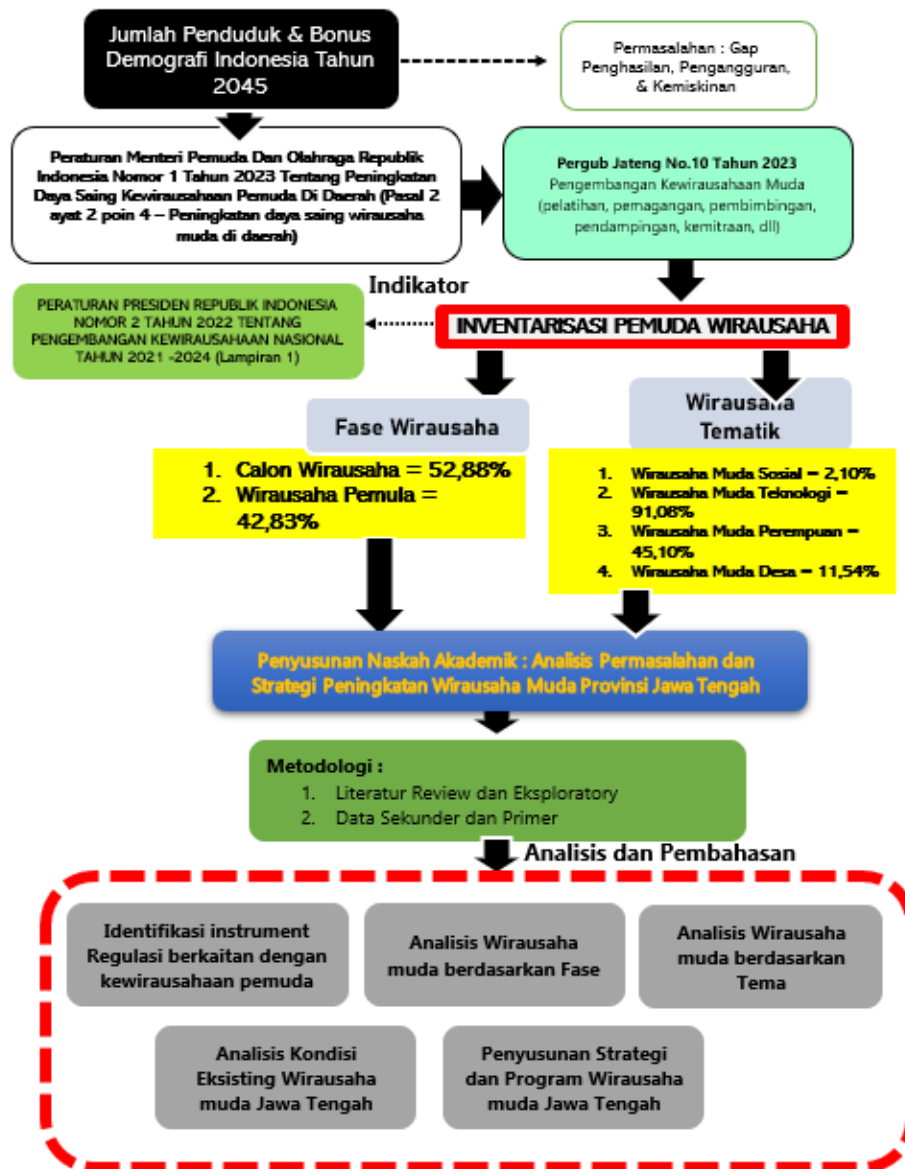
1. Data sekunder berupa jumlah pemuda wirausaha berdasarkan hasil inventarisasi per Kab/ Kota di lingkup Provinsi Jawa Tengah
2. Data sekunder berupa jumlah pemuda wirausaha berdasarkan hasil inventarisasi per Kab/ Kota di lingkup Provinsi Jawa Tengah (fase wirausaha dan tema wirausaha)
3. Data sekunder berupa jumlah pemuda wirausaha di lingkup Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kondisi eksisting (permasalahan, apa yang sudah dilakukan, dsb.)

Berikutnya adalah data primer yang juga akan digunakan dalam kajian ini. Data Primer adalah pengumpulan data atau serangkaian bentuk informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya melalui observasi, tes fisik, dan wawancara kepada pihak yang terkait. Data tersebut secara ilmiah akan valid dan dapat digunakan untuk mendukung data sekunder yang dapat menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan.

Kelebihan lain dari Data primer adalah memiliki ciri khasnya yang otentik, dan objektif karena dikumpulkan dari populasi yang tepat dengan harapan dapat memperoleh tujuan yang tepat pula untuk menangani masalah yang ada dalam kajian atau penelitian. Data Primer pada kajian ini dapat diperoleh dari kunjungan lapangan melalui proses dialog intensif dengan pengambil keputusan dan *stakeholders* terkait dengan pengelola kepentingan dan instansi yang juga dapat dilakukan melalui FGD kepada beberapa *stakeholders* terpilih terkait dengan informasi yang perlu pendalaman. Berikutnya *In-depth interview* akan dilakukan untuk beberapa responden yang diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih jauh di luar FGD.

3.3 SKEMA RANCANGAN KAJIAN

Kajian yang baik akan bisa memberikan gambaran dan metode yang jelas terkait dengan permasalahan yang terjadi. Berikutnya harus dapat tergambarkan bagaimana skema rancangan kajian yang dapat memberikan gambaran hubungan antar bab, sekaligus hasil yang diharapkan dari kajian ini. Skema rancangan kajian dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.1 Skema Rancangan Naskah Akademik Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah

BAB - 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 ANALISIS REGULASI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA PROVINSI JAWA TENGAH

Pembahasan awal mencakup analisis mendalam terkait regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda. Analisis ini dilakukan secara berurutan dengan mengkaji regulasi dari tingkat hierarki tertinggi hingga ke aturan yang lebih spesifik, yang berlaku langsung dalam lingkup aktivitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Melalui pendekatan ini, kajian dilakukan untuk memahami landasan hukum yang mendasari pengembangan kewirausahaan pemuda, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan. Tabel di bawah ini merangkum regulasi-regulasi yang dianalisis berdasarkan relevansi dan tingkatannya, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerangka kebijakan yang mempengaruhi kebijakan kewirausahaan pemuda di Jawa Tengah:

Tabel 4.1 Regulasi yang Berkaitan dengan Kewirausahaan Pemuda

UU No. 40 Tahun 2009	PP No. 41 Tahun 2011	Perpres No. 2 Tahun 2022	Permenpora No.1 tahun 2023	Pergub Jateng No. 10 Tahun 2023
<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengan populasi pemuda di Indonesia, sebagai berikut:</p> <p>a. Definisi Pemuda: Undang-undang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia berusia antara 16 dan 30 tahun. Rentang usia ini diakui sebagai periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan individu</p> <p>b. Pengembangan Pemuda: Undang-undang menekankan bahwa pengembangan pemuda mencakup potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan aspirasi pemuda.</p> <p>c. Prinsip Kemitraan: Undang-undang menetapkan bahwa kemitraan dalam pengembangan pemuda harus mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.</p>	<p>Peraturan tentang kewirausahaan pemuda di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011, menekankan pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kepemimpinan di kalangan pemuda. Berikut adalah poin-poin kunci yang berasal dari konteks yang disediakan:</p> <p>a. Definisi dan Tujuan: Pengembangan kewirausahaan pemuda bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian individu muda dalam bisnis.</p> <p>b. Tanggung Jawab Pemerintah: Peraturan menetapkan tanggung jawab memfasilitasi kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepemimpinan kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah (kabupaten/kota).</p> <p>c. Perencanaan Strategis: Baik pemerintah nasional maupun daerah diwajibkan untuk menetapkan rencana</p>	<p>Peraturan tentang kewirausahaan pemuda berfokus pada pemberdayaan individu muda berusia 16 hingga 30 tahun untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, sebagai berikut:</p> <p>a. Definisi Pengusaha Muda: Pengusaha muda didefinisikan sebagai individu berusia antara 16 dan 30 yang memiliki dan mengelola setidaknya satu bisnis terdaftar.</p> <p>b. Tujuan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda: Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, dan semangat perintis di kalangan pemuda dalam kewirausahaan.</p> <p>c. Implementasi dan Pengawasan: Peraturan mengamanatkan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengembangan</p>	<p>Peraturan tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>a. Definisi Wirausaha Pemuda: Pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan Kewirausahaan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>b. Pembentukan Ruang Fisik: Kewirausahaan pemuda membutuhkan ruang fisik khusus seperti ruang pameran dan area kreatif. Ruang-ruang ini dapat berupa fisik atau virtual, dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pengusaha muda.</p> <p>c. Pengelolaan Infrastruktur: Pengelolaan infrastruktur fisik ini harus diawasi oleh unit implementasi teknis lokal atau melalui kemitraan</p>	<p>Peraturan tentang kewirausahaan pemuda menguraikan berbagai aspek yang bertujuan untuk membina dan mendukung wirausahawan muda, sebagai berikut:</p> <p>a. Pelatihan untuk Pengusaha Muda: Pelatihan dasar diamanatkan bagi pemuda yang tertarik untuk memulai bisnis. Pelatihan ini berfokus pada membangun motivasi kewirausahaan, merumuskan ide bisnis, dan mengembangkan rencana bisnis.</p> <p>b. Peran Organisasi Pemuda: Organisasi pemuda dan kelompok masyarakat bertugas memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda. Ini termasuk memberikan pelatihan, magang, pendampingan, dukungan, kemitraan, promosi, dan akses ke modal.</p> <p>c. Pemantauan dan Evaluasi: Departemen pemerintah terkait bertanggung jawab untuk memantau dan</p>

UU No. 40 Tahun 2009	PP No. 41 Tahun 2011	Perpres No. 2 Tahun 2022	Permenpora No.1 tahun 2023	Pergub Jateng No. 10 Tahun 2023
<p>d. Kolaborasi dengan Organisasi: Ini mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan organisasi pemuda dan masyarakat dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk kegiatan pemuda.</p> <p>e. Prinsip Partisipatif dan Kolektif: Undang-undang menjamin bahwa pemuda dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, nasional, dan negara.</p> <p>f. Pengembangan Program: Undang-undang mempromosikan pengembangan program yang meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemuda di berbagai bidang, termasuk kewirausahaan dan kepemimpinan.</p>	<p>strategis yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.</p> <p>d. Sumber Pendanaan: Pendanaan untuk kegiatan kewirausahaan pemuda dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran pemerintah, organisasi pemuda, kontribusi masyarakat, dan sumber sah lainnya sesuai peraturan hukum.</p> <p>e. Partisipasi Publik: Pemerintah didorong untuk mencari masukan dari organisasi pemuda dan masyarakat ketika mengembangkan rencana program kewirausahaan dan kepemimpinan.</p> <p>f. Pemantauan dan Pemeliharaan: Peraturan ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya dan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan yang didedikasikan untuk pembangunan pemuda.</p> <p>g. Fokus pada Pengembangan Keterampilan: Tujuan menyeluruh dari peraturan ini adalah untuk menumbuhkan</p>	<p>kewirausahaan harus memantau dan mengevaluasi program mereka.</p> <p>d. Pendekatan Kolaborasi: Pengembangan kewirausahaan pemuda dirancang agar kolaboratif dan disinkronkan. Ini berarti bahwa berbagai aktor publik dan swasta harus berbagi peran dan tanggung jawab untuk memastikan komunikasi yang efektif dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pengembangan kewirausahaan.</p> <p>e. Inisiatif Pendidikan: Peraturan tersebut mencakup ketentuan pendidikan kewirausahaan dasar yang ditujukan untuk masyarakat umum yang bercita-cita menjadi pengusaha.</p> <p>f. Rencana Aksi dan Penyesuaian: Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional memiliki wewenang untuk menambah atau menyesuaikan rencana tindakan untuk</p>	<p>dengan organisasi lain. Ini memastikan bahwa fasilitas mematuhi peraturan hukum dan secara efektif melayani pemuda</p> <p>d. Dukungan Teknologi: Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kuat sangat penting. Ini termasuk mengembangkan jaringan komunikasi yang komprehensif dan memastikan akses internet, yang sangat penting untuk transformasi digital kewirausahaan pemuda.</p> <p>e. Fasilitas Pemerintah: Pemerintah memainkan peran penting dalam memfasilitasi sistem perizinan bisnis elektronik. Dukungan ini membantu merampingkan proses bagi pengusaha muda, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memulai dan mengelola bisnis mereka.</p> <p>f. Inisiatif Pengembangan Kapasitas: Pengembangan kapasitas sangat penting untuk memelihara wirausahawan muda baru.</p>	<p>mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda. Mereka harus melaporkan temuan mereka kepada Gubernur, yang akan menginformasikan upaya fasilitasi di masa depan.</p> <p>d. Kegiatan Promosi: Promosi sangat penting untuk memperkenalkan wirausahawan muda dan produk mereka ke pasar. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar untuk bisnis yang dipimpin kaum muda.</p> <p>e. Kemitraan: Kemitraan didorong antara pengusaha muda dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk bisnis, bank, lembaga pendidikan, dan organisasi profesional. Pemerintah mendukung kemitraan ini melalui pengembangan sumber daya manusia, bantuan manajemen, transfer teknologi, perluasan akses pasar, dan penyediaan</p>

UU No. 40 Tahun 2009	PP No. 41 Tahun 2011	Perpres No. 2 Tahun 2022	Permenpora No.1 tahun 2023	Pergub Jateng No. 10 Tahun 2023
	generasi pengusaha muda yang tidak hanya terampil tetapi juga mampu memimpin dan berinovasi dalam komunitas mereka, sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional	pengembangan kewirausahaan, memastikan bahwa strategi tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan mereka.	g. Kolaborasi dan Kemitraan: Implementasi infrastruktur kewirausahaan pemuda yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis.	peluang informasi dan pendanaan f. Akses ke Modal: Peraturan tersebut menekankan pentingnya memfasilitasi akses modal bagi pengusaha muda. Ini termasuk memberikan bantuan keuangan dan peluang investasi untuk mendukung usaha bisnis mereka.
Kebijakan yang berkaitan dengan kewirausahaan pemuda diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menekankan berbagai prinsip dan kerangka kerja untuk mendukung individu muda dalam upaya kewirausahaan mereka, sebagai berikut: a. Pengembangan Pemuda: Undang-undang menyoroti pentingnya pengembangan pemuda, yang mencakup membina keterampilan kewirausahaan di kalangan anak muda. Memiliki fungsi sebagai dasar untuk memberdayakan kaum muda untuk terlibat dalam kewirausahaan dan	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 menguraikan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk mendukung kewirausahaan pemuda di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengusaha muda dan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka, sebagai berikut: a. Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya: Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan di tingkat nasional dan lokal. Ini termasuk fasilitas yang mendukung inisiatif kewirausahaan pemuda,	Berdasarkan peraturan terdapat beberapa kebijakan utama yang bertujuan untuk mendorong kewirausahaan pemuda, sebagai berikut: a. Ekosistem Pendukung: Peraturan tersebut menekankan penciptaan ekosistem yang mendukung untuk kewirausahaan pemuda. Ini termasuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti kementerian, pemerintah daerah, dan aktor sektor swasta untuk memastikan pendekatan komprehensif untuk pengembangan kewirausahaan b. Pemantauan dan Evaluasi: Ada fokus yang kuat pada	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di daerah; dilaksanakan melalui: 1) Pelatihan; 2) Pemagangan; 3) Pembimbingan; 4) Pendampingan; 5) Kemitraan; 6) Promosi; dan/atau 7) Bantuan akses permodalan. b. Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah; dilakukan dengan: 1) Penguatan kerangka kebijakan; 2) Pemberian akses pendanaan, insentif, dan kemudahan;	Ruang lingkup pengaturan pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi : a. Pengembangan kewirausahaan pemuda; melalui: 1) Pelatihan; 2) Pemagangan; 3) Pembimbingan; 4) Pendampingan; 5) Kemitraan; 6) Promosi; dan/atau 7) Bantuan akses permodalan b. Peran organisasi kepemudaan dan/ atau masyarakat dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda c. Pendanaan; melalui: 1) APBN;

UU No. 40 Tahun 2009	PP No. 41 Tahun 2011	Perpres No. 2 Tahun 2022	Permenpora No.1 tahun 2023	Pergub Jateng No. 10 Tahun 2023
<p>berkontribusi positif bagi perekonomian.</p> <p>b. Kolaborasi dengan Organisasi: Undang-undang mendorong kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi pemuda. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan program yang menyediakan sumber daya, pelatihan, dan bimbingan bagi pengusaha muda, membantu mereka mengatasi tantangan memulai dan mengelola bisnis.</p> <p>c. Infrastruktur dan Fasilitas: Undang-undang mengamanatkan bahwa pemerintah dan otoritas lokal bekerja dengan organisasi pemuda untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan. Ini termasuk membangun inkubator bisnis, ruang kerja bersama, dan akses ke teknologi, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang</p>	<p>memastikan bahwa kaum muda memiliki akses ke alat yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam upaya bisnis mereka.</p> <p>b. Penyelarasan Perencanaan Strategis: Pemerintah daerah, seperti gubernur dan walikota, diharuskan menyelaraskan rencana strategis mereka dengan tujuan pembangunan nasional. Ini memastikan bahwa inisiatif lokal untuk kewirausahaan pemuda selaras dengan tujuan nasional yang lebih luas, mempromosikan koherensi dalam implementasi kebijakan</p> <p>c. Partisipasi Publik dalam Perencana: Peraturan ini mendorong keterlibatan organisasi pemuda dan masyarakat dalam proses perencanaan pengembangan kewirausahaan.</p> <p>d. Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya: Peraturan ini memungkinkan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan</p>	<p>pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kewirausahaan.</p> <p>Kementerian dan pemerintah daerah diharuskan melaporkan kegiatan dan hasil mereka kepada Menteri, memastikan akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.</p> <p>c. Inisiatif Pendidikan: Peraturan tersebut mempromosikan program pendidikan yang bertujuan meningkatkan keterampilan kewirausahaan di kalangan pemuda. Ini termasuk pendidikan kewirausahaan dasar yang mendorong individu muda untuk mengembangkan ide bisnis yang berorientasi pasar dan menumbuhkan pola pikir kewirausahaan.</p> <p>d. Pendanaan dan Sumber Daya: Peraturan tersebut menguraikan bahwa pendanaan untuk inisiatif kewirausahaan pemuda akan dialokasikan dari</p>	<p>3) Internalisasi budaya Kewirausahaan;</p> <p>4) Penyediaan infrastruktur;</p> <p>5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan</p> <p>6) Pengembangan sistem pemasaran.</p> <p>c. Tim kolaboratif, yang terdiri atas unsur:</p> <p>1) Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang Kepemudaan;</p> <p>2) Organisasi perangkat daerah terkait lainnya; dan</p> <p>3) Masyarakat</p> <p>d. Pendanaan; melalui:</p> <p>1) Anggaran pendapatan dan belanja negara;</p> <p>2) Anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>3) Program tanggung jawab sosial dan lingkungan</p> <p>4) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;</p> <p>5) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;</p>	<p>2) APBD;</p> <p>3) APBD Kabupaten/Kota; dan</p> <p>4) Sumber dana lain yang sah dan mengikat.</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi, melalui:</p> <p>1) Penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan;</p> <p>2) Rapat koordinasi/konsultasi;</p> <p>3) Peninjauan kegiatan; dan/atau</p> <p>4) Penerimaan masukan dari masyarakat.</p>

UU No. 40 Tahun 2009	PP No. 41 Tahun 2011	Perpres No. 2 Tahun 2022	Permenpora No.1 tahun 2023	Pergub Jateng No. 10 Tahun 2023
<p>mendukung kewirausahaan pemuda</p> <p>d. Pendekatan Partisipatif: Undang-undang mempromosikan pendekatan partisipatif, memastikan bahwa pemuda secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan perkembangan mereka.</p> <p>e. Program Pengembangan Kapasitas: Undang-undang mendukung pengembangan program yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kaum muda di berbagai bidang, termasuk kewirausahaan.</p> <p>f. Dorongan Nasionalisme dan Semangat Komunitas: Dengan menumbuhkan rasa nasionalisme dan komunitas di kalangan pemuda, undang-undang mendorong pengusaha muda untuk berkontribusi pada ekonomi lokal dan pembangunan sosial.</p>	<p>kewirausahaan pemuda. Ini termasuk anggaran pemerintah, kontribusi dari organisasi pemuda, dan dukungan masyarakat, yang membantu memastikan bahwa ada sumber daya keuangan yang memadai yang tersedia untuk inisiatif ini.</p> <p>e. Fokus pada Pengembangan Keterampilan: Kebijakan menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan kewirausahaan di kalangan pemuda, termasuk menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk mengambil risiko, yang merupakan sifat penting untuk kewirausahaan yang sukses.</p> <p>f. Pemantauan dan Evaluasi: Peraturan tersebut menyoroti perlunya pemantauan dan pemeliharaan sumber daya dan infrastruktur yang efektif yang didedikasikan untuk kewirausahaan pemuda. Hal ini untuk</p>	<p>anggaran nasional. Dukungan keuangan ini sangat penting untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempromosikan kewirausahaan pemuda di tingkat lokal.</p> <p>e. Kolaborasi dan Koordinasi: Peraturan ini menyerukan sinergi dan koordinasi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif ini dimaksudkan untuk memperkuat dampak program kewirausahaan dan memastikan bahwa mereka selaras dengan tujuan pembangunan nasional.</p> <p>f. Rencana Aksi dan Fleksibilitas: Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional diberdayakan untuk membuat dan menyesuaikan rencana aksi seperlunya. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi strategi untuk memenuhi kebutuhan pengusaha muda yang terus</p>	<p>6) Lembaga swadaya Masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau</p> <p>7) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>	

UU No. 40 Tahun 2009	PP No. 41 Tahun 2011	Perpres No. 2 Tahun 2022	Permenpora No.1 tahun 2023	Pergub Jateng No. 10 Tahun 2023
	memastikan bahwa program tetap berkelanjutan dan terus memenuhi kebutuhan pengusaha muda dari waktu ke waktu.	berkembang dan lanskap ekonomi.		
Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana melalui: a. Pelatihan; b. Pemagangan; c. Pembimbingan; d. Pendampingan; e. Kemitraan; f. Promosi; dan/atau g. Bantuan akses permodalan	Pemerintah mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam: a. RPJPN; b. RPJMN; dan c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional.	Setiap Wirausaha perlu memiliki jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fasenya yang terdiri dari Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan. Jiwa Kewirausahaan adalah sumber tenaga dan semangat untuk melakukan Kewirausahaan, yang terdiri dari aspek motif, sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan.		
	Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui: a. Pelatihan; b. Pemagangan; c. Pembimbingan; d. Pendampingan; e. Kemitraan; f. Promosi; dan/atau g. Bantuan akses permodalan.	Dalam perkembangannya, Kewirausahaan memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan motif, karakteristik pelaku, skala usaha, serta bidang usahanya. Keberagaman ini memunculkan kategori Wirausaha secara tematik antara lain: Wirausaha Sosial, Wirausaha Teknologi, Wirausaha Pemuda, Wirausaha Perempuan, dan Wirausaha Desa.		
	Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan			

UU No. 40 Tahun 2009	PP No. 41 Tahun 2011	Perpres No. 2 Tahun 2022	Permenpora No.1 tahun 2023	Pergub Jateng No. 10 Tahun 2023
	<p>kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; b. Pengembangan kurikulum; c. Pendirian inkubator kewirausahaan pemuda; d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan e. Penyediaan pendanaan. 			
	<p>Fasilitasi kemitraan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sumber daya manusia; b. Pemberian bantuan manajemen; c. Pengalihan teknologi dan dukungan teknis; d. Perluasan akses pasar; e. Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, asional, regional, maupun internasional; dan/atau f. Penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan. 			

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa aturan terkait kewirausahaan pemuda di Indonesia mendukung pengembangan pemuda berusia 16-30 tahun dalam aspek keterampilan, kewirausahaan, dan partisipasi sosial. UU No. 40 Tahun 2009 menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan organisasi pemuda untuk menyediakan pelatihan, infrastruktur, dan akses modal. PP No. 41 Tahun 2011 memperkuat hal ini dengan menugaskan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan fasilitas serta mendukung pemuda dalam program strategis yang dievaluasi secara berkala. Perpres No. 2 Tahun 2022 dan Permenpora No. 1 Tahun 2023 berfokus pada pelatihan, magang, dan kemitraan untuk memperkuat kapasitas serta akses permodalan. Pergub Jateng No. 10 Tahun 2023 menambah dukungan lokal dengan ruang kreatif dan akses teknologi bagi wirausahawan muda, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peraturan terkait kewirausahaan pemuda di Indonesia menitikberatkan pada pengembangan kapasitas dan keterampilan pemuda untuk mendorong semangat kewirausahaan dan kepemimpinan. Upaya ini melibatkan kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, organisasi pemuda, dan sektor swasta, serta penyediaan infrastruktur dan fasilitas seperti ruang kreatif dan teknologi yang mendukung kegiatan pemuda. Selain itu, akses terhadap modal dan pendanaan difasilitasi untuk membantu pemuda dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Program-program ini diawasi melalui pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas. Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan membangun ekosistem kewirausahaan yang mendukung pemuda sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

4.2 ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF WIRAUSAHA MUDA DI SELURUH WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap wirausaha muda di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah penting dilakukan untuk memahami kondisi yang dihadapi dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan

pemuda. Provinsi Jawa Tengah, dengan populasi pemuda yang besar dan beragam, memiliki potensi wirausaha yang signifikan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk mendukung wirausaha muda di seluruh Jawa Tengah. Dalam analisis ini dibedakan menjadi dua (2) kategori sebagai berikut:

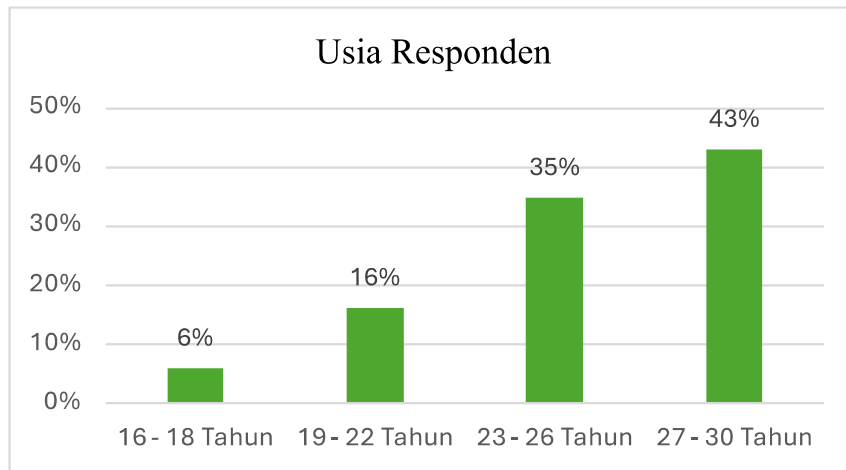
4.2.1 Berdasarkan Fase Wirausaha

Analisis wirausaha muda di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dapat dibagi menjadi tiga fase: calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan. Fase calon wirausaha mencakup individu yang berminat untuk memulai usaha namun belum memiliki keterampilan atau pengalaman yang memadai. Di sini, pendidikan kewirausahaan dan akses informasi sangat penting untuk mendorong mereka memulai usaha. Fase wirausaha pemula melibatkan mereka yang sudah memulai usaha, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis, memerlukan dukungan dalam bentuk pendampingan, akses modal, dan jaringan bisnis. Pada fase wirausaha mapan, individu telah mencapai stabilitas dan pertumbuhan, berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal, dengan hasil analisis sebagai berikut:

1. Calon Wirausaha

Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan memiliki ide bisnis dan/atau memiliki rintisan usaha. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Usia Responden

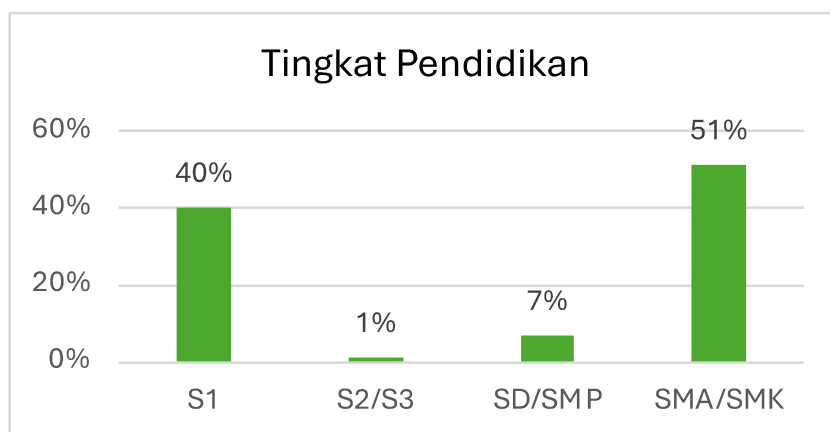


Gambar 4.1 Usia Responden Calon Wirausaha Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa dari fase wirausaha terendah yaitu calon wirausaha mayoritas memiliki umur 23 – 30 tahun dengan prosesntase nilai lebih dari 78%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara usia memang calon wirausaha tersebut masuk dalam periode akhir dari ukuran wirausaha muda. Secara data memang agak ironis, karena umur yang sudah mendekati batas akhir dari ukuran seorang pemuda masih mencapai level calon wirausaha.

b. Tingkat Pendidikan

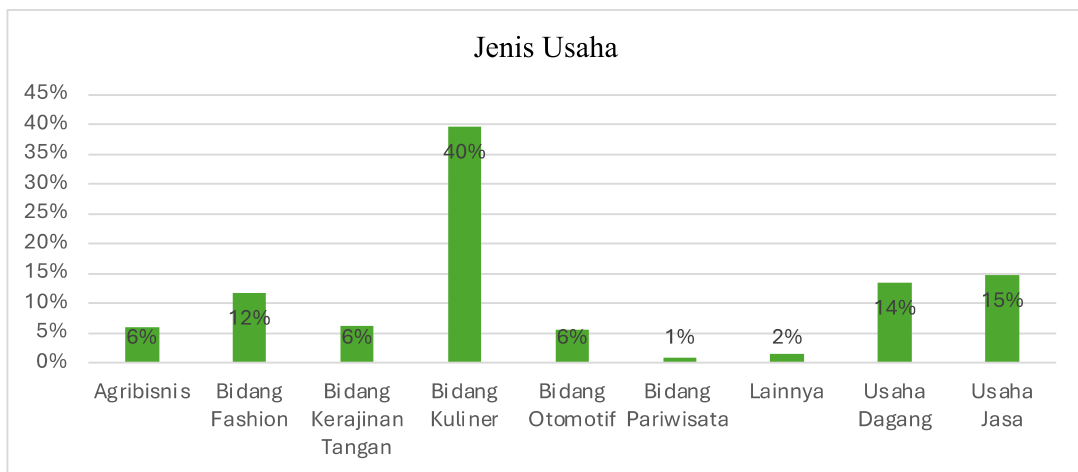


Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan Calon Wirausaha Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa dari fase wirausaha terendah yaitu calon wirausaha memiliki tingkat pendidikan S1 (Sarjana) sebanyak 40% dan SMA/SMK sebanyak 51%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi belum menjamin keberhasilan dalam melakukan aktivitas wirausaha. Akan tetapi dari data yang didapat, dapat diketahui sebenarnya mereka yang masih menjadi calon wirausaha seharusnya dapat lebih mudah ketika diberikan pelatihan, karena hampir lebih 90% memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni.

c. Jenis Usaha



Gambar 4.3 Jenis Usaha Calon Wirausaha Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

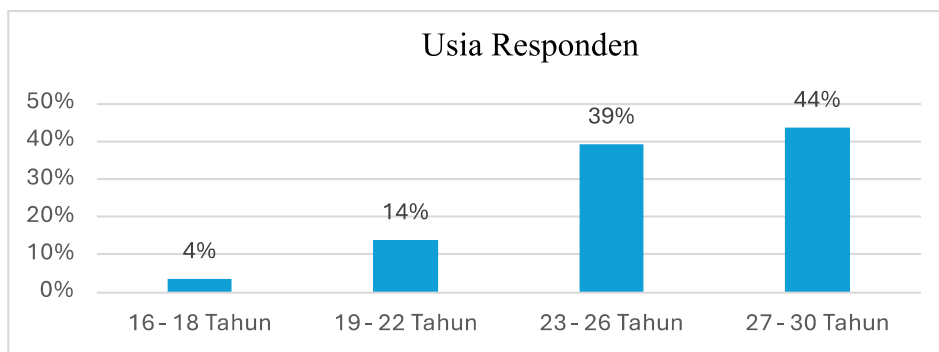
Berikutnya apabila ditanyakan kepada mereka para wirausaha yang masih mencapai level calon wirausaha, salah satu usaha yang menjadi keinginan untuk menjadi aktivitas usaha kedepan sebanyak 40% menyatakan pada bidang kuliner. Berikutnya yang kedua dengan nilai 15% adalah pada bidang usaha jasa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa memang jenis usaha kuliner menjadi salah satu usaha yang cukup menjanjikan ketika ingin digunakan sebagai jenis usaha seorang wirausaha muda. Perkembangan teknologi, informasi yang mudah didapatkan melalui internet terkait dengan bisnis kuliner menjadi

“triger” utama, bagaimana calon wirausaha muda ini mendapatkan ide untuk membuat sebuah usaha.

2. Wirausaha Pemula

Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Usia Responden

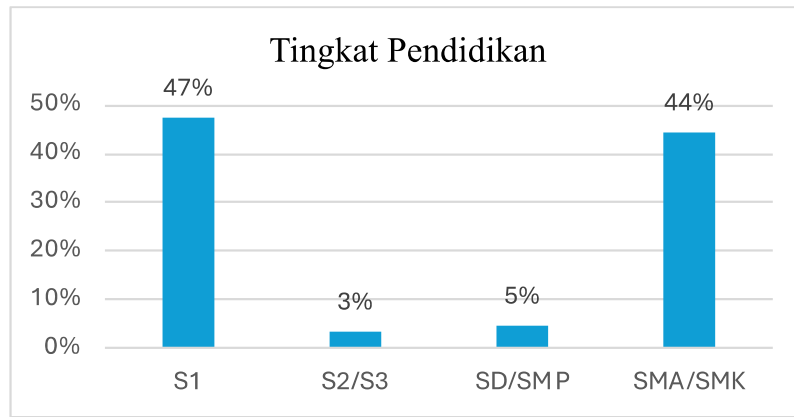


Gambar 4.4 Usia Responden Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha pemula yang sebagian besar berada dalam range 27-30 dengan prosesntase sebanyak 44%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak sekali para wirausaha pemula yang sudah mencapai batas akhir sebagai seorang pemuda. Maka dari hal tersebut diperlukan pembekalan bagaimana ketika sudah menginjak usia yang sudah tidak masuk kategori pemuda, usaha yang dijalani bisa lebih berkembang dari tingkat wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan.

b. Tingkat Pendidikan

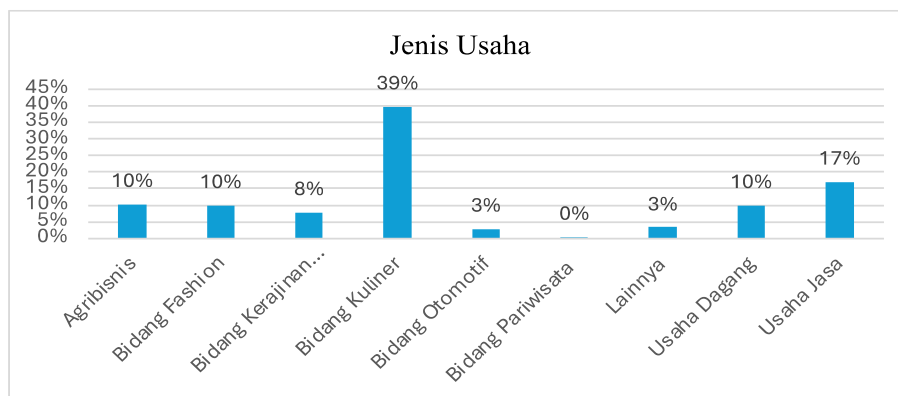


Gambar 4.5 Tingkat Pendidikan Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui tingkat pendidikan dari wirausaha pemula yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S1 (Sarjana). Pada level wirausaha pemula hal tersebut cukup menjadi informasi yang positif, karena dapat tergambar bagaimana seorang pemuda yang memiliki tingkat pendidikan S1 (Sarjana) memilih untuk menjadi wirausaha dibandingkan dengan melamar pekerjaan sebagai pekerja atau karyawan.

c. Jenis Usaha



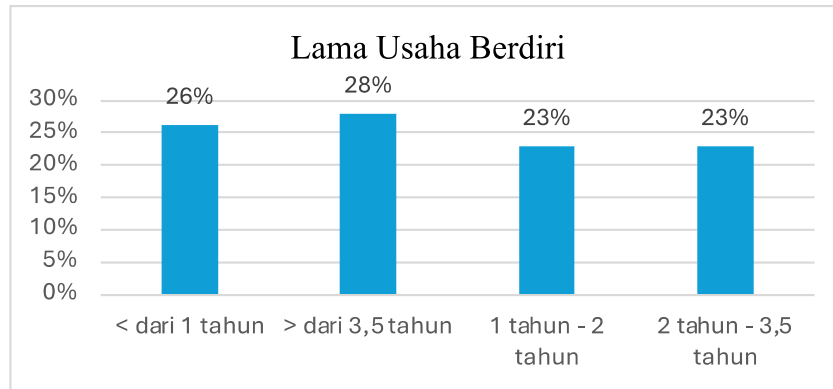
Gambar 4.6 Jenis Usaha Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas juga dapat diketahui jenis usaha apa yang dimiliki oleh para wirausaha pemula ini. Sebanyak 39% para wirausaha pemula ini memiliki jenis usaha kuliner. Jenis usaha kuliner memang sangat digemari oleh para wirausaha muda, mengingat secara teknis dapat

dipelajari secara otodidak menggunakan internet, dan secara modal tidak terlalu membutuhkan modal yang besar. Secara pasar, kuliner merupakan kebutuhan utama dari manusia, maka dari hal tersebut memang usaha kuliner masih menjadi pilihan pertama dari para wirausaha pemula di Provinsi Jawa Tengah.

d. Lama Usaha Berdiri

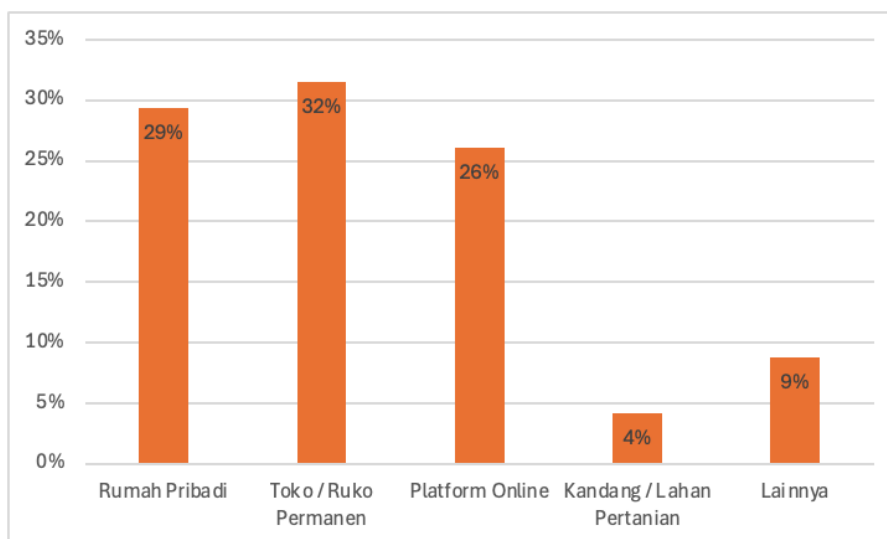


Gambar 4.7 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui umur atau lama usaha berdiri yang dimiliki oleh para wirausaha pemula ini. Sebanyak 28% para wirausaha pemula mampu mempertahankan usahanya lebih dari 3,5 tahun. Hal tersebut menjadi informasi positif, karena setidaknya usaha yang dimiliki oleh para wirausaha pemula ini dapat survive dari bencana Pandemi Covid-19. Akan tetapi, memang masih terdapat wirausaha pemula sebanyak 26% yang umur usahanya kurang dari 1 tahun.

e. Lokasi Tempat Usaha

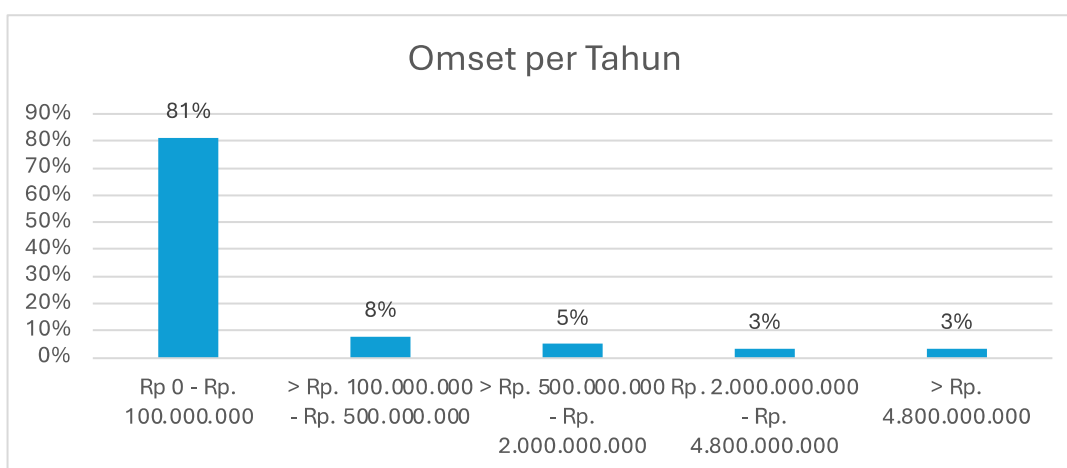


Gambar 4.8 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui lokasi tempat usaha yang dimiliki oleh para wirausaha pemula ini. Sebanyak 32% para wirausaha pemula mampu memiliki ruko sebagai lokasi usaha. Berikutnya 29% masih menggunakan tempat pribadi, dan 26% memiliki platform online sebagai lokasi usaha yang mengindikasikan bahwa hanya 26% wirausaha pemula yang melakukan aktivitas usaha melalui platform online (e-commerce).

f. Omset per Tahun

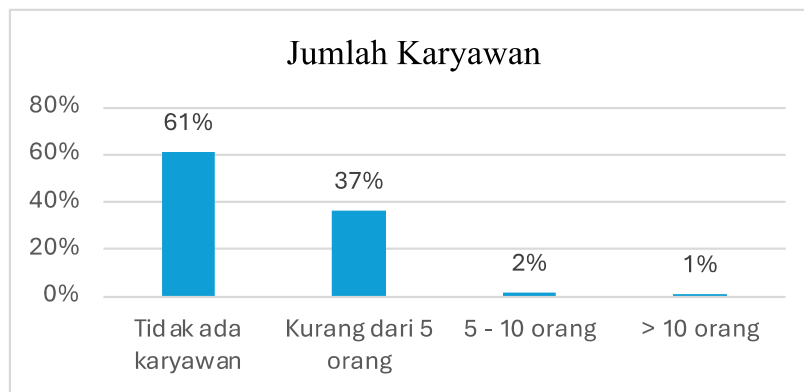


Gambar 4.9 Omset per Tahun Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui omzet usaha yang dimiliki oleh para wirausaha pemula ini. Hampir 81% omzet dari wirausaha pemula ini masih di bawah Rp 100.000.000 per tahun, dan hanya 3% yang memiliki omzet usaha diatas Rp 4,8M. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih perlu banyak pendampingan, pelatihan, maupun support yang lain dari pihak terkait untuk menaikkan level usaha. Level usaha yang dimaksud adalah setidaknya terjadi kenaikan omzet pada level wirausaha pemula.

g. Jumlah Karyawan

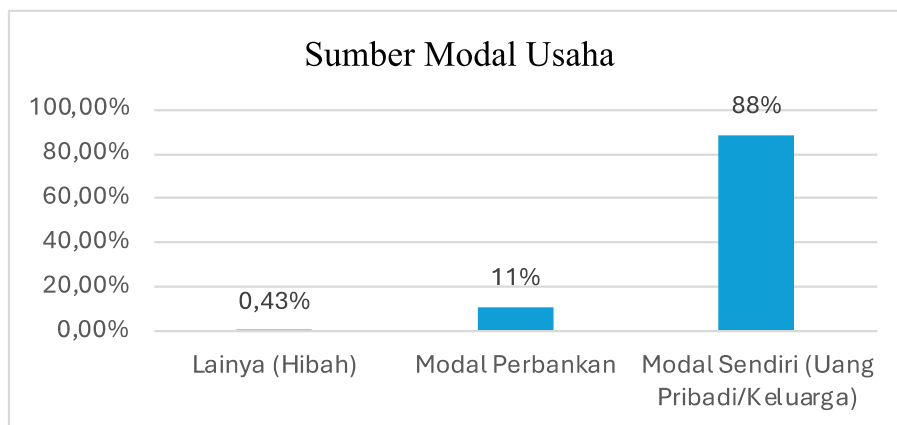


Gambar 4.10 Jumlah Karyawan Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jumlah karyawan yang dimiliki oleh para wirausaha pemula ini. Hampir 61% dari usaha yang dijalani wirausaha pemula ini, mereka tidak memiliki karyawan. Berikutnya hanya 1% dari wirausaha pemula yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar usaha yang dijalani para wirausaha muda pemula ini masih dikerjakan dengan cara individu. Hal tersebut membutuhkan pendampingan agar, kedepan aktivitas wirausaha muda dapat menjadi alternatif lapangan pekerjaan yang ada disekitar wilayahnya.

h. Sumber Modal Usaha

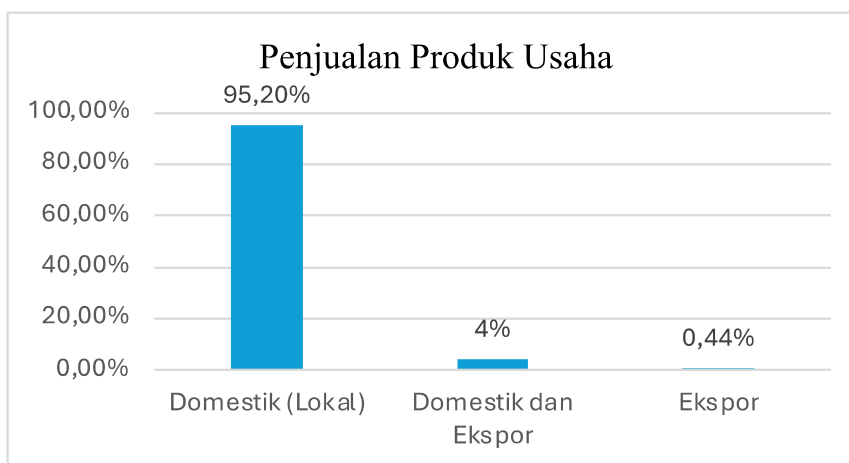


Gambar 4.11 Sumber Modal Usaha Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui sumber modal usaha dari wirausaha muda pemula pada Provinsi Jawa Tengah. Hampir 90% modal dari wirausaha pemula ini berasal dari modal sendiri. Hal ini cukup positif karena mengingat secara risiko usaha akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan usaha yang dibiayai dari perbankan.

i. Penjualan Produk Usaha



Gambar 4.12 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Pemula Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

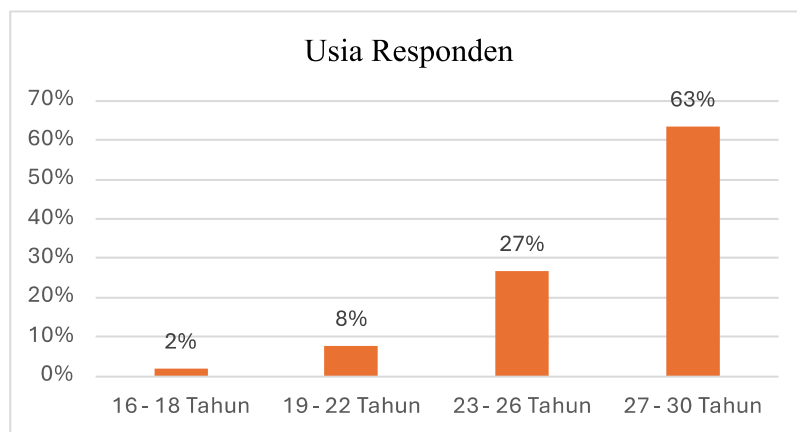
Pada gambar di atas dapat diketahui target sasaran penjualan dari wirausaha muda pemula pada Provinsi Jawa Tengah yang masih sangat didominasi oleh pasar domestik dengan nilai 95%. Berarti hanya 5% usaha wirausaha muda yang menjadikan pasar ekspor sebagai

targetnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang masih besar untuk bisa mendorong para wirausaha muda pemula yang lain agar dapat meningkatkan skala level usahanya hingga pasar ekspor.

3. Wirausaha Mapan

Analisis berikutnya adalah fase wirausaha yang paling tinggi, yaitu wirausaha mapan. Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya memenuhi persyaratan sebagai wirausaha mapan pada indikator motif, sikap, perilaku, pengetahuan, dan ketrampilan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan beberapa hal terkait wirausaha mapan sebagai berikut:

a. Usia Responden



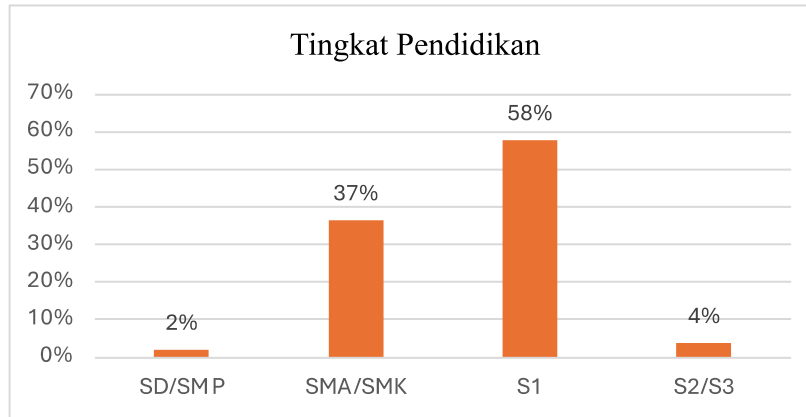
Gambar 4.13 Usia Responden Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha mapan lebih dari setengah atau 63% berada dalam range usia 27-30. Informasi tersebut mengindikasikan hal positif, bahwa para wirausaha muda yang sudah mapan memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai level fase wirausaha muda. Pengalaman dan mental juga sudah terbentuk mengingat umur yang sudah mencapai akhir dari batasan seorang pemuda. Hal positif lainnya, terdapat 2% wirausaha muda dengan usia 16-18 tahun yang sudah mencapai level

mapan. Hal tersebut sebenarnya mengindikasikan ada potensi besar bahwa sejak dini, para pemuda dapat menjadi wirausaha bahkan dengan level tertinggi.

b. Tingkat Pendidikan

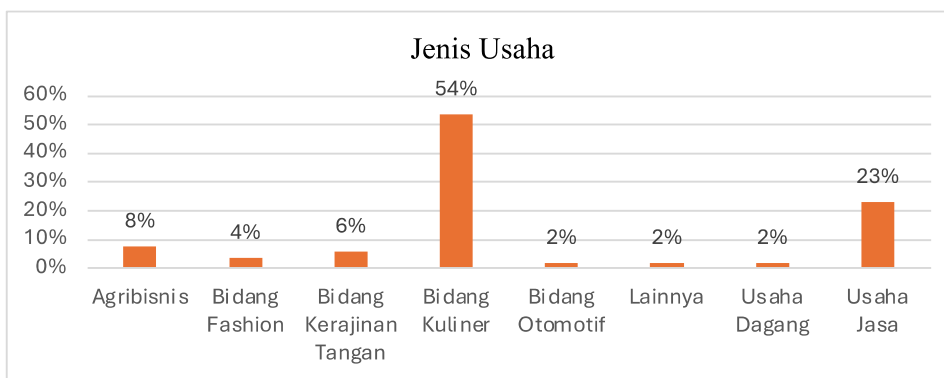


Gambar 4.14 Tingkat Pendidikan Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui tingkat pendidikan dari wirausaha mapan yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S1 (Sarjana) dengan angka yang cukup signifikan yaitu 58%. Pada level wirausaha mapan hal tersebut menjadi informasi yang positif, karena dapat tergambar bagaimana seorang pemuda yang memiliki tingkat pendidikan S1 (Sarjana) memilih untuk menjadi wirausaha dibandingkan dengan melamar pekerjaan sebagai pekerja atau karyawan, yang mana akan membuka kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar.

c. Jenis Usaha

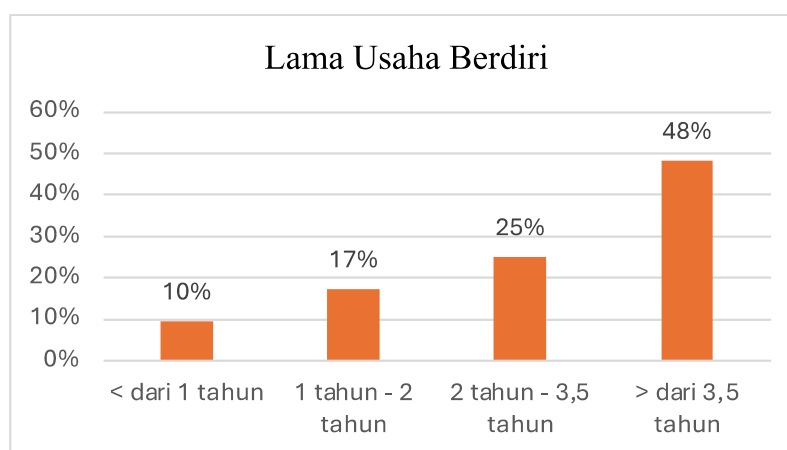


Gambar 4.15 Jenis Usaha Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas juga dapat diketahui jenis usaha apa yang dimiliki oleh para wirausaha mapan ini. Lebih dari setengah yaitu 54% para wirausaha mapan ini memiliki jenis usaha kuliner. Jenis usaha kuliner memang sangat digemari oleh para wirausaha muda, mengingat secara teknis dapat dipelajari secara otodidak menggunakan internet, dan secara modal tidak terlalu membutuhkan modal yang besar. Secara segmentasi pasar, kuliner merupakan kebutuhan utama dari manusia, maka dari hal tersebut memang usaha kuliner masih menjadi pilihan pertama dari para wirausaha mapan di Provinsi Jawa Tengah.

d. Lama Usaha Berdiri



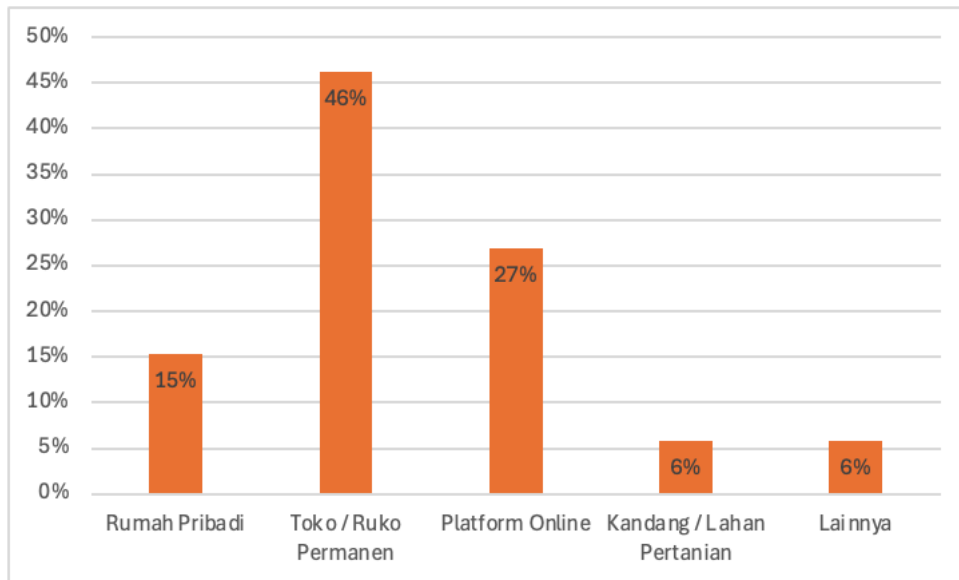
Gambar 4.16 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui umur atau lama usaha berdiri yang dimiliki oleh para wirausaha mapan ini. Sebanyak 48% atau hampir dari

setengah dari para wirausaha mapan memiliki usaha yang sudah dijalani lebih dari 3,5 tahun. Hal tersebut menjadi informasi positif, memang pengalaman yang didapatkan dan tergambar pada umur lama usaha menjadi gambaran bagaimana mencapai level wirausaha mapan.

e. Lokasi Tempat Usaha

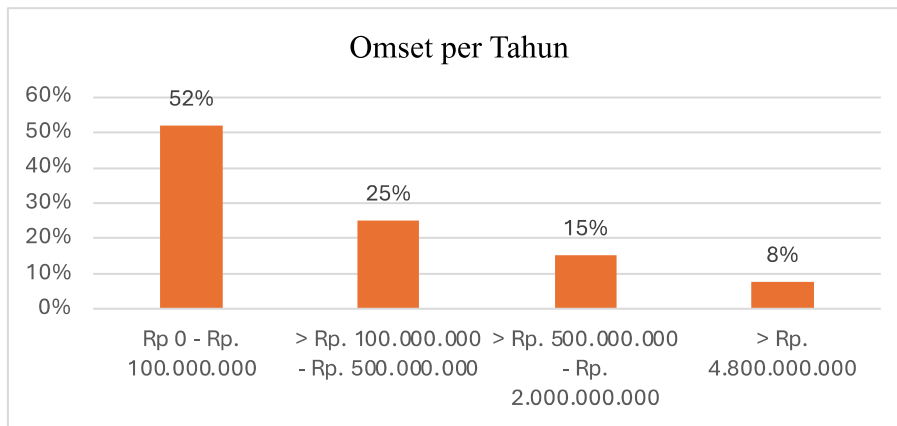


Gambar 4.17 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui lokasi tempat usaha yang dimiliki oleh para wirausaha mapan ini. Sebanyak 46% atau hampir dari setengah dari para wirausaha mapan memiliki usaha yang memiliki tempat usaha permanen seperti ruko. Hal ini berarti informasi positif, bahwa bisa terlihat hampir setengah dari wirausaha mapan memiliki lokasi usaha yang tetap.

f. Omset per Tahun

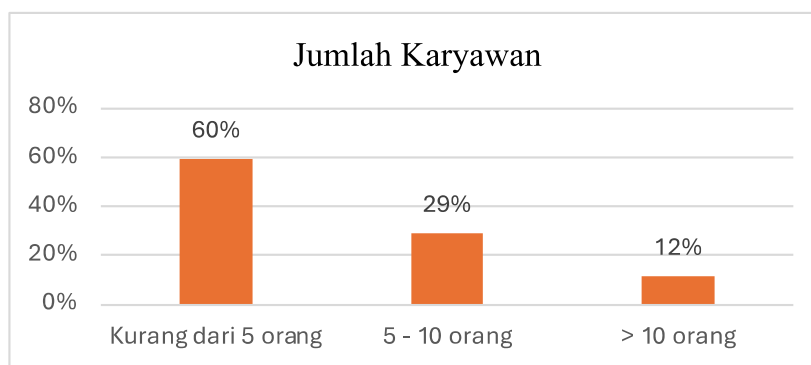


Gambar 4.18 Omset per Tahun Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui omzet usaha yang dimiliki oleh para wirausaha mapan. Omzet dari wirausaha mapan memang sebanyak 52% masih di bawah Rp 100.000.000 per tahun. Akan tetapi terdapat 8% wirausaha muda yang mapan memiliki omzet usaha diatas Rp 4,8M. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih perlu banyak pendampingan, pelatihan, maupun support yang lain dari pihak terkait untuk menaikkan level usaha dari sisi omzet.

g. Jumlah Karyawan



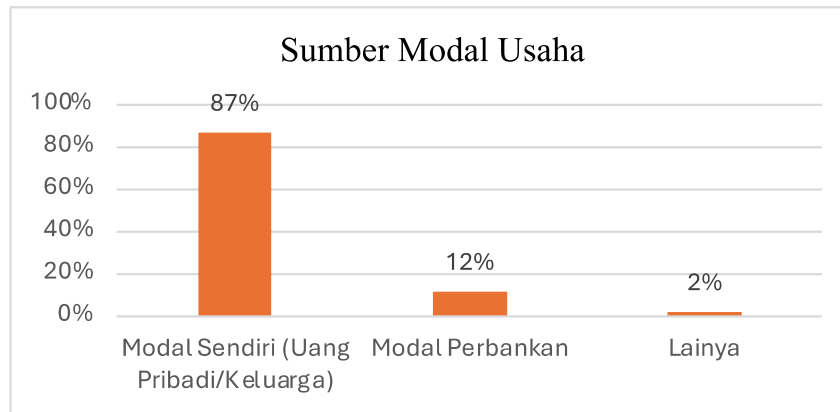
Gambar 4.19 Jumlah Karyawan Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jumlah karyawan yang dimiliki oleh para wirausaha mapan ini. Hampir 60% dari usaha yang dijalani wirausaha mapan ini, mereka hanya memiliki karyawan kurang dari 5 orang. Berikutnya 12% dari wirausaha mapan yang memiliki karyawan

lebih dari 10 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pekerjaan wirausaha dapat menjadi alternatif untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang ada disekitar wilayahnya.

h. Sumber Modal Usaha

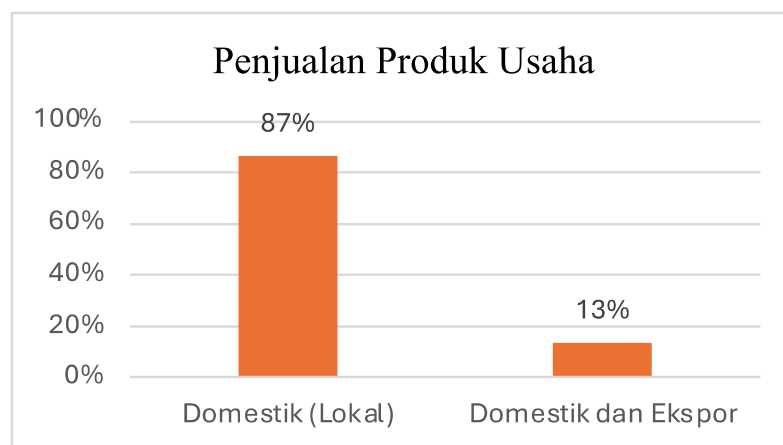


Gambar 4.20 Sumber Modal Usaha Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui sumber modal usaha dari wirausaha muda mapan pada Provinsi Jawa Tengah. Hampir 87% modal dari wirausaha mapan ini berasal dari modal sendiri. Hal ini cukup positif karena mengingat secara risiko usaha akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan usaha yang dibiayai dari perbankan.

i. Penjualan Produk Usaha



Gambar 4.21 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Mapan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui target sasaran penjualan dari wirausaha muda mapan pada Provinsi Jawa Tengah yang masih sangat didominasi oleh pasar domestik dengan nilai 87%. Hal tersebut berarti hanya 13% usaha wirausaha muda mapan yang menjadikan pasar ekspor sebagai targetnya. Hal tersebut mengindikasikan masih terdapat potensi yang masih besar untuk bisa mendorong para wirausaha muda pemula yang lain agar dapat meningkatkan skala level usahanya hingga pasar ekspor

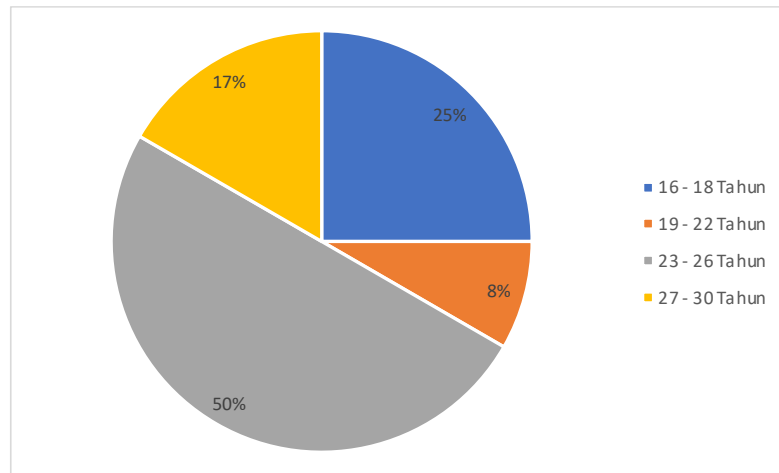
4.2.2 Berdasarkan Tematik

Analisis wirausaha pemuda berikutnya adalah berdasarkan tematik yang dibedakan menjadi empat kategori yaitu wirausaha sosial, wirausaha teknologi, wirausaha perempuan, dan wirausaha desa. Analisis ini dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh setiap kelompok, sehingga memungkinkan perumusan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, dengan hasil analisis sebagai berikut:

1. Wirausaha Sosial

Wirausaha Sosial adalah setiap orang yang memiliki jiwa sosial tinggi dan kemampuan bisnis yang sangat baik. Mereka mampu mengidentifikasi masalah sosial, melihatnya sebagai peluang, kemudian mampu memberikan solusi. Mereka dapat beroperasi di dalam komunitas dan lebih mengutamakan perilaku tolong menolong daripada mencari keuntungan materi. Tujuan utama dari Wirausaha Sosial adalah membantu Pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Usia Responden

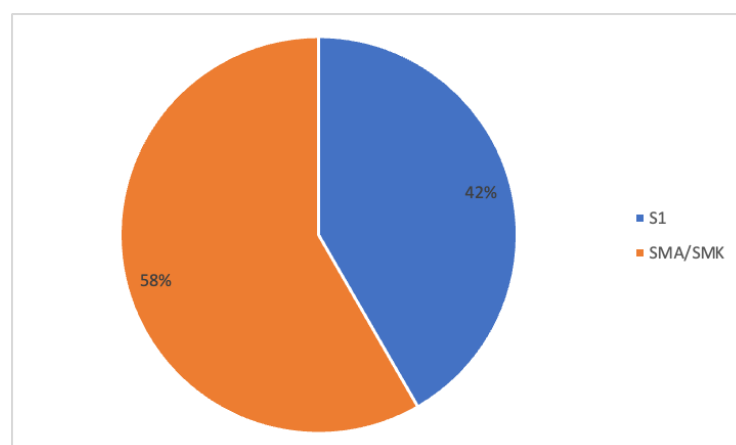


Gambar 4.22 Usia Responden Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha muda dengan tipe sosial lebih dari setengah atau 50% berada dalam range usia 23-26. Informasi tersebut mengindikasikan hal positif, bahwa para wirausaha muda yang berjiwa sosial masih terdapat dalam range yang cukup baik, yaitu tidak pada fase akhir dari batas umur yang dikatakan pemuda. Hal tersebut akan membuat masih ada waktu kedepan untuk para wirausaha muda tema sosial untuk lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

b. Tingkat Pendidikan

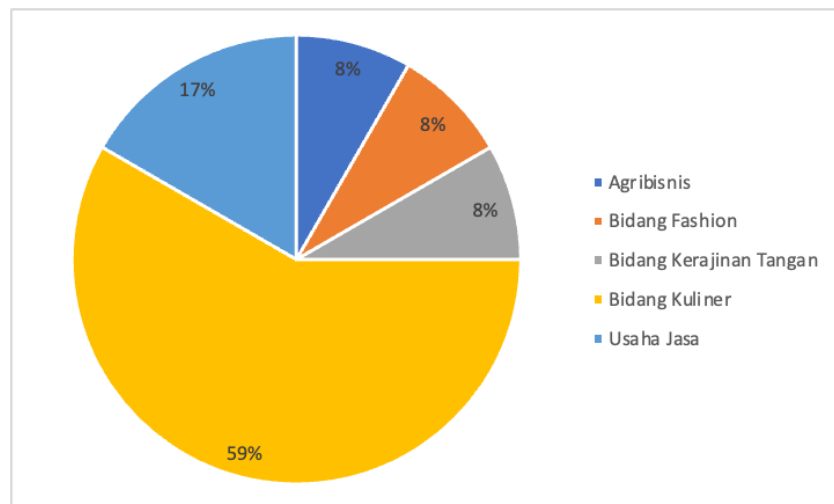


Gambar 4.23 Tingkat Pendidikan Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui tingkat pendidikan dari wirausaha muda dengan tema sosial yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S1 (Sarjana) dengan angka yang cukup signifikan yaitu 58%. Pada level wirausaha muda dengan tema sosial ini juga menjadi informasi yang positif, karena dapat tergambar bagaimana seorang pemuda yang memiliki tingkat pendidikan S1 (Sarjana) memilih untuk menjadi wirausaha yang sekaligus bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

c. Jenis Usaha

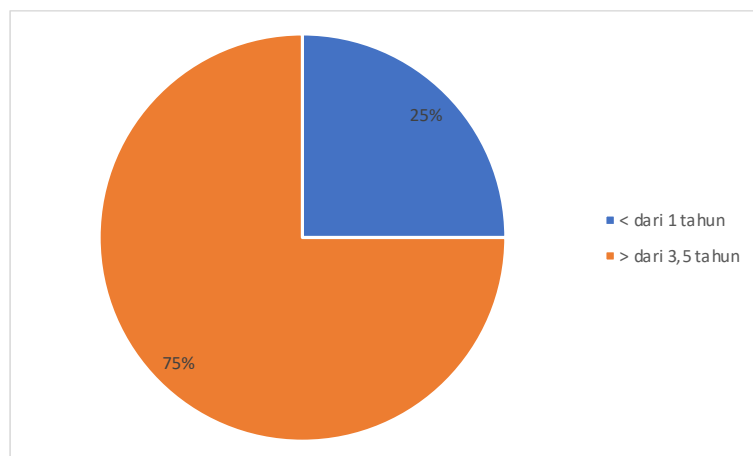


Gambar 4.24 Jenis Usaha Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas juga dapat diketahui jenis usaha apa yang dimiliki oleh para wirausaha muda dengan tema sosial ini. Lebih dari setengah yaitu 59% para wirausaha muda dengan tema sosial ini memiliki jenis usaha kuliner. Jenis usaha kuliner memang sangat terkait dengan lingkungan wilayah di sekitar lokasi usaha.

d. Lama Usaha Berdiri

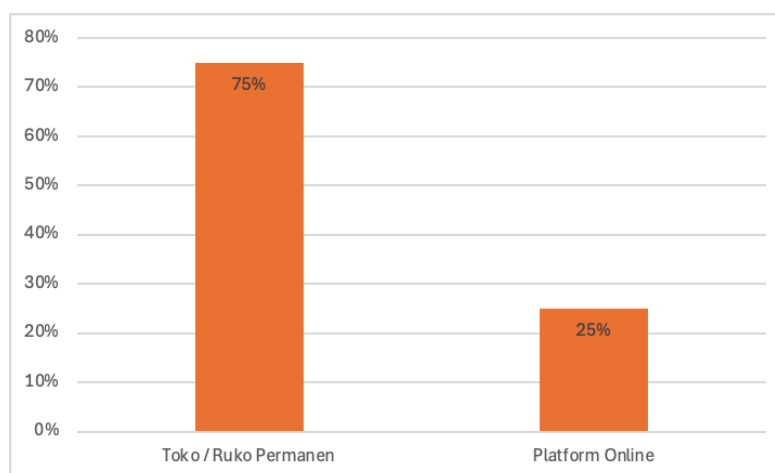


Gambar 4.25 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas juga dapat diketahui berapa lama umur usaha yang dimiliki oleh para wirausaha muda dengan tema sosial ini. Lebih dari setengah yaitu 75% para wirausaha muda dengan tema sosial ini memiliki umurusaha lebih dari 3,5 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wirausaha sosial memiliki dampak yang baik terkait umur usaha yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

e. Lokasi Tempat Usaha



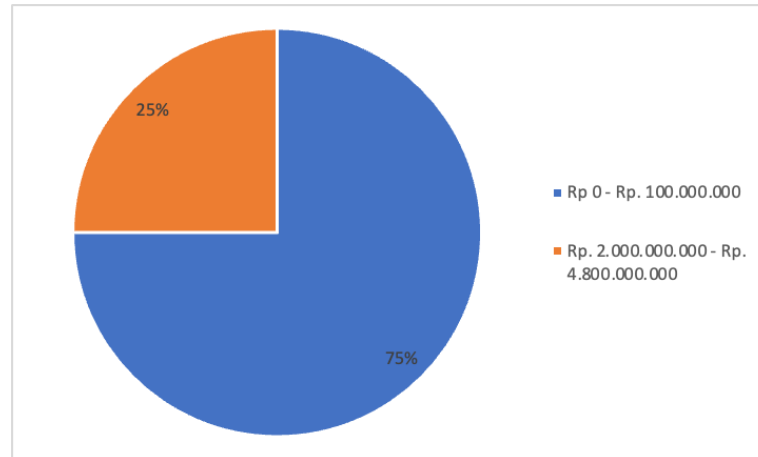
Gambar 4.26 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas juga dapat diketahui lokasi usaha yang dimiliki oleh para wirausaha muda dengan tema sosial ini. Lebih dari setengah yaitu 75% para wirausaha muda dengan tema sosial ini memiliki lokasi usaha

berupa toko atau ruko permanen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wirausaha sosial memiliki dampak yang baik terkait skala usaha yang mampu untuk memiliki tempat yang baik dalam berusaha.

f. Omset per Tahun

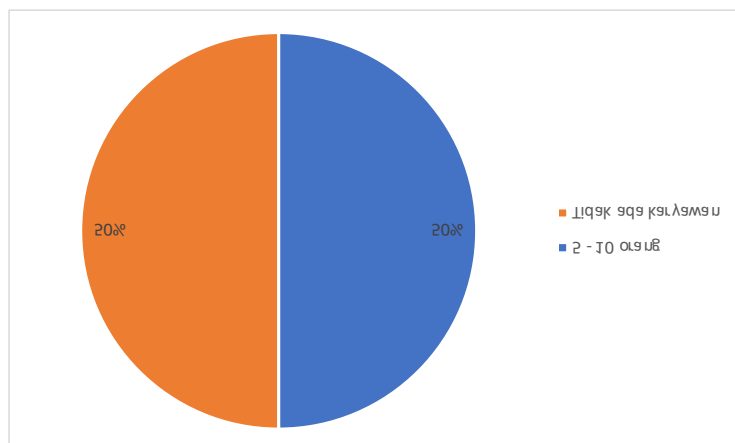


Gambar 4.27 Omset per Tahun Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas juga dapat diketahui omzet usaha yang dimiliki oleh para wirausaha muda dengan tema sosial ini. Lebih dari setengah yaitu 75% para wirausaha muda dengan tema sosial ini memiliki omzet yang masih dibawah Rp 100.000.000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wirausaha muda dengan tema sosial perlu untuk disupport agar skala usahanya naik, sehingga manfaat sosial juga akan semakin meningkat bagi lingkungan sekitar lokasi usaha.

g. Jumlah Karyawan

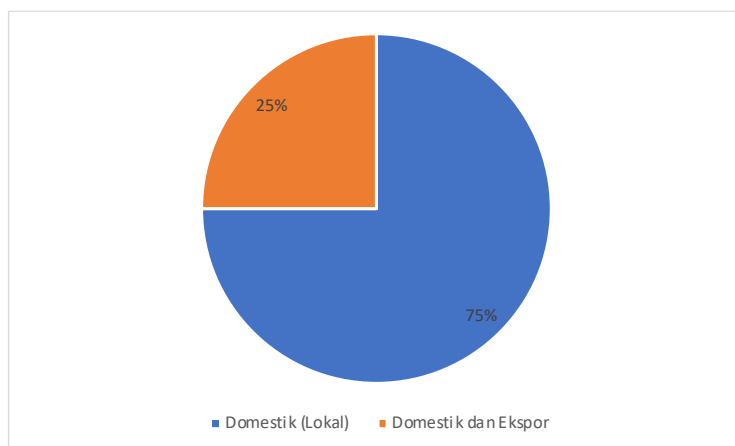


Gambar 4.28 Jumlah Karyawan Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas juga dapat diketahui jumlah karyawan yang dimiliki oleh para wirausaha muda dengan tema sosial ini. Lebih dari setengah yaitu 50% para wirausaha muda dengan tema sosial ini memiliki jumlah karyawan antara 5-10 orang. Akan tetapi, 50% lainnya masih belum memiliki karyawan.

h. Penjualan Produk Usaha



Gambar 4.29 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Sosial Provinsi Jawa Tengah

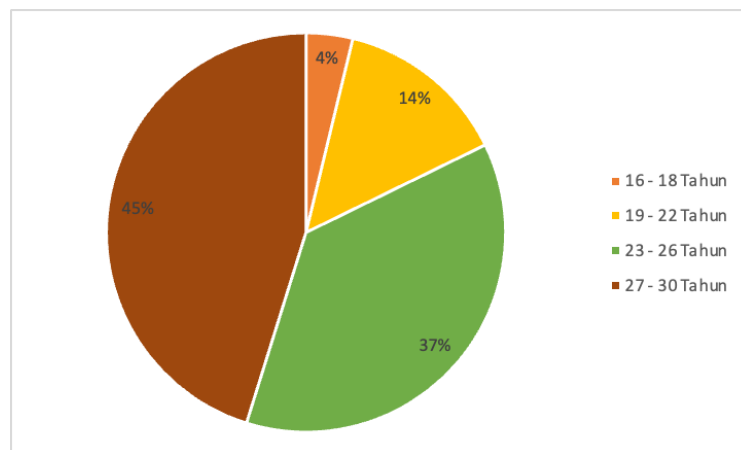
Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas juga dapat diketahui target pasar dari produk yang dimiliki oleh para wirausaha muda dengan tema sosial ini. Lebih dari setengah yaitu 75% para wirausaha muda dengan tema sosial ini masih menggunakan pasar domestik sebagai target produknya. Akan tetapi, 25% lainnya sudah masuk ke ranah ekspor.

2. Wirausaha Teknologi

Wirausaha Teknologi adalah Wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha teknologi yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan menerapkan kebaruan (inovasi) melalui penciptaan teknologi dan menjalankan proses inovasinya melalui sebuah usaha yang berkelanjutan. Tujuan pengembangan Wirausaha Teknologi adalah untuk mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempercepat peningkatan skala bisnis. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Usia Responden

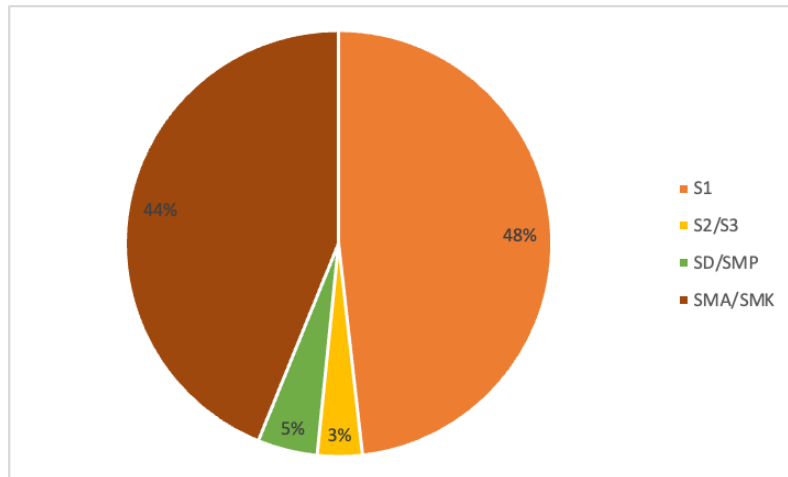


Gambar 4.30 Usia Responden Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha muda dengan tema teknologi hampir dari setengah atau 45% berada dalam range usia 27-30 tahun. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa para wirausaha muda yang memiliki ketertarikan dengan teknologi sudah masuk kedalam batas usia yang dikategorikan sebagai pemuda. Hal tersebut berarti harus ada semacam alih pengetahuan teknologi bagi range usia dibawahnya, agar wirausaha muda teknologi dapat dipertahankan jumlahnya.

b. Tingkat Pendidikan

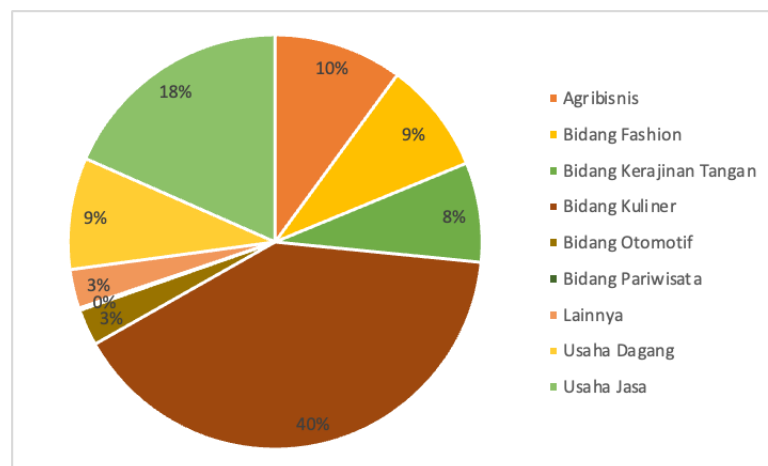


Gambar 4.31 Tingkat Pendidikan Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui tingkat pendidikan dari wirausaha muda dengan tema teknologi hampir dari setengah atau 48% adalah pada tingkat S1 (Sarjana) dan 48% lainnya adalah SMA atau SMK. Informasi tersebut mengindikasikan hal positif, yang berarti ilmu yang berkaitan dengan teknologi pada jenjang pendidikan dapat diterapkan ketika menjadi seorang wirausaha.

c. Jenis Usaha



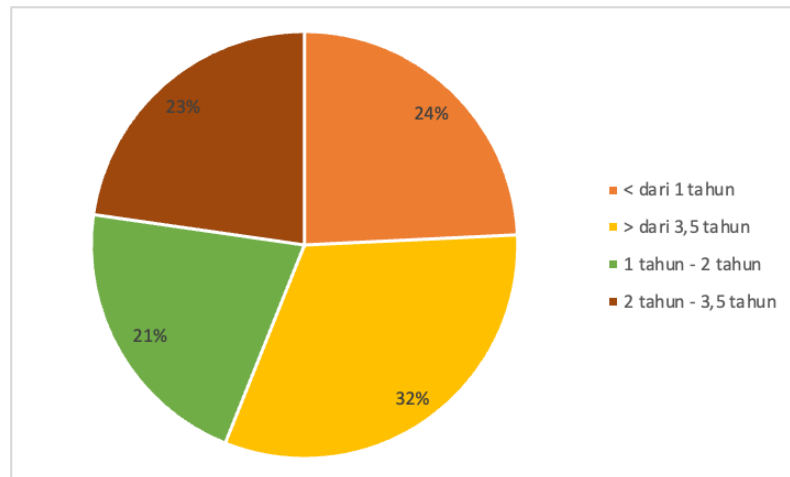
Gambar 4.32 Jenis Usaha Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha yang dimiliki oleh wirausaha muda dengan tema teknologi yang dengan nilai 40% adalah jenis usaha kuliner. Usaha kuliner memang masih menjadi tingkat

pertama walaupun menggunakan tema teknologi. Tema teknologi yang dimaksud ada pada aspek pemasaran yaitu menggunakan transformasi teknologi digital. Berikutnya sebanyak 18% ada pada bidang kerajinan tangan, yang terkait dengan proses produksinya.

d. Lama Usaha Berdiri

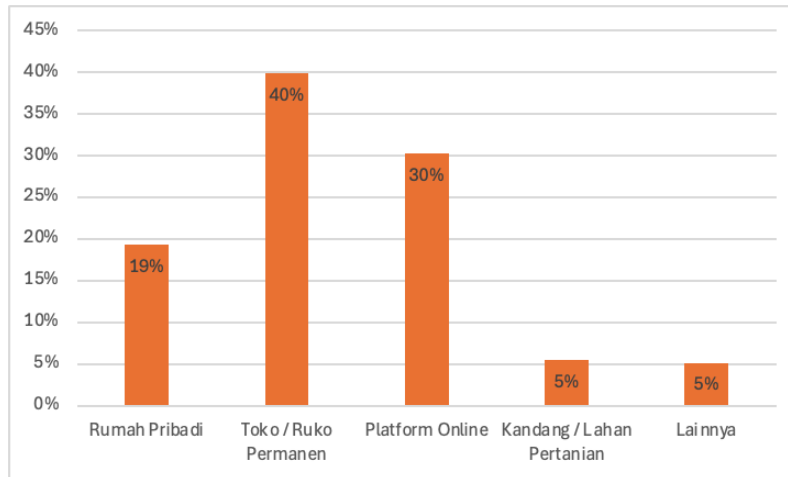


Gambar 4.33 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui umur usaha yang dimiliki oleh wirausaha muda dengan tema teknologi yaitu mencapai 32% yang lebih dari 3,5 tahun. Hal tersebut selaras dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat dibutuhkan pada zaman saat ini, termasuk dalam bidang wirausaha muda.

e. Lokasi Tempat Usaha

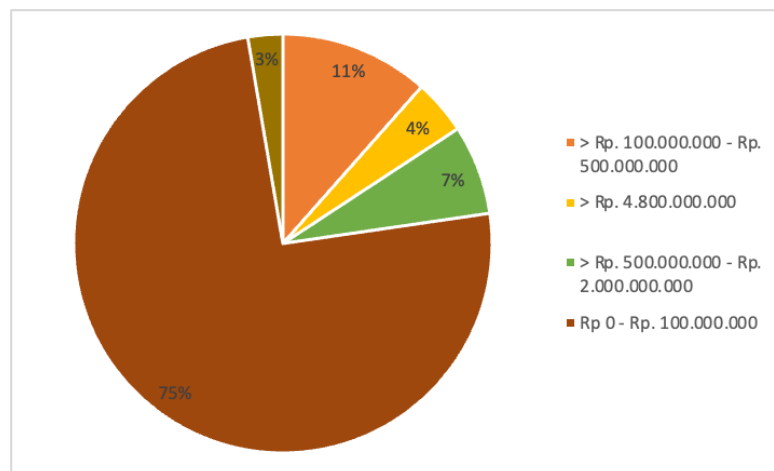


Gambar 4.34 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui lokasi usaha yang dimiliki oleh wirausaha muda dengan tema teknologi yaitu sebanyak 40% memiliki toko/ ruko permanen dan 30% yang memiliki platform online. Wirausaha muda dalam bidang teknologi yang memiliki ruko atau tempat permanen mengindikasikan status usaha dalam kondisi baik.

f. Omset per Tahun



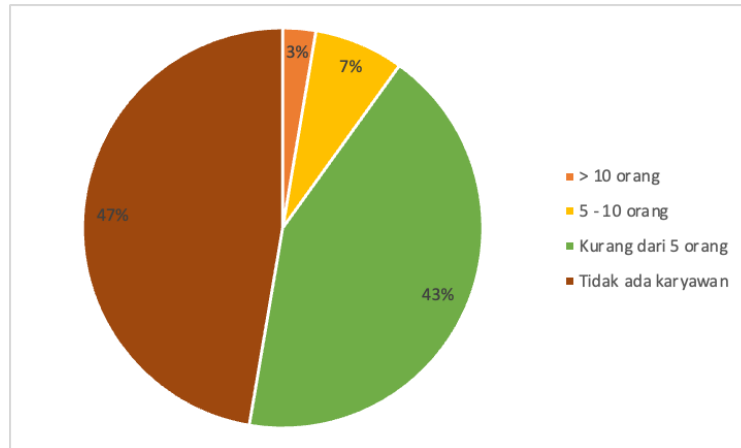
Gambar 4.35 Omset per Tahun Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui omzet usaha yang dimiliki oleh wirausaha muda dengan tema teknologi yaitu sebanyak 75% masih dibawah Rp 100.000.000. Akan tetapi terdapat pula sebanyak 4% yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 Milliar. Hal tersebut sebenarnya

mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang besar bagi wirausaha muda dibidang teknologi ini untuk terus mengembangkan skala usahanya.

g. Jumlah Karyawan

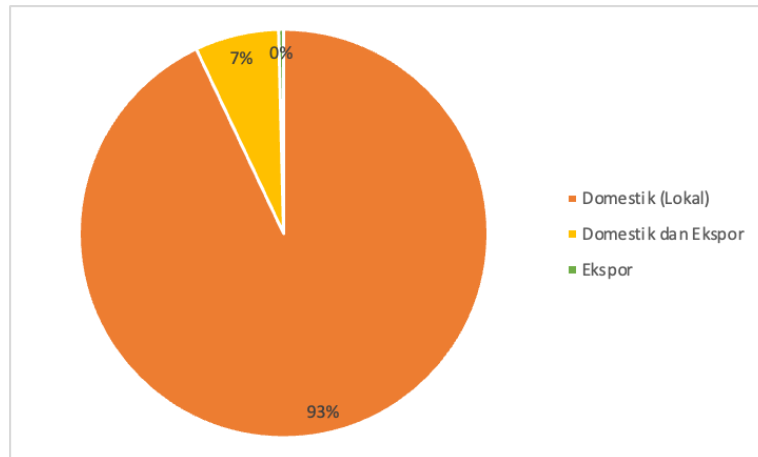


Gambar 4.36 Jumlah Karyawan Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jumlah karyawan usaha yang dimiliki oleh wirausaha muda dengan tema teknologi yang sangat signifikan. Gambar menyebutkan bahwa sebanyak 47% wirausaha muda teknologi tidak memiliki karyawan dan 43% yang memiliki karyawan kurang dari 5 orang. Informasi ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi memiliki "efek samping" yaitu di beberapa aspek operasional usaha tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi, karena dianggap tidak lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan teknologi.

h. Penjualan Produk Usaha



Gambar 4.37 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Teknologi Provinsi Jawa Tengah

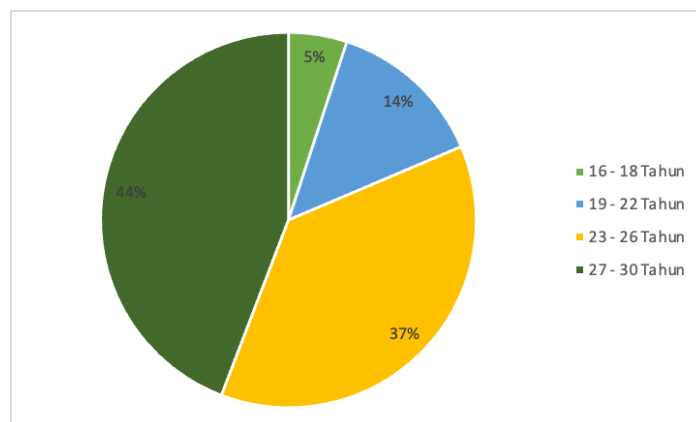
Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui target pasar dari para wirausaha muda dengan tema teknologi yang masih menasar pasar domestik dengan angka yang sangat signifikan yaitu 93%. Berikutnya sebanyak 7% wirausaha muda dengan tema teknologi sudah masuk ke dalam pasar import. Seharusnya angka tersebut semakin meningkat, karena kemajuan teknologi di bidang pemasaran.

3. Wirausaha Perempuan

Wirausaha Perempuan adalah perempuan pelaku Wirausaha. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Usia Responden

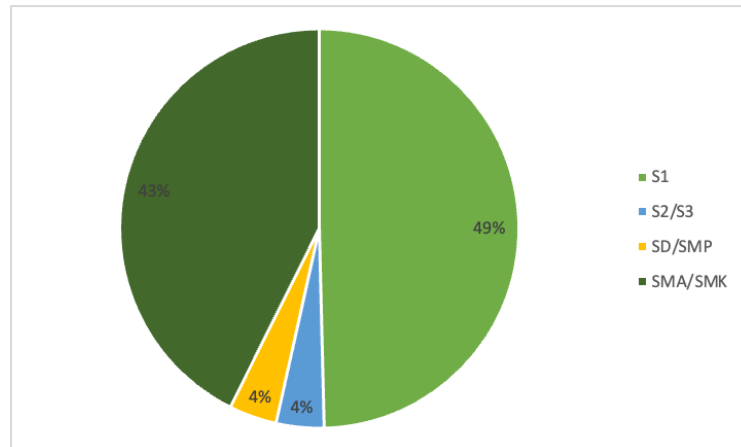


Gambar 4.38 Usia Responden Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha muda perempuan yang hampir dari setengah atau 44% berada dalam range usia 27-30 tahun. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa para wirausaha muda perempuan sudah masuk kedalam batas usia yang dikategorikan sebagai pemuda.

b. Tingkat Pendidikan

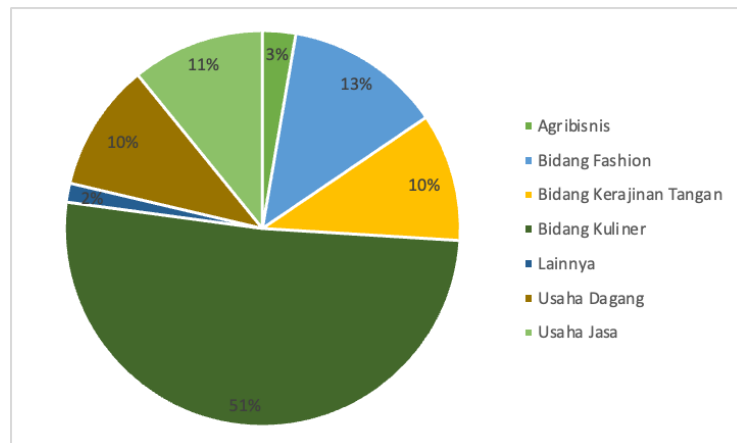


Gambar 4.39 Tingkat Pendidikan Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha muda perempuan yang hampir dari setengah atau 49% memiliki pendidikan S1 (Sarjanan) dan 43% adalah SMA/SMK. Hal ini menandakan bahwa perempuan yang terdidik atau memiliki background pendidikan yang baik akan lebih memilih menjadi seorang wirausaha.

c. Jenis Usaha

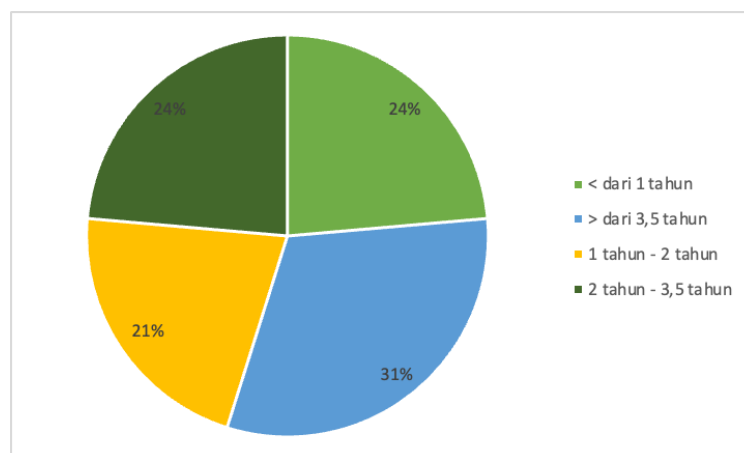


Gambar 4.40 Jenis Usaha Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha muda perempuan yang lebih dari setengah, yaitu sebanyak 51% memiliki usaha di bidang kuliner. Hal ini sangat sesuai dengan minat dan bakat dari seorang perempuan, yaitu ketika memilih sebuah usaha adalah yang terkait dengan kemampuannya.

d. Lama Usaha Berdiri

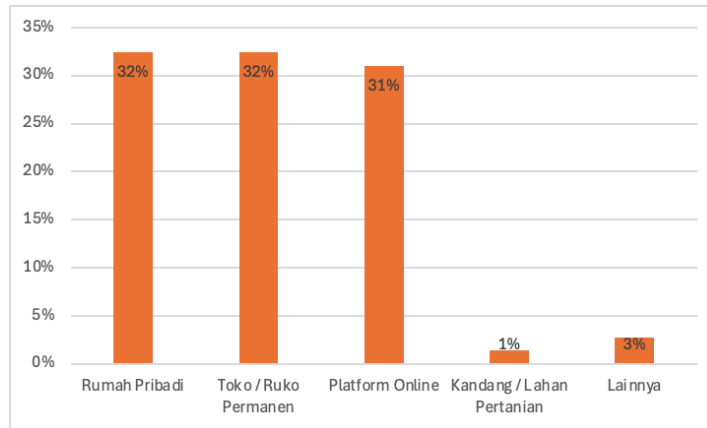


Gambar 4.41 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui umur usaha dari wirausaha muda perempuan yaitu sebanyak 31% memiliki umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Hal ini merupakan informasi yang sangat positif, dikarenakan gender tidak mempengaruhi kemampuan dalam berusaha.

e. Lokasi Tempat Usaha

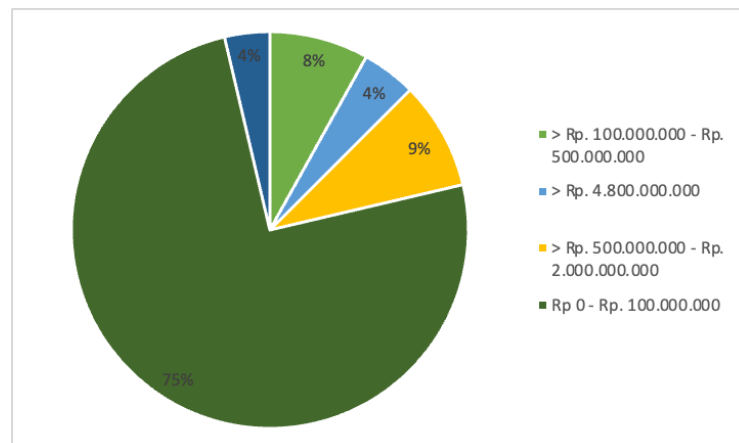


Gambar 4.42 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui lokasi usaha dari wirausaha muda perempuan yaitu sebanyak 32% masih menggunakan rumah pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan yang menjadi seorang wirausaha memiliki tugas lain yaitu sebagai seorang Ibu Rumah Tangga. Hal tersebut dibuktikan dengan lokasi usaha yang sama dengan rumah tempat tinggal.

f. Omset per Tahun



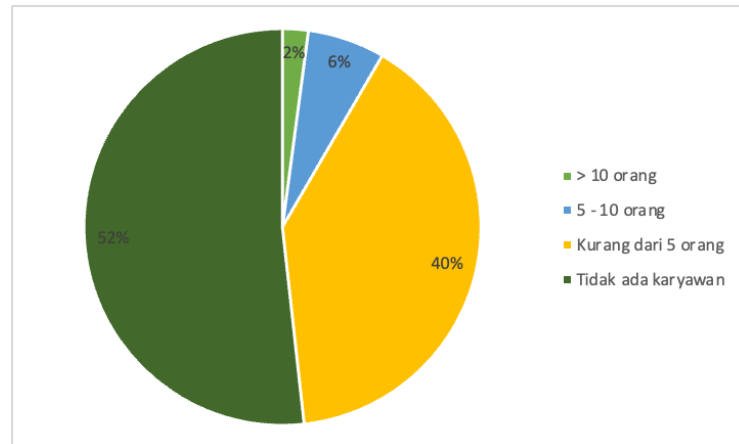
Gambar 4.43 Omset per Tahun Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui omzet usaha dari wirausaha muda perempuan yaitu sebanyak 75% dan sangat dominan hanya maksimal Rp 100.000.000 per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usaha

yang dilakukan oleh para wirausaha perempuan ini masih tergolong kecil dalam skala usahanya.

g. Jumlah Karyawan

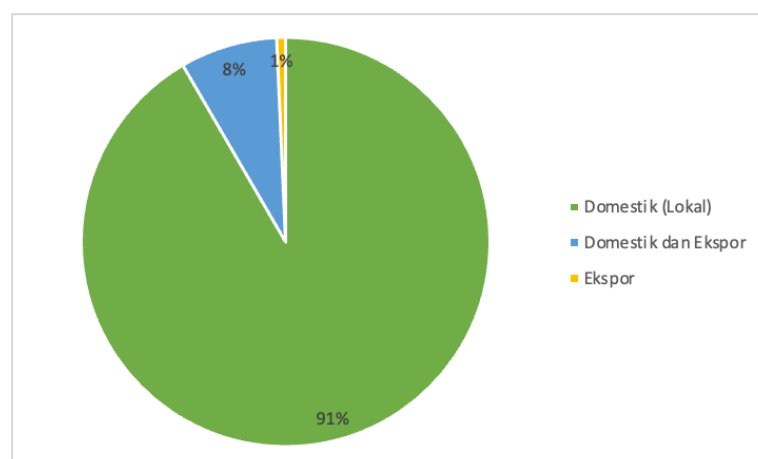


Gambar 4.44 Jumlah Karyawan Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jumlah karyawan usaha dari wirausaha muda perempuan yaitu sebanyak 52% tidak memiliki karyawan, dan sebanyak 40% memiliki karyawan kurang dari 5 orang. Hal tersebut berarti hampir mayoritas wirausaha pemuda perempuan melakukan aktivitas usaha secara individual.

h. Penjualan Produk Usaha



Gambar 4.45 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Perempuan Provinsi Jawa Tengah

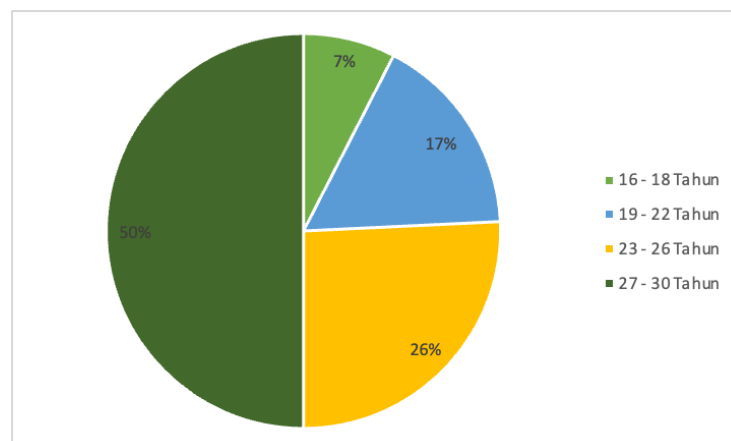
Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat juga diketahui target pasar usaha dari wirausaha muda perempuan yaitu sebanyak 91% adalah pasar domestik, sisanya sudah menuju kepada pasar ekspor. Hal tersebut memang menjadi tantangan besar bagi wirausaha muda perempuan untuk meningkatkan kualitas produknya agar skala usahanya semakin baik.

4. Wirausaha Desa

Wirausaha Desa adalah kegiatan Wirausaha yang dilaksanakan di wilayah desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi desa dan warga desa tersebut. Tujuan pengembangan Wirausaha Desa adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Usia Responden



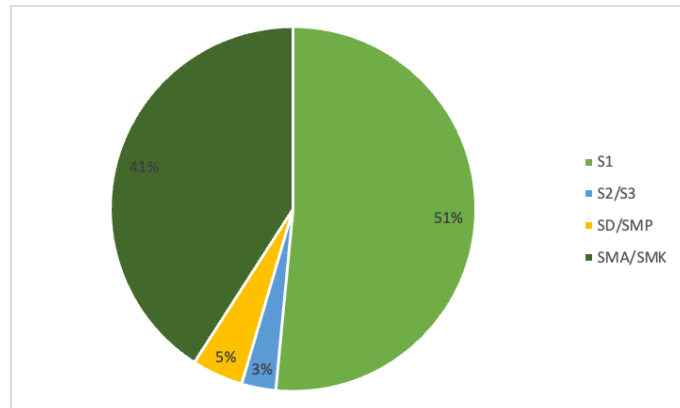
Gambar 4.46 Usia Responden Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha muda desa yang hampir dari setengah atau 50% berada dalam range usia 27-30 tahun. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa para

wirausaha muda yang ada di pedesaan sudah masuk kedalam batas usia yang dikategorikan sebagai pemuda.

b. Tingkat Pendidikan

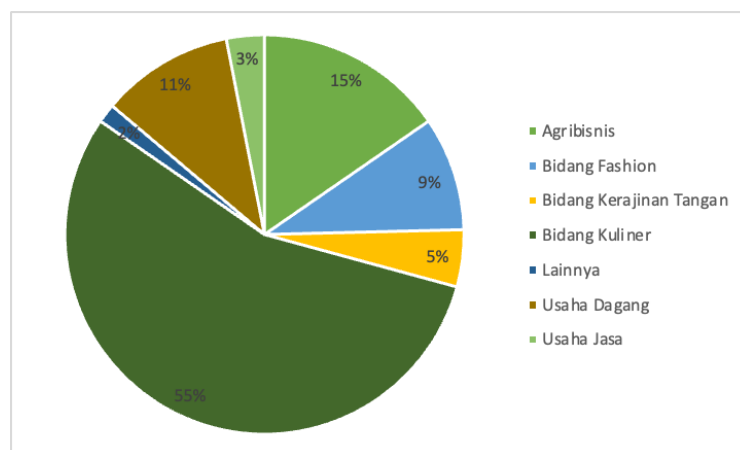


Gambar 4.47 Tingkat Pendidikan Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui usia responden dari wirausaha muda desa yang lebih dari setengah atau 51% memiliki pendidikan S1(Sarjana) dan 41% yang memiliki pendidikan SMA/SMK. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya secara pendidikan wirausaha muda yang berada di desa tidak kalah dengan yang ada di perkotaan.

c. Jenis Usaha



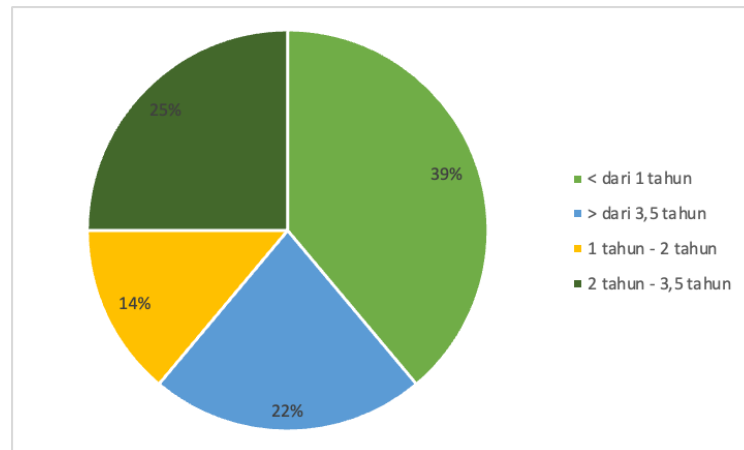
Gambar 4.48 Jenis Usaha Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha dari wirausaha muda desa yang lebih dari setengah atau 55% memiliki usaha kuliner.

Berikutnya sebanyak 15% yaitu bergerak dalam bidang agribisnis. Hal tersebut menandakan bahwa memang usaha kuliner sekali lagi menjadi pilihan utama bagi para wirausaha muda, baik yang beroperasi di perkotaan maupun pedesaan.

d. Lama Usaha Berdiri

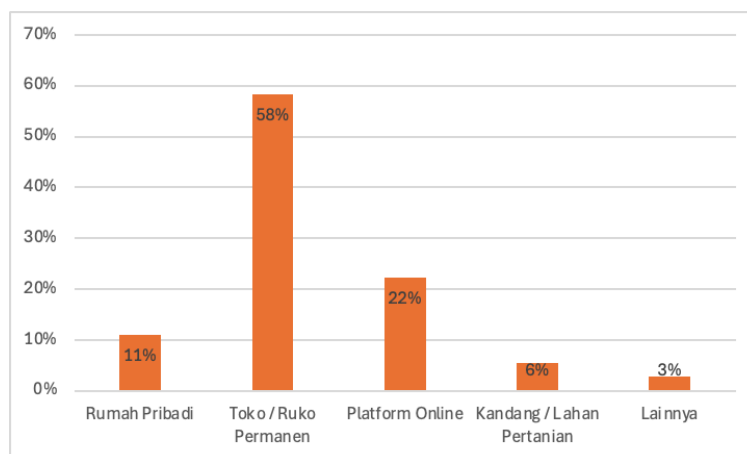


Gambar 4.49 Lama Usaha Berdiri Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui umur usaha dari wirausaha muda desa yang ternyata mayoritas kurang dari 1 tahun. Angka prosentase menunjukkan 39% responden hanya memiliki umur usaha kurang dari 1 tahun untuk wirausaha pemuda yang ada di pedesaan. Hal tersebut menjadi tantangan bagaimana wirausaha muda yang ada di pedesaan dapat bertahan, agar terus berkontribusi pada kondisi perekonomian yang ada di pedesaan.

e. Lokasi Tempat Usaha

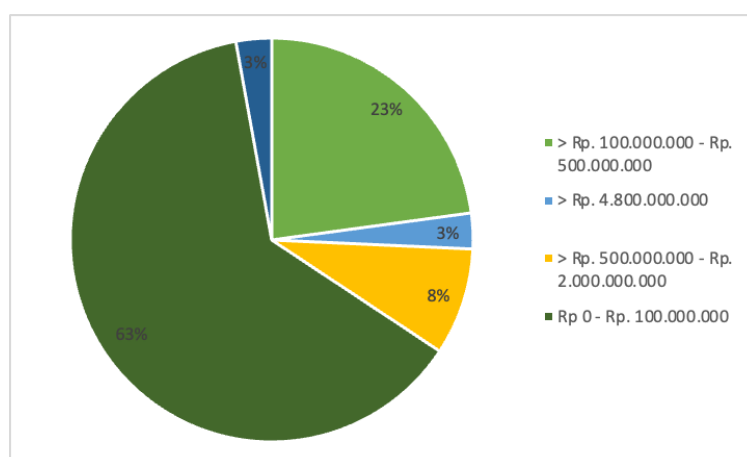


Gambar 4.50 Lokasi Tempat Usaha Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui lokasi usaha dari wirausaha muda desa yang ternyata mayoritas atau lebih dari 58% memiliki toko atau ruko permanen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar wirausaha pemuda yang ada di desa memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Angka 22% yang memiliki platform online juga mengindikasikan bahwa wirausaha pemuda di desa juga telah menyadari pentingnya teknologi informasi untuk menunjang aktivitas usaha terutama dalam hal pemasaran.

f. Omset per Tahun

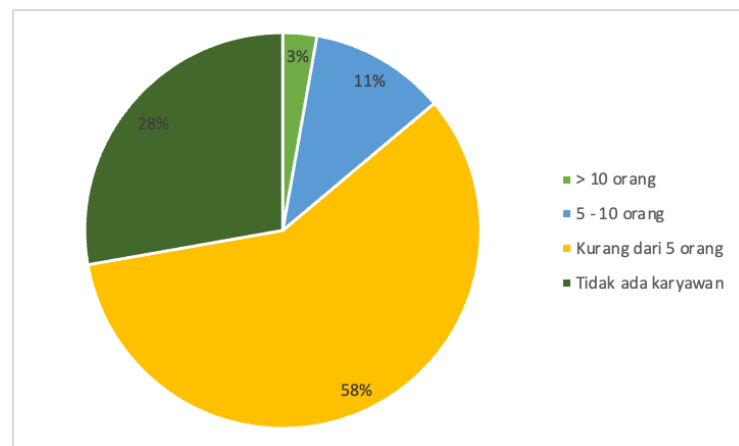


Gambar 4.51 Omset Per Tahun Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui omzet usaha dari wirausaha muda desa yang ternyata mayoritas atau lebih dari 63% omzet masih dibawah Rp 100.000.000 setiap tahun. Hal ini berarti bahwa skala usaha dari para wirausaha muda di desa belum terlalu besar. Maka, kedepan perlu ada kerjasama dari berbagai pihak untuk bersama meningkatkan skala usaha wirausaha muda di desa.

g. Jumlah Karyawan

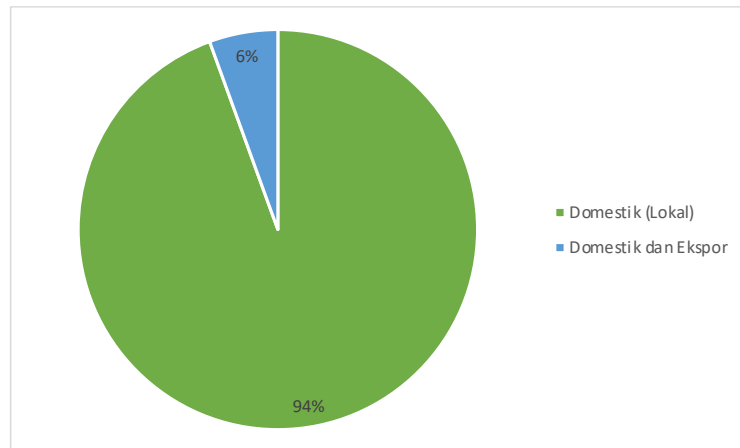


Gambar 4.52 Jumlah Karyawan Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jumlah karyawan usaha dari wirausaha muda desa yang ternyata mayoritas atau lebih dari 58% memiliki karyawan, walaupun jumlahnya kurang dari 5. Hal tersebut adalah informasi positif, artinya wirausaha pemuda yang dilakukan di desa dapat memberikan sumbangsih dalam penciptaan lapangan pekerjaan, walaupun masih dengan tingkat yang kecil.

h. Penjualan Produk Usaha



Gambar 4.53 Penjualan Produk Usaha Wirausaha Desa Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui target pasar usaha dari wirausaha muda desa yang ternyata mayoritas atau lebih dari 94% adalah pasar domestik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wirausaha muda yang ada di pedesaan belum mengetahui betul mengenai pasar ekspor. Maka penting untuk dapat memberikan informasi mengenai teknis atau keuntungan usaha apabila produknya mampu menembus pasar ekspor.

Penjelasan pada analisis kondisi wirausaha pemuda berdasarkan fase dan tematik penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat digunakan untuk membantu pihak terkait terutama Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dan/atau program yang dapat mendukung perkembangan wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan wirausaha pemuda juga dapat menjadi salah satu indikator peningkatan ekonomi yang baik dari suatu wilayah.

4.3 ANALISIS WIRAUSAHA MUDA BERDASARKAN FASE PER KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Analisis pada bab ini akan memuat hal-hal penting terkait kondisi wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah yang akan di potret berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara detail dapat dilihat sebagai berikut ini:

4.3.1 Kabupaten Banjarnegara

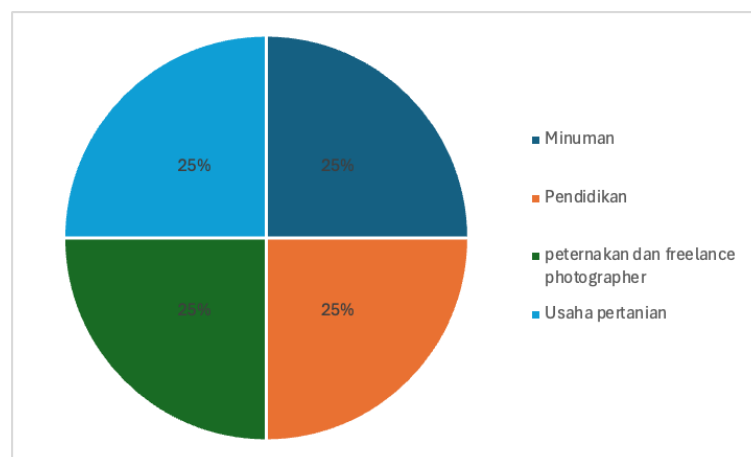
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Banjarnegara akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Fase Wirausaha Kab. Banjarnegara

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	50%	-	-	-
Wirausaha Pemula	50%	Jasa	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	-	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Banjarnegara mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan sampel yang diperoleh tidak terdapat responden yang masuk dalam kategori Wirausaha Mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Banjarnegara:



Gambar 4.54 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Banjarnegara

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Banjarnegara. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu minuman, Pendidikan, peternakan, dan pertanian.

4.3.2 Kabupaten Banyumas

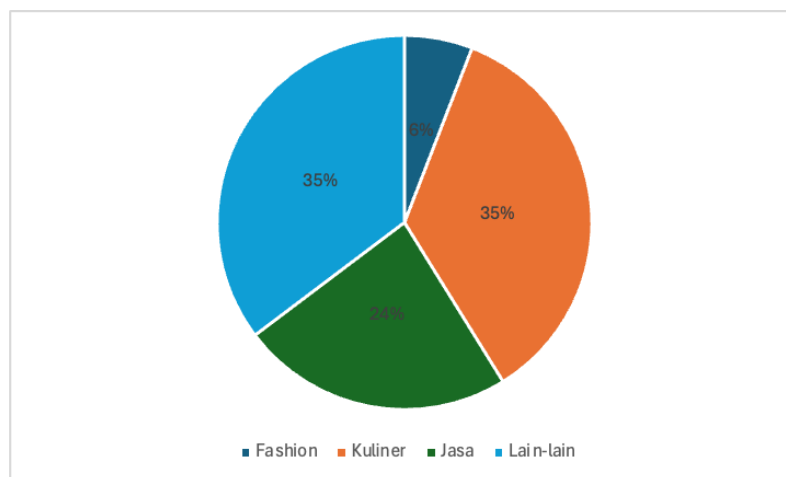
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Banyumas akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Banyumas. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Fase Wirausaha Kab. Banyumas

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	51%	-	-	-
Wirausaha Pemula	40%	Jasa	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	9%	Kuliner	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Banyumas. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Banyumas mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Banyumas mayoritas jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Banyumas:



Gambar 4.55 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Banyumas

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Banyumas. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu fashion, kuliner, jasa, dan lain-lain (kerajinan tangan, percetakan, konter HP,dll).

4.3.3 Kabupaten Batang

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Batang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Batang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

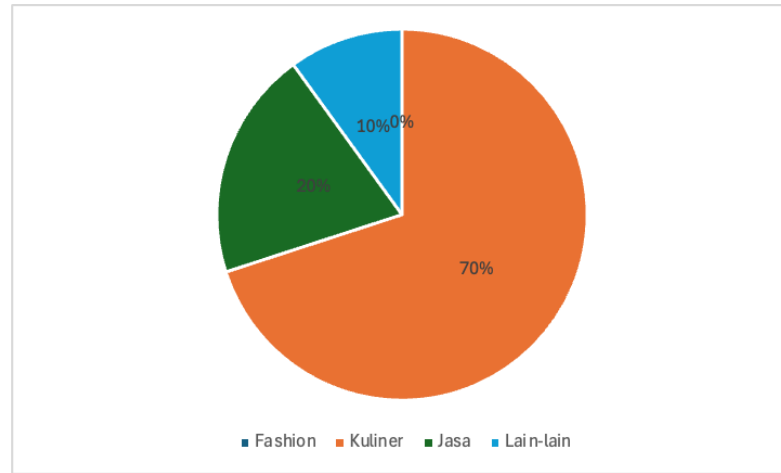
Tabel 4.4 Fase Wirausaha Kab. Batang

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	42%	-	-	-
Wirausaha Pemula	53%	Kuliner	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	5%	Kuliner	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Batang. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Batang mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Batang mayoritas jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet

per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Batang.



Gambar 4.56 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Batang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Batang. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu fashion, kuliner, jasa, dan lain-lain (kerajinan tangan, percetakan, konter HP,dll).

4.3.4 Kabupaten Blora

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Blora akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Blora. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

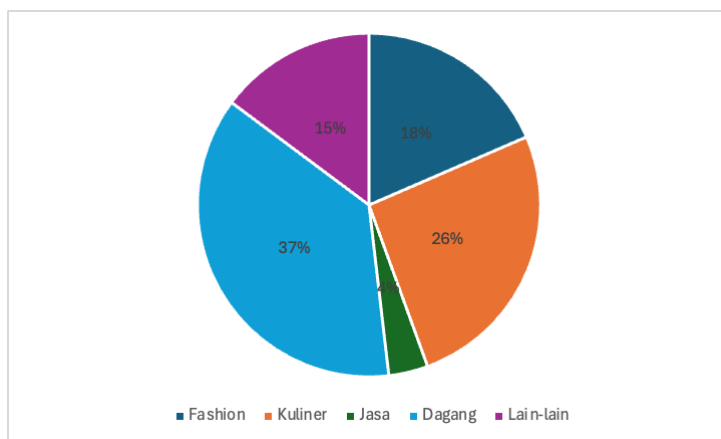
Tabel 4.5 Fase Wirausaha Kab. Blora

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	82%	-	-	-
Wirausaha Pemula	16%	Dagang	Rp. 0 - Rp 100jt	< 1 th
Wirausaha Mapan	2%	Kuliner	Rp. 500jt - Rp 2M	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Blora. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Blora mayoritas memiliki jenis usaha di

bidang dagang dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Blora mayoritas jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.500.000.000 – Rp. 2.000.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Blora.



Gambar 4.57 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Blora

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Blora. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu fashion, kuliner, jasa, dagang, dan lain-lain (kerajinan tangan, percetakan, konter HP,dll).

4.3.5 Kabupaten Boyolali

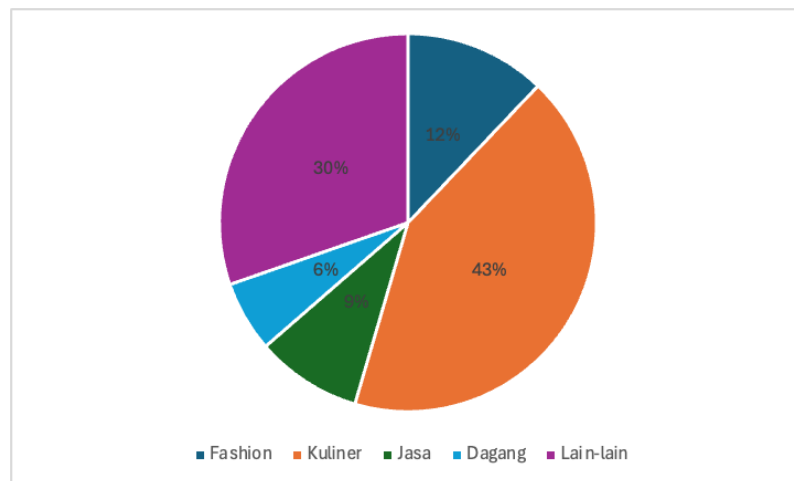
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Boyolali akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Boyolali. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Fase Wirausaha Kab. Boyolali

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	55%	-	-	-
Wirausaha Pemula	42%	Kuliner	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	3%	Jasa	Rp. 500jt - Rp 2M	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Boyolali. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Boyolali mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Boyolali mayoritas jenis usaha di bidang jasa dengan omzet per tahun Rp.500.000.000 – Rp. 2.000.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Boyolali:



Gambar 4.58 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Boyolali

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Batang. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu fashion, kuliner, jasa, dagang, dan lain-lain (kerajinan tangan, percetakan, dll).

4.3.6 Kabupaten Brebes

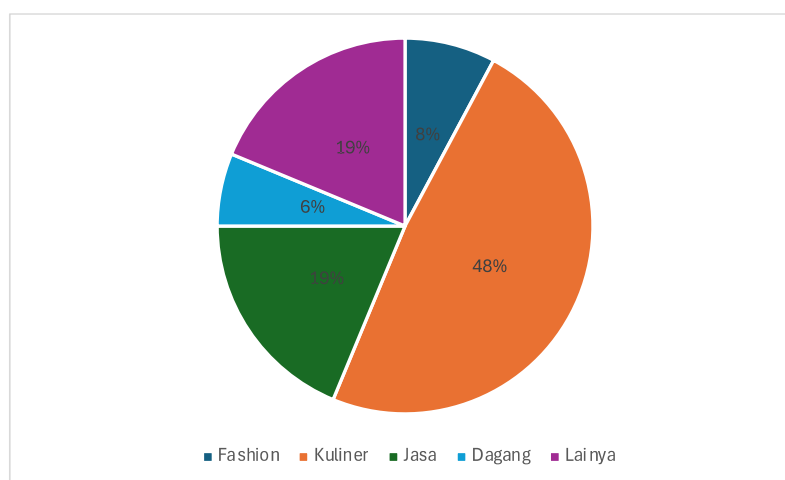
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Brebes akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Brebes. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Fase Wirausaha Kab. Brebes

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	33%	-	-	-
Wirausaha Pemula	48%	Kuliner	Rp. 0 - Rp 100jt	<1 th
Wirausaha Mapan	19%	Kuliner	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Brebes. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Brebes mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Brebes mayoritas jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Brebes:



Gambar 4.59 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Brebes

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Brebes. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu fashion, kuliner, jasa, dan lain-lain (kerajinan tangan, percetakan, konter HP,dll).

4.3.7 Kabupaten Cilacap

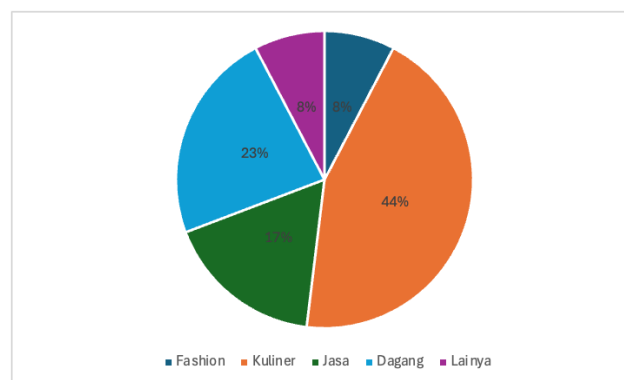
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Cilacap akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Cilacap. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Fase Wirausaha Kab. Cilacap

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	38%	-	-	-
Wirausaha Pemula	48%	Kuliner	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	14%	Kuliner	Rp. 0 - Rp 100jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Cilacap. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Cilacap mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Cilacap mayoritas jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Cilacap:



Gambar 4.60 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Cilacap

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Cilacap. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu

fashion, kuliner, jasa, dan lain-lain (kerajinan tangan, percetakan, konter HP,dll).

4.3.8 Kabupaten Demak

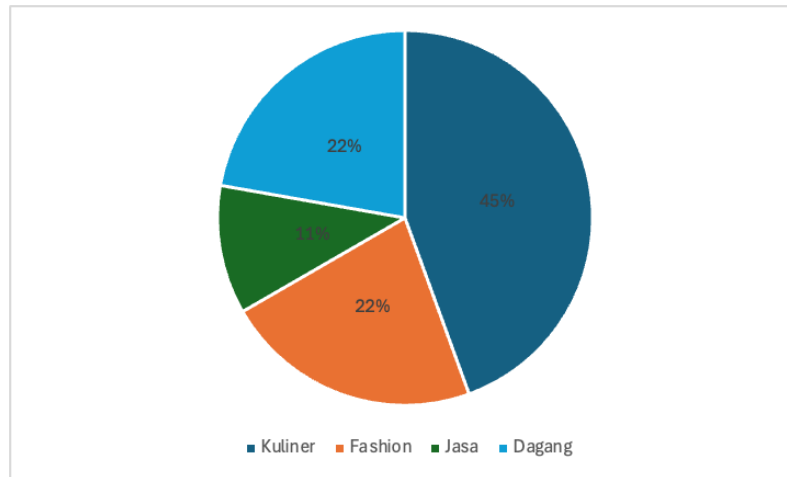
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Demak akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Demak. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Fase Wirausaha Kab. Demak

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	81%	-	-	-
Wirausaha Pemula	19%	Jasa	-	-
Wirausaha Mapan	-	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Demak. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Demak mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa, tetapi informasi terkait omzet dan umur usaha tidak diberikan oleh reponden. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Demak dari data yang diberikan oleh reponden menunjukkan tidak ada yang memenuhi kategori tersebut, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Demak:



Gambar 4.61 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Demak

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Demak. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu fashion, kuliner, jasa, dan lain-lain (kerajinan tangan, percetakan, konter HP,dll).

4.3.9 Kabupaten Grobogan

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Grobogan akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Grobogan. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

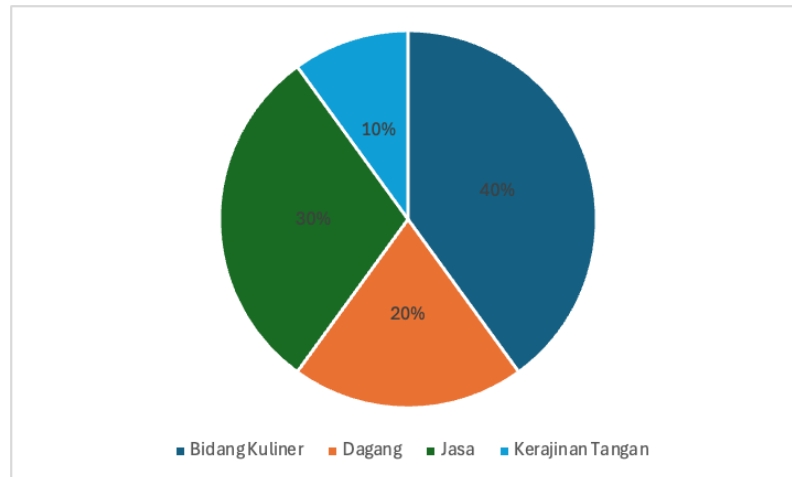
Tabel 4.10 Fase Wirausaha Kab. Grobogan

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	50%	-	-	-
Wirausaha Pemula	45%	Kuliner	Rp. 0 Rp 100jt	< 1 th
Wirausaha Mapan	5%	Jasa	Rp. 100 - Rp 500jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Grobogan. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Grobogan mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Grobogan mayoritas jenis usaha di bidang jasa dengan omzet

per tahun Rp.100.000.000 - Rp.500.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Grobogan:



Gambar 4.62 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Grobogan

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Grobogan. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu fashion, kuliner, jasa, dan lain-lain (kerajinan tangan, percetakan, konter HP,dll).

4.3.10 Kabupaten Jepara

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Jepara akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Jepara. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

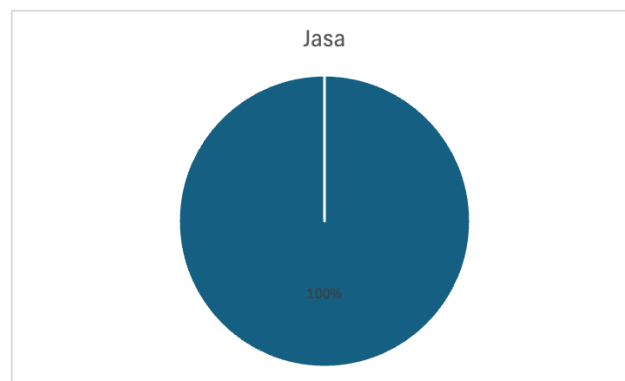
Tabel 4.11 Fase Wirausaha Kab. Jepara

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	33%	-	-	-
Wirausaha Pemula	67%	Jasa	-	-
Wirausaha Mapan	-	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Jepara. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa

wirausaha pemula di Kabupaten Jepara mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa tetapi omzet per tahun dan umur usaha tidak ada informasi yang diberikan oleh responden, sehingga tidak bisa dianalisis lebih lanjut. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Jepara tidak ada responden yang memenuhi kriteria sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Jepara:



Gambar 4.63 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Jepara

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha yang ada di wirausaha pemula kabupaten Jepara keseluruhan berasal dari bidang jasa.

4.3.11 Kabupaten Karanganyar

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Karanganyar akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Karanganyar. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

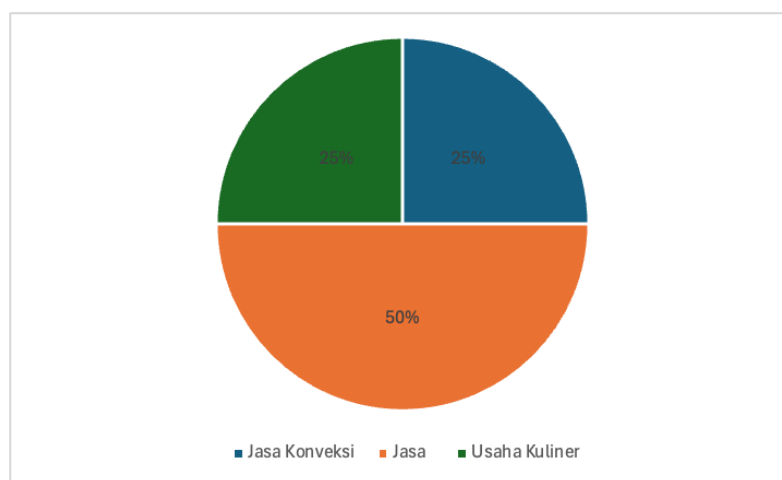
Tabel 4.12 Fase Wirausaha Kab. Karanganyar

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	62%	-	-	-
Wirausaha Pemula	31%	Jasa	Rp. 0 Rp 100jt	< 3,5 th
Wirausaha Mapan	8%	Kuliner	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Karanganyar. Pada kolom jenis usaha didapatkan

bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Karanganyar mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Karanganyar mayoritas jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Karanganyar:



Gambar 4.64 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Karanganyar

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Karanganyar. Secara konsep tergambar 3 usaha yaitu jasa, konveksi, dan kuliner.

4.3.12 Kabupaten Kebumen

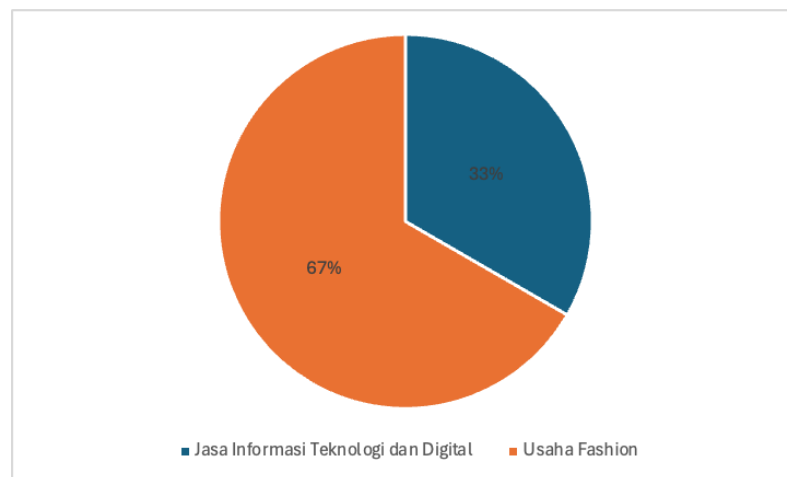
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Kebumen akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Kebumen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13 Fase Wirausaha Kab. Kebumen

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	40%	-	-	-
Wirausaha Pemula	60%	Fashion	Rp.0 – Rp.100 jt	< 1 tahun
Wirausaha Mapan	-	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Kebumen. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Kebumen mayoritas memiliki jenis usaha di bidang fashion dengan omzet per tahun s/d Rp. 100.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Kebumen tidak ada responden yang memenuhi kriteria sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Kebumen:



Gambar 4.65 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Kebumen

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha yang ada di wirausaha pemula kabupaten Kebumen berasal dari 2 bidang yaitu bidang fashion dan bidang jasa informasi teknologi dan digital.

4.3.13 Kabupaten Kendal

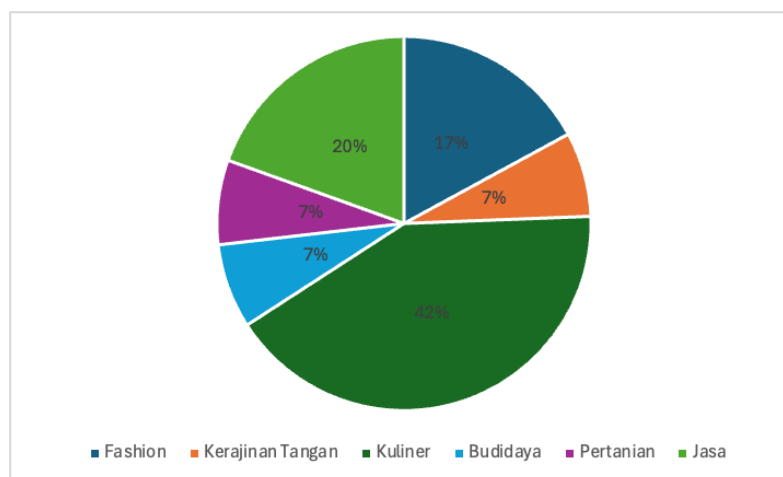
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Karanganyar akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Karanganyar. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14 Fase Wirausaha Kab. Kendal

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	51%	-	-	-
Wirausaha Pemula	46%	Kuliner	Rp. 0-Rp 100jt	1-2 th
Wirausaha Mapan	33%	Kuliner	Rp. 100-Rp. 500 jt	> 3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Kendal. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Kendal mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha 1-2 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Kendal mayoritas jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp. 100.000.000 – Rp. 500.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Kendal:



Gambar 4.66 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Kendal

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Kendal. Secara konsep tergambar 5 usaha yaitu fashion, kerajinan tangan, kuliner, budidaya, pertanian, dan jasa.

4.3.14 Kabupaten Klaten

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Klaten akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha

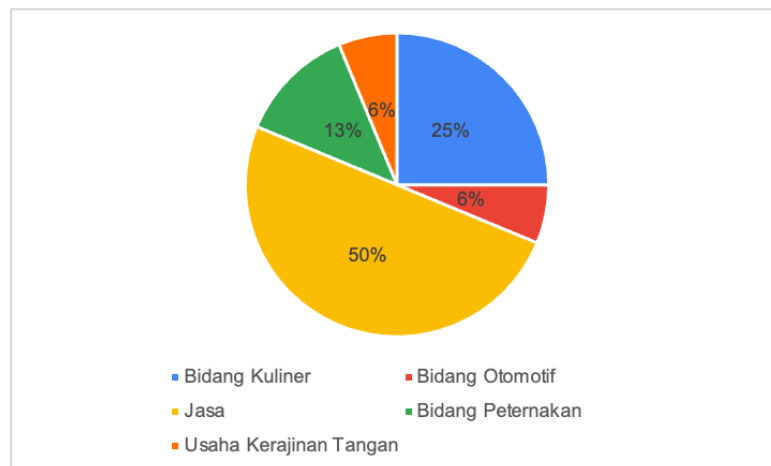
muda yang ada di Kabupaten Klaten. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15 Fase Wirausaha Kab. Klaten

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	43%	-	-	-
Wirausaha Pemula	53%	Jasa	Rp. 0-Rp 100jt	> 3,5 th
Wirausaha Mapan	3%	Jasa	Rp. 100-Rp. 500 jt	> 3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Klaten. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Klaten mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Klaten mayoritas jenis usaha di bidang Jasa dengan omzet per tahun Rp. 100.000.000 – Rp. 500.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Klaten:



Gambar 4.67 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Klaten

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Klaten. Secara konsep tergambar 5 usaha yaitu kuliner, jasa, kerajinan tangan, otomotif, dan peternakan.

4.3.15 Kabupaten Kudus

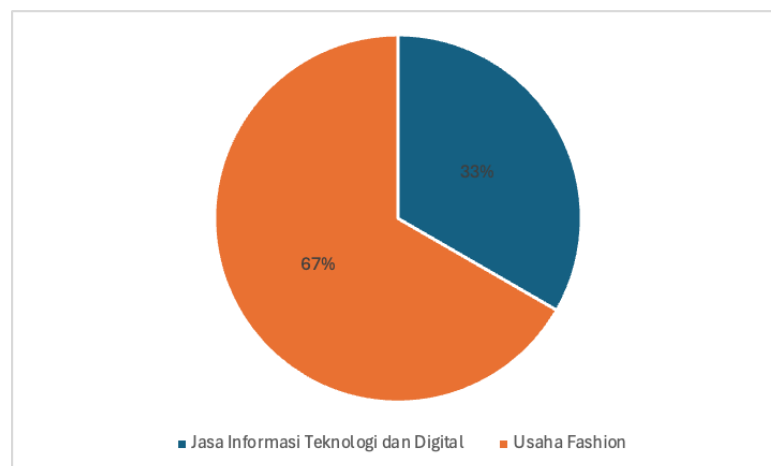
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Kudus akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Kudus. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16 Fase Wirausaha Kab. Kudus

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	40%	-	-	-
Wirausaha Pemula	60%	Jasa	Rp. 0-Rp 100jt	< 1 th
Wirausaha Mapan	3%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Kudus. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Kudus mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Kudus berdasarkan data yang diperoleh tidak ada responden yang memenuhi kriteria dari wirasusaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Kudus:



Gambar 4.68 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Kudus

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Kudus. Secara konsep tergambar 2 usaha yaitu bidang fashion dan jasa informatika teknologi dan digital.

4.3.16 Kabupaten Magelang

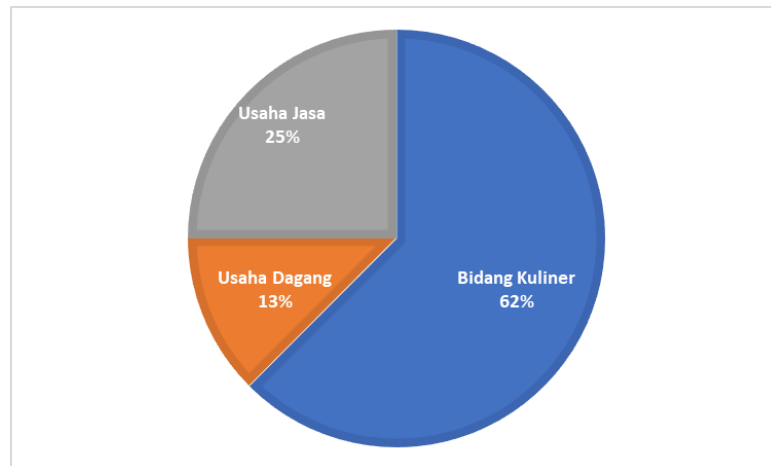
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Magelang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Magelang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.17 Fase Wirausaha Kab. Magelang

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	32%	-	-	-
Wirausaha Pemula	49%	Kuliner	Rp. 0-Rp 100jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	2%	Kuliner	Rp. 0-Rp 100jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Magelang. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Magelang mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Magelang mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Magelang:



Gambar 4.69 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Magelang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kab. Magelang. Secara konsep tergambar 3 usaha yaitu bidang kuliner, dagang, dan jasa.

4.3.17 Kabupaten Pati

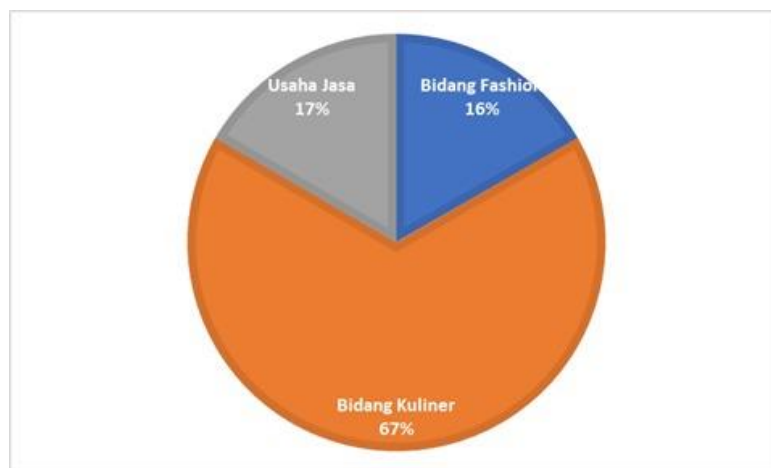
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Pati akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Pati. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18 Fase Wirausaha Kab. Pati

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	45%	-	-	-
Wirausaha Pemula	55%	Kuliner	Rp. 0-Rp 100jt	< 1 th
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Pati. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Pati mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Pati dari data yang ada tidak memenuhi kriteria sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Pati:



Gambar 4.70 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Pati

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Pati. Secara konsep tergambar 3 usaha yaitu kuliner, fashion dan jasa.

4.3.18 Kabupaten Pekalongan

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Pekalongan akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Pekalongan. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

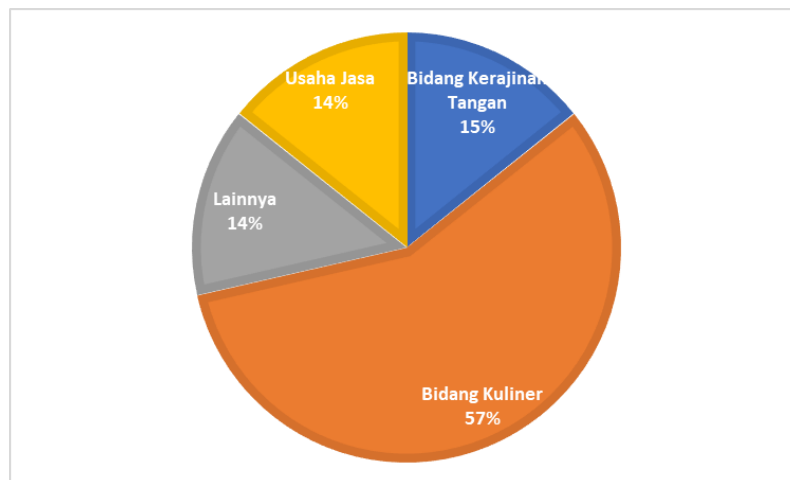
Tabel 4.19 Fase Wirausaha Kab. Pekalongan

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	50%	-	-	-
Wirausaha Pemula	50%	Kuliner	Rp. 0-Rp 100jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Pekalongan. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Pekalongan mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Pekalongan dari data yang ada tidak memenuhi kriteria sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan

informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Pekalongan:



Gambar 4.71 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Pekalongan

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Pekalongan. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu kuliner, jasa, kerajinan tangan, dan lain-lain.

4.3.19 Kabupaten Pemalang

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Pemalang akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Pemalang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

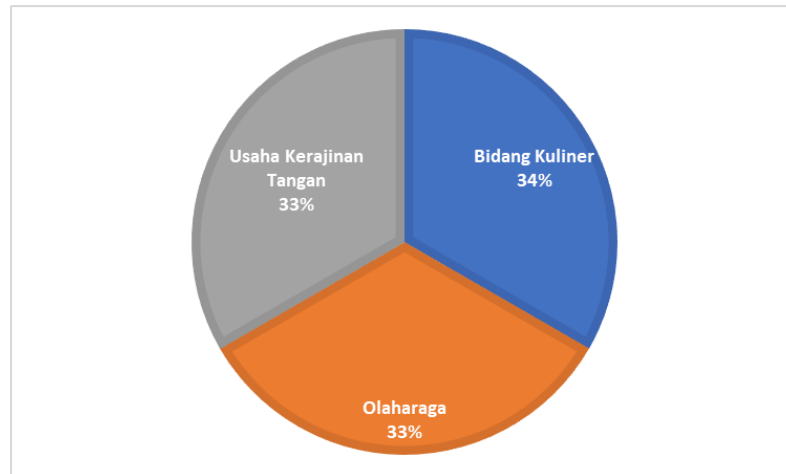
Tabel 4.20 Fase Wirausaha Kab. Pemalang

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	75%	-	-	-
Wirausaha Pemula	13%	Kuliner	Rp. 100-Rp 500jt	2-3,5 th
Wirausaha Mapan	12%	Kuliner	Rp 500 jt – 2M	1-2 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Pemalang. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Pemalang mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.100.000.000 – Rp.

500.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Pemalang mayoritas memiliki jenis usaha kuliner dengan omzet per tahun Rp. 500.00.000 – Rp. 2.000.000.000 dan umur usaha antara 1-2 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Pemalang:



Gambar 4.72 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Pemalang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Pemalang. Secara konsep tergambar 3 usaha yaitu kuliner, kerajinan tangan, dan olahraga.

4.3.20 Kabupaten Purbalingga

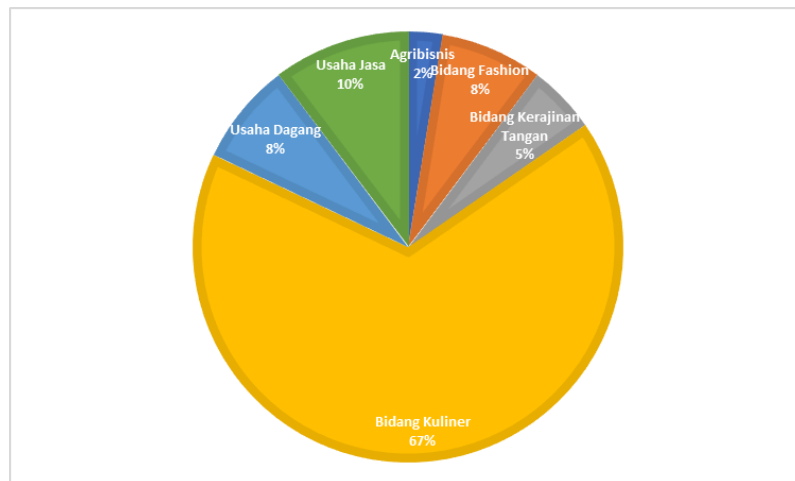
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Purbalingga akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Purbalingga. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.21 Fase Wirausaha Kab. Purbalingga

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	45%	-	-	-
Wirausaha Pemula	55%	Kuliner	Rp. 100-Rp 500jt	<1 th
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Purbalingga mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.100.000.000 – Rp. 500.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data yang ada tidak ada yang memenuhi kriteria sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Purbalingga:



Gambar 4.73 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Purbalingga

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Purbalingga. Secara konsep tergambar 6 usaha yaitu kuliner, kerajinan tangan, dagang, jasa, agribisnis, dan fashion.

4.3.21 Kabupaten Purworejo

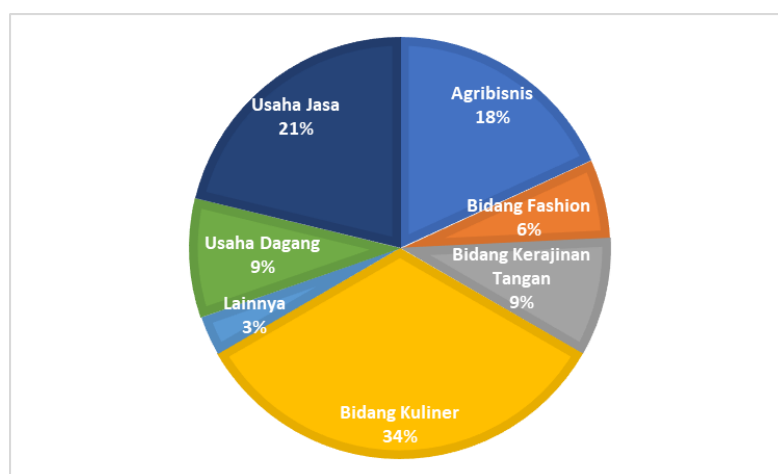
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Purworejo akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Purworejo. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.22 Fase Wirausaha Kab. Purworejo

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	35%	-	-	-
Wirausaha Pemula	60%	Kuliner	Rp. 0-Rp 500jt	<1 th
Wirausaha Mapan	5%	Kuliner	Rp. 0-Rp 500jt	2-3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Purworejo. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Purworejo mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp. 0 – Rp. 500.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Purworejo mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp. 0 – Rp. 500.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Purworejo:



Gambar 4.74 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Purworejo

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Purworejo. Secara konsep tergambar 7 usaha yaitu kuliner, kerajinan tangan, dagang, jasa, agribisnis, fashion, dan lainnya.

4.3.22 Kabupaten Rembang

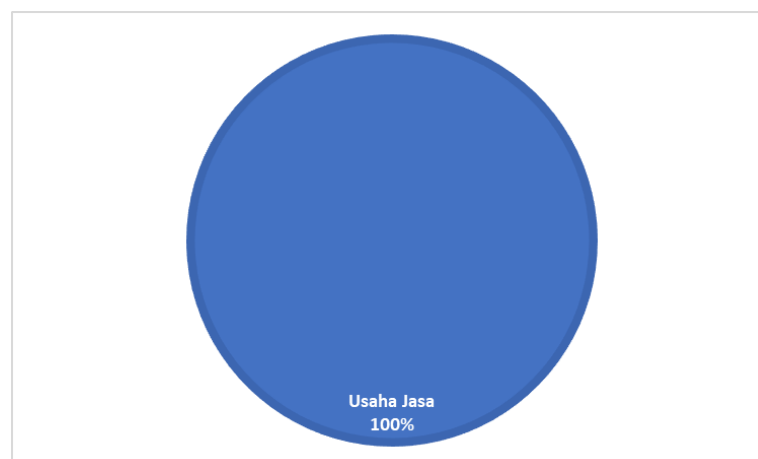
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Rembang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Rembang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.23 Fase Wirausaha Kab. Rembang

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	67%	-	-	-
Wirausaha Pemula	33%	Jasa	-	-
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Rembang. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Rembang mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa dengan omzet per tahun dan umur usaha tidak dapat dianalisis karena tidak diperolehnya data dari responden. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Rembang berdasarkan data yang ada tidak ada yang memenuhi kategori wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Rembang:



Gambar 4.75 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Rembang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Rembang. Secara konsep tergambar 1 usaha yaitu jasa.

4.3.23 Kabupaten Semarang

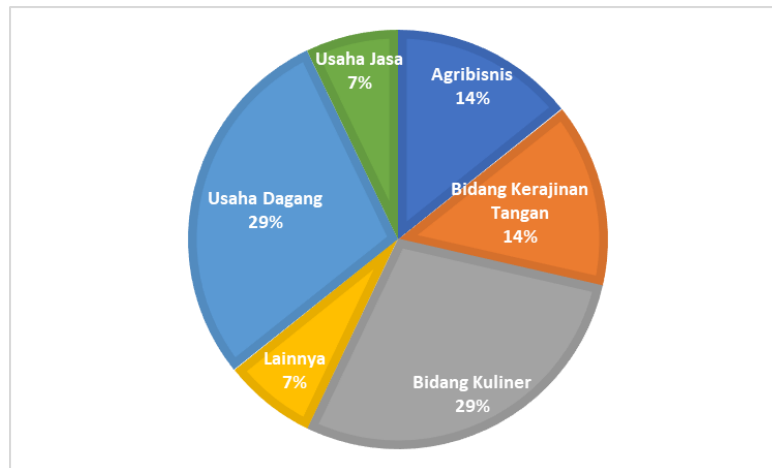
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Semarang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Semarang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.24 Fase Wirausaha Kab. Semarang

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	53%	-	-	-
Wirausaha Pemula	47%	Kuliner	-	-
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Semarang. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Semarang mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun dan umur usaha tidak dapat dianalisis karena tidak diperolehnya data dari responden. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Semarang berdasarkan data yang ada tidak ada yang memenuhi kategori wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Semarang:



Gambar 4.76 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Semarang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Semarang. Secara konsep tergambar 6 usaha yaitu kuliner, kerajinan tangan, dagang, jasa, agribisnis, dan lainnya.

4.3.24 Kabupaten Sragen

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Sragen akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Sragen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

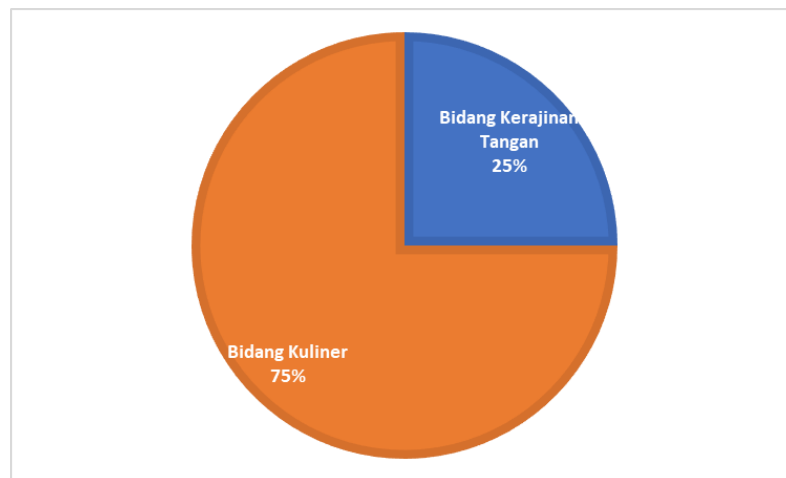
Tabel 4.25 Fase Wirausaha Kab. Sragen

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	55%	-	-	-
Wirausaha Pemula	36%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	> 3,5 th
Wirausaha Mapan	9%	Kerajinan Tangan	> Rp. 4,8M	2-3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Sragen. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Sragen mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.0-Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Sragen mayoritas berasal dari bidang kerajinan tangan dengan omzet lebih dari Rp. 4.800.000.000 dan umur usaha antara 2 sampai 3,5

tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Sragen:



Gambar 4.77 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Sragen

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Sragen. Secara konsep tergambar 2 usaha yaitu kuliner dan kerajinan tangan.

4.3.25 Kabupaten Sukoharjo

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Sukoharjo akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

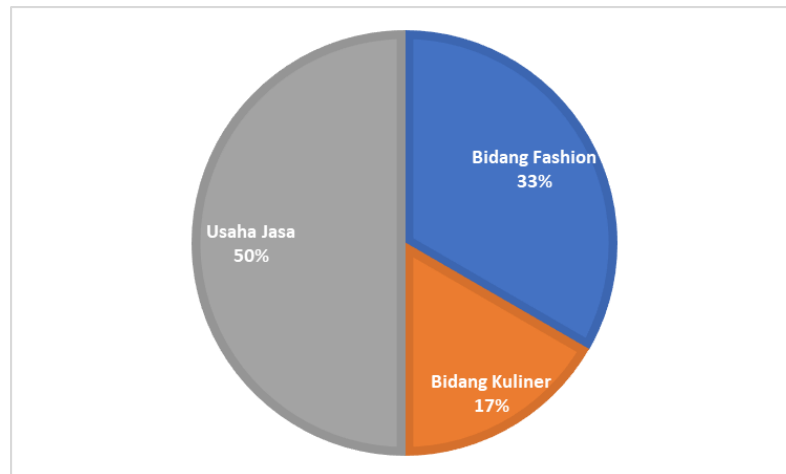
Tabel 4.26 Fase Wirausaha Kab. Sukoharjo

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	0%	-	-	-
Wirausaha Pemula	100%	Jasa	Rp.0-Rp.100 jt	1-2 th
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Sukoharjo mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa dengan omzet per tahun Rp.0-Rp.100.000.000 dan

umur usaha lebih dari 1-2 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Sukoharjo tidak ada yang memenuhi kriteria wirausaha mapan dari data yang diperoleh, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Sukoharjo:



Gambar 4.78 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Sukoharjo

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Sukoharjo. Secara konsep tergambar 2 usaha yaitu kuliner dan kerajinan tangan.

4.3.26 Kabupaten Tegal

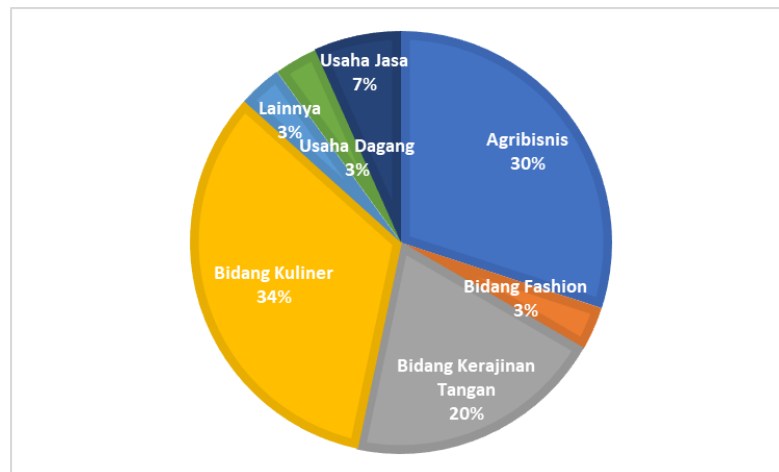
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Tegal akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Tegal. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.27 Fase Wirausaha Kab. Tegal

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	30%	-	-	-
Wirausaha Pemula	65%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	2-3,5 th
Wirausaha Mapan	5%	Agribisnis	Rp.100-Rp.500 jt	2-3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Tegal. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Tegal mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.0-Rp.100.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Tegal mayoritas memiliki jenis usaha di bidang agribisnis dengan omzet per tahun Rp.100.000.000 – Rp.500.000.000, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Tegal:



Gambar 4.79 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Tegal

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Tegal. Secara konsep tergambar 7 usaha yaitu kerajinan tangan, fashion, agribisnis, jasa, dagang, kuliner, dan lainnya.

4.3.27 Kabupaten Temanggung

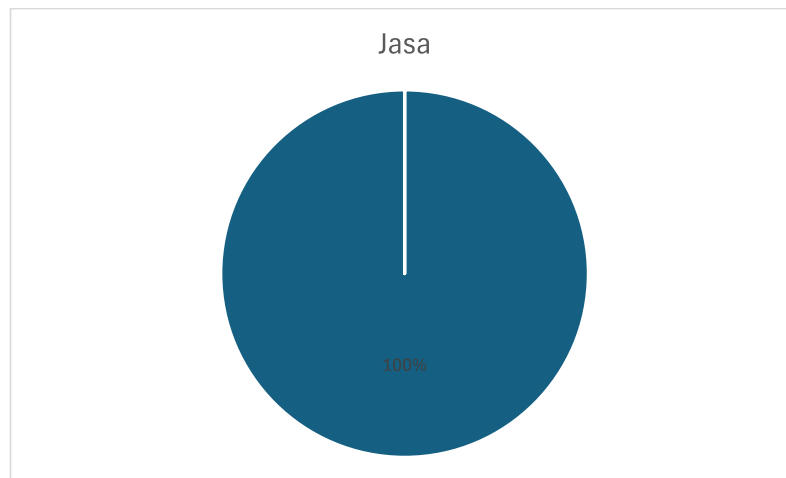
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Temanggung akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Temanggung. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.28 Fase Wirausaha Kab. Temanggung

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	0%	-	-	-
Wirausaha Pemula	50%	Kuliner	-	-
Wirausaha Mapan	50%	Jasa	Rp.0-Rp.100 jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Temanggung. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Temanggung mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet dan umur usaha tidak didapatkan data terkait dari responden. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Temanggung mayoritas memiliki jenis usaha di bidang jasa dengan omzet per tahun s/d - Rp.500.000.000, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Temanggung:



Gambar 4.80 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Temanggung

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Temanggung. Secara konsep tergambar 1 usaha yaitu bidang jasa.

4.3.28 Kabupaten Wonogiri

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Wonogiri akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha

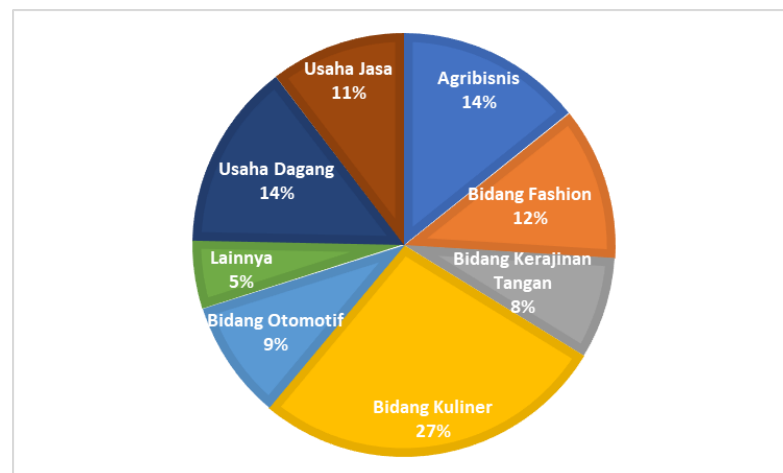
muda yang ada di Kabupaten Wonogiri. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.29 Fase Wirausaha Kab. Wonogiri

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	54%	-	-	-
Wirausaha Pemula	46%	Kuliner	-	-
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Wonogiri. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Wonogiri mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun dan umur usaha tidak didapatkan informasi yang sesuai dari responden. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan data tidak ada yang memenuhi kriteria sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kabupaten Wonogiri:



Gambar 4.81 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kab. Wonogiri

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kabupaten Wonogiri. Secara konsep tergambar 8 usaha yaitu kerajinan tangan, fashion, agribisnis, jasa, dagang, kuliner, otomotif dan lainnya.

4.3.29 Kabupaten Wonosobo

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Wonosobo akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Wonosobo. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.30 Fase Wirausaha Kab. Wonogiri

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	100%	-	-	-
Wirausaha Pemula	0%	-	-	-
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kabupaten Wonosobo tidak ada yang memenuhi kriteria sebagai wirausaha pemula. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kabupaten Wonosobo berdasarkan data tidak ada yang memenuhi kriteria sebagai wirausaha mapan.

4.3.30 Kota Magelang

Analisis wirausaha muda di Kota Magelang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Magelang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

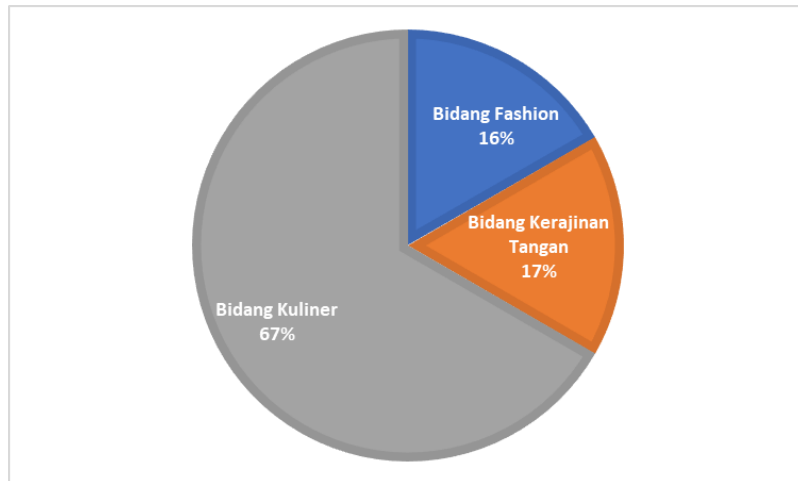
Tabel 4.31 Fase Wirausaha Kota Magelang

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	61%	-	-	-
Wirausaha Pemula	33%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	6%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	2-3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Magelang. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kota Magelang mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.0-Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kota

Magelang mayoritas berasal dari usaha kuliner dengan omzet per tahun Rp.0-Rp.100.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kota Magelang:



Gambar 4.82 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Magelang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kota Magelang. Secara konsep tergambar 3 usaha yaitu kerajinan tangan, fashion, dan kuliner.

4.3.31 Kota Pekalongan

Analisis wirausaha muda di Kota Pekalongan akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Pekalongan. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

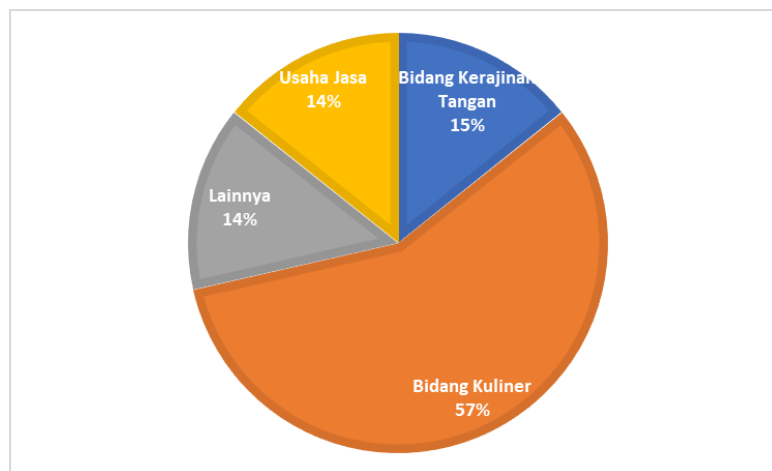
Tabel 4.32 Fase Wirausaha Kota Pekalongan

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	0%	-	-	-
Wirausaha Pemula	88%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	>3,5 th
Wirausaha Mapan	12%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Pekalongan. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa

wirausaha pemula di Kota Pekalongan mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.0-Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kota Pekalongan mayoritas berasal dari usaha kuliner dengan omzet per tahun Rp.0-Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kota Pekalongan:



Gambar 4.83 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Pekalongan

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kota Pekalongan. Secara konsep tergambar 3 usaha yaitu kerajinan tangan, fashion, dan kuliner.

4.3.32 Kota Salatiga

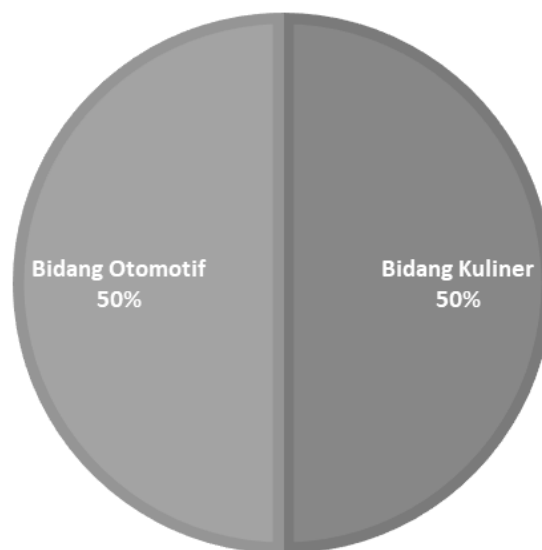
Analisis wirausaha muda di Kota Salatiga akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Salatiga. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.33 Fase Wirausaha Kota Salatiga

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	57%	Kuliner	-	-
Wirausaha Pemula	43%	Kuliner	Rp.500 jt -Rp.2M	2-3,5 th
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Salatiga. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kota Salatiga mayoritas berasal dari usaha kuliner dengan omzet per tahun Rp.500.000.000-Rp.2.000.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kota Salatiga tidak ada data yang memenuhi sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kota Salatiga:



Gambar 4.84 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Salatiga

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kota Salatiga. Secara konsep tergambar 2 usaha yaitu otomotif dan kuliner.

4.3.33 Kota Semarang

Analisis wirausaha muda di Kota Semarang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Semarang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

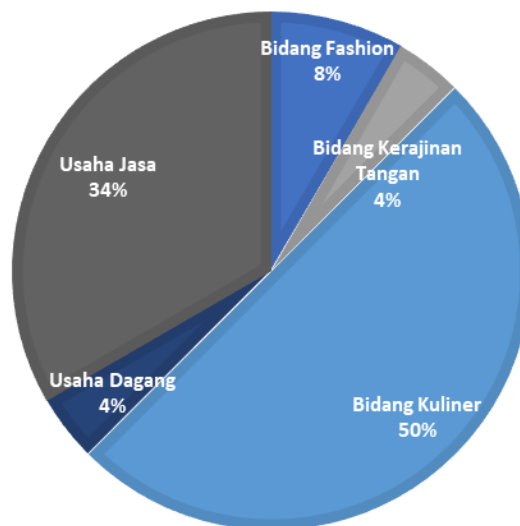
Tabel 4.34 Fase Wirausaha Kota Semarang

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	51%	-	-	-

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Wirausaha Pemula	49%	Kuliner	-	-
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Semarang. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kota Semarang mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun dan umur usaha yang tidak dapat dianalisis karena data tidak tersedia. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kota Semarang tidak ada data yang memenuhi sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kota Semarang:



Gambar 4.85 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Semarang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kota Semarang. Secara konsep tergambar 5 usaha yaitu kuliner, dagang, jasa, fashion, dan kerajinan tangan.

4.3.34 Kota Surakarta

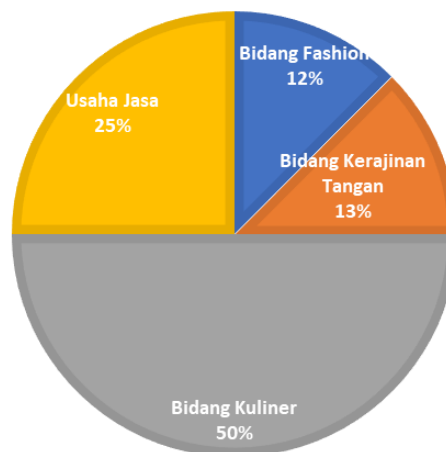
Analisis wirausaha muda di Kota Surakarta akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Surakarta. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.35 Fase Wirausaha Kota Surakarta

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	53%	-	-	-
Wirausaha Pemula	47%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	1-2 th
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Surakarta. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kota Surakarta mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.0-Rp.100.000.000 dan umur usaha antara 1-2 tahun. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kota Surakarta tidak ada data yang memenuhi sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kota Surakarta:



Gambar 4.86 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Surakarta

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kota Surakarta. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu kuliner, jasa, fashion, dan kerajinan tangan.

4.3.35 Kota Tegal

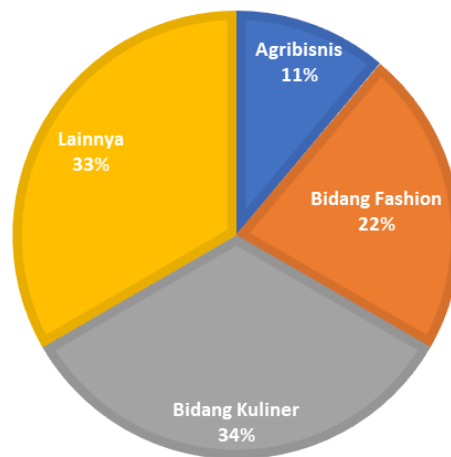
Analisis wirausaha muda di Kota Tegal akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Tegal. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.36 Fase Wirausaha Kota Tegal

Fase	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Calon Wirausaha	10%	-	-	-
Wirausaha Pemula	90%	Kuliner	-	-
Wirausaha Mapan	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas merupakan data tertinggi dari kondisi wirausaha muda yang ada di Kota Tegal. Pada kolom jenis usaha didapatkan bahwa wirausaha pemula di Kota Tegal mayoritas memiliki jenis usaha di bidang kuliner dengan omzet dan umur usaha tidak dapat dianalisis karena tidak ada informasi yang tersedia. Berikutnya terkait wirausaha mapan di Kota Tegal tidak ada data yang memenuhi sebagai wirausaha mapan, maka pada gambar di bawah ditampilkan informasi lain yaitu jenis usaha wirausaha pemula yang ada di Kota Tegal:



Gambar 4.87 Jenis Usaha Fase Wirausaha Kota Tegal

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui jenis usaha lainnya pada wirausaha pemula di Kota Tegal. Secara konsep tergambar 4 usaha yaitu kuliner, fashion, agribisnis dan lainnya.

4.4 ANALISIS WIRAUSAHA TEMATIK BERDASARKAN TEMATIK PER KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Analisis pada bab ini akan memuat hal-hal penting terkait kondisi wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah yang akan di potret berdasarkan

Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Tengah. Secara detail dapat dilihat sebagai berikut ini:

4.4.1 Kabupaten Banjarnegara

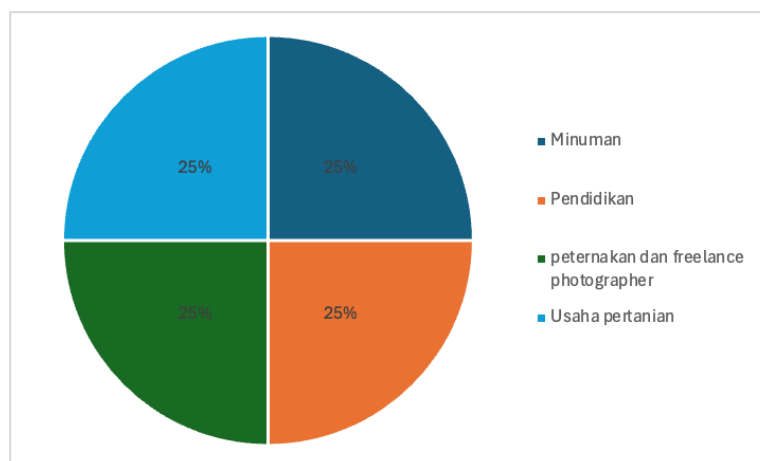
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Banjarnegara akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.37 Wirausaha Tematik Kabupaten Banjarnegara

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	100%	Agribisnis	-	-
Perempuan	0%	-	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas berasal dari bidang agribisnis dengan omzet yang tidak diketahui karena responden tidak memberikan data terkait dan umur usaha juga tidak diketahui karena responden tidak memberikan data terkait. Untuk tematik social, Perempuan dan desa tidak bisa di analisis karena dari data yang ada tidak memenuhi kriteria tematik tersebut. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.88 Jenis Tematik Teknologi Kabupaten Banjarnegara

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang agribisnis, dll

4.4.2 Kabupaten Banyumas

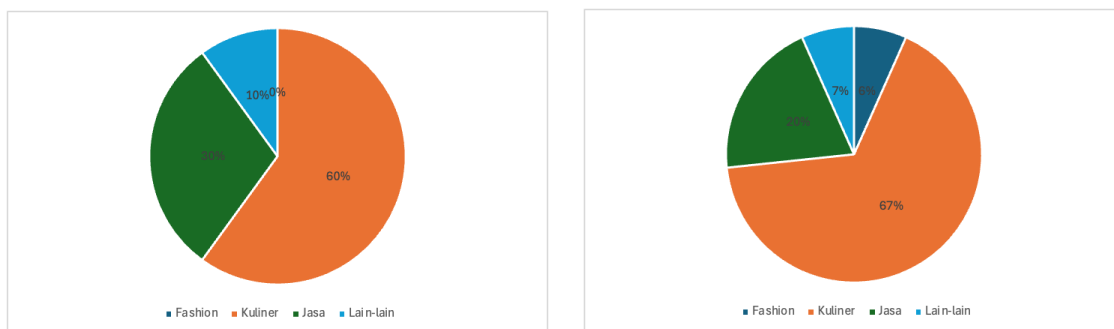
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Banyumas akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda yang ada di Kabupaten Banyumas. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.38 Wirausaha Tematik Kabupaten Banyumas

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	3%	-	-	-
Teknologi	54%	Kuliner	0-100 jt	>3,5 tahun
Perempuan	41%	Kuliner	0-100 jt	>3,5 tahun
Desa	3%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas berasal dari bidang kuliner dengan omzet sd Rp. 100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Untuk tematik Perempuan 41 %, sosial dan desa diketahui terdapat 3%. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.89 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Banyumas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang kuliner, dll.

4.4.3 Kabupaten Batang

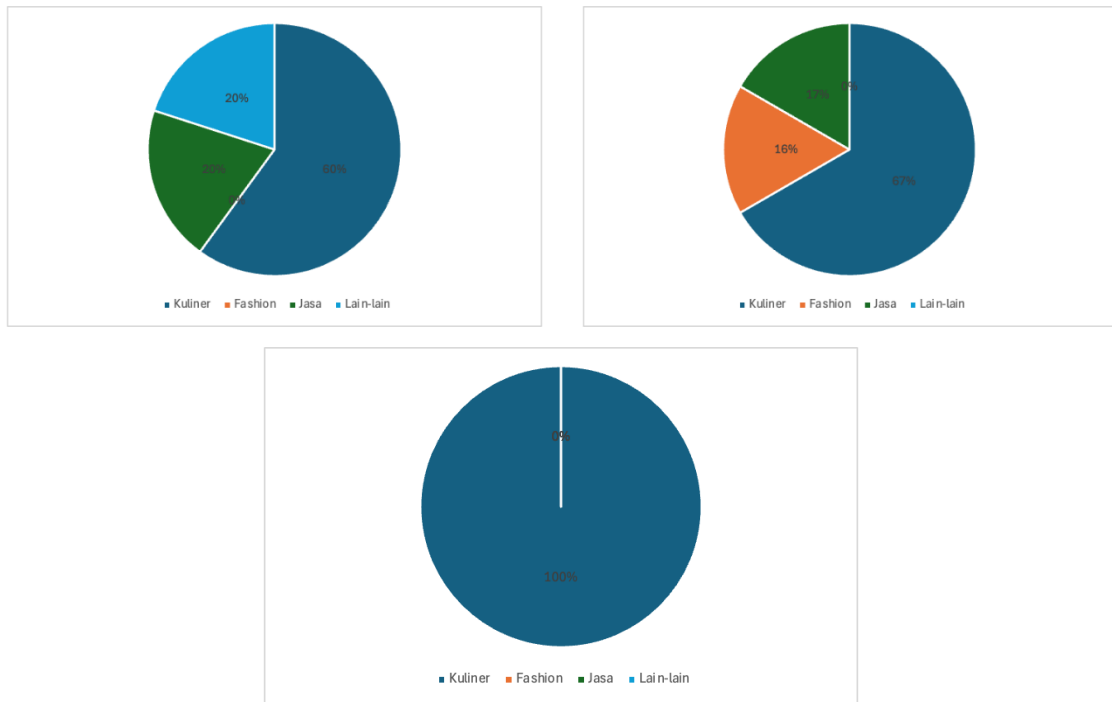
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Batang akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Batang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.39 Wirausaha Tematik Kabupaten Batang

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	56%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	2 tahun - 3,5 tahun
Perempuan	33%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	>3,5 tahun
Desa	11%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	> 1 tahun

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Batang. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas berasal dari bidang kuliner dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan masa waktu usaha 2 tahun – 3,5 tahun. Untuk tematik Perempuan 33% dan desa diketahui terdapat 11% sehingga menempati posisi tertinggi kedua dan tiga. Sedangkan untuk tematik social tidak bisa di analisis karena dari data yang ada tidak memenuhi kriteria tematik tersebut. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.90 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Batang

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang kuliner, dll.

4.4.4 Kabupaten Blora

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Blora akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Blora. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

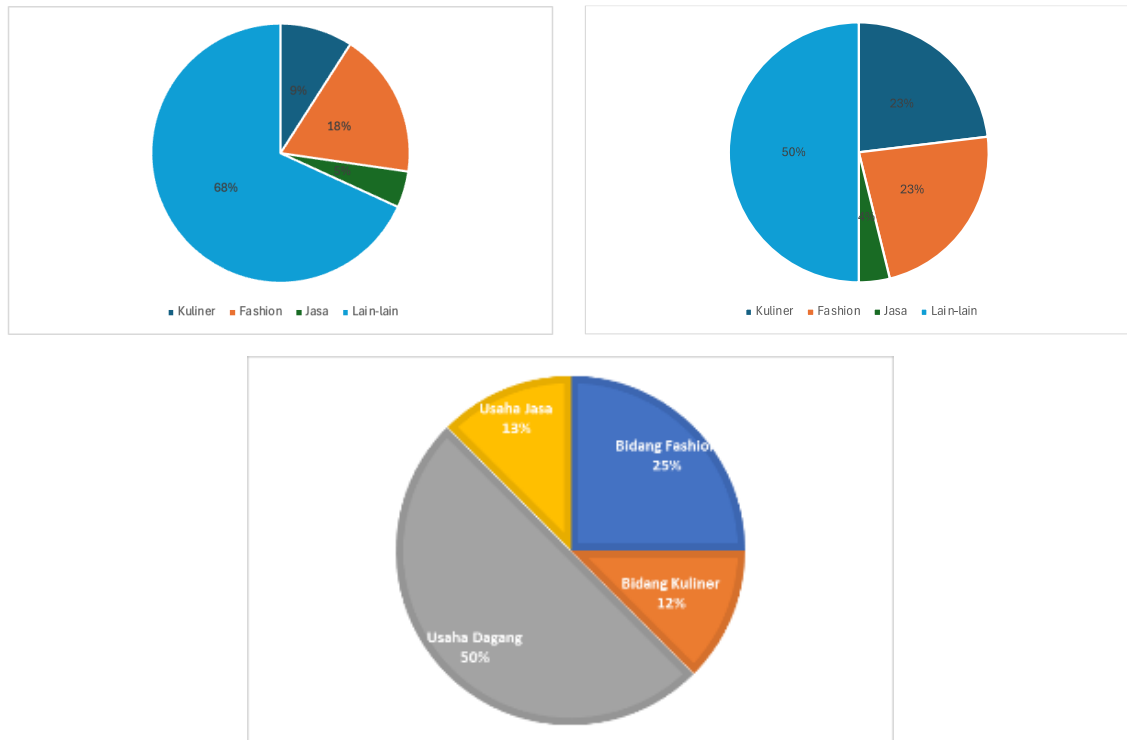
Tabel 4.40 Wirausaha Tematik Kabupaten Blora

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	39%	Lainnya	0 – Rp. 100jt	> 1 tahun
Perempuan	46%	Lainnya	0 – Rp. 100jt	> 1 tahun
Desa	16%	Dagang	0 – Rp. 100jt	> 1 tahun

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Blora. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik perempuan mayoritas tertinggi dengan 46% berasal dari bidang lainnya

dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan masa waktu usaha >1 tahun. Untuk tematik teknologi 39% dan desa diketahui terdapat 16% sehingga menempati posisi tertinggi kedua dan tiga. Sedangkan untuk tematik social tidak bisa di analisis karena dari data yang ada tidak memenuhi kriteria tematik tersebut. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.91 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Blora

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.5 Kabupaten Boyolali

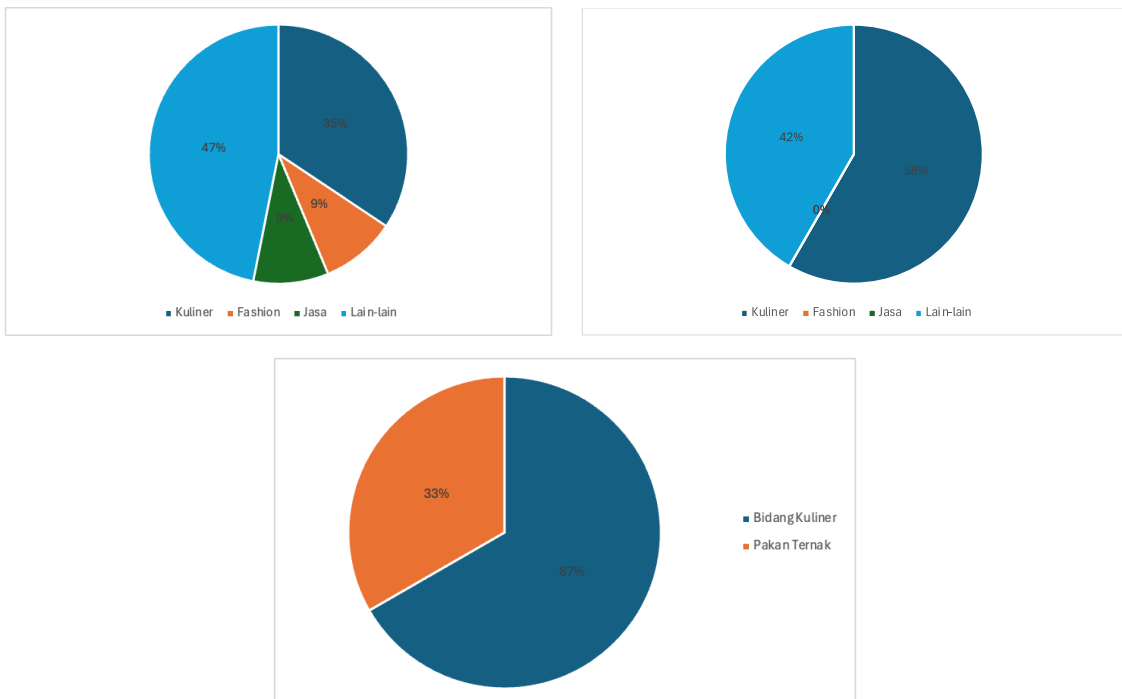
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Boyolali akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Boyolali. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.41 Wirausaha Tematik Kabupaten Boyolali

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	2%	Kuliner	2 M – 4,8 M	> 1 tahun
Teknologi	65%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	> 3,5 tahun
Perempuan	27%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	> 3,5 tahun
Desa	6%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	> 3,5 tahun

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 65% berasal dari bidang kuliner dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan masa waktu usaha >3,5 tahun. Untuk tematik Perempuan 27%, tematik desa dengan 6% dan sosial diketahui terdapat 2%. Dengan omzet tertinggi pada 2M – 4,8 M diurutan tematik social. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.92 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Boyolali

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.6 Kabupaten Brebes

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Brebes akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Brebes. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

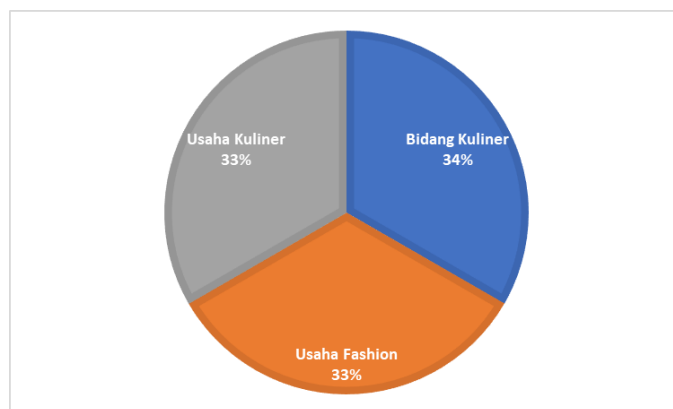
Tabel 4.42 Wirausaha Tematik Kabupaten Brebes

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	64%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	> 3,5 tahun
Perempuan	25%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	> 3,5 tahun
Desa	11%	Kuliner	Rp 100 jt – Rp. 500jt	> 3,5 tahun

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 64% berasal dari bidang kuliner dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan masa waktu usaha >3,5 tahun. Untuk tematik Perempuan 25%, tematik desa dengan 11% dan sosial diketahui terdapat 0%. Dengan omzet tertinggi pada Rp. 100.000.000 – Rp. 500.000.000 diurutkan tematik social. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:





Gambar 4.93 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Brebes

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.7 Kabupaten Cilacap

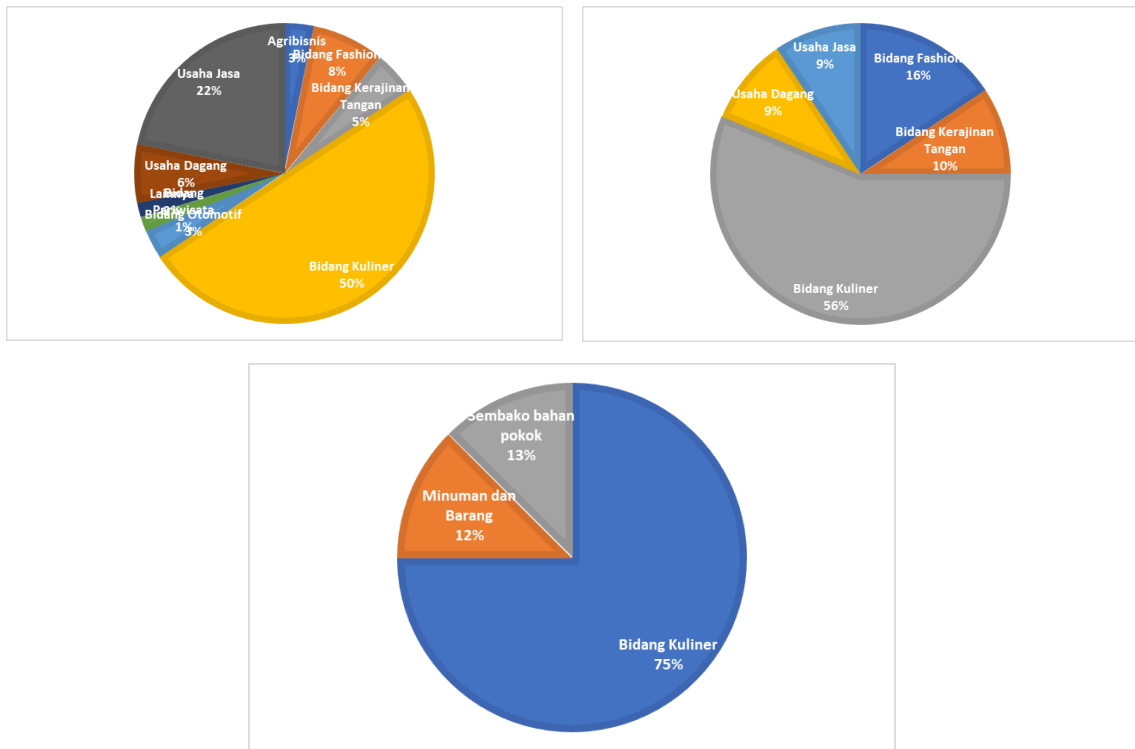
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Cilacap akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Cilacap. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.43 Wirausaha Tematik Kabupaten Cilacap

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	61%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	2 tahun - 3,5 tahun
Perempuan	31%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	2 tahun - 3,5 tahun
Desa	8%	Kuliner	0 – Rp. 100jt	> 3,5 tahun

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 61% berasal dari bidang kuliner dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan masa waktu usaha 2 tahun - 3,5 tahun. Untuk tematik Perempuan 31%, tematik desa dengan 8% dan sosial diketahui terdapat 0. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.94 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Cilacap

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.8 Kabupaten Demak

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Demak akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Demak. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

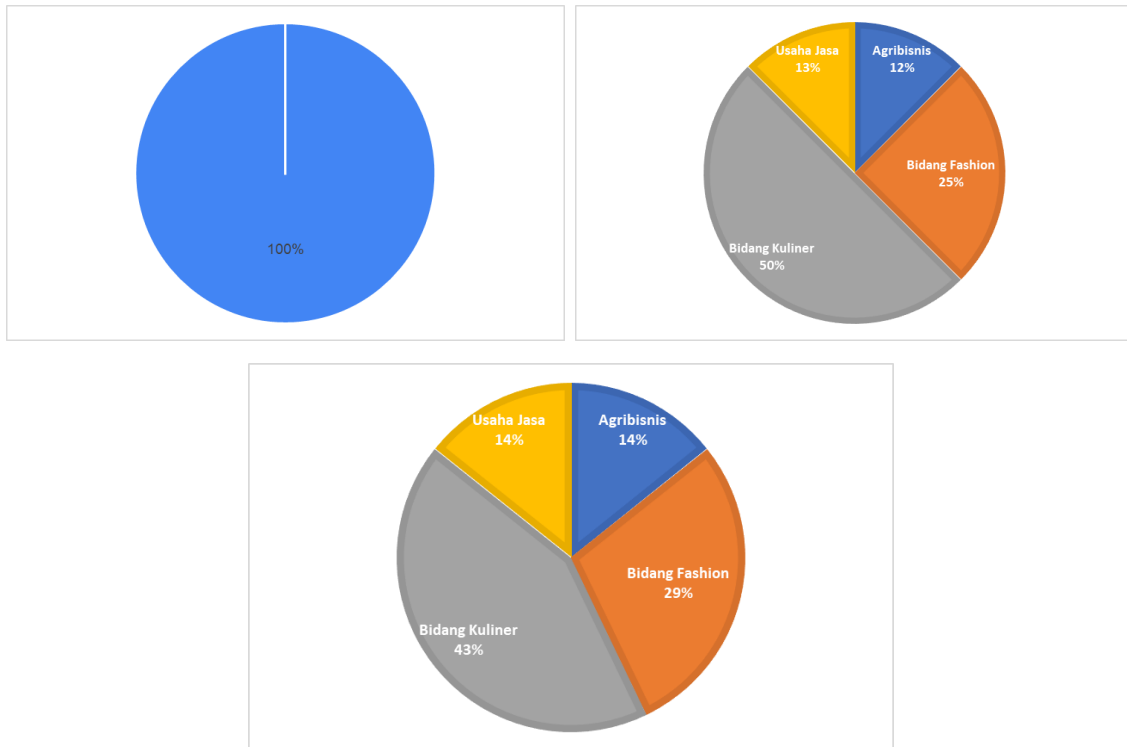
Tabel 4.44 Wirausaha Tematik Kabupaten Demak

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	6%	Kuliner	-	-
Teknologi	47%	Kuliner	-	-
Perempuan	41%	Kuliner	-	-
Desa	6%	Kuliner	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Demak. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 47% berasal dari bidang

kuliner dengan omzet dan lama usaha yang tidak disajikan karena tidak terdapat data. Untuk tematik Perempuan 41%, tematik desa dengan 6% dan sosial diketahui 6%. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.95 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Demak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.9 Kabupaten Grobogan

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Grobogan akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Grobogan. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

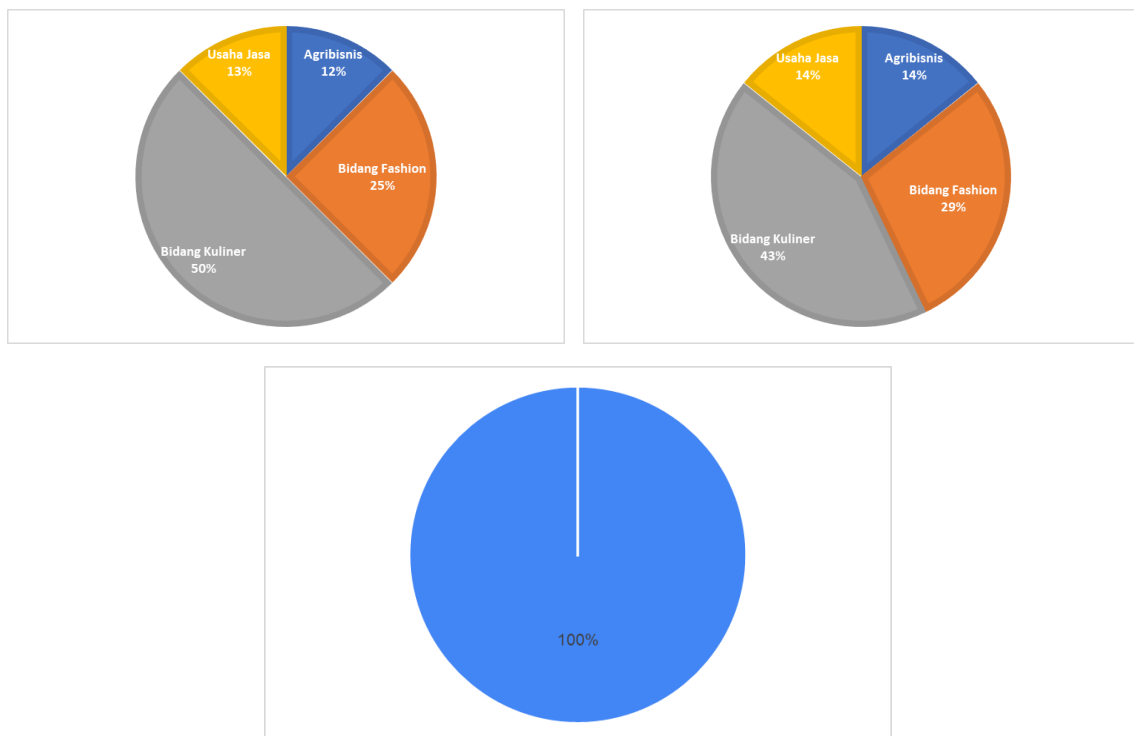
Tabel 4.45 Wirausaha Tematik Kabupaten Grobogan

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	65%	Kuliner	-	-
Perempuan	29%	Kuliner	-	-

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Desa	6%	Kuliner	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Demak. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 65% berasal dari bidang kuliner dengan omzet dan lama usaha yang tidak disajikan karena tidak terdapat data. Untuk tematik Perempuan 29%, tematik desa dengan 6% dan sosial tidak ada data yang disajikan. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.96 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Grobogan

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.10 Kabupaten Jepara

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Jepara akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha

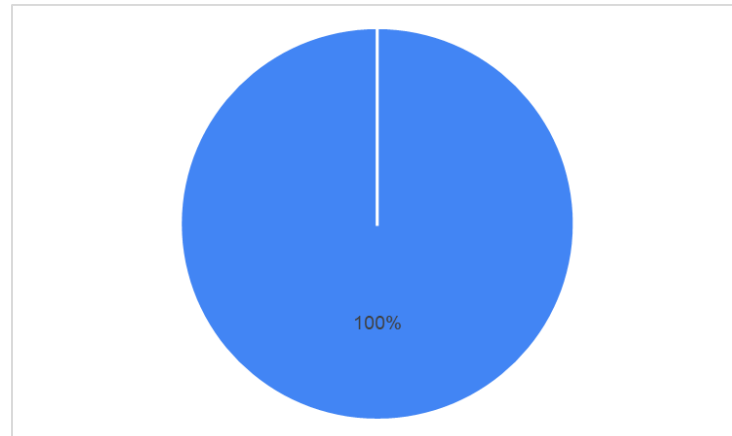
muda per tematik yang ada di Kabupaten Jepara. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.46 Wirausaha Tematik Kabupaten Jepara

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	100%	Kuliner	-	-
Perempuan	0%	-	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 100% berasal dari bidang kuliner dengan omzet dan lama usaha yang tidak disajikan karena tidak terdapat data. Untuk tematik Perempuan, tematik desa dan sosial tidak ada data yang disajikan. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut



Gambar 4.97 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Jepara

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.11 Kabupaten Karanganyar

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Karanganyar akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha

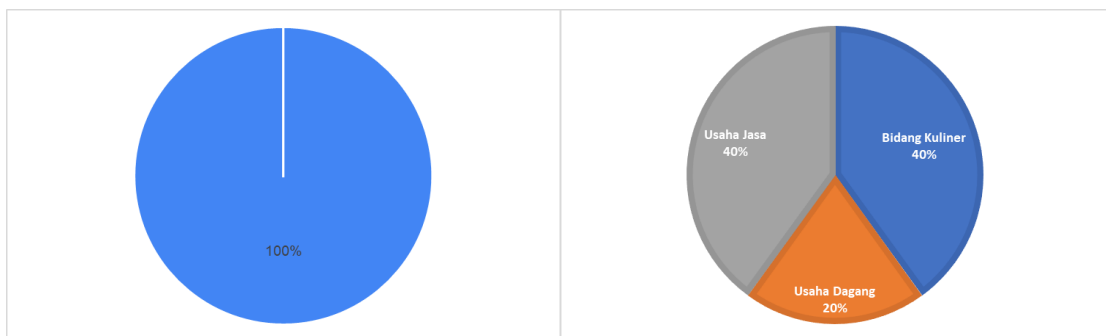
muda per tematik yang ada di Kabupaten Karanganyar. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.47 Wirausaha Tematik Kabupaten Karanganyar

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	83%	Kuliner	Rp 100 jt – Rp. 500 jt	> 3,5 tahun
Perempuan	17%	Kuliner	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 83% berasal dari bidang kuliner dengan omzet Rp. 100.000.000 s/d Rp. 500.000.000 dan lama usaha yang tidak disajikan karena tidak terdapat data. Untuk tematik Perempuan 17 %, tematik desa dan sosial tidak ada data yang disajikan. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut



Gambar 4.98 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Karanganyar

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.12 Kabupaten Kebumen

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Kebumen akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha

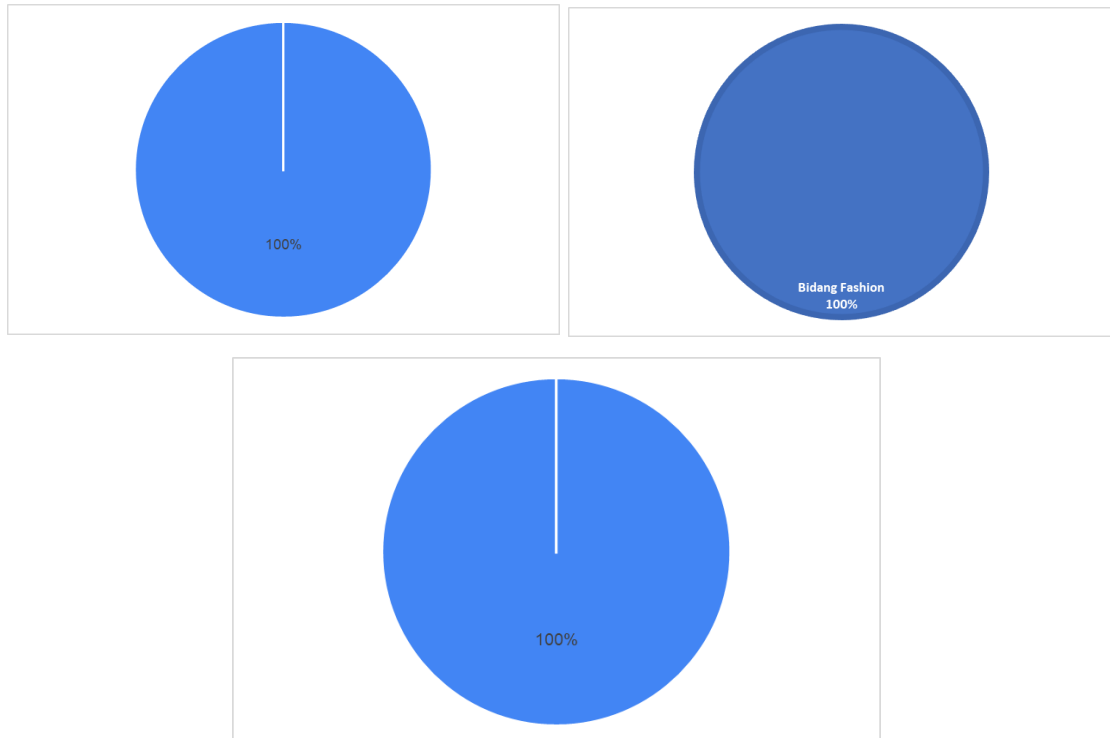
muda per tematik yang ada di Kabupaten Kebumen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.48 Wirausaha Tematik Kabupaten Kebumen

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	25%	-	-	-
Teknologi	50%	Fashion	-	-
Perempuan	0%	-	-	-
Desa	25%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 50% berasal dari bidang fashion dengan omzet dan lama usaha yang tidak disajikan karena tidak terdapat data. Untuk tematik desa dan sosial 25%. Sedangkan tematik Perempuan tidak ada data yang disajikan. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut



Gambar 4.99 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Kebumen

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.13 Kabupaten Kendal

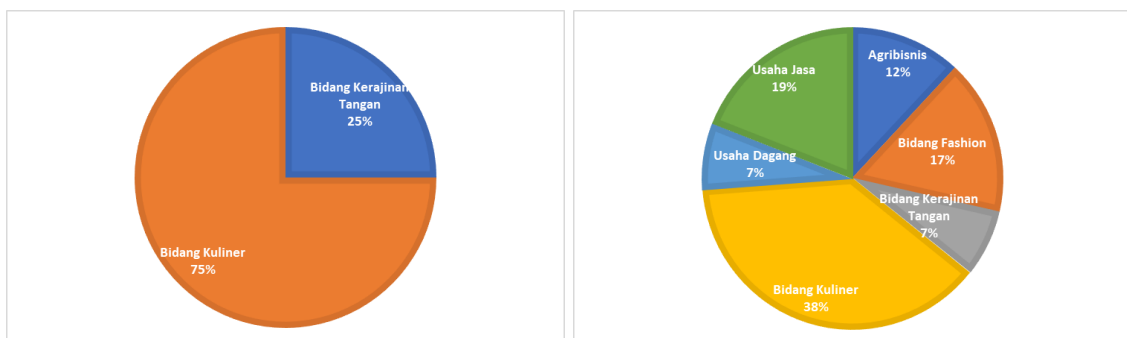
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Kendal akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Kendal. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

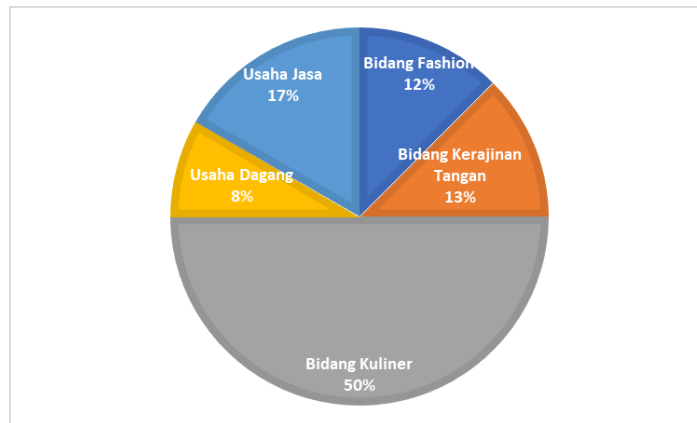
Tabel 4.49 Wirausaha Tematik Kabupaten Kendal

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	59%	Kuliner	0 – Rp. 100 jt	1 tahun - 2 tahun
Perempuan	36%	Kuliner	0 – Rp. 100 jt	> 1 tahun
Desa	6%	Kuliner	0 – Rp. 100 jt	1 tahun - 2 tahun

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Kendal. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 59% berasal dari bidang kuliner dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan lama usaha 1 tahun – 2 tahun. Untuk tematik Perempuan 36% dan desa 6%. Sedangkan tematik sosial tidak ada data yang disajikan. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut.





Gambar 4.100 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Kendal

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.14 Kabupaten Klaten

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Klaten akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Klaten. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

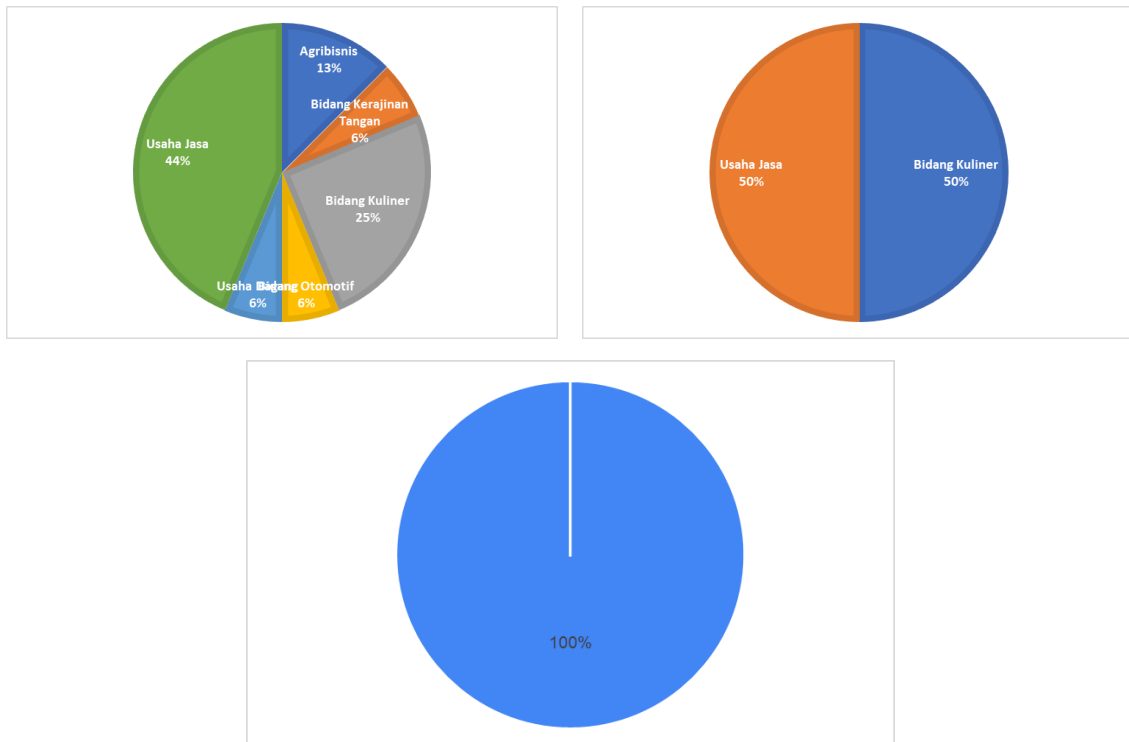
Tabel 4.50 Wirausaha Tematik Kabupaten Klaten

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	84%	Jasa	0 – Rp. 100 jt	>3,5 tahun
Perempuan	11%	Jasa	0 – Rp. 100 jt	1 tahun - 2 tahunan
Desa	5%	Kuliner	0 – Rp. 100 jt	1 tahun - 2 tahunan

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 84% berasal dari bidang jasa dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan lama usaha >3,5 tahun. Untuk tematik Perempuan 11% dengan bidang jasa dan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan desa 5% dengan bidang kuliner dengan omzet s/d Rp. 100.000.000. Sedangkan tematik sosial tidak ada data yang disajikan. Untuk

menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.101 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Klaten

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainnya, dll.

4.4.15 Kabupaten Kudus

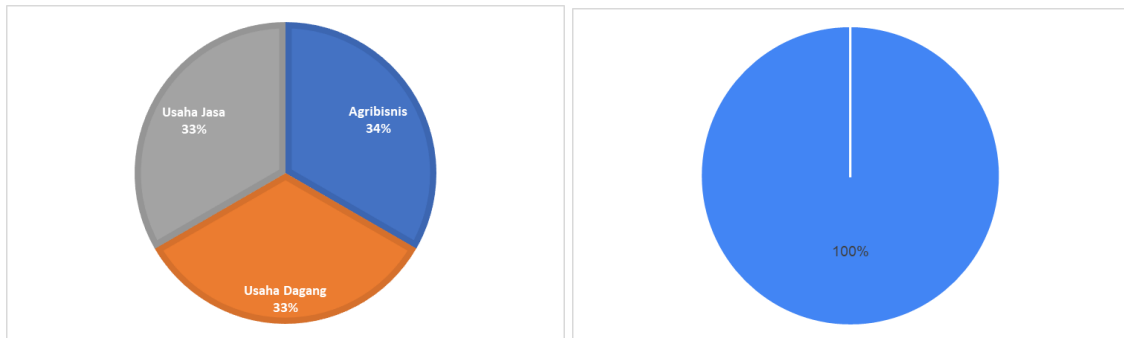
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Kudus akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Kudus. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.51 Wirausaha Tematik Kabupaten Kudus

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	75%	Agribisnis	0 – Rp. 100 jt	>3,5 tahun
Perempuan	25%	Kuliner	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Kudus. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 75% berasal dari bidang Agribisnis dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan lama usaha >3,5 tahun. Untuk tematik Perempuan 25% namun bidang, omzet dan umur tidak disajikan dalam data. Sedangkan tematik sosial dan desa tidak ada data yang disajikan. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.102 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Kudus

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainya, dll.

4.4.16 Kabupaten Magelang

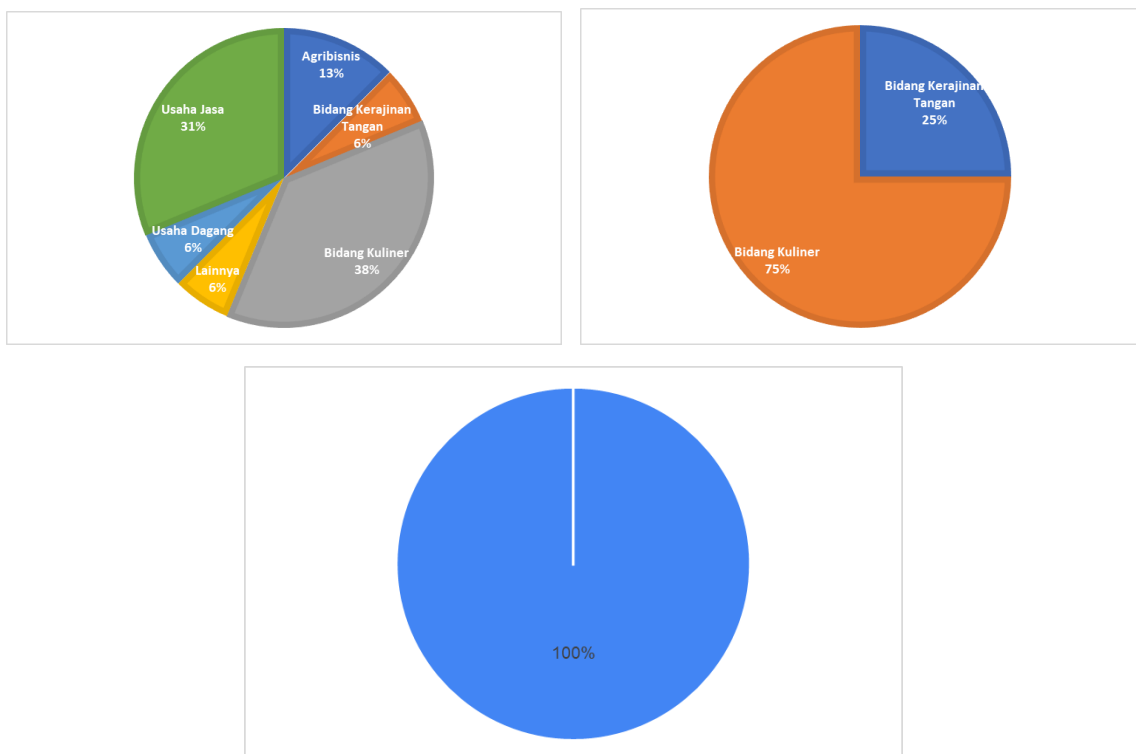
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Magelang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Magelang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.52 Wirausaha Tematik Kabupaten Magelang

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	68%	Kuliner	0 – Rp. 100 jt	>3,5 tahun
Perempuan	18%	Kuliner	0 – Rp. 100 jt	>3,5 tahun
Desa	14%	-	Rp 100 jt – Rp 500 jt	1 tahun - 2 tahun

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha teknologi yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik teknologi mayoritas tertinggi dengan 68% berasal dari bidang Agribisnis dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan lama usaha >3,5 tahun. Untuk tematik Perempuan 18% dengan omzet s/d Rp. 100.000.000 dan lama usaha >3,5 tahun. Tematik desa dengan 14% bidang usaha kuliner dan omzet Rp. 100.000.000 s/d Rp. 500.000.000 lama masa usaha 1 tahun – 2 tahun. Sedangkan tematik social tidak ada data yang disajikan. Untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.103 Jenis Usaha Wirausaha Tematik Kabupaten Magelang

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha didominasi dari bidang lainya, dll.

4.4.17 Kabupaten Pati

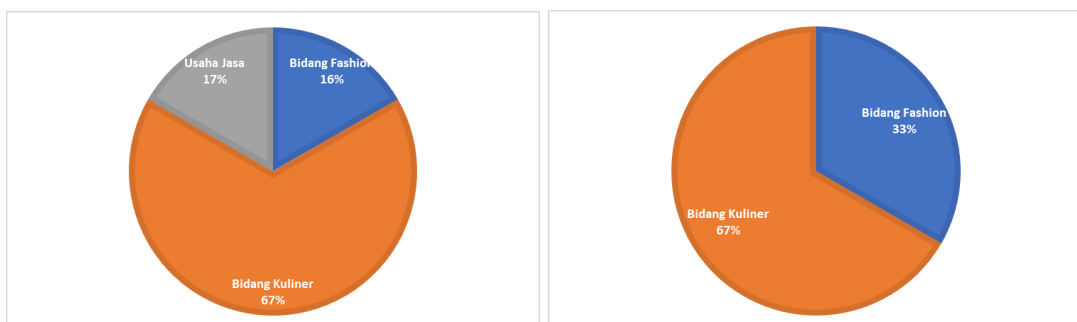
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Pati akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Pati. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

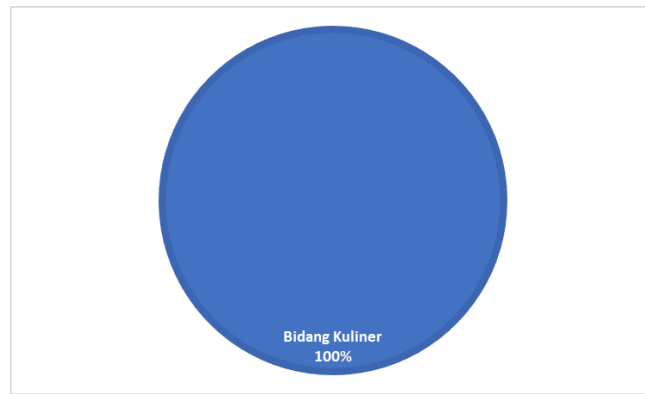
Tabel 4.53 Wirausaha Tematik Kabupaten Pati

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	50%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	< 1 th
Perempuan	25%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	< 1 th
Desa	25%	Kuliner	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Pati. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi dan Perempuan mayoritas dimiliki bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Tematik Desa mayoritas dimiliki bidang Kuliner dengan omzet per tahun dan umur usaha tidak diperoleh data yang lengkap dari responden. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:





Gambar 4.104 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Pati

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Pati berasal dari bidang kuliner, fashion, dan jasa.

4.4.18 Kabupaten Pekalongan

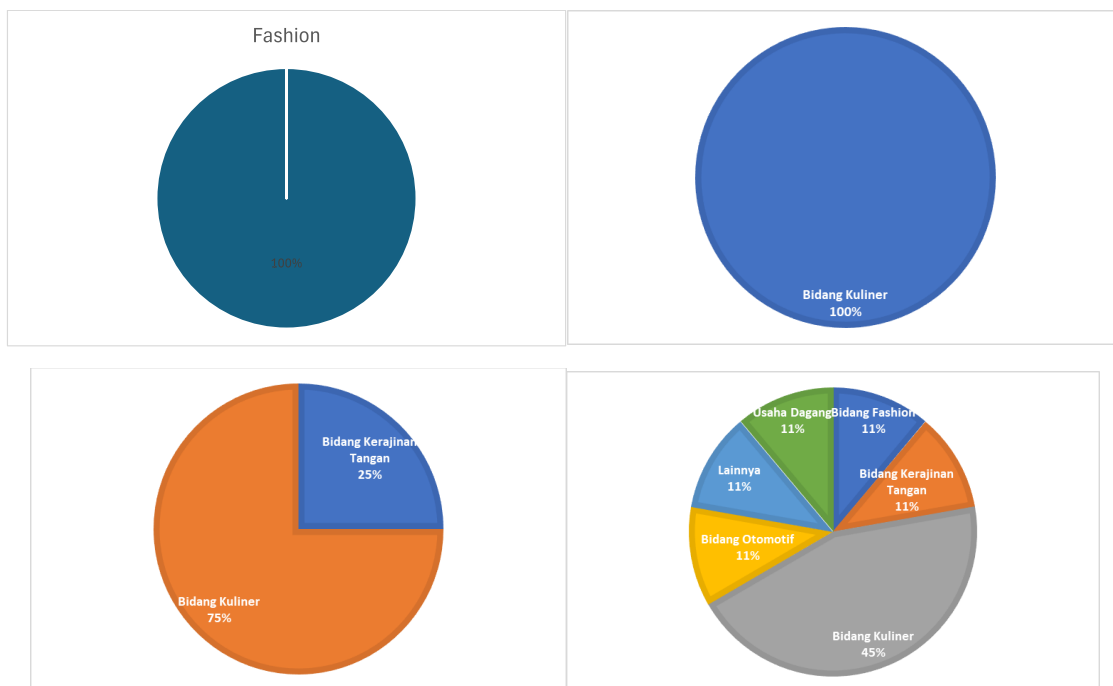
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Pekalongan akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Pekalongan. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.54 Wirausaha Tematik Kabupaten Pekalongan

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	6%	Kuliner	-	-
Teknologi	56%	Kuliner	-	-
Perempuan	31%	Kuliner	-	-
Desa	6%	Fashion	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial, teknologi, dan Perempuan mayoritas dimiliki bidang kuliner. Sedangkan untuk tematik desa mayoritas dimiliki bidang fashion dengan masing-masing omzet per tahun dan umur usaha tidak memperoleh data yang lengkap. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.105 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Pekalongan

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Pekalongan berasal dari bidang kuliner, fashion, otomotif, kerajinan tangan, dagang, dan lainnya.

4.4.19 Kabupaten Pemalang

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Pemalang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Pemalang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

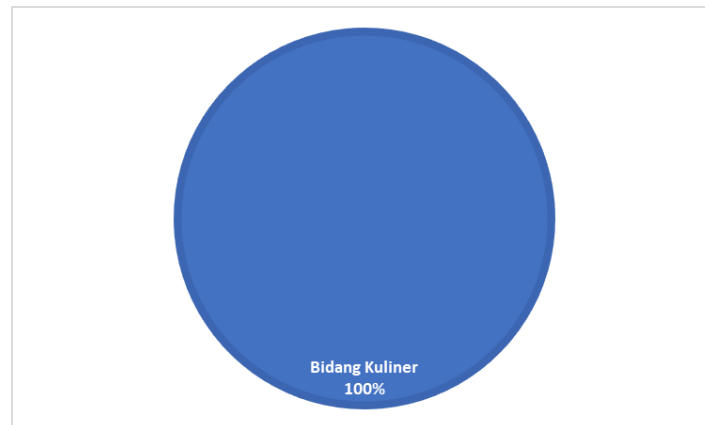
Tabel 4.55 Wirausaha Tematik Kabupaten Pemalang

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	67%	Kuliner	Rp.500jt-Rp.2M	1-2 th
Perempuan	33%	Kuliner	-	< 1 tahun
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial dan desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan

untuk tematik teknologi dan Perempuan mayoritas dimiliki bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.500.000.000 - Rp.2.000.000.000 dan umur usaha antara 1-2 tahun dan kurang dari 1 tahun. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.106 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Pemalang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Pemalang berasal dari bidang kuliner.

4.4.20 Kabupaten Purbalingga

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Purbalingga akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Purbalingga. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

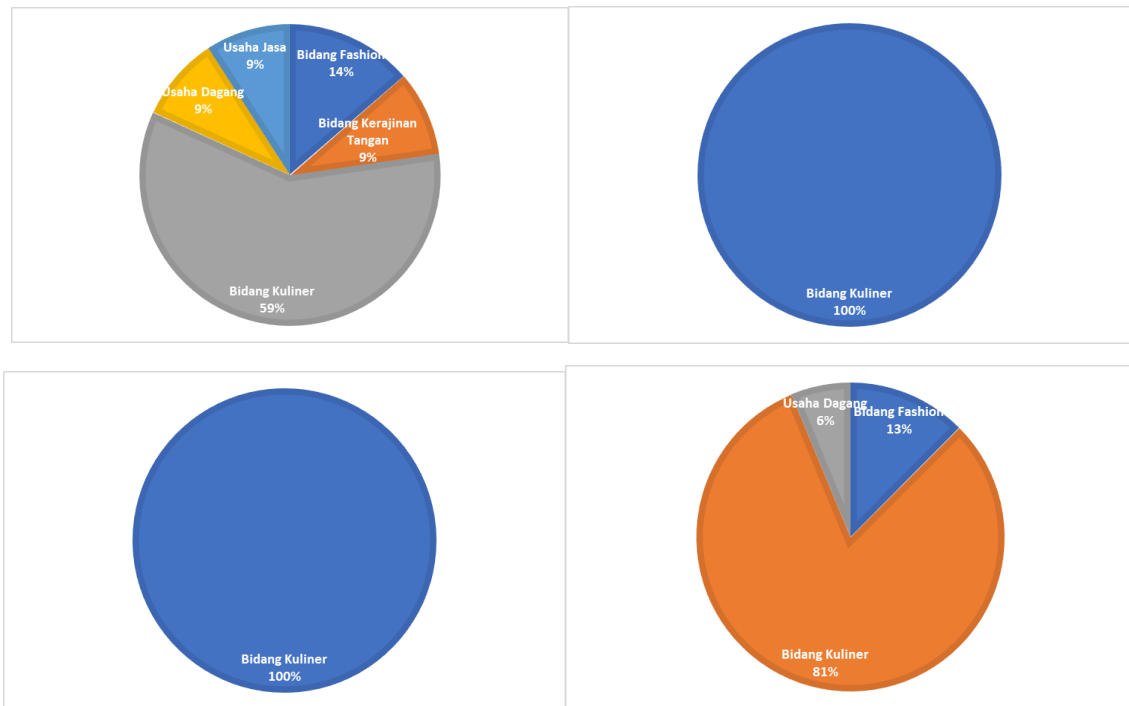
Tabel 4.56 Wirausaha Tematik Kabupaten Purbalingga

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	3%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Teknologi	55%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Perempuan	40%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Desa	3%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	<1 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa

tematik sosial, teknologi, Perempuan, dan desa mayoritas dimiliki bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun, tetapi tematik desa memiliki umur usaha kurang dari 1 tahun. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.107 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Purbalingga

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Purbalingga berasal dari bidang kuliner, fashion, dagang, jasa dan kerajinan tangan.

4.4.21 Kabupaten Purworejo

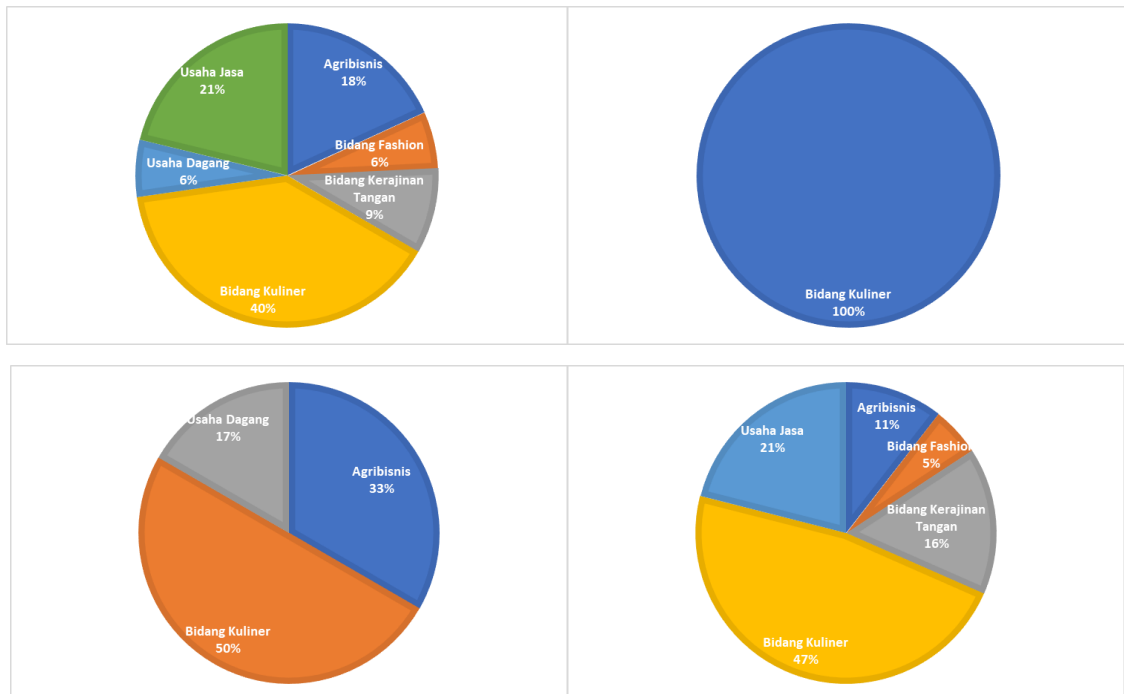
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Purworejo akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Purworejo. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.57 Wirausaha Tematik Kabupaten Purworejo

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	2%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Teknologi	57%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	<1 th
Perempuan	32%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	2-3,5 th
Desa	10%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	<1 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial mayoritas dimiliki bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Sedangkan untuk tematik teknologi dan desa mayoritas dimiliki bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha kurang dari 1 tahun. Tematik perempuan mayoritas dimiliki bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.108 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Purworejo

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Purworejo berasal dari bidang kuliner, agribisnis, dagang, kerajinan tangan, fashion, dan jasa.

4.4.22 Kabupaten Rembang

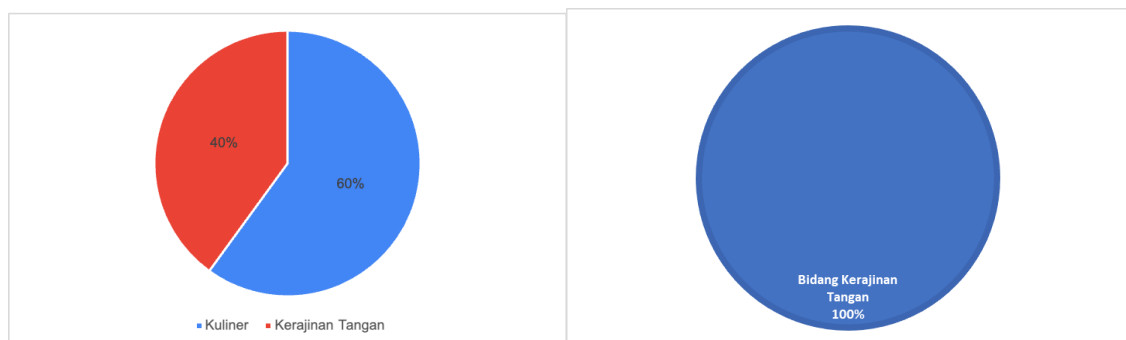
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Rembang akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Rembang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.58 Wirausaha Tematik Kabupaten Rembang

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	50%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	2-3,5 th
Perempuan	50%	Kerajinan Tangan	Rp.0-Rp 100jt	2-3,5 th
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Rembang. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial dan desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi mayoritas dimiliki bidang kuliner dan Perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang kerajinan tangan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.109 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Rembang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Rembang berasal dari bidang kerajinan tangan dan kuliner.

4.4.23 Kabupaten Semarang

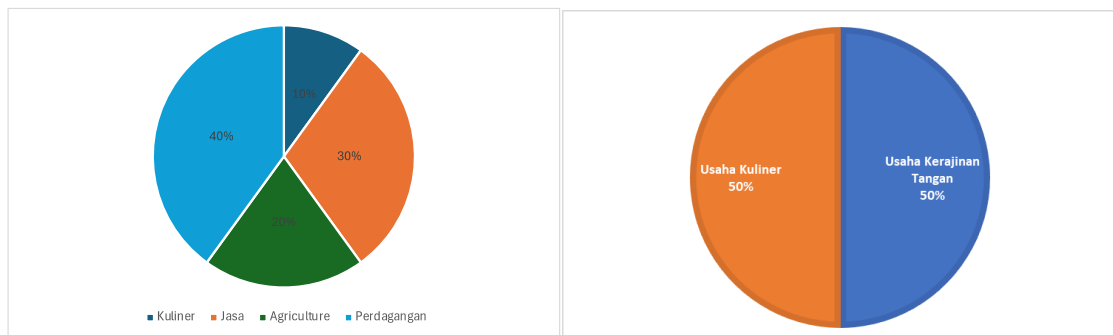
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Semarang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Semarang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

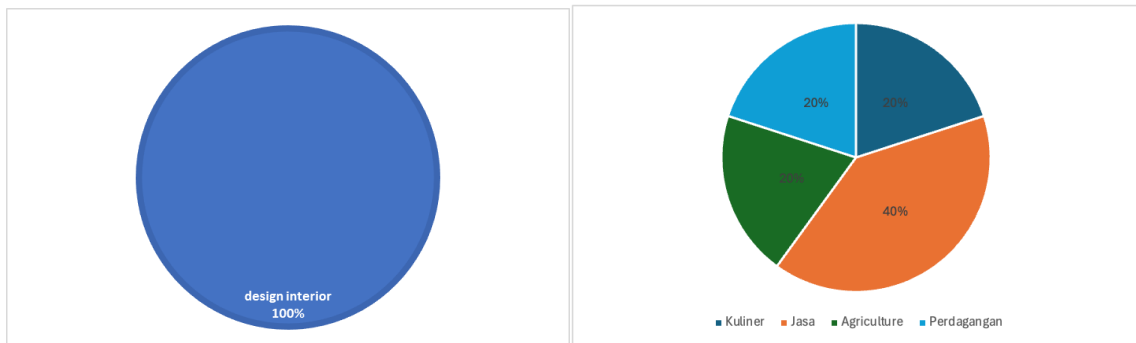
Tabel 4.59 Wirausaha Tematik Kabupaten Semarang

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	9%	Kuliner	-	-
Teknologi	61%	Kuliner	-	-
Perempuan	26%	Jasa	-	-
Desa	4%	Desaign Interior	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Semarang. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial dan teknologi mayoritas dari bidang kuliner. Sedangkan untuk tematik perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang jasa, tematik desa mayoritas dimiliki oleh bidang design interior dengan omzet per tahun dan umur usaha tidak diperoleh data yang relevan. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:





Gambar 4.110 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Semarang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Semarang berasal dari bidang kuliner, kerajinan tangan, jasa, agriculture, perdagangan, dan design interior.

4.4.24 Kabupaten Sragen

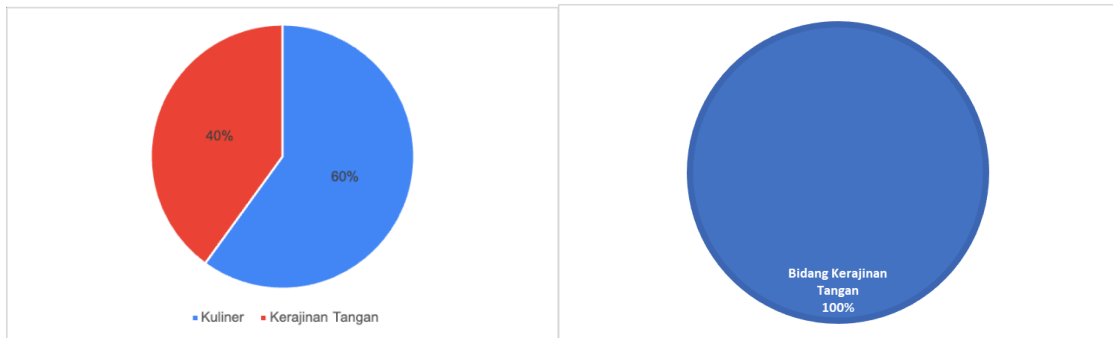
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Sragen akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Sragen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.60 Wirausaha Tematik Kabupaten Sragen

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	71%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	2-3,5 th
Perempuan	29%	Kerajinan Tangan	Rp.0-Rp 100jt	2-3,5 th
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial dan desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi mayoritas dimiliki bidang kuliner dan Perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang kerajinan tangan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.111 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Sragen

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Sragen berasal dari bidang kerajinan tangan dan kuliner.

4.4.25 Kabupaten Sukoharjo

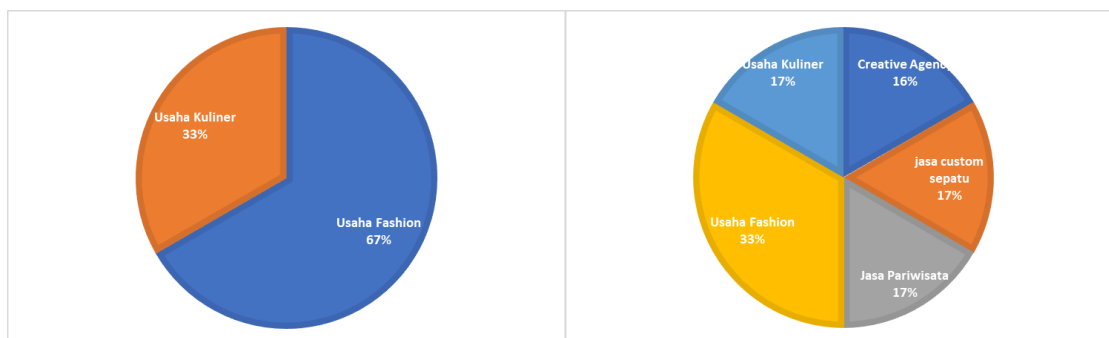
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Sukoharjo akan dilihat berdasarkan faktor-faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.61 Wirausaha Tematik Kabupaten Sukoharjo

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	67%	Fashion	Rp.0-Rp 100jt	1-2 th
Perempuan	33%	Fashion	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial dan desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi dan Perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang fashion dengan tematik teknologi omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha antara 1-2 tahun, sedangkan tematik Perempuan omzet per tahun dan umur usaha tidak dicantumkan oleh responden. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.112 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Sukoharjo berasal dari bidang fashion, kuliner, jasa, dan creative agency.

4.4.26 Kabupaten Tegal

Analisis wirausaha muda di Kabupaten Tegal akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Tegal. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

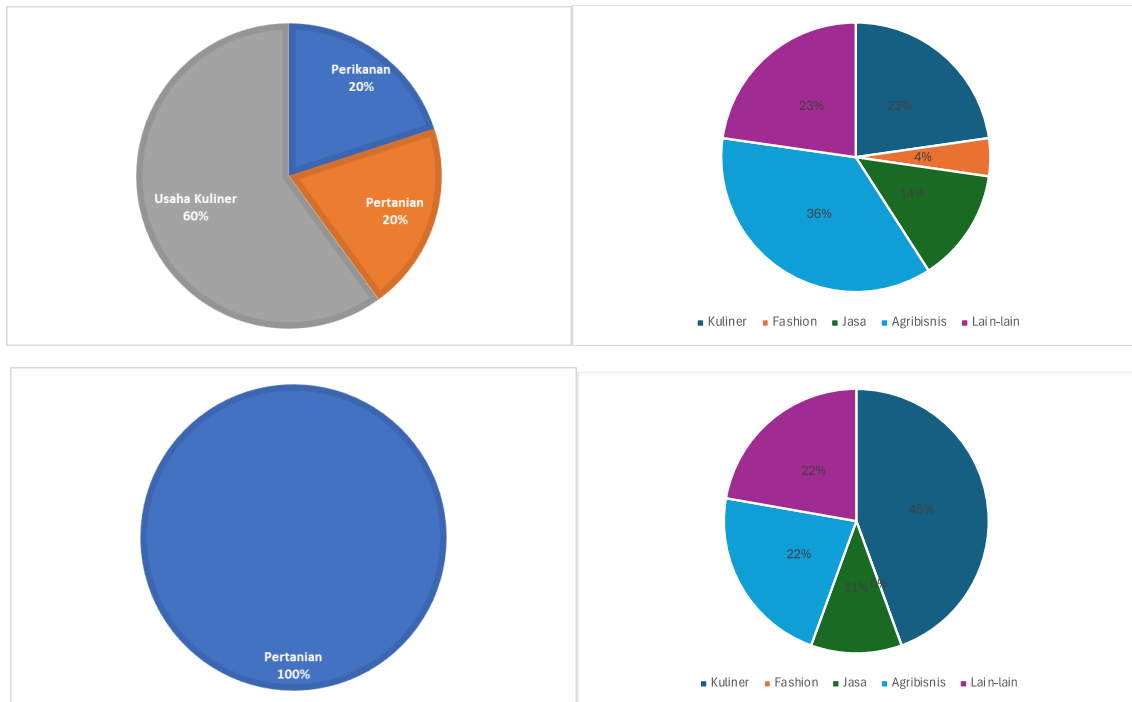
Tabel 4.62 Wirausaha Tematik Kabupaten Tegal

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	2%	Pertanian	-	-
Teknologi	65%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	2-3,5 th
Perempuan	23%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	2-3,5 th
Desa	10%	Kuliner	Rp.100 -Rp.500jt	2-3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Tegal. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial mayoritas dari bidang pertanian dengan omzet per tahun dan umur usaha tidak diperoleh data yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan untuk tematik teknologi dan Perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha 2- 3,5 tahun. Tematik desa mayoritas dimiliki oleh bidang kuliner dengan omzet per tahun Rp.100.000.000-Rp.500.000.000 dan umur usaha 2- 3,5 tahun.

Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.113 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Tegal

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Tegal berasal dari bidang kuliner, pertanian, fashion, jasa, agribisnis, perikanan, dan lain-lain.

4.4.27 Kabupaten Temanggung

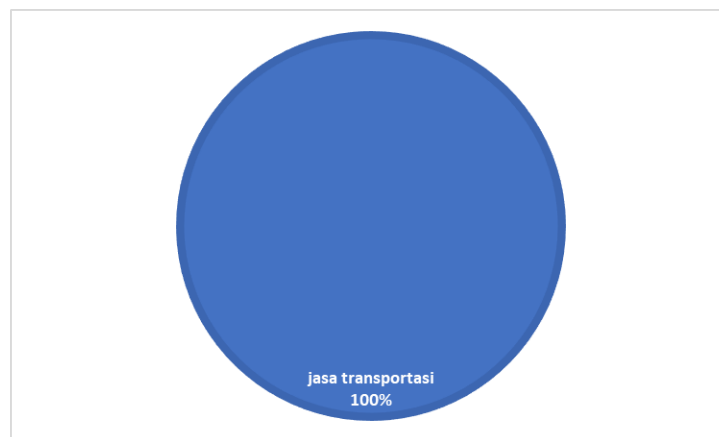
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Temanggung akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Temanggung. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.63 Wirausaha Tematik Kabupaten Temanggung

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	100%	Transportasi	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Perempuan	0%	-	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial, Perempuan, dan desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi mayoritas dimiliki oleh bidang transportasi dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.114 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Temanggung

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Temanggung berasal dari bidang transportasi.

4.4.28 Kabupaten Wonogiri

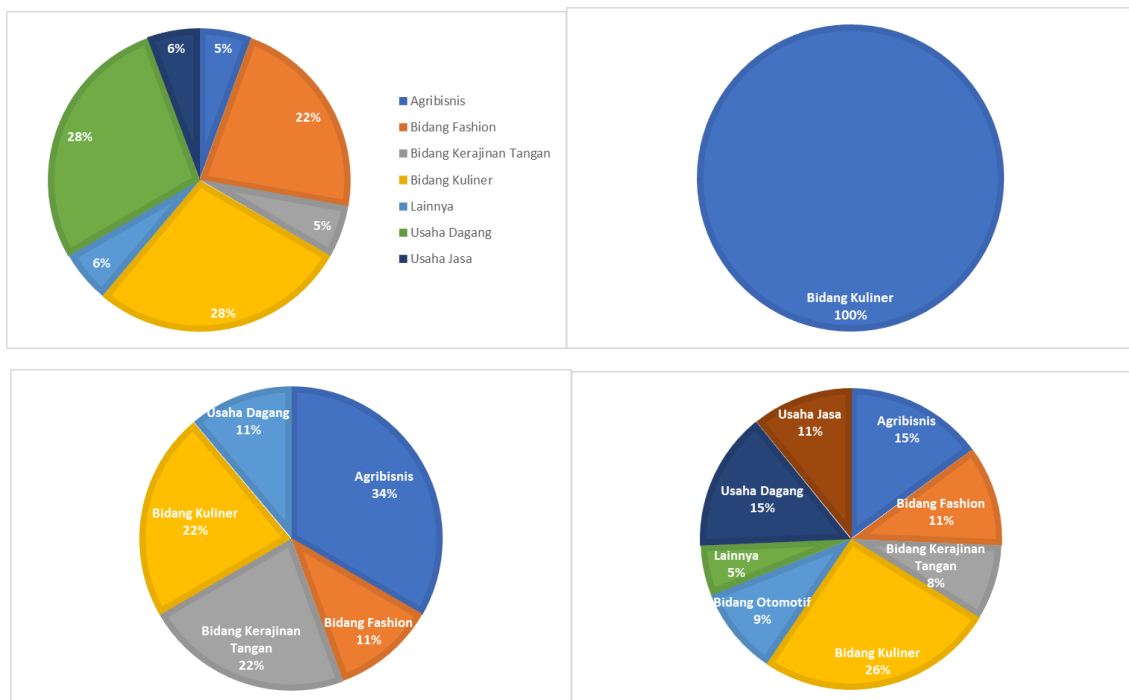
Analisis wirausaha muda di Kabupaten Wonogiri akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kabupaten Wonogiri. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.64 Wirausaha Tematik Kabupaten Wonogiri

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	1%	Kuliner	-	-
Teknologi	73%	Kuliner	-	-
Perempuan	18%	Kuliner	-	-
Desa	9%	Agribisnis	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial, teknologi, dan perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang kuliner, dan tematik desa mayoritas dimiliki oleh bidang agribisnis, tetapi omzet per tahun dan umur usaha tidak diperoleh data dari responden. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.115 Jenis Usaha Tematik Kabupaten Wonogiri

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kabupaten Wonogiri berasal dari bidang kuliner, fashion, agribisnis, dagang, jasa, otomotif, dan lainnya.

4.4.29 Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori Calon Wirausaha, sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut dalam wirausaha tematik.

4.4.30 Kota Magelang

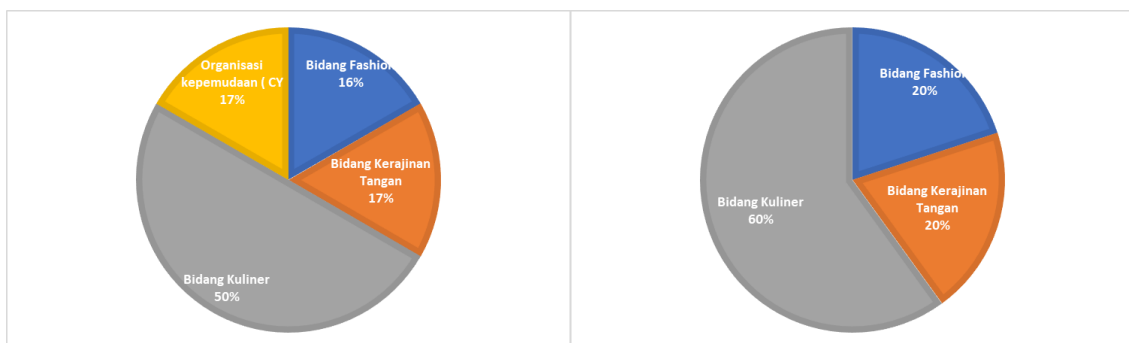
Analisis wirausaha muda di Kota Magelang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kota Magelang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.65 Wirausaha Tematik Kota Magelang

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	55%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Perempuan	45%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kota Magelang. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial dan desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi dan perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.116 Jenis Usaha Tematik Kota Magelang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kota Magelang berasal dari bidang kuliner, kerajinan tangan, fashion dan organisasi kepemudaan.

4.4.31 Kota Pekalongan

Analisis wirausaha muda di Kota Pekalongan akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kota Pekalongan. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

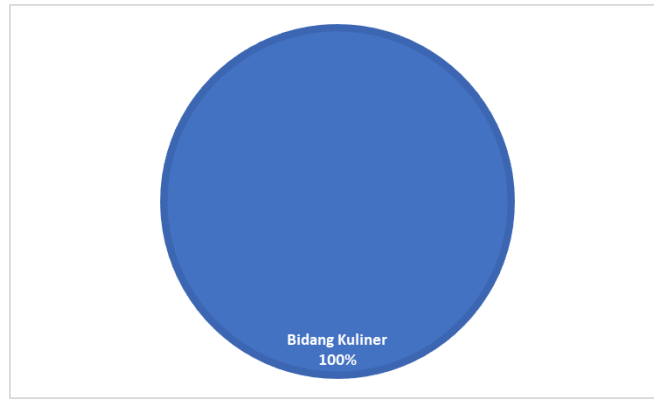
Tabel 4.66 Wirausaha Tematik Kota Pekalongan

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	54%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Perempuan	39%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th
Desa	7%	Kuliner	Rp.0-Rp 100jt	>3,5 th

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kota Pekalongan. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi, perempuan, dan desa mayoritas dimiliki oleh bidang kuliner dengan omzet per tahun s/d Rp.100.000.000 dan umur usaha lebih dari 3,5 tahun. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:





Gambar 4.117 Jenis Usaha Tematik Kota Pekalongan

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kota Pekalongan berasal dari bidang kuliner, kerajinan tangan, penginapan dan kontrakan, dan investasi dan jual beli.

4.4.32 Kota Salatiga

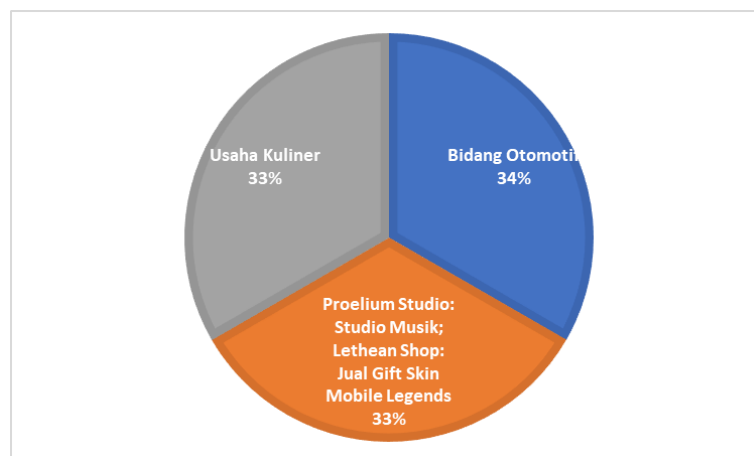
Analisis wirausaha muda di Kota Salatiga akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kota Salatiga. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.67 Wirausaha Tematik Kota Salatiga

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	100%	Otomotif	Rp. 500jt-Rp.2M	2-3,5 th
Perempuan	0%	-	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kota Salatiga. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial, Perempuan, dan desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi mayoritas dimiliki oleh bidang otomotif dengan omzet per tahun Rp. 500.000.000 - Rp.2.000.000.000 dan umur usaha antara 2-3,5 tahun. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.118 Jenis Usaha Tematik Kota Salatiga

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kota Semarang berasal dari bidang kuliner, otomotif, dan proelium studio.

4.4.33 Kota Semarang

Analisis wirausaha muda di Kota Semarang akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kota Semarang. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

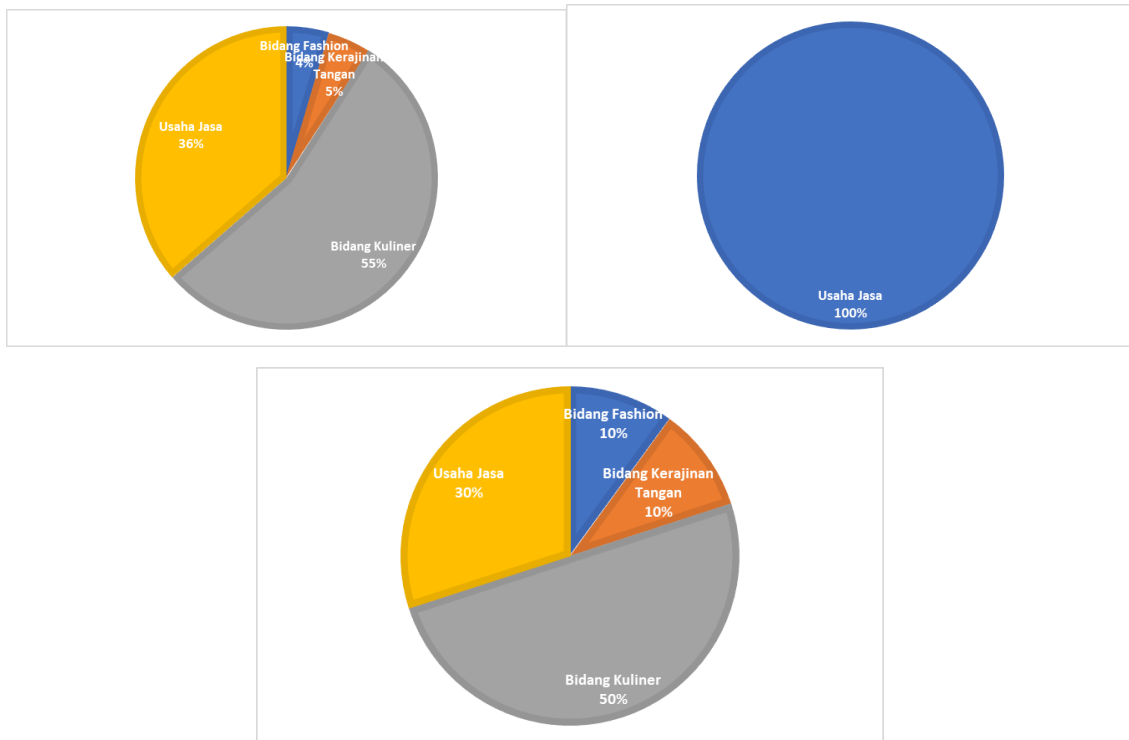
Tabel 4.68 Wirausaha Tematik Kota Semarang

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	3%	Jasa	-	-
Teknologi	67%	Kuliner	-	-
Perempuan	30%	Kuliner	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik sosial mayoritas bidang jasa dan tematik teknologi dan Perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang kuliner dengan omzet per tahun dan umur usaha tidak memperoleh data yang lengkap dari responden. Namun untuk

menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.119 Jenis Usaha Tematik Kota Semarang

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kota Semarang berasal dari bidang jasa, kuliner, fashion, dan kerajinan tangan.

4.4.34 Kota Surakarta

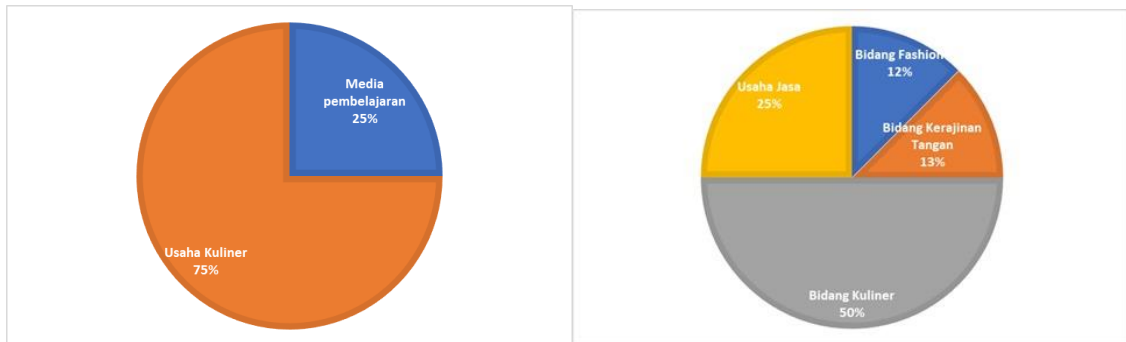
Analisis wirausaha muda di Kota Surakarta akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kota Surakarta. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.69 Wirausaha Tematik Kota Surakarta

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	67%	Kuliner	Rp.0-Rp.100 jt	1-2 th
Perempuan	33%	Kuliner	-	-
Desa	0%	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kota Surakarta. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial dan desa tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi dan Perempuan mayoritas dimiliki oleh bidang teknologi dengan omzet per tahun s/d Rp. 100.000.000 dan umur usaha antara 1-2 tahun, tetapi untuk tematik Perempuan omzet per tahun dan umur usaha tidak ada informasi yang diberikan dari responden. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.120 Jenis Usaha Tematik Kota Surakarta

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kota Surakarta berasal dari bidang kuliner, fashion, media pembelajaran, EO, dan Kerajinan tangan.

4.4.35 Kota Tegal

Analisis wirausaha muda di Kota Tegal akan dilihat berdasarkan faktor- faktor yang penting terkait dengan kondisi wirausaha muda per tematik yang ada di Kota Tegal. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

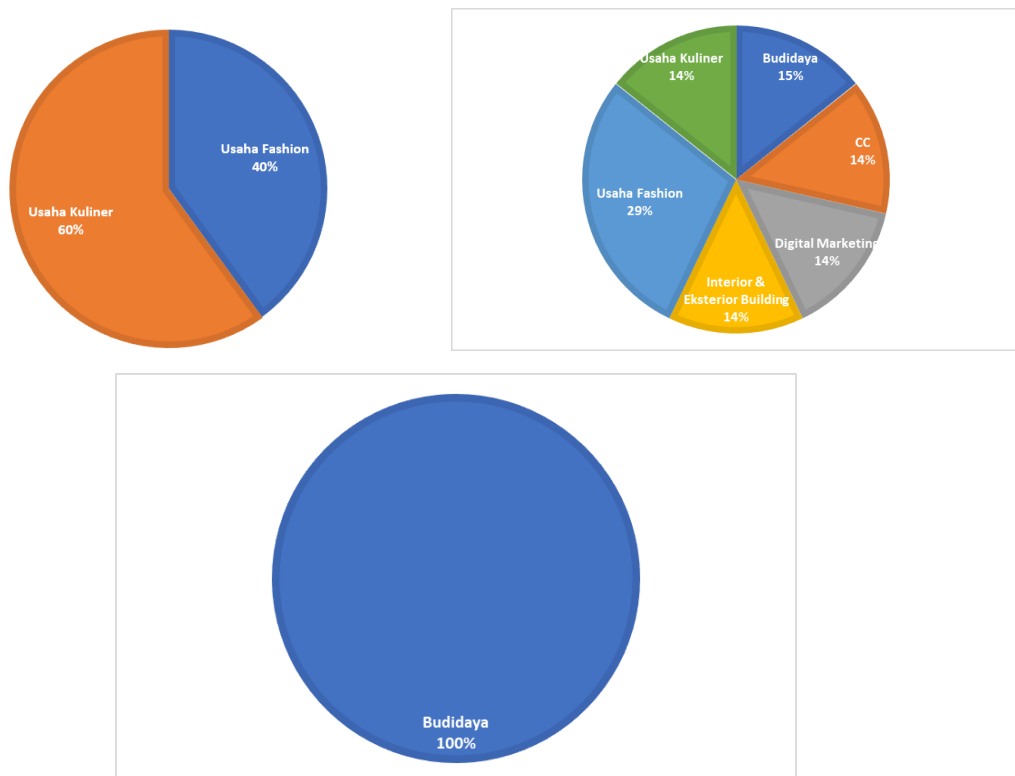
Tabel 4.70 Wirausaha Tematik Kota Tegal

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Sosial	0%	-	-	-
Teknologi	54%	Fashion	-	-
Perempuan	39%	Kuliner	-	-

Tematik	% Jumlah	Jenis Usaha	Omzet	Umur Usaha
Desa	7%	Budidaya	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menyajikan data tertinggi dari wirausaha tematik yang ada di Kota Tegal. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tematik sosial tidak ada yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk tematik teknologi mayoritas dimiliki oleh bidang otomotif, tematik Perempuan mayoritas bidang kuliner, dan tematik desa mayoritas bidang budidaya tetapi dengan omzet per tahun dan umur usaha yang tidak bisa dianalisis karena tidak ada data yang diperoleh. Namun untuk menjelaskan lebih detail tentang jenis usaha yang ada disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.121 Jenis Usaha Tematik Kota Tegal

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa wirausaha di Kota Semarang berasal dari bidang kuliner, fashion, digital marketing, interior, dan budidaya.

4.5 STRATEGI PENGEMBANGAN WIRUSAHA MUDA PROVINSI JAWA TENGAH

Penyusunan analisis strategi pengembangan wirausaha muda didasarkan pada hasil rekomendasi kajian sebelumnya, yaitu mengenai inventarisasi wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Analisis strategi pengembangan wirausaha muda Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada permasalahan utama yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan juga per masing- masing Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan dan strategi juga akan mengacu kepada regulasi yang terkait, yaitu Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah terutama pada pasal 4 yang secara detail pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah dilaksanakan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan bantuan akses permodalan. Berikutnya regulasi kedua, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.71 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan akses permodalan, 2. kemitraan 3. pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dana 2. Penyediaan infrastruktur atau fasilitator tenaga pendamping 3. Kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang kompeten 4. Kemitraan dengan perbankan dan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan program kerja sama dengan BUMD, BUMN, dan Pelaku usaha swasta agar bisa membantu pendanaan bagi para wirausaha muda melalui berbagai macam program, salah satunya adalah CSR 2. Pengadaan pelatihan kepada para wirausaha muda dengan tema <i>"Financial Planner"</i> 3. Pengadaan program fasilitasi kemitraan terutama dengan perbankan Bank Daerah atau Bank BUMN untuk mengadakan program khusus terkait kredit permodalan bagi para wirausaha muda dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda. 	Jangka Pendek
2	Proses pendampingan pengembangan, dan pemasaran produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan 2. Pemagangan 3. Pembimbingan 4. Pendampingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur atau fasilitator tenaga pendamping 2. Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten 3. Pengadaan tenaga yang kompeten 4. Pelatihan dan pengembangan keterampilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk mengadakan program pendampingan aktivitas wirausaha secara berjenjang dan berkelanjutan di setiap wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Materi yang disajikan disesuaikan dengan kondisi fase wirausaha dan dengan tematik wirausaha muda serta permasalahan yang terjadi. 2. Pengadaan kerja sama dengan pihak pemilik platform e-commerce terkait pelatihan mengenai segala teknis terkait aktivitas wirausaha yang awalnya dilakukan secara tradisional menjadi digital 3. Pembuatan program "Percontohan Wirausaha" sebagai pendamping. Setiap wilayah Kab/Kota menunjuk satu wirausaha muda yang sudah memasuki fase wirausaha mapan untuk menjadi 	Jangka Menengah

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
				<p>pendamping atau mentor bagi wirausaha muda yang lainnya.</p> <p>4. Pengadaan seminar yang melibatkan wirausaha muda dengan materi pemasaran produk dengan "orientasi ekspor" bagi wirausaha muda dengan kategori pemula dan mapan.</p>	
3	Perizinan dan pendataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbingan 2. Pendampingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan konsultasi 2. Pelatihan dan pengembangan keterampilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengandaan pendampingan mengenai teknis pendaftaran izin usaha secara serentak per Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2. Pengadaan seminar dengan kerja sama dengan dinas terkait mengenai pentingnya memiliki sertifikat TKDN bagi para wirausaha muda agar dapat melakukan transaksi kepada setiap pihak termasuk Pemerintah Daerah. 	Jangka Panjang
4	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan 2. Pendampingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sumber daya manusia; 2. Pemberian bantuan manajemen; 3. Pengalihan teknologi dan dukungan teknis; 4. Perluasan akses pasar; 5. Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; 6. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan forum bersama antar BUMN, BUMD, pihak swasta, dengan wirausaha muda di setiap kab/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dikemas dalam bentuk seminar dan pameran produk agar membuka link untuk dapat membuka komunikasi dan diskusi antara wirausaha muda dengan para pelaku bisnis yang lain (BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta). 2. Mendorong setiap BUMN dan BUMD untuk membuat program penghargaan bagi wirausaha muda yang menggunakan indikator kreatifitas dan inovasi dalam penciptaan produk unggulan. 	Jangka Panjang
5	Penciptaan konten produk yang akan dijual di platform e-commerce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan 2. Pemagangan 3. Pembimbingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dasar; 2. Pelatihan penguatan usaha 3. Pelatihan pengembangan usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pelatihan dasar pembuatan konten produk untuk dipasarkan pada platform e-commerce. 2. Pengadaan pelatihan dengan melibatkan wirausaha muda dengan tema Pelatihan dan Seminar "Digital Marketing" 	Jangka Pendek

Penyusunan berbagai macam program yang ditunjukkan pada pengembangan wirausaha muda disusun berdasarkan analisis permasalahan utama yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan berhubungan dengan anggaran daerah yang terbatas, maka perlu ditentukan prioritas untuk melaksanakan berbagai macam program pengembangan wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah. Program yang dilaksanakan memang seharusnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, agar tidak terlalu membebani daerah. Hal tersebut juga seharusnya dilakukan oleh Dinas yang mengurus pemuda Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu penyusunan program pengembangan wirausaha muda pada level Kabupaten/Kota juga akan dianalisis berdasarkan permasalahan utama di wilayah masing- masing. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.72 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuatkan khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Banjarnegara, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Ketidakmampuan dan Ketidapkahaman Fitur Platfrom E-Commerce	Pelatihan	Pelatihan dasar dan penguatan usaha	Pengadaan program kerja sama dengan platform e-commerce yang berada di wilayah Kabupaten atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan pelatihan khusus mengenai teknis pengoperasian e-commerce	Jangka Pendek

Tabel 4.73 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Banyumas, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat "forum bersama" yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.74 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Batang

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Batang, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Ketidakmampuan dan Ketidakhahaman Fitur Platform E-Commerce	Pelatihan	Pelatihan dasar dan penguatan usaha	Pengadaan program kerja sama dengan platform e-commerce yang berada di wilayah Kabupaten atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan pelatihan khusus mengenai teknis pengoperasian e-commerce	Jangka Pendek

Tabel 4.75 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Blora

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek
2	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat " forum bersama " yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.76 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Boyolali

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Boyolali, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal,	Pengadaan program kerja sama dengan membuat " forum bersama " yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
			nasional, regional, maupun internasional	sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	

Tabel 4.77 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Brebes

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Brebes, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Penciptaan konten produk yang akan dijual di platform e-commerce	Pelatihan, Pemagangan, dan Pembimbingan	Pelatihan dasar; Pelatihan penguatan usaha; Pelatihan pengembangan usaha	Pengadaan pelatihan dasar pembuatan konten produk untuk dipasarkan pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing"	Jangka Pendek

Tabel 4.78 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Cilacap

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Cilacap, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat "forum bersama" yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.79 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Demak

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Demak, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Ketidakmampuan dan Ketidapkahaman Fitur Platfrom E-Commerce	Pelatihan	Pelatihan dasar dan penguatan usaha	Pengadaan program kerja sama dengan platform e-commerce yang berada di wilayah Kabupaten atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan pelatihan khusus mengenai teknis pengoperasian e-commerce	Jangka Pendek

Tabel 4.80 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Grobogan

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan,	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab.	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
		dan Pendampingan	pelatihan yang berkompeten	Grobogan, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	
3	Kurangnya Minat Pengguna Platform E-Commerce	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Pelatihan dasar dan penguatan usaha	Pengadaan pelatihan dasar mengenai teknis pengoperasional'an (teknis berjualan) pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing" yang akan membuka pengetahuan mengenai pentingnya "berjualan secara online"	Jangka Pendek

Tabel 4.81 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Jepara

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Jepara, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Ketidakmampuan dan Ketidakhahaman Fitur Platfrom E-Commerce	Pelatihan	Pelatihan dasar dan penguatan usaha	Pengadaan program kerja sama dengan platform e-commerce yang berada di wilayah Kabupaten atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan pelatihan khusus mengenai teknis pengoperasioan e-commerce	Jangka Pendek

Tabel 4.82 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Karanganyar

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Karanganyar, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
2	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
3	Permasalahan pada Proses Produksi dan Packaging Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Pelatihan penguatan usaha dan Pelatihan pengembangan usaha	Pengadaan program pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan penunjukkan mentor di setiap jenis usaha. Mentor bisa berasal dari wirausaha mapan atau yang berpengalaman dari daerah asal masing- masing wirausaha.	Jangka Pendek

Tabel 4.83 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Kebumen

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Penciptaan konten produk yang akan dijual di platform e-commerce	Pelatihan, Pemagangan, dan Pembimbingan	Pelatihan dasar; Pelatihan penguatan usaha; Pelatihan pengembangan usaha	Pengadaan pelatihan dasar pembuatan konten produk untuk dipasarkan pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing"	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat " forum bersama " yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.84 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Kendal

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Kendal, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat " forum bersama " yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.85 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Klaten, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
2	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
3	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek

Tabel 4.86 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Kudus

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Klaten, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Hardware yang tidak mendukung	Kemitraan dan Bantuan Akses Permodalan	pengadaan; penyewaan; pinjam pakai; dan/atau bantuan.	Pengadaan program kerja sama KSO (Kerja Sama Operasional) dengan pelaku usaha lain, BUMN, BUMD, atau wirausaha muda lainnya dan/atau bila dimungkinkan pengadaan program bantuan peralatan yang mendukung aktivitas usaha	Jangka Pendek

Tabel 4.87 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Magelang

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat "forum bersama" yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek
3	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Magelang, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek

Tabel 4.88 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Pati

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Pati, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Kurangnya Minat Pengguna Platform E-Commerce	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Pelatihan dasar dan penguatan usaha	Pengadaan pelatihan dasar mengenai teknis pengoperasional'an (teknis berjualan) pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing" yang akan membuka pengetahuan mengenai pentingnya "berjualan secara online"	Jangka Pendek

Tabel 4.89 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Pekalongan

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Pekalongan, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek

Tabel 4.90 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Pemalang

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Pemalang, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
2	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat "forum bersama" yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek
3	Penciptaan konten produk yang akan dijual di platform e-commerce	Pelatihan, Pemagangan, dan Pembimbingan	Pelatihan dasar; Pelatihan penguatan usaha; Pelatihan pengembangan usaha	Pengadaan pelatihan dasar pembuatan konten produk untuk dipasarkan pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing"	Jangka Pendek

Tabel 4.91 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Purworejo

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Purworejo, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Penciptaan konten produk yang akan dijual di platform e-commerce	Pelatihan, Pemagangan, dan Pembimbingan	Pelatihan dasar; Pelatihan penguatan usaha;	Pengadaan pelatihan dasar pembuatan konten produk untuk dipasarkan pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing"	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
			Pelatihan pengembangan usaha		

Tabel 4.92 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Rembang

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Rembang, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
2	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek
3	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek

Tabel 4.93 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Purbalingga

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Purbalingga, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
3	Penciptaan konten produk yang akan dijual di platform e-commerce	Pelatihan, Pemagangan, dan Pembimbingan	Pelatihan dasar; Pelatihan penguatan usaha; Pelatihan pengembangan usaha	Pengadaan pelatihan dasar pembuatan konten produk untuk dipasarkan pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing"	Jangka Pendek

Tabel 4.94 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Semarang

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Semarang, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek

Tabel 4.95 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Sragen

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
				produk unggulan Kab. Sragen, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	
3	Permasalahan pada Proses Produksi dan Packaging Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Pelatihan penguatan usaha dan Pelatihan pengembangan usaha	Pengadaan program pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan penunjukkan mentor di setiap jenis usaha. Mentor bisa berasal dari wirausaha mapan atau yang berpengalaman dari daerah asal masing- masing wirausaha.	Jangka Pendek

Tabel 4.96 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Sukoharjo

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Sukoharjo, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
2	Penciptaan konten produk yang akan dijual di platform e-commerce	Pelatihan, Pemagangan, dan Pembimbingan	Pelatihan dasar; Pelatihan penguatan usaha; Pelatihan pengembangan usaha	Pengadaan pelatihan dasar pembuatan konten produk untuk dipasarkan pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing"	Jangka Pendek
3	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek

Tabel 4.97 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Tegal

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Tegal, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat " forum bersama " yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.98 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek
2	Hardware yang tidak mendukung	Kemitraan dan Bantuan Akses Permodalan	pengadaan; penyewaan; pinjam pakai; dan / atau bantuan.	Pengadaan program kerja sama KSO (Kerja Sama Operasional) dengan pelaku usaha lain, BUMN, BUMD, atau wirausaha muda lainnya dan/atau bila dimungkinkan pengadaan program bantuan peralatan yang mendukung aktivitas usaha	Jangka Pendek

Tabel 4.99 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Wonogiri

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
			lembaga pelatihan yang berkompeten	Kab. Wonogiri, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	
3	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek

Tabel 4.100 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kab. Wonosobo

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kab. Wonosobo, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek

Tabel 4.101 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Magelang

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kota. Magelang, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat “forum bersama” yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.102 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Pekalongan

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kota. Pekalongan, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat “forum bersama” yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.103 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Salatiga

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kota. Salatiga, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Perizinan dan pendataan	Pembimbingan dan Pendampingan	Bimbingan dan konsultasi	Pengadaan pendampingan wirausaha muda terkait dengan pendaftaran izin usaha seperti NIB, pembentukan legalitas usaha (misal CV), berikutnya pengadaan seminar mengenai sertifikat "TKDN", agar wirausaha muda dapat lebih luas untuk pemasarannya.	Jangka Pendek

Tabel 4.104 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Semarang

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kota. Semarang, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
2	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat " forum bersama " yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.105 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kota. Surakarta, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Swasta	Kemitraan	Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional	Pengadaan program kerja sama dengan membuat " forum bersama " yang mempertemukan antara wirausaha muda dengan pihak pelaku usaha atau BUMD setempat. Hal tersebut akan membuka komunikasi awal antara wirausaha muda dan para pelaku usaha atau BUMD. Kerja sama dapat berupa penyediaan kebutuhan operasional adm kantor dari BUMD hingga penyediaan bahan baku dan lain sebagainya.	Jangka Pendek

Tabel 4.106 Analisis Strategi Wirausaha Muda Provinsi Jawa Tengah Kota. Tegal

No	Permasalahan	Kebijakan	Strategi	Program	Timeline
1	Akses permodalan	Bantuan akses permodalan,	Penyediaan dana	Pengadaan program kerja sama dengan perbankan (Bank Daerah atau BUMN) untuk membuat khusus kredit modal dengan skema bagi hasil atau skema yang tidak memberatkan bagi wirausaha muda.	Jangka Pendek
2	Proses Pendampingan, Pengembangan, dan Pemasaran Produk	Pelatihan, Pembimbingan, dan Pendampingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten	Pengadaan program kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi setempat untuk membantu wirausaha muda dalam pendampingan termasuk penciptaan produk yang lebih inovatif dan berasal dari produk unggulan Kota. Tegal, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan konsep digitalisasi.	Jangka Pendek
3	Penciptaan konten produk yang akan dijual di platform e-commerce	Pelatihan, Pemagangan, dan Pembimbingan	Pelatihan dasar; Pelatihan penguatan usaha; Pelatihan pengembangan usaha	Pengadaan pelatihan dasar pembuatan konten produk untuk dipasarkan pada platform <i>e-commerce</i> , pelatihan tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan lain seperti Seminar "Digital Marketing"	Jangka Pendek

Pada tabel di atas dapat diketahui berbagai macam kebijakan, strategi, hingga program untuk pengembangan wirausaha muda Provinsi Jawa Tengah serta pada Kabupaten/ kota nya. Kebijakan yang digunakan pada tabel di atas juga menggunakan dasar regulasi yaitu Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda Di Daerah terutama pada pasal 4 yang secara detail pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah dilaksanakan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan bantuan akses permodalan. Berikutnya untuk strategi menggunakan regulasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Berikutnya program yang disusun di atas didasarkan pada permasalahan yang dialami oleh wirausaha muda yang ada didalam wilayah tersebut. Program di atas juga disusun agar implementatif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga program yang disusun seharusnya tepat sasaran dengan “impact” yang tepat yaitu wirausaha muda.

BAB - 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah ditulis pada bab sebelumnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil dari kajian ini. Beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regulasi mengenai pengembangan wirausaha muda Provinsi Jawa Tengah, maka secara detail kebijakan pengembangan wirausaha muda dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda Di Daerah terutama pada pasal 4 dan secara teknis dapat dilihat pada regulasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
2. Hasil analisis berdasarkan kondisi wirausaha muda di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah bahwa beberapa permasalahan utama yang dialami oleh wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah hampir mirip antara satu Kabupaten/Kota dengan wilayah yang lain. Maka, penyusunan program untuk pengembangan wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan secara terpusat dan terpadu, serta dilakukan terbagi berdasarkan fase wirausaha dan/atau tematik wirausaha muda Provinsi Jawa Tengah.

3. Hasil analisis berdasarkan fase wirausaha muda, yaitu calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap Kabupaten/ Kota belum memiliki sebaran yang merata, memiliki permasalahan yang berbeda, dengan kondisi dan tantangan yang berbeda termasuk jenis usaha, kepemilikan usaha, lokasi tempat usaha, dan berapa lama usaha tersebut berdiri berdasarkan fase wirausaha di setiap Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Hasil analisis berdasarkan tematik wirausaha muda, yaitu wirausaha muda sosial, teknologi, perempuan, dan desa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap Kabupaten/ Kota masih di dominasi oleh wirausaha muda teknologi yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Berikutnya secara tematik wirausaha sosial memiliki angka yang paling kecil di setiap Kabupaten/Kota. Hal tersebut menandakan bahwa secara operasional para wirausaha muda masih cenderung untuk fokus pada diri sendiri (usaha sendiri) dengan belum memikirkan kondisi sosial yang ada di wilayahnya.
5. Penyusunan strategi program yang akan dilakukan untuk pengembangan wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan program yang implementatif dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

5.2 REKOMENDASI

Bab rekomendasi berisi sebuah masukan yang implementatif untuk dilakukan oleh pihak terkait terutama pihak- pihak yang terkait dengan proses pengembangan wirausaha muda di Provinsi Jawa Tengah. Rekomendasi juga didasarkan pada bab analisis pembahasan dan kesimpulan yang sudah disusun sebelumnya. Secara detail rekomendasi pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan strategi program pengembangan wirausaha muda yang dapat dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah secara terpusat dan berjenjang berdasarkan fase wirausaha dan tematik wirausaha muda yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pelaksanaan strategi program wirausaha muda yang dapat dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata pada tingkat Kabupaten/ Kota berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi pada wilayah masing-masing dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
3. Pelaksanaan inventarisasi data wirausaha muda berdasarkan fase dan tematik secara berkelanjutan untuk melihat perkembangan kondisi wirausaha muda Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. T., & von Korfflesch, H. F. O. (2021). Entrepreneurship education in Indonesian higher education: mapping literature from the Country's perspective. *Entrepreneurship Education*, 4(3), 291–333. <https://doi.org/10.1007/s41959-021-00053-9>
- Bank Jateng. (2024). Kembangkan Kapasitas Wirausaha Pemula, DPPKUM dan HIPMI Kota Magelang Gandeng Bank Jateng Melalui Program Kemitraan. *Bankjateng.Co.Id*. <https://bankjateng.co.id/kembangkan-kapasitas-wirausaha-pemula-dppkum-dan-hipmi-kota-magelang-gandeng-bank-jateng-melalui-program-kemitraan>
- Basia, L.-. (2016). STRATEGI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN WIRAUSAHAWAN MANDIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA (Studi pada Koperasi Sumekar di Kampung Sanggrahan Pathuk Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 42. <https://doi.org/10.22146/jkn.10226>
- Blorakab. (2021). Pelaku Usaha dan Pemuda Kelurahan Beran Ikuti Pelatihan Digital Marketing. *Blorakab.Go.Id*.
- BPS Jawa Tengah. (2023). *Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- BPS Jawa Tengah. (2024). *Jawa Tengah Dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Jawa

Tengah.

- Cahya, A. D., Maharani, B. D., & Cahyani, P. D. (2020). Strategi Peningkatan Produktivitas Usaha Pemuda Produktif Gunungkidul. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *4*(4), 538–547.
- Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka*.
- Dinas Tenaga Kerja, K. dan U. kecil dan M. (2021). Latih Generasi Muda Melalui Pelatihan Usaha Kreatif. *Dinnakerkopukm.Banyumaskab.Go.Id*.
- Du, K., & O'Connor, A. (2018). Entrepreneurship and advancing national level economic efficiency. *Small Business Economics*, *50*(1), 91–111. <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9904-4>
- Farida, F. A., Hermanto, Y. B., Paulus, A. L., & Leylasari, H. T. (2022). Strategic Entrepreneurship Mindset, Strategic Entrepreneurship Leadership, and Entrepreneurial Value Creation of SMEs in East Java, Indonesia: A Strategic Entrepreneurship Perspective. *Sustainability*, *14*(16), 10321. <https://doi.org/10.3390/su141610321>
- Grigalashvili, V. (2022). E-government and E-governance: Various or Multifarious Concepts. *International Journal of Scientific and Management Research*, *05*(01), 183–196. <https://doi.org/10.37502/IJSMR.2022.5111>
- Gunawan, J., & Fraser, K. (2016). Exploring young and green entrepreneurship in Indonesia: An introduction. *Journal of Asian Business Strategy*, *6*(8), 185–194. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2016.6.9/1006.9.185.194>
- Husna, A. N. (2018). Konseptualisasi Karakter Wirausaha: Studi Literatur. *University Research Colloquium*, 315–324.
- Husna, A. N. (2020). Memetakan kognisi wirausaha : konseptualisasi dan potensi riset di Indonesia. *Universitas Research Colloquium*, *7*, 118–126.
- Idris, A., & Hijrah Hati, R. (2013). Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past. *Journal of Social Entrepreneurship*, *4*(3), 277–301. <https://doi.org/10.1080/19420676.2013.820778>

- Jones, B. J. (2021). What Makes Government Work Great: The Characteristics of Positive Public Service. *Public Personnel Management*, 50(4), 610–628. <https://doi.org/10.1177/0091026020985559>
- Kadarusman, Y. B. (2020). The Impact of Entrepreneurship on Economic Performance in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 66(1), 1. <https://doi.org/10.47291/efi.v66i1.684>
- Kemenpora. (2023). Bangun Semangat Smart Entrepreneur, Kemenpora Gelar Kuliah Kewirausahaan di Universitas Negeri Semarang. *Deputi2.Kemenpora.Go.Id*. <https://deputi2.kemenpora.go.id/detail/100/bangun-semangat-smart-entrepreneur-kemenpora-gelar-kuliah-kewirausahaan-di-universitas-negeri-semarang>
- Kemkominfo. (2022). Kemkominfo Adakan Pelatihan Kewirausahaan Digital Kabupaten Wonosobo #UMKMPulihBersama #WonosoboHebat. *Bpsdm.Kominfo.Go.Id*.
- Lavitskaya, M. I. (2021). Theoretical Legal Approaches to the Definition of the E-Government Concept. *State Power and Local Self-Government*, 4, 17–20. <https://doi.org/10.18572/1813-1247-2021-4-17-20>
- Lediana, E., Perdana, T., Deliana, Y., & Sendjaja, T. P. (2023). Sustainable Entrepreneurial Intention of Youth for Agriculture Start-Up: An Integrated Model. *Sustainability*, 15(3), 2326. <https://doi.org/10.3390/su15032326>
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121102. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102>
- Manullang, E. B., & Simarmata, P. P. (2023). Literature Study Analysis of Indonesian Entrepreneurs' Attitudes in Doing Business. *TRANSFORM: Journal of English Language Teaching and Learning*, 12(1), 40. <https://doi.org/10.24114/tj.v12i1.47259>
- Martínez-Fierro, S., Biedma-Ferrer, J. M., & Ruiz-Navarro, J. (2016).

- Entrepreneurship and strategies for economic development. *Small Business Economics*, 47(4), 835–851. <https://doi.org/10.1007/s11187-016-9738-5>
- Najma, R. N., & Kamaruddin, S. A. (2024). Peran Wirausaha dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 28(4), 19–23.
- Nurmalia, Hartono, D., & Muzayanah, I. F. U. (2020). The Roles of Entrepreneurship on Regional Economic Growth in Indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, 11(1), 28–41. <https://doi.org/10.1007/s13132-018-0557-6>
- Osborne, S. P. (2010). Delivering Public Services: Time for a new theory? *Public Management Review*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/14719030903495232>
- Osborne, S. P. (2020). *Public Service Logic*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003009153>
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *The American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>
- Rahmatiah, R., Wirotto, D. W., & Taan, H. (2017). A Conceptual Framework in the Formation of Young Entrepreneurs in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(2), 102. <https://doi.org/10.22146/jsp.30435>
- Ranjan, A. (2019). The Role of Entrepreneurship in Economic Development. *American Journal of Management Science and Engineering*, 4(6), 87. <https://doi.org/10.11648/j.ajmse.20190406.11>
- Ridha, R. N., Burhanuddin, B., & Wahyu, B. P. (2017). Entrepreneurship intention in agricultural sector of young generation in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 76–89. <https://doi.org/10.1108/APJIE-04-2017-022>
- Semarangkota. (2022). Dispora Kota Semarang Gelar Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Muda. *Semarangkota.Go.Id*.

- Shiyovych, S. (2023). Public services: theoretical and legal aspects. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 1, 431–435. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.01.74>
- Sofiyanto, A. (2017). Disdikpora Gelar Pelatihan Ketrampilan, Murti : Beri Bekal Pemuda Wirausaha Mandiri & Ciptakan Lapangan Kerja. *Isknews.Com*. <https://isknews.com/disdikpora-gelar-pelatihan-ketrampilan-murti-beri-bekal-pemuda-wirausaha-mandiri-ciptakan-lapangan-kerja/>
- Vasiuta, V., Chornovol, N., & Horbunova, M. (2022). The role of entrepreneurship in the development of the national economy. *Galic'kij Ekonomičnij Visnik*, 78–79(5–6), 130–137. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.05_06.130
- Virtanen, P., & Jalonen, H. (2024). Public value creation mechanisms in the context of public service logic: an integrated conceptual framework. *Public Management Review*, 26(8), 2331–2354. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2268111>
- Vrabie, C. (2023). E-Government 3.0: An AI Model to Use for Enhanced Local Democracies. *Sustainability*, 15(12), 9572. <https://doi.org/10.3390/su15129572>
- Wang, T.-M., van Witteloostuijn, A., & Heine, F. (2020). A Moral Theory of Public Service Motivation. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.517763>
- Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal. (2024). Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda. *Wirausahapemuda.Tegalkab.Go.Id*. <https://wirausahapemuda.tegalkab.go.id/post/4>
- Yandip. (2021). Pemkab Tegal Dorong Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. *Jatengprov.Go.Id*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-tegal-dorong-pengembangan-kewirausahaan-pemuda/>
- Yandip. (2023). Tingkatkan Kesejahteraan Daerah, Pelajar Didorong Jadi Wirausaha Muda. *Jatengprov.Go.Id*.

- Yildiz, M. (2007). E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward. *Government Information Quarterly*, 24(3), 646–665. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.01.002>
- Yulianto, D. (2020). Peran Pendidikan dalam Pembentukan Jiwa Wirausaha. *Pos Kota*, 1.